PEMERINTAH KOTA MALANG
https://malangkota.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MALANG TAHUN 2013 -2018

TAHUN 2017

SALINAN
NOMOR 8/2017

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 8 A

   Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua penyebutan SKPD harus dibaca dan dimaknai sebagai perangkat daerah.

2. Ketentuan Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan dan Bab IX tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 451 – 8/ 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum
Pembina
NIP 19650302 199003 1 019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **Hal**

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya I-10

1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD I-19

1.5 Maksud dan Tujuan I-21

1.5.1. Maksud I-21

1.5.2. Tujuan I-21

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi..... II-2

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-3

b. Potensi Pengembangan Wilayah II-15

c. Wilayah Rawan Bencana II-20

d. Demografi II-22

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-30

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-30

1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) II-32

2. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) per Kapita II-37

3. Indeks Gini II-38

4. Indeks Williamson II-39

b. Kesejahteraan Masyarakat II-41

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-41

2. Tingkat Pengangguran II-45

3. Tingkat Kemiskinan..... II-49

4. Tingkat Kerawanan Sosial II-58

5. Produk Hukum Daerah II-64

C. Seni Budaya dan Olahraga II-65

2.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-68

A. Pelayanan Dasar II-69

1. Pelayanan Bidang Pendidikan II-69

2. Pelayanan Bidang Kesehatan..... II-82
B. Pelayanan Penunjang II-89
1. Pelayanan Infrastruktur Komunikasi..... II-89
2. Pelayanan Infrastruktur Energi II-92
2.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-97
A. Kemampuan Ekonomi Daerah II-98
B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-104
1. Jalan dan Jembatan II-104
2. Transportasi dan Lalu Lintas II-121
3. Lingkungan Hidup II-122
C. Perdagangan Daerah II-124
D. Iklim Berinvestasi II-130
E. Sumber Daya Manusia II-131
F. Capaian Berdasarkan MDG's II-179

BAB III.GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKA PENDANAAN III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-3
1. Pendapatan Daerah..... III-3
2. Belanja Daerah III-18
3. Pembiayaan Daerah III-29
3.1.2. Neraca Daerah III-36
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III-39
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran..... III-40
3.2.2. Analisis Pembiayaan..... III-46
3.3. KERANGKA PENDANAAN III-57
3.3.1.Perhitungan Kerangka Pendanaan..... III-57

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV-3
A. PENDIDIKAN IV-4

B. KESEHATAN..... IV-7
1. Permasalahan Kesehatan Ibu IV-8
2. Permasalahan Kesehatan Bayi IV-9
3. Permasalahan Kesehatan Anak Balita IV-10
4. Permasalahan Gizi Buruk IV-11
5. Peran Serta Masyarakat IV-12
6. Kondisi Farmasi, Makanan dan Minuman IV-13
C. LINGKUNGAN HIDUP IV-15
D. PEKERJAAN UMUM IV-17
E. PENATAAN RUANG IV-18
F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN IV-19
G. PERUMAHAN IV-20
H. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV-21
I. PENANAMAN MODAL IV-22
J. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH IV-23
K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL IV-24
L. KETENAGAKERJAAN IV-26
M. KETAHANAN PANGAN IV-27
N. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV-27
O. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA IV-28
P. PERHUBUNGAN IV-29
Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV-30
R. PERTANAHAN IV-31
S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI IV-31
T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN IV-33
U. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ... IV-34
V. SOSIAL IV-36
W. KEBUDAYAAN IV-37
X. STATISTIK IV-38
Y. KEARSIPAN IV-38
Z. PERPUSTAKAAN IV-39
AA. PERTANIAN IV-39

BB. PARIWISATA IV-40
CC. INDUSTRI IV-41
DD. PERDAGANGAN IV-43
4.2. ISU STRATEGIS IV-45

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... V-1
5.1. RUMUSAN VISI V-1
5.2. RUMUSAN MISI V-7
5.3.TUJUAN DAN SASARAN V-11
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1. ISU STRATEGIS VI-3
A. Identifikasi Faktor Internal VI-5
B. Identifikasi Faktor Eksternal VI-11
6.2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG . VI-25
6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH VI-34

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.......... VII-1
7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN..... VII-1
7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-3

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VIII-1

BAB IX. PENUTUP IX-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Walikota Malang dan Wakil Walikota Malang dengan masa bakti jabatan tahun 2013 sampai dengan 2018 sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yang bersifat strategis sebagai :

1. Pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahunnya.
2. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
3. Alat atau instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
4. Instrumen pengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 tahun dan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah tahapan rencanaan lima tahunan yang merupakan periode ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025.

Tahapan tahunan RPJMD Kota Malang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang diuraikan lebih lanjut pada Bab V s.d Bab VIII.

Menindaklanjuti beberapa hal penting diatas serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan dinamika kondisi ekonomi nasional dan internasional yang membawa dampak bagi Kota Malang, maka dengan ini Pemerintah Kota Malang memandang perlu dilakukannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan kewenangan tidak hanya lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, namun juga perubahan kewenangan Pemerintah Kota Malang. Beberapa contoh perubahan kewenangan di tingkat Pemerintah Kota Malang antara lain, pengelolaan persampahan yang awalnya berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mulai tahun 2017 ini kewenangan persampahan tersebut berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan contoh perubahan kewenangan dari Pemerintah Kota Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun ke Pemerintah Pusat antara lain, Kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dahulu berada di bawah naungan Pemerintah Kota Malang, namun sejak tahun 2017 wewenang

pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan-perubahan tersebut tentu harus diikuti dengan perubahan di tingkat Kabupaten/Kota. Bentuk perubahan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030;
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diantaranya untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

35. SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMN 2015-2019 yang meminta kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota agar memberi dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pebangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintah melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1

Bagan Hubungan RPJM Daerah Kota Malang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

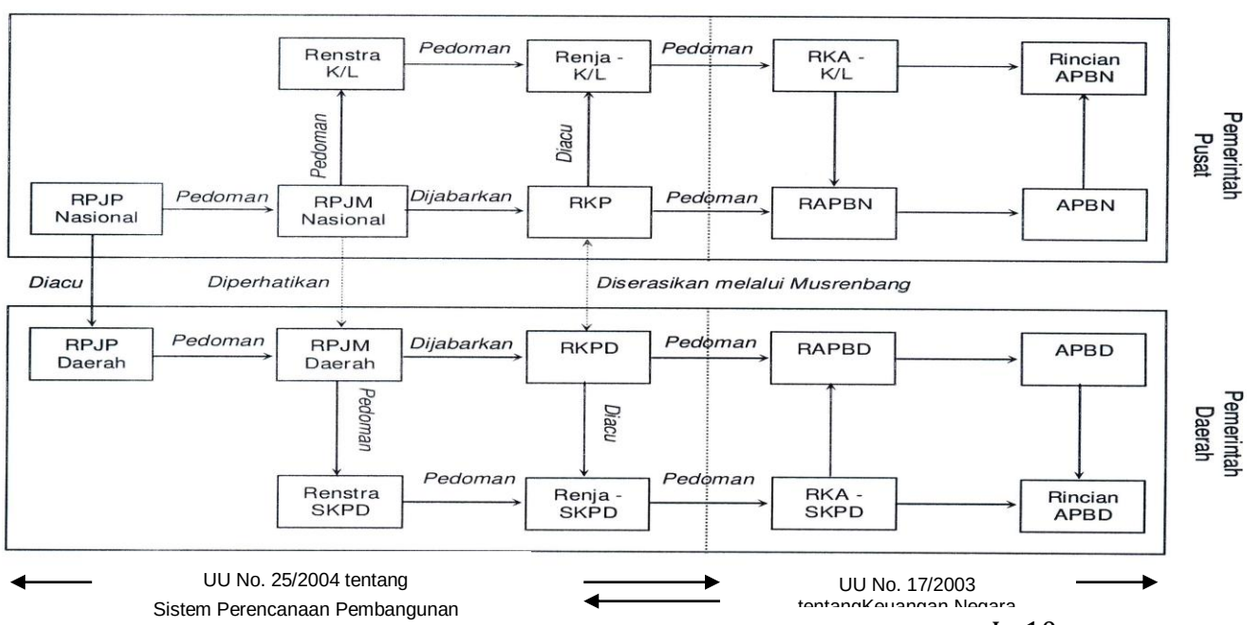

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kota Malang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang maupun kebijakan pola ruang.

Adapun sinkronisasi RPJMD Kota Malang 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut:

1. RPJM Nasional Tahun 2009-2014;
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;

5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2030;
6. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010 – 2030;
8. RPJMD Kota Batu Tahun 2012 – 2017.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang;
10. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
11. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
12. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Berikut adalah hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 dengan Nawa Cita Presiden 2014 – 2019, RPJPD Kota Malang Tahun 2005 – 2025, serta dengan RTRW Kota Malang Tahun 2010 – 2030 sebagaimana tercantum pada tabel 1.3.1 sampai1.3.3

Tabel 1.3.1

Kesesuaian Misi RPJMD 2013-2018 dengan Nawacita

Misi RPJMD 2013-2018	**Keselarasan**		**Nawa Cita Presiden 2014-2019**
	Ya	**Tidak**	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	V		Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Misi 2: Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah.	V		Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
			Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial	V		Nawa Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa Nawa Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Misi 4: Meningkatkan			

pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan			
Misi 5: Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	V		Nawa Cita 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Tabel 1.3.2

Kesesuaian Misi RPJMD 2013-2018 dengan RPJPD Kota Malang Tahun 2005 - 2025

Misi RPJMD 2013-2018	**Keselarasan**		**Misi RPJPD 2005-2025**
	Ya	**Tidak**	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	V		Misi 1 : Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan local Misi 3 : Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi	V		Misi 7 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan

daerah.			Berkelanjutan
Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial	V		Misi 6 : Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Misi 8 : Mewujudkan Kota Malang Yang Sejahtera
Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	V		Misi 4 : Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
Misi 5: Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	V		Misi 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional

Tabel 1.3.3

Kesesuaian Misi RPJMD 2013-2018 dengan RTRW Kota Malang Tahun 2010 - 2030

Misi RPJMD 2013-2018	**Keselarasan**		**Misi RTRW 2010-2030**
	Ya	**Tidak**	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	V		Misi 1 : Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas; Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah.	V		Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya
Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial			
Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang	V		Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan			
Misi 5: Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	V		Misi 5 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, RPJPD Kota Malang Tahun 2005 – 2025, serta RTRW Kota Malang 2010 – 2030. Sedangkan Hubungan antara Perubahan RPJMD dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, baik dari sisi isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas, telah tertuang dalam dokumen Penyelarasan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 yang merupakan kelengkapan dalam proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018.

Sedangkan keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang 2005 – 2025 dapat dilihat dari Pentahapan dan Sasaran Pembangunan Kota Malang Lima Tahunan, adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama: Rencana Pembangunan Jangka Menengah I (RPJM 1) Kota Malang (2005-2009), merupakan tahap Peningkatan Daya Saing yang berkualitas.
- Tahap kedua: Rencana Pembangunan Jangka Menengah II (RPJM II) Kota Malang (2010-2014), merupakan tahap Pemantapan Infrastruktur Pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal. Periode ini merupakan fase lanjutan yang bertujuan untuk Memantapkan "infrastruktur" pembangunan Kota Malang melalui penataan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM di semua sektor pelayanan, serta peningkatan pelayanan publik sesuai dengan didukung dengan kemapuan pemanfaatan IT di segala bidang.
- Tahap ketiga (2015-2019), Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (RPJM III) kota Malang (2015-2019), merupakan tahap Pembangunan Malang Menuju kualitas Global dengan kearifan Lokal. Tahun 2015 sebagai awal dimulainya pasar bebas, menuntut suatu kondisi kesiapan kota Malang menghadapi pasar bebas. Pada fase ini harus dilakukan upaya-upaya untuk Memantapkan pembangunan kota Malang secara menyeluruh melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang berkemampuan penguasaan dan pengembangan IPTEKS dalam merespon persaingan global di era pasar bebas.
- Tahap keempat (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV (RPJM IV) kota Malang (2020-2024), merupakan

fase terwujudnya visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawaskan lingkungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Malang.

Terkait dengan hal diatas, maka Visi Pemerintah Kota Malang 2013 – 2018 adalah **Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota BERMARTABAT.** Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya *Peduli Wong Cilik* sebagai *spirit* dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, 'kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa' dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik. Lebih lanjut tentang penjabaran Visi dan Misi tersebut akan dibahas dalam Bab VI.

1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD

Sistematika RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, mencakup gambaran tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah, menguraikan tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Malang tahun 2013-2018.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah, berisi tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan

aspek daya saing daerah.

Bab IX PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RPJMD Kota Malang.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 ini sudah selayaknya untuk dilaksanakan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kondisi ekonomi nasional dan internasional yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak bagi Kota Malang, juga menjadi hal mendasar disusunnya Perubahan RPJMD Kota Malang ini. Perubahan RPJMD ini merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Oleh karena itu penyusunan perubahan RPJMD Kota Malang ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang pada tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran Kepala Daerah.

1.5.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut, maka penyusunan perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, bertujuan :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan berpedoman pada RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025;
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2013-2018;
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah;
4. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2013-2018;
5. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
7. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta perumusan strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2013-2018 sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa keberadaan dokumen RPJMD bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan admnistratif saja, akan tetapi juga untuk mensinergikan perencanaan pembangunan yang ada di Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dan dalam rangka melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan akan menjadi modal dasar yang kuat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berkualitas. Pengertian ini dapat diperoleh dari data-data mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek geografi adalah merupakan aspek sumber daya alam yang ada berdasarkan tata letak suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif terhadap wilayah lainnya, dan aspek demografi adalah mempelajari tentang aspek sumber daya manusia berdasarkan struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah mengkaji tentang tingkat perekonomian dan kajian sosial masyarakat dalam suatu wilayah. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran tentang jenis-jenis layanan umum yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diperoleh masyarakat, serta aspek daya saing daerah menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan unggulan

daerah yang selanjutnya menjadi nilai jual daerah dan dapat diperbandingkan secara relatif terhadap wilayah lain.

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Letak suatu wilayah secara relatif terhadap wilayah yang lain akan sangat mempengaruhi tingkat kemajuan wilayah tersebut. Bersama-sama dengan faktor-faktor yang lain, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia (demografi), dan sebagainya, letak geografis yang strategis dalam suatu jalur perekonomian dapat meningkatkan tingkat pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai posisi suatu wilayah di muka bumi menjadi bahan dasar untuk perencanaan pengembangan wilayah tersebut di masa mendatang.

Gambar 2.1
Peta Kota Malang

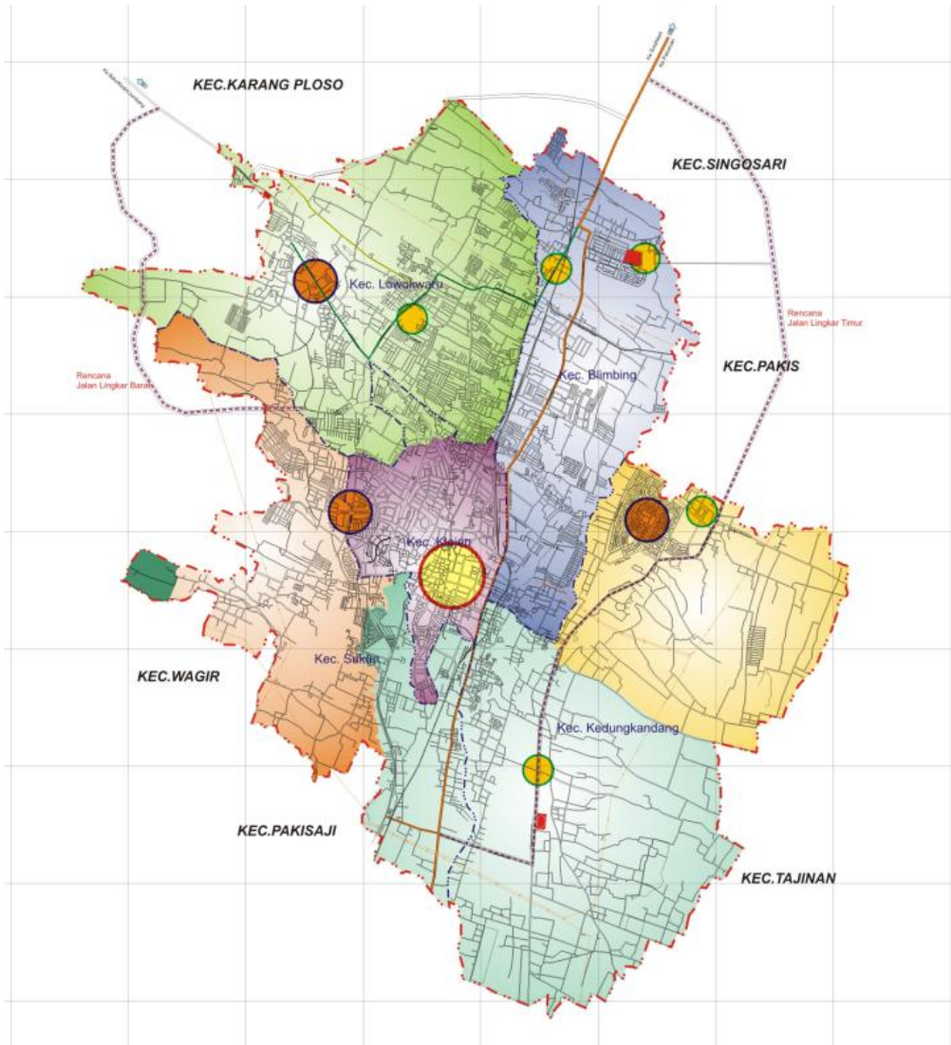

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06 - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut :

(1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

(2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

(3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

(4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 546 Rukun Warga (RW) dan 4.157 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian data kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan di Kota Malang sebagai berikut :

Gambar 2.2
Grafik Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Malang (km²)

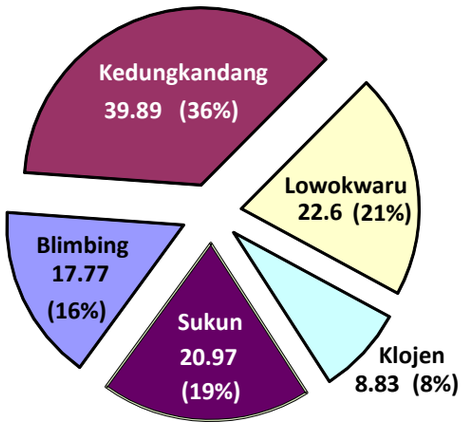

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan
Jumlah RW dan RT Se-Kota Malang Kondisi Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Area (Km²)	% Terhadap Luas Kota	Kelurahan		Jumlah	
						RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
I	**BLIMBING**	17,76	16,14	1	Balearjosari	7	44
				2	Arjosari	5	34
				3	Polowijen	6	39
				4	Purwodadi	13	93
				5	Blimbing	10	55
				6	Pandanwangi	14	125
				7	Purwantoro	24	157
				8	Bunulrejo	21	146
				9	Kesatrian	12	70
				10	Polehan	7	74
				11	Jodipan	8	86
					JUMLAH	**127**	**923**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
II	**KEDUNG-KANDANG**	39,89	36,24	1	Kotalama	11	141
				2	Mergosono	6	77
				3	Bumiayu	6	56

				4	Wonokoyo	5	27
				5	Buring	9	46
				6	Kedungkandang	7	49
				7	Lesanpuro	11	94
				8	Sawojajar	16	120
				9	Madyopuro	17	123
				10	Cemorokandang	11	63
				11	Arjowinangun	9	59
				12	Tlogowaru	8	37
					JUMLAH	**116**	**892**
III	**LOWOKWARU**	22,60	20,53	1	Tasikmadu	6	32
				2	Tunggulwulung	6	54
				3	Merjosari	12	84
				4	Tlogomas	9	49
				5	Dinoyo	7	51
				6	Sumbersari	7	40
				7	Ketawanggede	5	32
				8	Jatimulyo	10	75
				9	Tunjungsekar	8	73
				10	Mojolangu	19	117
				11	Tulusrejo	16	74
				12	Lowokwaru	15	104
					JUMLAH	**120**	**785**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
IV	**KLOJEN**	8,83	8,02	1	Klojen	7	47
				2	Samaan	8	58
				3	Rampalcelaket	6	35
				4	Kiduldalem	8	49
				5	Sukoharjo	7	57
				6	Kasin	11	96
				7	Kauman	10	67
				8	Oro-oro Dowo	10	97

				9	Bareng	8	74
				10	Gadingkasri	6	50
				11	Penanggungan	8	45
					JUMLAH	**89**	**675**
V	**SUKUN**	20,97	19,06	1	Bakalan Krajan	7	49
				2	Mulyorejo	7	57
				3	Karangbesuki	9	79
				4	Ciptomulyo	5	62
				5	Gadang	8	66
				6	Kebonsari	5	44
				7	Bandung-rejosari	13	127
				8	Sukun	9	113
				9	Tanjungrejo	13	138
				10	Pisangcandi	11	87
				11	Bandulan	7	60
					JUMLAH	**94**	**882**
KOTA MALANG		**110,06**	**100,00**	**57**		**546**	**4.157**

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2017

Dilihat dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang.

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar

tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.

Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2^{o}C sampai 24,5^{o}C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3^{o}C dan suhu minimum 17,8^{o}C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.

Dalam tabel-tabel berikut ini akan disajikan data-data mengenai iklim di Kota Malang (Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso) :

Tabel. 2.2
Data Iklim Kota Malang tahun 2009

No	Unsur Klimatologi	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	23,5	23,5	23,7	24,3	23,9	23,0	22,1	22,3	23,3	24,4	24,9	24,3
2	Temp. Maximum	28,1	27,8	28,8	29,4	27,8	28,3	27,7	28,4	28,8	30,0	30,3	29,4
3	Temp. Minimum	20,8	21,1	20,2	20,8	19,7	18,9	17,8	17,6	19,4	20,1	20,7	20,6
4	Temp. Max. Absolut	29,8	30,5	29,8	30,7	29,4	29,7	30,0	30,3	32,0	32,9	32,2	31,6
5	Temp. Min. Absolut	18,9	20,0	18,4	19,0	15,6	16,2	15,8	15,8	16,6	17,7	18,2	18,0
6	Lembab Nisbi Rata-rata	85	84	78	76	75	72	70	69	73	71	73	78
7	Lembab Nisbi Maximum	96	96	96	92	95	98	96	93	94	94	96	100
8	Lembab Nisbi Minimum	54	56	46	46	41	41	41	38	33	29	35	37
9	Curah Hujan	206	315	460	66	61	2	0	47	8	92	174	241
10	Hari Hujan	29	26	18	10	9	4	2	-	4	9	12	20
11	Hujan Maximum	30	19	22	18	20	64	39	-	4	22	82	73
12	Tanggal.Hujan Maximum	7	22	5	2	7	12	4	-	16	12	16	26
13	Penyinaran Matahari(8jam/12jam)	43/33	41/31	53/45	76/60	64/49	91/72	89/70	85/65	81/61	77/60	72/55	68/52
14	Radiasi Matahari	304,0	232,6	334,4	358,1	340,8	359,6	385,2	393,6	400,3	380,1	379,6	376,3
15	Penguapan	107,1	104,2	139,9	149,3	138,8	142,2	141,8	157,9	170,0	183,2	161,5	147,0
16	Kecepatan Angin	3,1	3,2	4,3	8,6	9,9	5,1	9,5	7,7	11,0	9,5	7,9	4,9
17	Arah Angin Terbanyak	S	S	S	E	S	S	S	S	S	S	S	S
18	Kec. Angin Maximum	36,0/NW	36,0/NW	36,0/E	43,2/E	36,0/E	36,0/E	32,4/W	25,2/S	36,0/E	32,4/E	39,6/NE	36,0/S
19	Tekanan Udara Rata-rata	945,3	944,1	945,6	945,6	948,4	947,0	947,4	947,1	947,9	947,8	945,3	946,0
20	Tekanan Udara Maximum	947,0	946,3	948,0	947,8	949,9	948,5	949,7	949,3	950,3	950,1	947,2	949,9
21	Tekanan Udara Minimum	943,5	941,9	942,9	943,2	947,1	945,9	945,7	945,5	944,3	945,5	942,5	943,2

Tabel. 2.3
Data Iklim Kota Malang tahun 2010

No	Unsur Klimatologi	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	23,8	24,0	24,4	23,9	24,5	23,8	23,2	23,4	23,8	24,1	24,4	23,8
2	Temp. Maximum	28,4	29,0	29,2	28,7	28,7	28,3	28,6	28,2	28,3	28,6	28,9	28,0
3	Temp. Minimum	21,1	21,2	21,6	21,3	21,9	20,6	19,8	19,9	20,8	20,9	20,8	21,0
4	Temp. Max. Absolut	30,3	30,3	30,4	29,9	30,2	30,1	30,2	29,4	30,6	30,2	30,0	29,6
5	Temp. Min. Absolut	19,9	19,8	19,8	20,2	20,4	18,0	18,2	18,2	19,0	18,9	18,4	18,6
6	Lembab Nisbi Rata-rata	83	84	83	86	83	80	81	78	80	80	78	82
7	Lembab Nisbi Maximum	99	98	98	97	98	94	98	94	96	98	99	97
8	Lembab Nisbi Minimum	48	53	56	59	57	46	62	64	55	47	45	51
9	Curah Hujan	346	219,3	352,3	525,7	348,8	30	93	134	187	142	466	261
10	Hari Hujan	29	23	22	27	25	11	9	11	19	16	20	24
11	Hujan Maximum	58,5	32,1	152	67,7	58,4	9	33	39	52	32	131	45
12	Tanggal.Hujan Maximum	26	7	5	9	5	11	12	31	13	22	8	6
13	Penyinaran Matahari	44	55	59	56	54	67	72	82	67	66	59	35
14	Radiasi Matahari	322,6	333,8	337,5	365,9	303,7	315	326,1	369,4	348	367,9	361,1	289,8
15	Penguapan	104,4	101,5	134,6	96,1	106,2	111,9	116,2	133,6	126,6	130,9	122,7	98,7
16	Kecepatan Angin	4,14	4,86	5,76	16,02	7,02	4,68	4,14	5,22	4,5	7,2	5,2	3,96
17	Arah Angin Terbanyak	S	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S
18	Kec. Angin Maximum	27/B	21,6/T	28,8	25,2/T	36/TL	30,6/TL	28,8/T	36,0/TL	28,8/S	46,0/U	43,2/TL	45,0/S
19	Tekanan Udara Rata-rata	946,0	946,6	946,5	946,0	944,8	946,5	946,4	946,7	946,2	945,6	945,2	945,0
20	Tekanan Udara Maximum	948,5	948,0	951,1	948,0	947,9	947,9	948,9	948,7	947,7	947,3	947,4	947,2
21	Tekanan Udara Minimum	943,3	945,1	943,8	944,0	941,3	945,3	944,1	945,2	944,8	943,8	942,9	941,0

Tabel. 2.4
Data Iklim Kota Malang tahun 2011

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	24,1	23,9	23,3	23,4	23,5	22,1	22,0	21,8	22,8	24,3	24,0	24,0
2	Temp. Maximum	°C	28,2	28,4	28,1	27,9	28,0	27,1	27,5	27,6	28,9	29,8	28,7	28,3
3	Temp. Minimum	°C	21,4	21,1	20,5	20,6	20,4	18,1	17,8	17,0	18,9	20,0	20,6	21,0
4	Temp. Max. Absolut	°C	30,3	31,5	29,8	30,2	29,7	29,4	28,9	29,9	30,8	31,4	30,9	30,2
5	Temp. Min. Absolut	°C	19,8	19,6	18,3	18,4	18,0	15,3	15,0	14,8	16,3	18,0	19,4	19,4
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	78	79	84	83	79	72	72	69	70	71	79	83
7	Lembab Nisbi Maximum	%	98	97	98	97	100	91	96	88	87	94	96	98
8	Lembab Nisbi Minimum	%	53	44	52	53	48	45	41	38	28	40	50	54
9	Curah Hujan	Millimeter	140	184	337	160	232	5	2	0	2	62	273	267
10	Hari Hujan	Hari	22	20	31	18	14	28	30	0	30	6	21	28
11	Hujan Maximum	Millimeter	50	75	78	52	68	5	1	0	2	26	53	52
12	Tanggal.Hujan Maximum		25	2	25	16	2	1	14	-	16	18	24	4
13	Penyinaran Matahari(8jam/12jam)	%	39/29	42/33	44/32	49/36	63/48	84/65	91/71	90/69	89/69	78/60	60/46	46/37
14	Radiasi Matahari	Kal/cm^2	306,8	322,1	327,2	309,2	339,6	372,6	385,1	400,0	416,4	416,3	362,8	344,6
15	Penguapan	Millimeter	107,9	106,8	96,2	95,3	110,5	128,3	136,4	156,7	176,3	175,9	101,2	98,1
16	Kecepatan Angin	Km/Jam	8,4	6,9	5,3	4,8	5,6	6,5	6,8	8,2	15,9	7,8	5,1	3,7
17	Arah Angin Terbanyak	Mt angin	70	70	160	160	160	160	160	160	160	180	180	0
18	Kec. Angin Maximum	Km/Jam	43/250	36/250	29/30	29/70	27/30	31/30	34/30	25/70	553/0	40/60	40/45	27/70
19	Tekanan Udara Rata-rata	Millibar	945,7	943,5	943,9	945,1	945,4	946,4	943,4	947,1	947,6	946,6	945,1	944,3
20	Tekanan Udara Maximum	Millibar	947,9	945,9	945,6	947,0	947,2	948,8	945,9	948,9	949,3	949,6	947,0	946,9
21	Tekanan Udara Minimum	Millibar	942,7	941,0	942,4	943,0	943,4	943,8	941,1	944,9	943,6	943,8	943,2	941,6

Tabel. 2.5
Data Iklim Kota Malang tahun 2012

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	22,8	23,5	23,8	23,8	23,7	22,7	21,6	21,7	23,0	24,6	24,7	23,8
2	Temp. Maximum	°C	27,6	28,5	27,7	28,8	28,0	27,9	26,7	27,7	29,3	30,3	29,5	28,6
3	Temp. Minimum	°C	21,2	20,3	20,9	20,2	19,9	18,6	17,8	17,1	18,1	19,7	21,1	20,8
4	Temp. Max. Absolut	°C	30,4	30,3	30,0	29,8	29,4	29,4	29,4	30,1	31,4	32,6	31,3	31,0
5	Temp. Min. Absolut	°C	20,2	19,0	17,4	18,3	17,8	15,8	14,6	14,2	14,7	17,4	20,1	19,8
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	83	81	77	76	74	72	75	73	69	71	78	85
7	Lembab Nisbi Maximum	%	98	96	98	92	92	90	91	94	91	91	95	96
8	Lembab Nisbi Minimum	%	49	55	45	47	45	40	44	37	31	28	46	53
9	Curah Hujan	Millimeter	254	348	205	65	19	5	-	4	-	107	127	406
10	Hari Hujan	Hari	25	18	21	9	8	2	-	1	-	8	13	22
11	Hujan Maximum	Millimeter	43	85	56	22	8	4	-	4	-	35	39	98
12	Tanggal.Hujan Maximum		15	13	3	9	8	13	-	7	-	17	11	10
13	Penyinaran Matahari(8jam/12jam)	%	33/23	54/44	40/30	74/57	77/59	78/59	73/57	89/69	91/71	86/70	68/54	49/38
14	Radiasi Matahari	Kal/cm^2	289,0	367,5	316,2	409,0	378,6	378,5	337,9	408,6	425,8	435,9	389,8	338,5
15	Penguapan	Millimeter	87,2	99,1	98,2	133,1	126,8	121,7	125,9	157,2	177,3	178,7	144,4	111,7
16	Kecepatan Angin	Km/Jam	17,5	5,5	8,5	6,6	7,3	7,0	6,6	7,7	8,2	7,8	6,4	5,0
17	Arah Angin Terbanyak	Mt angin	130	180	180	90	180	180	180	180	180	180	180	90
18	Kec. Angin Maximum/Arah angin	Km/Jam	41/50	38/60	40/300	29/80	32/50	31/50	22/190	27/90	36/40	54/40	41/90	32/130
19	Tekanan Udara Rata-rata	Millibar	943,6	944,3	943,9	946,1	945,4	946,4	946,9	951,0	948,3	947,0	946,2	947,5
20	Tekanan Udara Maximum	Millibar	947,1	946,7	947,8	949,3	947,0	948,2	948,7	953,1	949,4	949,6	947,2	949,6
21	Tekanan Udara Minimum	Millibar	939,9	942,0	939,5	943,8	943,8	944,0	944,6	949,8	946,8	943,6	944,1	944,7

Tabel. 2.6
Data Iklim Kota Malang tahun 2013

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	23,9	24,1	23,9	24,1	24,0	23,7	22,4	21,9	22,7	24,4	24,0	23,2
2	Temp. Maximum	°C	28,2	29,1	28,8	28,9	28,7	28,2	27,1	27,5	28,6	30,3	29,0	27,6
3	Temp. Minimum	°C	21,4	21,1	20,8	21,2	20,8	20,5	19,0	17,5	18,2	19,8	20,5	20,5
4	Temp. Max. Absolut	°C	30,0	31,0	30,6	30,2	30,7	29,4	28,8	30,0	31,3	32,7	32,0	30,4
5	Temp. Min. Absolut	°C	19,8	20,0	18,9	18,7	18,8	19,0	14,9	14,7	15,4	15,8	18,7	16,9
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	85	82	83	82	81	83	79	74	70	71	80	86
7	Lembab Nisbi Maximum	%	98	96	96	97	95	98	96	92	89	91	96	98
8	Lembab Nisbi Minimum	%	56	55	50	52	53	58	55	28	21	32	38	47
9	Curah Hujan	Millimeter	663	214	287	218	120	184	132	0	0	88	169	425
10	Hari Hujan	Hari	31	23	24	30	15	21	29	2	30	5	16	25
11	Hujan Maximum	Millimeter	23	33	64	31	29	84	28	0	0	35	29	79
12	Tanggal.Hujan Maximum		12	15	12	1	2	6	3	31	1	23	26	10
13	Penyinaran Matahari(8jam/12jam)	%	36	54	60	61	62	61	67	82	89	77	55	36
14	Radiasi Matahari	Kal/cm^2	287,0	349,2	356,9	341,4	328,2	318,5	331,7	399,0	431,2	442,8	355,5	297,1
15	Penguapan	Millimeter	105,6	117	130,9	129,6	112,7	97,5	113,9	142,5	167,6	186,1	135,4	106,0
16	Kecepatan Angin	Km/Jam	5,8	5,8	5,6	5,8	6,2	5,7	7,3	8,5	8,8	8,7	6,3	5,3
17	Arah Angin Terbanyak	Mt angin	S	T	S	T	T	T	S	S	S	S	S	S
18	Kec. Angin Maximum/Arah angin	Km/Jam	85/S	43/BL	40/T	40/BL	36/TL	31/TL	36/TL	41/TL	40/TL	41/T	45/TL	25/BL
19	Tekanan Udara Rata-rata	Millibar	945,0	944,5	945,9	945,7	945,8	945,1	946,6	947,8	947,9	948,2	945,7	945,1
20	Tekanan Udara Maximum	Millibar	948,2	947,4	947,6	948,2	947,6	947,9	948,4	948,8	949,6	949,6	947,7	946,4
21	Tekanan Udara Minimum	Millibar	940,3	941,5	943,2	943,4	941,5	942,5	944,9	945,9	946,7	947,0	942,4	944,0

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah sudah tidak memungkinkan. Namun demikian, potensi pengembangan wilayah bagi Kota Malang dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan menghembuskan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya.

Diagram Penggunaan Lahan Kota Malang

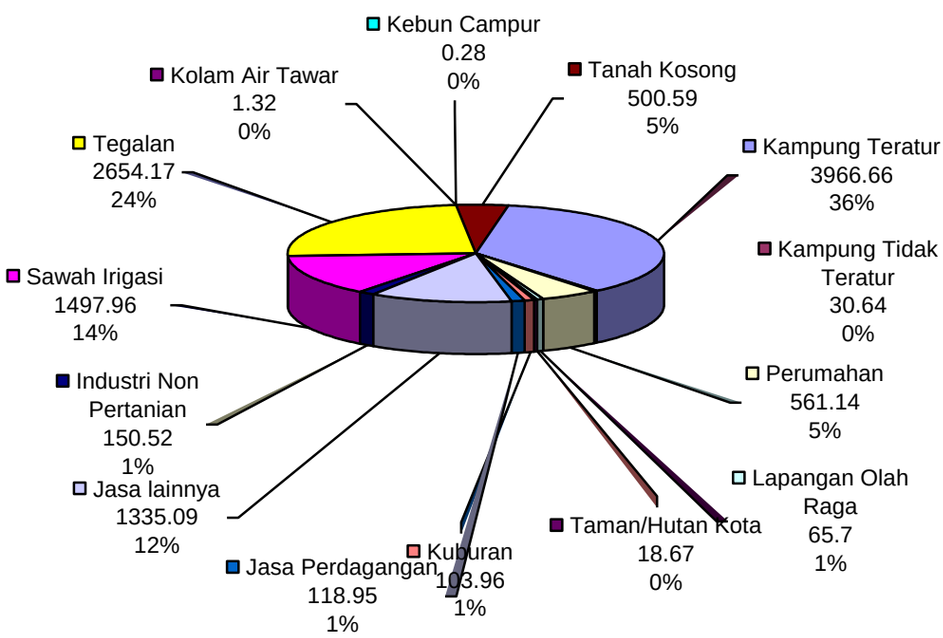

Sumber : BPN Kota Malang

Berdasarkan gambar diatas, bahwa dengan luas wilayah Kota Malang seluas 11.055,66 Ha ini, penggunaan guna lahan terbesar adalah permukiman tertata seluas kurang lebih 3.966,66 Ha atau 36% dari luas wilayah Kota Malang (luas total permukiman seluas 4558,44 Ha). Penggunaan lahan kedua terbesar adalah untuk pertanian tanah kering/tegalan seluas 2.654,17 Ha atau 24% dari luas wilayah.

Sedangkan, pengembangan wilayah pada bidang pendidikan adalah merupakan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan tujuan akhir yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Tersedia dan tersebarnya fasilitas pendidikan sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga Perguruan Tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh tidak saja penduduk Kota Malang, namun juga bagi masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid mulai pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta sampai dengan SMA/SMK. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	65	4279	551	11,73	7,65
Sukun	69	4368	580	14,17	7,46
Klojen	65	4224	535	13,75	7,76
Blimbing	67	4122	583	16,44	6,92
Lowokwaru	75	3658	578	-	6,33
Jumlah	341	20651	2827	13,67	7,21

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	56	15.476	746	22,27	13,47
Sukun	58	16.435	824	23,22	11,75
Klojen	43	11.904	658	19,99	16,47
Blimbing	57	16.201	839	21,49	13,71
Lowokwaru	60	16.802	938	18,87	16,27
Jumlah	274	76.818	4.005	21,30	14,77

Tabel 2.10
Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid-Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	17	5833	407	17,02	9,63
Sukun	16	5156	381	15,94	11,81
Klojen	25	11089	738	16,58	12,76
Blimbing	21	6973	491	14,60	13,80
Lowokwaru	21	7846	544	16,11	12,49
Jumlah	100	36.897	2.561	16,14	12,34

Tabel 2.11
Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	5	1,778	168	11	356
Sukun	6	438	97	5	73
Klojen	18	9,684	756	13	538
Blimbing	5	374	83	5	75
Lowokwaru	9	4,919	342	14	547
Jumlah/*Total*	43	17,193	1,446	12	400

Tabel 2.12
Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta
Di Bawah Kementerian Agama
Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	21	3449	238	-	16,31
Sukun	11	2432	149	19,73	17,74
Klojen	5	2589	135	23,79	23,48
Blimbing	4	1057	49	-	23,61
Lowokwaru	2	681	49	-	9,27
Jumlah	43	10.208	620	22,35	90,40

Tabel 2.13
Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta Di Bawah Kementerian Agama
Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	14	1316	188	13,37	6,85
Sukun	4	575	45	-	11,89
Klojen	6	1403	132	14,69	13,63
Blimbing	2	315	30	-	16,94
Lowokwaru	8	902	86	-	9,67
Jumlah	34	4511	481	28,06	10,34

Tabel 2.14
Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta
Di Bawah Kementrian Agama
Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	5	345	85	4	69
Sukun	1	323	20	16	323
Klojen	4	912	118	8	228
Blimbing	1	24	13	2	24
Lowokwaru	4	1,178	110	11	295
Jumlah	15	2,782	346	8	185

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa sebaran sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di Kota Malang sudah cukup baik. Disparitas kewilayahan hanya terjadi pada SMU Negeri/Swasta (Tabel 2.11) dan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta (Tabel 2.14), di mana rasio pada Kecamatan Sukun dan Kedungkandang cukup jauh perbedaannya dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini utamanya disebabkan karena faktor geografis di kedua wilayah tersebut yang relatif sulit diakses dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Malang. Untuk itu perlu dilakukan penguatan akses pada sarana pendidikan di dua Kecamatan tersebut.

C. Wilayah Rawan Bencana

Kota Malang dengan topografi yang berada pada ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut, adalah merupakan hamparan dataran yang berada pada lokasi yang cukup tinggi. Wilayah Kota

Malang yang berada pada dataran tinggi tersebut sebenarnya juga merupakan implikasi dari letaknya yang berada pada lereng-lereng dari beberapa pegunungan di sekitar Kota Malang. Diuntungkan dengan lokasi yang berada pada kawasan lereng pegunungan tersebut, beberapa sisi Kota Malang memiliki berbagai pemandangan yang indah serta kawasan yang sejuk dengan hawa khas pegunungan. Di lain pihak, Kota Malang juga berpotensi memiliki kawasan yang rawan bencana.

Tingkat kerawanan terhadap bencana ini merupakan karakteristik dari daerah yang mempunyai kawasan lereng dengan aliran sungai yang dikelilingi tebing-tebing sungai, serta kemiringan lahan yang berpotensi erosi maupun longsor. Semakin tinggi lokasinya, semakin tinggi nilai kemiringan lahannya, sehingga tingkat potensi erosi maupun longsor pada kawasan tersebut juga semakin meningkat.

Menilik potensi wilayah dengan karakteristik demikian, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban daerah untuk mengelola kawasan-kawasan rawan erosi dan longsor. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk, potensi yang lain adalah dengan dimanfaatkannya kawasan aliran sungai sebagai saluran drainase dan tujuan akhir dari aliran buangan maupun aliran permukaan (*run off)*. Konsekuensi yang timbul adalah terbawanya sampah-sampah maupun material-material erosi ke dalam aliran, sehingga berpotensi menyumbat lubang-lubang pembuangan dan saluran-saluran drainase yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya genangan pada musim hujan. Semakin

banyak tumpukan sampah padat dan juga material buangan pada titik pembuangan/saluran drainase tertentu, maka akan semakin banyak kapasitas air hujan yang meluap dan menggenang pada kawasan tersebut.

Semakin mahalnya harga tanah, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah akan hidup secara berkelompok pada kawasan marjinal di tepian bantaran sungai. Kawasan tersebut, selain merupakan kawasan yang masih terjangkau dari segi harga, secara aspek yang lain juga masih terhitung ekonomis bagi mereka, misalnya pembuangan limbah rumah tangga cukup dekat dan tidak memerlukan tambahan instalasi yang rumit dan berbiaya tinggi.

Pemanfaatan daerah-daerah bantaran sungai dengan sisi tebing yang cukup tinggi sebagai kawasan hunian, akan membahayakan keselamatan jiwa dari masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut.

D. Demografi

Berdasarkan data-data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam buku Kota Malang dalam Angka (Tahun 2009 hingga Tahun 2013), jumlah penduduk Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan di dalam grafik di bawah. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 secara berurutan adalah Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa, Tahun 2014 sebanyak 865.011 jiwa, Tahun 2015 sebanyak 881.123 jiwa, dan Tahun 2016 sebanyak 894.278 jiwa.

(Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Gambar 2.3.

Grafik Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2013-2016

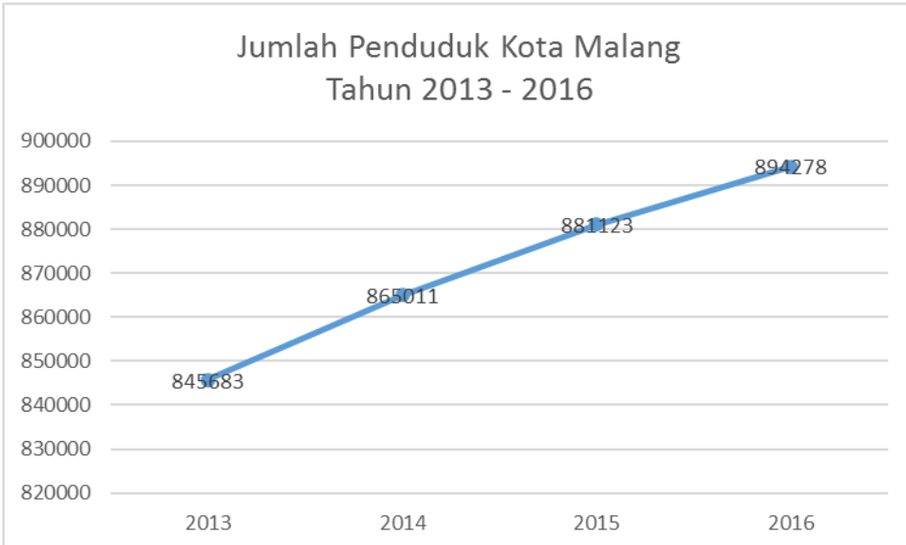

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ditinjau dari sebaran jumlah penduduk pada lima kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk terbanyak, kemudian diikuti Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, dan terakhir Kecamatan Klojen. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2013, di Kecamatan Kedungkandang terjadi lonjakan jumlah penduduk yaitu menjadi 194.076 jiwa sehingga menjadi kecamatan berpenduduk paling banyak.

Gambar 2.4.

Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2009-2013

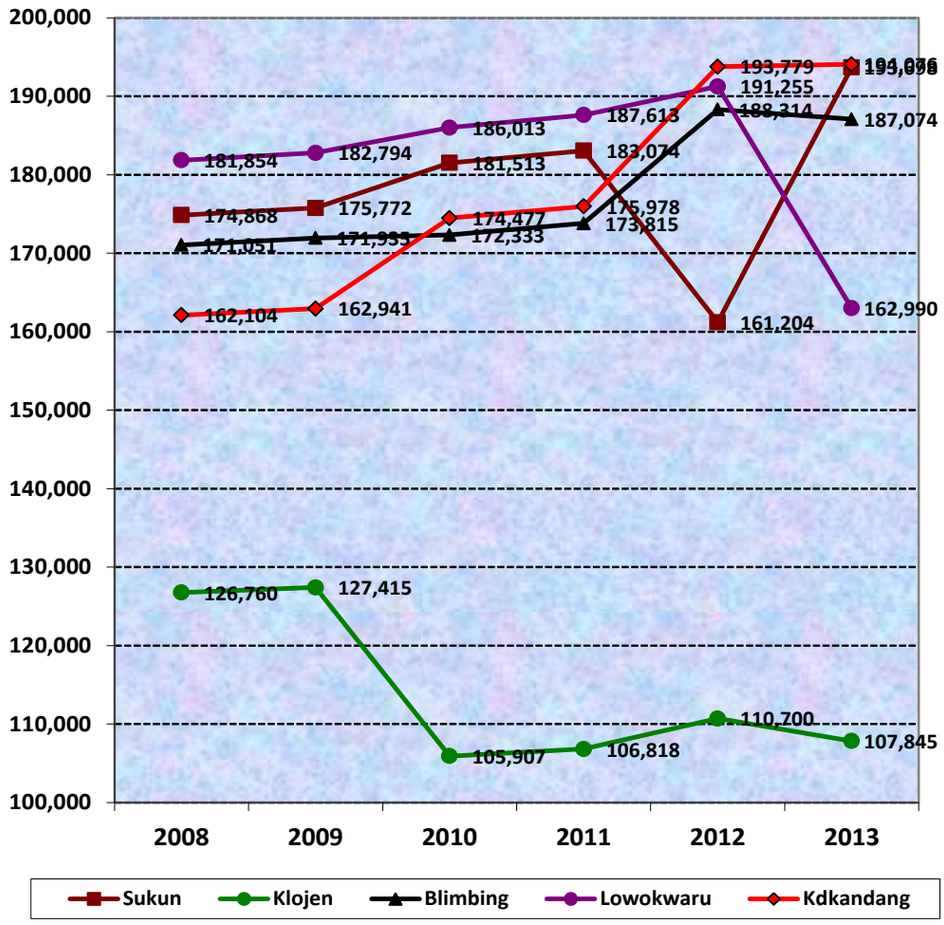

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Selama tahun 2008 hingga 2012, komposisi penduduk Kota Malang tidak mengalami perubahan, dimana untuk Kecamatan Klojen jumlah penduduknya paling sedikit, namun paling padat hingga mencapai 14.430 jiwa per km^2. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Klojen tersebut berbanding terbalik dengan Kecamatan Kedungkandang yang memiliki kepadatan paling rendah dimana menurut data terakhir yaitu sebesar 4.858 jiwa per km^2.

Gambar 2.5.

Grafik Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2) Berdasarkan Kecamatan Tahun 2008-2012

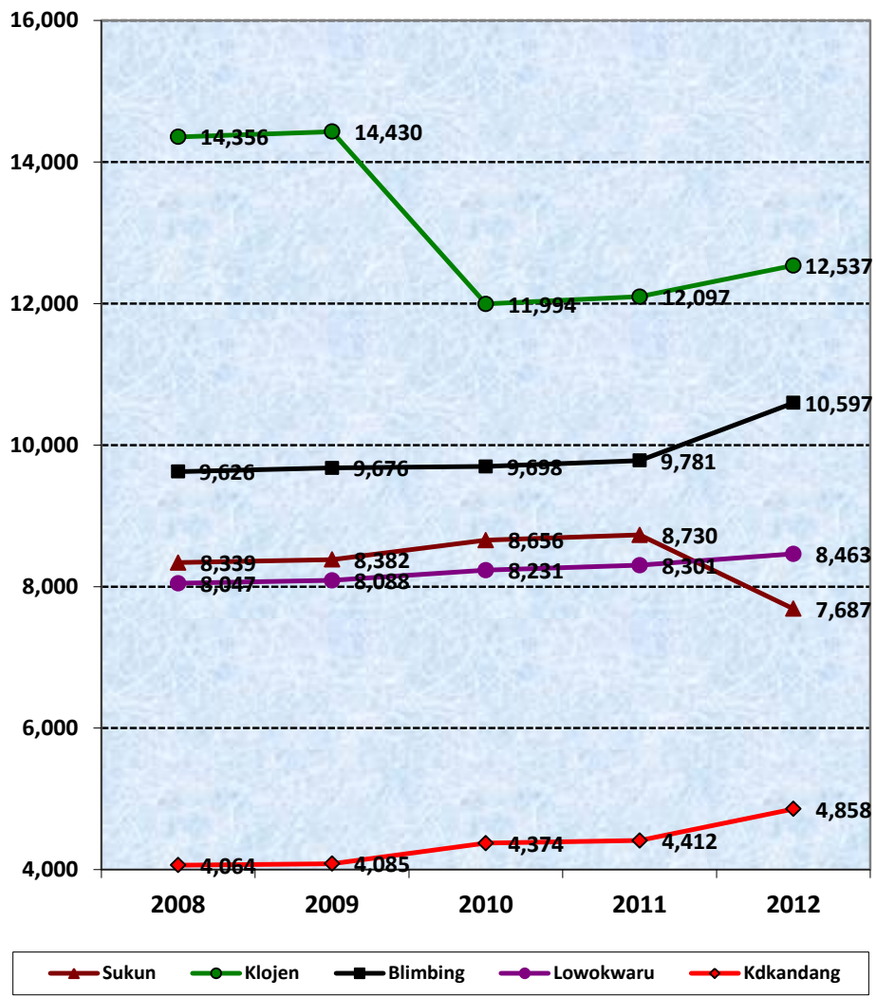

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2008-2012

Gambaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dibaca pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Menurut Umur
Tahun 2009– 2013

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	00 - 04	61.303	56.533	61.351	61.351	58368
2	05 - 09	60.051	55.378	62.412	62.412	65310
3	10 - 14	63.192	58.275	60.405	60.405	81125
4	15 - 19	94.145	46.819	79.300	79.300	13204
5	20 - 24	123.502	113.892	97.775	97.775	13430
6	25 - 29	79.654	73.456	76.544	76.544	101066
7	30 - 34	67.666	62.401	65.882	65.882	74623
8	35 - 39	59.732	55.084	60.974	60.974	81405
9	40 - 44	52.455	48.373	57.694	57.694	69433
10	45 – 49	41.286	38.073	51.291	51.291	66294
11	50 – 54	30.728	28.337	44.737	44.737	57339
12	55 – 59	25.885	23.871	33.374	33.374	50771
13	60 – 64	22.128	20.406	23.098	23.098	32868
14	65 - 69	15.825	14.594	17.878	17.878	30878
15	70 - 74	12.252	11.299	12.808	12.808	27808
16	75 +	11.051	10.191	14.720	14.720	21761
Jumlah Penduduk		**820.857**	**716.982**	**820.243**	**820.243**	**845.683**

Sumber : Kota Malang dalam Angka 2009-2013

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kelompok umur pada usia produktif (10-59) sangat tinggi (608.690), sehingga ini bisa menjadi modal dasar untuk memacu produktivitas kota. Kelompok umur dengan jumlah paling banyak adalah di usia 25-29 tahun, yaitu hingga mencapai sebesar 101.066 jiwa pada Tahun 2013. Berdasarkan tabel itu juga terlihat komposisi penduduk menurut kelompok umur hampir tidak mengalami perubahan. Kelompok umur pada generasi muda dari usia 0 hingga 39 masih berada di kisaran 488 ribuan jiwa atau lebih. Hal ini menunjukkan tingkat regenerasi yang sangat baik, dimana jumlah generasi muda berada pada tingkat yang tetap agar dapat mendukung produktivitas daerah. Kondisi tersebut dapat digambarkan pada grafik tersebut dibawah ini :

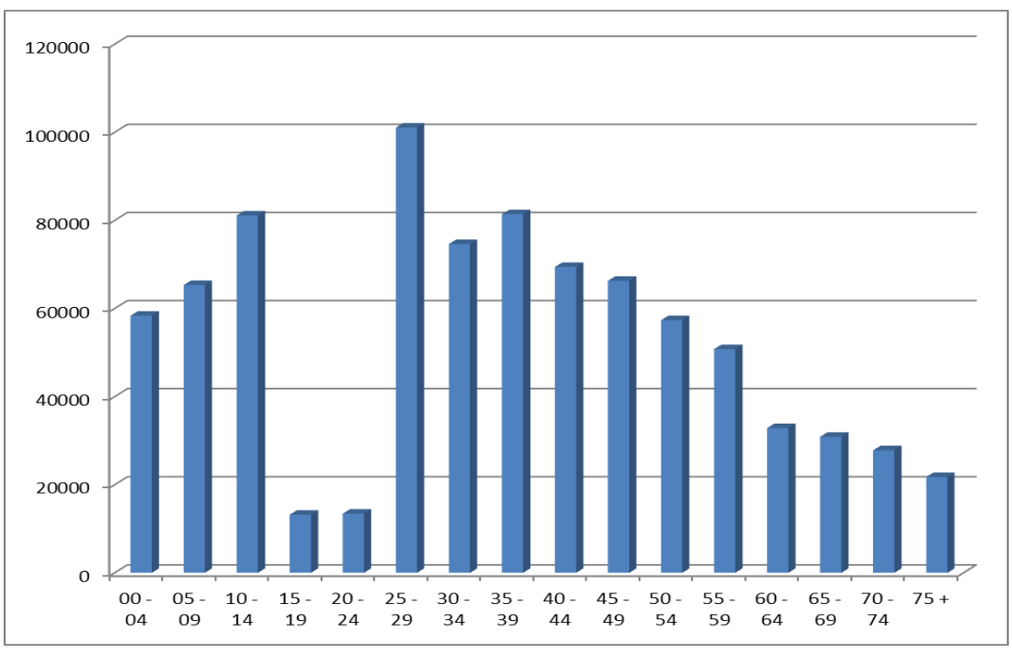

Dari segi kualitas penduduk, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar masih didominasi oleh pendidikan dasar yaitu sejak SD hingga SMP. Penduduk yang sudah menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi sudah cukup tinggi pada tahun 2008 namun

cenderung turun jumlahnya pada tahun 2009 dan 2010, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin meningkat. Secara positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat sumber daya manusia di Kota Malang juga akan semakin lebih baik, karena semakin banyaknya masyarakat yang semakin terpelajar dan memiliki pendidikan yang semakin bagus. Secara lebih rinci, dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012

Tingkat Pendidikan	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Tidak/Blm Tamat SD/MI	17,59	20,52	21,21	14,55	12,92
SD/MI	21,36	18,99	23,77	22,91	18,92
SMP/MTs/SMPK	14,52	17,25	18,17	18,53	17,04
SMU/MA	21,28	21,50	21,02	22,69	28,11
SMK	8,46	8,78	8,83	9,09	6,96
Diploma I, II	0,97	0,81	0,47	12,22	16,06
Diploma III	3,10	3,21	0,65		
D IV / S1	11,52	7,95	4,86		
S2 / S3	1,20	0,98	1,03		
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2009-2013

Jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi dari kelompok lulusan SMU dan/atau SMK, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.17

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2013

Tingkat Pendidikan	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
SD/MI	16	23	9	1.661	1.661
SMP	333	92	135	1.650	1.650
SMU	6.573	632	330	2.174	2.174
SMK	-	-	-	606	606
Diploma	3.491	739	108	81	81
Sarjana	14.558	2.875	343	325	325
Tingkat Pendidikan Tidak Ditulis	-	-	-	242	242
Total	**24.971**	**4.361**	**925**	**6.739**	**6.739**

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2009-2013

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja dibandingkan dengan angka kelulusan, khususnya untuk tingkat SMA dan Diploma/Sarjana, menunjukkan trend yang baik. Hal ini ditunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Artinya, sebagian besar lulusan sudah dapat ditampung baik di lapangan pekerjaan maupun di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga menunjukkan

bahwa angka pengangguran terdidik di Kota Malang sejauh ini relatif dapat tertangani dengan baik. Arah kebijakan ke depan adalah tetap terus berupaya meningkatkan daya serap lapagan kerja, khususnya lapangan kerja kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Kota Malang yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai selama ini akan diuraikan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sesungguhnya masih bersifat sangat terbuka untuk dikemukakan dalam suatu media diskusi lebih lanjut. Namun demikian, sebagai bahan pembahasan mengenai pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Kota Malang, dapat diindikasikan dari tingkat pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) baik menggunakan dasar penghitungan harga konstan maupun harga berlaku.

PDRB ini dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010.

Dilihat dari data PDRB, Kota Malang mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut-turut dari sektor Tersier, Sekunder dan terakhir sektor Tersier lagi. Sektor Primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang PDRB Kota Malang adalah:

1. Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Tersier),
2. Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan
3. Jasa-Jasa (Sektor Tersier)

Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usaha di tiga bidang tersebut,

maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut di atas.

1. Adapun PDRB Kota Malang berdasarkan harga konstan dan harga berlaku adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Malang Tahun 2012-2016 (dalam miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	104.137,8	103.161,2	105.082,5	107.427,37	107.515,2
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	42.254,5	40.548,7	39.791,5	38.366,99	36.225,19
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9.553.589,3	9.737.974,2	10.011.809,6	10.261.727,41	10.463.340,74
4. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	15.183,8	15.425,1	15.527,8	16.076,5	16.836,16
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	75.187,0	81.384,8	83.900,6	87.012,81	91.297,18
6. KONSTRUKSI	4.225.473,1	4.592.692,1	4.998.470,2	5.263.448,1	5.612.051,03
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	10.819.659,8	11.586.292,6	12.221.546,3	13.022.699,01	13.844.817,35
8. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	849.816,1	912.178,3	977.545,7	1.044.323,01	1.122.291,33
9. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	1.434.880,4	1.549.845,6	1.712.018,9	1.850.982,02	1.997.080,74
10. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.522.395,8	1.704.436,0	1.843.103,8	1.993.053,2	2.174.187,92
11. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	866.774,5	976.990,6	1.042.606,7	1.116.992,73	1.205.068,20
12. REAL ESTATE	507.912,3	545.746,5	585.329,5	627.783,48	674.328,34
13. JASA PERUSAHAAN	245.645,5	262.764,3	285.795,6	310.845,56	333.005,89
14. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	597.794,9	602.693,7	603.377	625.810,45	636.494,29
15. JASA PENDIDIKAN	2.510.565,3	2.730.421,8	2.957.340	3.203.129,86	3.456.841,41
16. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	812.722,5	887.332,7	967.805,9	1.064.148,1	1.152.126,46
17. JASA LAINNYA	1.171.749,3	1.217.850,8	1.273.251,7	1.322.646,1	1.380.393,57
PDRB	35.355.741,9	37.547.738,8	39.724.309,8	41.951.560,17	44.303.900,96

Sumber Data: PDRB Kota Malang menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.

Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang Tahun 2009-2012 (dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	119,893.0	127,215.7	142,690.2	157,491.46	164,274.69
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	44.476,4	44.267,1	50.314,3	51.714,9	49.289,18
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	11.096.158,7	12.090.542,5	12.637.710,3	13.734.280,25	14.521.774,32
4. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	14.203,1	12.859,4	13.048,2	14.510,7	17.498,63
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	78.019,1	86.848,7	91.186,4	97.071,50	106.821,48
6. KONSTRUKSI	4.648.138,7	5.191.183,5	5.848.419,2	6.496.491,95	7.386.697,38
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	11.310.280,9	12.363.789,0	13.257.073,6	14.977.147,24	16.890.296,89
8. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	866,570.6	971,954.6	1,119,241.8	1,250,611.57	1,399,217.47
9. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	1.603.371,6	1.871.409,8	2.271.347,2	2.484.650,62	2.802.703,97
10. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.529.620,4	1.711.052,5	1.834.747.7	2.057.261,06	2.277.943,91
11. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	1.018.483,8	1.200.034,7	1.359.591,0	1.538.546,79	1.740.475,01
12. REAL ESTATE	531.151,6	590.616,6	633.584,2	729.613,18	808.237,92
13. JASA PERUSAHAAN	279.283,3	315.924,5	348.608,5	399.521,40	447.691,64
14. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	694.448,7	721.502,6	733.619,6	788.580,99	844.471,77
15. JASA PENDIDIKAN	2,867,351.9	3,290,680.7	3,728,450.3	4,224,457.87	4,646,287.30
16. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	854,027.6	973,909.5	1,135,615.0	1,292,020.62	1,428,667.10
17. JASA LAINNYA	1,191,168.5	1,256,077.8	1,358,011.7	1,534,008.22	1,638,712.92
PDRB	38,747,007.8	42,819,869.1	46,563,259.4	51,827,980.32	57,171,601.59

Sumber Data: PDRB Kota Malang menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.

Tabel 2.7
Jumlah Industri di Kota Malang Hingga Tahun 2012
Perkembangan Industri Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Industri Besar	5	5	5	5
Industri Kecil dan Menengah	834	844	848	853
Sentra Industri	914	914	914	914
Industri Non Formal	1471	1486	1506	1506

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Nilai pertumbuhan ekonomi Kota Malang relatif tinggi hingga melampaui nilai pertumbuhan ekonomi kawasan regional Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2012 hingga tahun 2016 berturut-turut adalah 6,26%, 6,2%, 5,8% dan 5,61%, dan 5,61% sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

Gambar 2.6.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2012-2016 (%)

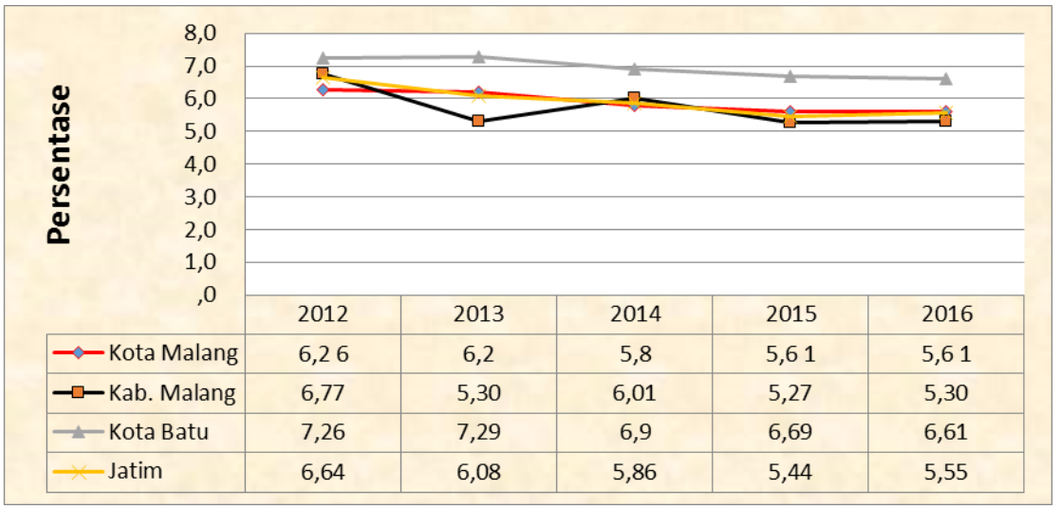

	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Malang	6,2 6	6,2	5,8	5,6 1	5,6 1
Kab. Malang	6,77	5,30	6,01	5,27	5,30
Kota Batu	7,26	7,29	6,9	6,69	6,61
Jatim	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55

Tingkat inflasi di Kota Malang juga cukup terkendali. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa. Tingkat inflasi di Kota Malang pada Tahun 2016 sebesar 2,62%, dan Inflasi tribulan II Tahun 2017 sebesar 4,99% (Data berdasarkan sumber data BPS Kota Malang).

Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai.

Gambar 2.7

Grafik Tingkat Inflasi Kota Malang
Tahun 2015-2016

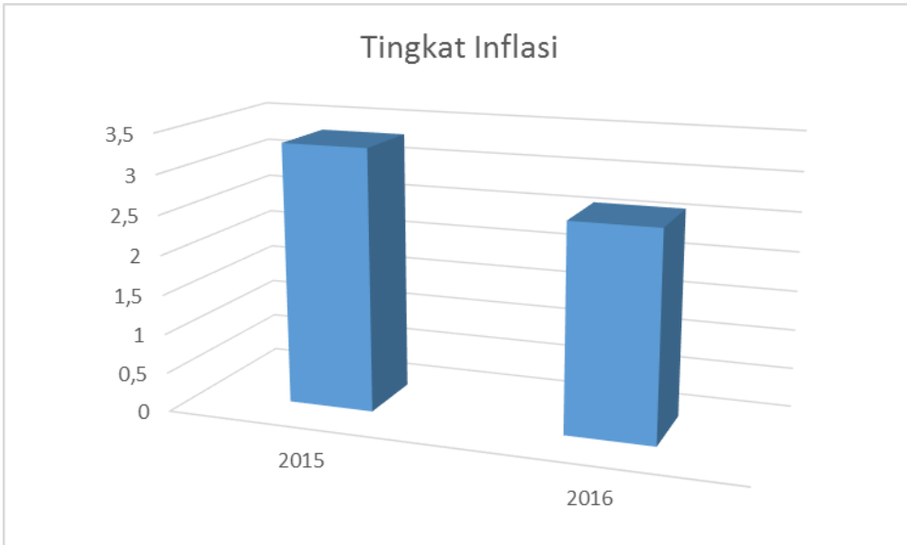

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2015-2016.

Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Malang secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait.

2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto Per kapita diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah (wilayah penghitungan PDRB), adapun PDRP Per kapita di Kota Malang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Kota Malang Tahun 2012 – 2016

PDRB PERKAPITA	**Tahun**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	38747,01	42819,87	46563,21	51824,39	57717,6
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)	35355,74	37547,74	39724,7	41952,13	44303,9

3. Indeks Gini

Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna.

Tabel 2.21
Angka Gini Rasio Menurut Status Wilayah
di Kota Malang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Gini Rasio
1	2011	0,36
2	2012	0,48
3	2013	0,38
4	2014	0,37
5	2015	0,38

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah
0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang
G>0,5 = Ketimpangan Tinggi

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Kota Malang menunjukkan trend meningkat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri yang harus di jawab dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun ke depan. Pembukaan akses pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik pada level kelurahan maupun kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan yang ada.

4. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat disparitas antar wilayah, yaitu Indeks Williamson. Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Tabel 2.22
PDRB Kota Malang per Kecamatan Kota Malang
Dan Indeks Williamson
Tahun 2009-2013

TAHUN	PDRB (Rupiah)					INDEKS WILLIAMSON
	KEDUNG-KANDANG	SUKUN	KLOJEN	BLIMBING	LOWOKWARU	
2009	17.661.762	27.174.459	74.253.601	35.618.597	28.720.799	0,50
2010	19.861.659	30.560.098	83.840.448	40.052.325	32.391.793	0,51
2011	21.667.463	33.188.219	91.584.286	43.539.994	35.352.960	0,50
2012	25.316.804	35.895.470	105.024.161	48.513.941	38.367.184	0,52
2013	27.212.073	39.061.506	119.830.101	54.087.894	43.862.252	0,54

Sumber: BPS Kota Malang

Berdasarkan hasil penghitungan tercatat Indeks Williamson kota Malang periode 2009 sampai 2013 sebesar 0,50 – 0,54. Besaran tersebut dapat diartikan masih ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kecamatan karena nilai Indeks Williamson lebih besar dari 0. Indikasi ketimpangan tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di satu kecamatan yaitu Klojen, hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita Kecamatan Klojen paling besar. Hal ini didukung oleh peran sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan .

Jika dilihat dari perkembangan nilai Indeks Williamson, maka ada kecenderungan ketimpangan pendapatan antar kecamatan semakin melebar.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Malang dapat ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Index (HDI), yang dimaknai sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) serta standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang. Selain itu pula untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup.

Gambar 2.8.
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Malang Tahun 2012-2016

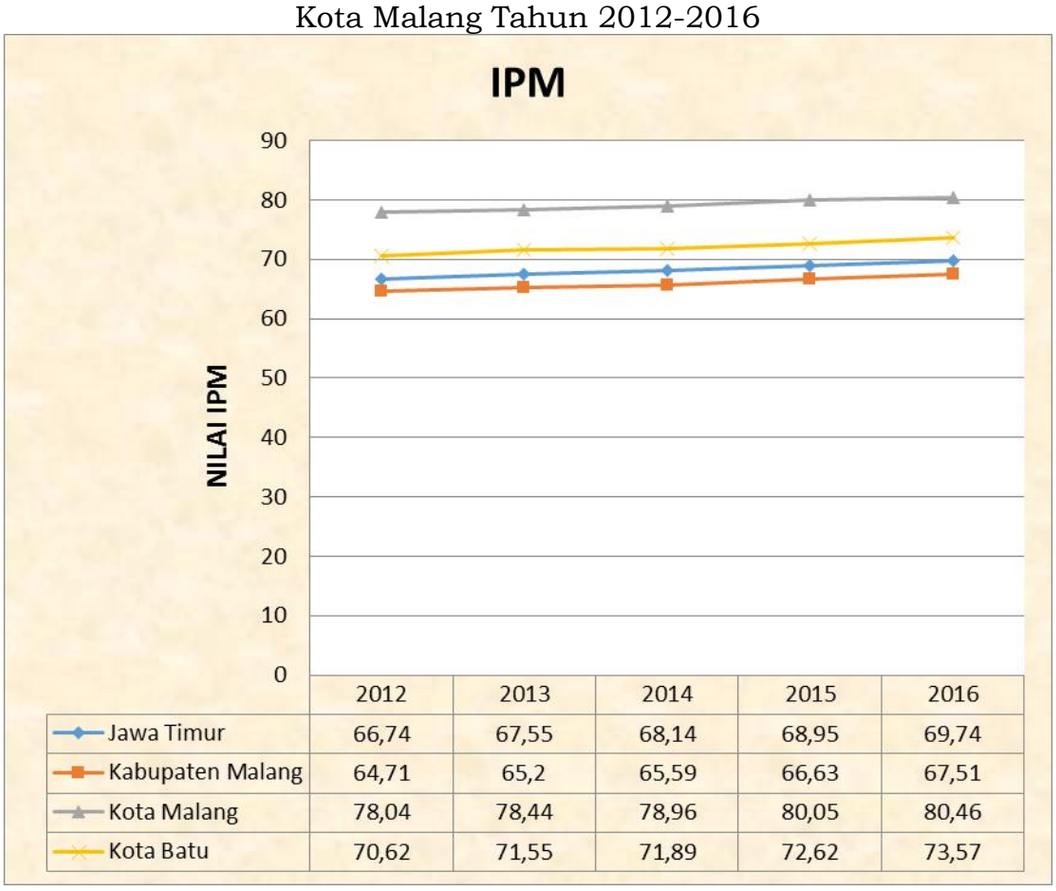

	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74
Kabupaten Malang	64,71	65,2	65,59	66,63	67,51
Kota Malang	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46
Kota Batu	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57

Jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur, nilai IPM Kota Malang dari tahun ke tahun selalu meningkat dan masih di atas IPM Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 2.9.
Grafik Indeks Pembangunan Kota Malang
Tahun 2013-2015

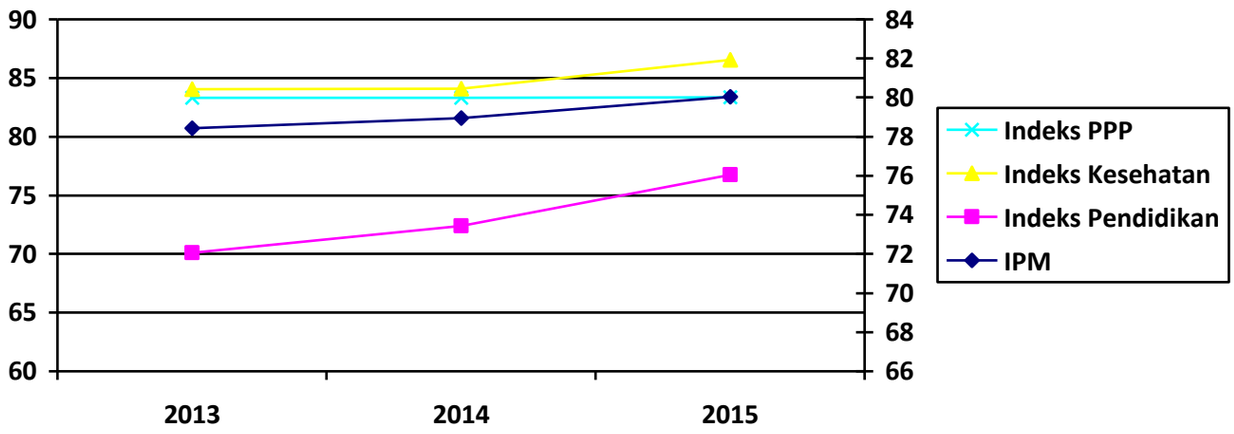

Dalam mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan urusan :

1. Bidang pendidikan, telah dicapai indikator-indikator kinerja sebagai berikut :
   a. Angka melek huruf sebesar 99,91%
   b. Angka rata-rata lama sekolah sebesar :
      1) SD selama 6 tahun;
      2) SMP selama 3 tahun;
      3) SMA/SMK selama 3 tahun;
   c. Angka Partisipasi Kasar, sebesar :
      1) APK SD sebesar 95,86%;
      2) APK SMP sebesar 85,13%;
      3) APK SMA/SMK sebesar 84,67%;
   d. Angka Partisipasi Murni, sebesar :
      1) APM SD sebesar 82,79%;
      2) APM SMP sebesar 62,99%;

3) APM SMA/SMK sebesar 58,66%;

Tabel 2.23
Angka Melek Huruf Kota Malang
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2014	97.51
2	2015	99,91
3	2016	99,91

Tabel 2.24
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013

No.	Jenjang	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	6.12	6.11	6.11	6.10	6.11
2	SMP/MTs	3.02	3.02	3.02	3.01	3.02
3	SMA/MA	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
4	SMK	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99
	Jumlah	12.14	12.13	12.13	12.11	12.13

2. Bidang kesehatan, telah dicapai indikator-indikator kinerja sebagai berikut :
   a. Jumlah kelahiran hidup bayi sebesar 11.953 anak;
   b. Angka harapan hidup sebesar 72,60;
   c. Prosentase balita gizi buruk sebesar 0,5%
3. Bidang pertanahan, telah dicapai indikator-indikator kinerja persentase penduduk memiliki lahan, sebesar 78,46% dari 191.898 lahan;

2. Tingkat Pengangguran

Problem yang dihadapi mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan, yang dalam hal ini adalah bagaimana mengurangi angka pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2009 sebesar 388.491 orang, tahun 2010 sebesar 392.500 orang, tahun 2011 sebesar 427.177 orang, tahun 2012 sebesar 413.933 orang, dan tahun 2013 sebesar 413.403 orang. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja yang telah terserap dalam lapangan kerja pada tahun 2009 sebesar 347.283 orang, tahun 2010 sebesar 358.415 orang, tahun 2011 sebesar 404.992 orang, tahun 2012 sebesar 382.126 orang, dan tahun 2013 sebesar 398.094 orang.

Gambar 2.09.
Tingkat Pengangguran
Tahun 2013-2015

No	Indikator	2013	2014	2015
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,72	7,22	7,28
2	Bekerja	398.094	393.050	377.329
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.44		60,56
4	Tingkat Kesempatan Kerja	96.23		

Sumber: BPS Kota Malang

Ditinjau dari jumlah pengangguran yang ada di Kota Malang, pada tahun 2015 sebesar 29.606 orang, tahun 2014 sebesar 30.581 orang. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah pengangguran, yang dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Sesuai

dengan data BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 7,22%, tahun 2015 naik menjadi 7,28. Sedangkan indikator kinerja rasio penduduk yang bekerja telah dicapai sebesar 98,27%.

Gambar 2.10.
Grafik Jumlah Angkatan Kerja Kota Malang
Tahun 2013 - 2015

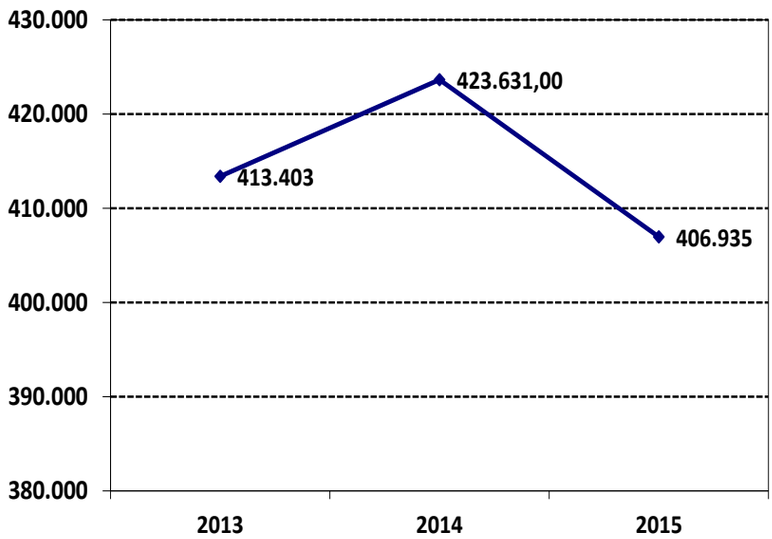

Sumber: BPS Kota Malang

Gambar 2.11.
Grafik Tingkat Pengangguran Kota Malang
Tahun 2013 - 2015

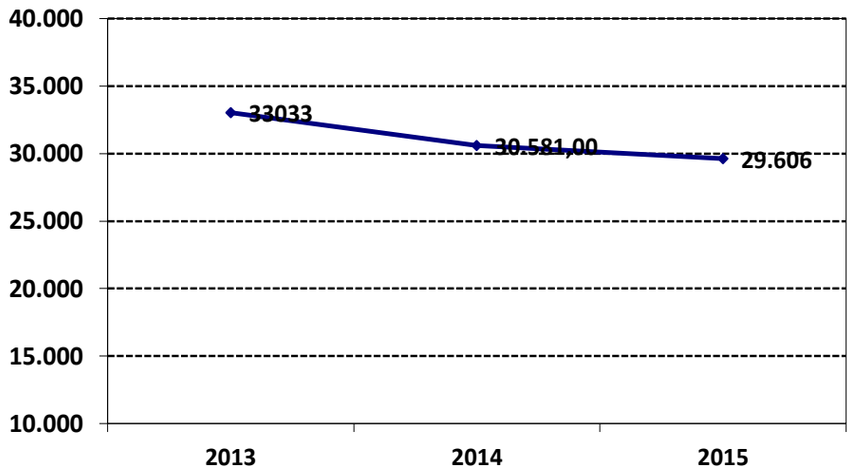

Sumber : BPS Kota Malang

Masih adanya pengangguran tersebut disebabkan oleh adanya pertambahan angkatan kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia; adanya PHK; masih rendahnya kualitas dan ketrampilan calon tenaga kerja; masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan kerja; dan kurangnya informasi pasar kerja.

Berdasarkan data dari Kota Malang dalam Angka Tahun 2013 hingga 2015, Lapangan Usaha Utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja secara berturut-turut adalah sektor Perdagangan, Keuangan dan Jasa-Jasa, serta Industri Pengolahan. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam sektor tersebut, memiliki korelasi positif dengan tingkat PDRB terbesar yang diraih oleh Kota Malang.

Tabel 2.25
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2013-2015

NO	LAPANGAN USAHA UTAMA	JUMLAH TENAGA KERJA		
		2013	2014	2015
1	Pertanian	4.996	7.778	7.990
2	Industri Pengolahan	85.284	87.912	53.922
3	Konstruksi	26.475	39.699	27.375
4	Perdagangan Besar, Eceran,Rumah Makan dan Hotel	137.501	116.432	129.256
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikas	25.478	19.679	21.744
6	Keuangan dan Jasa-jasa	114.531	119.946	135.960
7	Pertambangan, dan Penggalan, Listrik Gas dan Air	3.829	2.504	1.082
JUMLAH		398.094	393.050	377.329

Sumber : Kota Malang dalam Angka 2014-2016

3. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kota Malang, bahwa tingkat kemiskinan Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 4,87%, pada tahun 2014 sebesar 4,8%, pada tahun 2015 sebesar 4,6%, pada tahun 2016 sebesar 4,33%.

Sedangkan dilihat dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin, penerima Raskin di Kota Malang dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai berikut, pada Tahun 2009 sebesar 26.732 RTS, pada tahun 2010 sebanyak 25.816 RTS, pada Tahun 2011 sebanyak 20.359 RTS dan pada Tahun 2012 sebanyak 16.990 RTS.

Tabel 2.26.
Data Rumah Tangga Miskin Untuk Pemberian Raskin Tahun 2014 Berdasarkan Data PPLS 2011

NO.	KECAMATAN / KELURAHAN	PPLS 2008	PPLS 2011	PERUBAHAN DARI PPLS 2008 KE PPLS 2011 (+/-)
1	2	3	4	5
A	**Kec. Blimbing**	**5,072**	**4,197**	**(875)**
1	Jodipan	717	650	(67)
2	Polehan	577	571	(6)
3	Kesatrian	120	113	(7)
4	Bunulrejo	863	551	(312)
5	Purwantoro	707	563	(144)
6	Pandanwangi	640	431	(209)
7	Blimbing	290	244	(46)
8	Purwodadi	577	530	(47)
9	Polowijen	230	160	(70)

1	2	3	4	5
10	Arjosari	93	136	43
11	Balearjosari	258	248	(10)
B.	**Kec. Kedungkandang**	**6,183**	**4,869**	**(1,314)**
1	Arjowinangun	261	92	(169)
2	Tlogowaru	259	352	93
3	Wonokoyo	287	124	(163)
4	Bumiayu	326	359	33
5	Buring	526	521	(5)
6	Mergosono	954	828	(126)
7	Kotalama	1410	1,108	(302)
8	Kedungkandang	480	315	(165)
9	Sawojajar	285	321	36
10	Madyopuro	341	250	(91)
11	Lesanpuro	351	435	84
12	Cemorokandang	703	164	(539)

1	2	3	4	5
C.	**KEC. KLOJEN**	**3,536**	**2,561**	**(975)**
1	Kasin	345	427	82
2	Sukoharjo	448	150	(298)
3	Kiduldalem	246	175	(71)
4	Kauman	418	228	(190)
5	Bareng	445	244	(201)
6	Gadingkasri	173	161	(12)
7	Oro-oro Dowo	357	289	(68)
8	Klojen	213	176	(37)
9	Rampalcelaket	137	158	21
10	Samaan	486	369	(117)
11	Penanggungan	268	184	(84)
D	**KEC. SUKUN**	**7,295**	**5,112**	**(2,183)**
1	Kebonsari	367	161	(206)
2	Gadang	725	428	(297)
3	Ciptomulyo	524	104	(420)
4	Sukun	695	499	(196)
5	Bandungrejosari	839	890	51
6	Bakalan Krajan	475	165	(310)
7	Mulyorejo	594	304	(290)
8	Bandulan	407	305	(102)
1	2	3	4	5
9	Tanjungrejo	1,865	1,527	(338)
10	Pisangcandi	441	244	(197)
11	Karangbesuki	363	485	122

E.	**KEC.LOWOKWARU**	**4,646**	**3,620**	**(1,026)**
1	Merjosari	263	166	(97)
2	Dinoyo	373	160	(213)
3	Sumbersari	282	144	(138)
4	Ketawanggede	187	56	(131)
5	Jatimulyo	519	559	40
6	Lowokwaru	797	410	(387)
7	Tulusrejo	467	308	(159)
8	Mojolangu	479	326	(153)
9	Tunjungsekar	453	505	52
10	Tasikmadu	312	331	19
11	Tunggulwulung	243	420	177
12	Tlogomas	271	235	(36)
	KOTA MALANG	**26,732**	**20,359**	**(6,373)**

Sumber data : BKBPM Kota Malang

Gambar 2.12.
Grafik Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin
Kota Malang 2009 – 2012

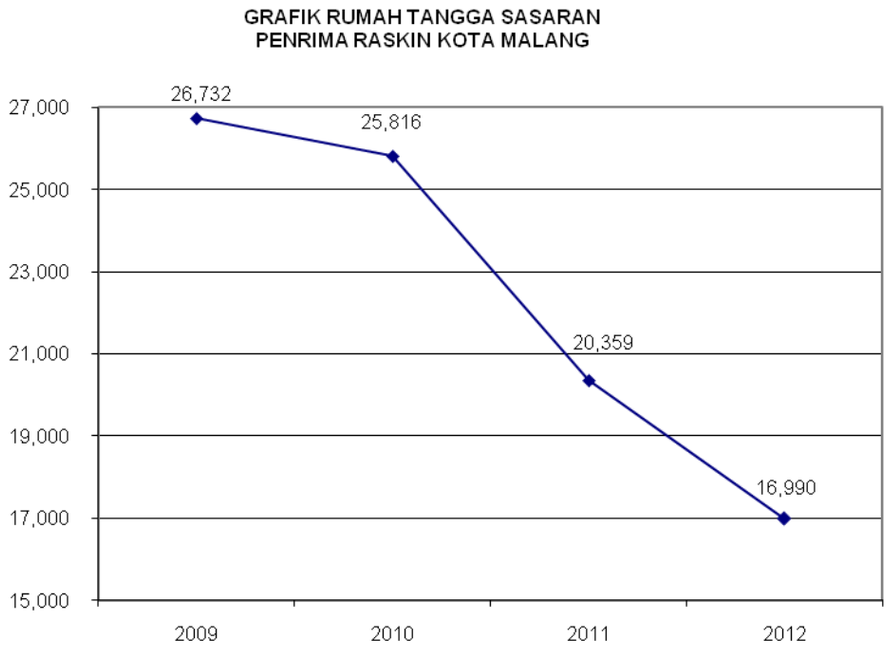

Sumber data : BKBPM Kota Malang

Masalah kemiskinan di perkotaan dikarenakan tidak saja menyangkut pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkait pula dengan masalah sosial lain yang bersifat pathologis seperti ketunaan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas dan tindak kekerasaan. Oleh karena itu kemiskinan di kota sering dikatakan miskin plus, yaitu selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang masalah sosial lain yang bersifat pathologis. Terbatasnya daya dukung lingkungan juga memicu munculnya kawasan kumuh yang merusak keindahan, ketertiban, mengganggu kesehatan serta rawan terjadi bencana banjir dan kebakaran.

Penilaian dan penentuan terhadap kawasan kumuh di Kota Malang ditentukan dari beberapa kriteria antara lain

permukiman yang memiliki legalitas resmi, sarana dan prasarana kurang lengkap/tidak memadai, kondisi bangunan yang kurang memadai (mayoritas temporer/semi, padat dan tidak teratur (karena pertumbuhannya tidak terencana), kesehatan lingkungan dan sanitasi yang rendah, permukiman miskin, permukiman kumuh ada di sekitar pusat kota, tingkat kepadatan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rata-rata rendah, tingkat pendapatan sebagian besar rendah (kondisi perekonomian rata-rata rendah), tingkat pengangguran tinggi dan tingkat kerawanan sosial tinggi. Dengan melihat beberapa kriteria mengakibatkan kurang baiknya kondisi hidup masyarakat yang bermukim didaerah tersebut, baik dari segi tampilan wilayah maupun bagi kesehatan lingkungan. Menurut hasil perhitungan dan analisa penentuan dan deliniasi kawasan permukiman kumuh Kota Malang, maka lokasi kawasan kumuh di Kota Malang antara lain :

Tabel 2.281
KAWASAN KUMUH DI KOTA MALANG

No.	Kecamatan	Kelurahan	SK.Kumuh (Ha)	Perhitungan Ulang (Ha)	Penanganan (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)	Tingkat Kumuh
1.	Sukun	Sukun	34,35	20,8	6,93	13,87	Sedang
		Ciptomulyo	62,6	21,14	21,14	0	Sedang
		Bandungrejosari	0,45	57,09	0	57,09	Sedang
		Tanjungrejosari	8,4	27,58	6,9	20,68	Sedang
		Bandulan	27	32,16	0	32,16	Sedang
2.	Klojen	Sukoharjo	39,2	19,32	0	19,32	Sedang
		Kiduldalem	26,02	9,39	0	9,39	Sedang
		Kauman	3,1	14,74	0	14,74	Sedang
		Kasin	48,2	20,26	0	20,26	Sedang
		Bareng	81,56	20,55	0	20,55	Sedang
		Gadingkasri	42,62	19,19	4,8	14,39	Sedang
		Penanggungan	53,01	16,36	8,18	8,18	Sedang
		Oro-Oro Dowo	22,4	13,91	0	13,91	Sedang
		Samaan	30,4	16,01	0	16,01	Sedang
3.	Lowokwaru	Tulusrejo	8	13,53	13,53	0	Sedang
		Lowokwaru	9,5	7,42	1,86	5,56	Sedang
		Jatimulyo	0,4	7,38	0	7,38	Sedang
		Dinoyo	0,66	17,31	4,33	12,98	Sedang
		Tlogomas	2,54	18,36	0	18,36	Sedang
		Merjosari	0,05	18,13	0	18,13	Sedang
		Sumbersari	10,2	9,92	0	9,92	Sedang
4.	Blimbing	Polehan	17,5	25,04	12,52	12,52	Sedang
		Jodipan	4,8	16,36	0	16,36	Sedang
		Pandanwangi	0,17	28,07	0	28,07	Sedang
		Balearjosari	2,27	23,77	7,92	15,85	Sedang
		Blimbing	0,25	17,73	0	17,73	Sedang
		Purwantoro	0,05	22,76	0	22,76	Sedang
5.	Kedungkandang	Mergosono	47,2	20,48	0	20,48	Sedang
		Kotalama	25,7	49,64	9,93	39,71	Sedang
6.	Lowokwaru	Tunggulwulung	0	4,38	0	4,38	Sedang
7.	Kedungkandang	Buring	0	2,91	0	2,91	Sedang
		Kedungkandang	0	0,48	0	0,48	Sedang
Luas Total			608,6	612,17	98,04	514,13	

Dari data kawasan kumuh tersebut diatas dapat dikelompokan berdasarkan tingkat kekumuhan sebagai berikut: kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat.

Adapun luas wilayah kumuh berat 166,2 Ha, kumuh sedang 374,47 Ha dan kumuh ringan 54,8 Ha, yang digambarkan dalam grafik dibawah ini;

Kawasan kumuh sangat berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Per 31 Desember 2016

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2	3	4	5
POPULASI DATA KELUARGA MISKIN				
1	Keluarga Fakir Miskin			37.025
POPULASI PMKS PRIORITAS				
1	Anak Jalanan	56	48	104
2	Tuna Susila	-	4	4
3	Pengemis	32	39	71
4	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	9	1	10
	JUMLAH PMKS PRIORITAS	97	92	189
POPULASI PMKS LAINNYA				
1	Anak Balita Terlantar	2	3	5
2	Anak Terlantar	-	-	-
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	20	5	25
4	Anak Dengan Kedisabilitasan	79	53	132
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	1	-	1
6	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	5	5
7	Lanjut Usia Terlantar	830	1349	2179
8	Penyandang Disabilitas (Orang dengan Kedisabilitasan (ODK) & Bekas Penderita Penyakit Kronis)	755	642	1397
9	Pemulung	95	25	120
10	Kelompok Minoritas	13	26	39
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	41	3	44

12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-
14	Korban Traffiking /Keluarga Rentan	-	1	1
15	Anak Korban Tindak Kekerasan atau yang diperlakukan salah	1	-	1
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-
17	Korban Bencana Alam	78	83	161
18	Korban Bencana Sosial	-	-	-
19	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	916	916
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-
21	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	-	-	-

Tabel 2.28
BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Blimbing	519
2	Klojen	709
3	Kedungkandang	837
4	Sukun	591
5	Lowokwaru	717

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.27 dan 2.28 menunjukkan bahwa antara jumlah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS dan yang mendapat bantuan (khususnya di sektor pendidikan) masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah dan sebaran program-program bantuan sosial di berbagai sektor secara tepat sasaran. Tabel 2.81 menunjukkan permukiman yang tergolong dalam kriteria kawasan kumuh hampir

merata disetiap Kecamatan, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki kriteria demikian.

4. Tingkat Kerawanan Sosial

Tingkat stabilitas sosial dan keamanan yang baik bagi masyarakat akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sebagainya. Kondisi aman dan tertib menjadi modal dasar untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Semakin aman dan tertib kondisi di suatu wilayah, maka aktivitas sosial dan ekonomi akan berkembang semakin baik, dan sebaliknya. Untuk mengetahui gambaran tingkat kerawanan sosial di Kota Malang, berikut ini ditampilkan data tindak kejahatan yang terjadi selama tahun 2009 hingga 2012.

Tabel 2.29
Jumlah Tindak Kejahatan di Kota Malang
Tahun 2013-2016

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Total	Tertangani	Total	Tertangani	Total	Tertangani	Total	Tertangani
a. Terhadap Fisik Manusia									
1	Pembunuhan	1	1	-	-	1	-	-	2
2	pemerkosaan	7	5	2	3	1	1	3	2
3	penganiayaan ringan	43	35	27	16	136	87	125	75
4	penganiayaan berat	98	42	96	81	40	37	57	24
5	penculikan	-	-	2	-	1	1	-	-
6	KDRT	-	-	82	46	86	20	85	27
b. Terhadap Hak Milik (Barang)									
1	kebakaran	5	5	11	9	39	14	16	4
2	pencurian dengan pemberatan	652	85	116	103	335	148	450	179
3	pencurian dengan kekerasan	60	20	16	15	20	22	72	40
4	pencurian kendaraan bermotor	1.503	88	379	158	871	176	1187	151
5	Curi Biasa			140	112	231	152	424	150
c. Jenis Kejahatan Lain									
1	narkotika	80	80	92	92	170	171	136	136

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Total	Tertangani	Total	Tertangani	Total	Tertangani	Total	Tertangani
2	uang palsu	-	-	-	-	2	3	1	1
3	lainnya	0	0	1126	821	1408	809	1685	925
JUMLAH		**2.490**	**402**	**2089**	**1456**	**3341**	**1641**	**4241**	**1716**

Sumber: Kepolisian Resort Malang Kota

Dari tabel tersebut tampak bahwa kejahatan yang paling banyak terjadi secara berturut-turut adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian dengan pemberatan dan masalah narkotika. Keunikan dari kasus ini adalah tidak semua kasus dilandasi oleh semata-mata masalah kesulitan ekonomi, namun seringkali kondisi mental psikologis yang sedang mengalami gangguan/permasalahan juga bisa menjadi pemicunya.

Terkait erat dengan semakin banyaknya kasus curanmor, semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor juga berakibat semakin naiknya kejadian kecelakaan sebagaimana ditampilkan pada data berikut :

Tabel 2.30
Jumlah Kecelakaan di Kota Malang
Tahun 2008-2011

Bulan	Tahun 2008					Tahun 2009				
	Jumlah Ke-celaka-an	Jumlah korban (jiwa)			Kerugian material (Rp)	Jumlah Ke-celaka-an	Jumlah korban (jiwa)			Kerugian material (Rp)
		Mati	Luka Berat	Luka ringan			Mati	Luka Berat	Luka ringan	
Januari	38	8	7	45	13.550.000	23	8	5	26	3.925.000
Februari	23	3	0	26	4.650.000	26	8	3	33	8.250.000
Maret	40	8	0	51	6.055.000	27	8	0	24	4.750.000
April	39	6	0	56	7.695.000	18	8	2	21	5.850.000
Mei	33	8	0	35	16.710.000	14	7	2	12	8.000.000
Juni	17	1	0	24	1.875.000	21	7	4	24	16.750.000
Juli	31	6	4	35	5.625.000	19	6	2	26	17.900.000
Agustus	30	8	1	43	9.250.000	33	5	2	53	18.150.000
September	35	9	1	40	7.820.000	27	8	2	31	7.950.000
Oktober	17	7	0	15	5.250.000	21	9	2	20	34.750.000
Nopember	20	4	0	25	5.000.000	13	4	1	18	8.650.000
Desember	26	12	3	19	8.350.000	17	6	0	17	4.750.000
	349	**80**	**16**	**414**	**91.830.000**	**259**	**84**	**25**	**305**	**139.675.000**

Bulan	Tahun 2010					Tahun 2011				
	Jumlah Kecelakaan	Jumlah korban (jiwa)			Kerugian material (Rp)	Jumlah Kecelakaan	Jumlah korban (jiwa)			Kerugian material (Rp)
		Mati	Luka Berat	Luka ringan			Mati	Luka Berat	Luka ringan	
Januari	15	3	0	18	5.450.000	28	11	29	3	
Februari	9	1	1	15	13.100.000	25	7	26	2	
Maret	17	9	4	16	4.700.000	45	10	56	12	
April	18	8	3	11	3.950.000	34	7	36	5	
Mei	15	11	2	9	3.750.000	29	8	26	2	
Juni	18	6	7	18	7.550.000	18	13	18	0	
Juli	10	7	2	8	4.200.000	23	4	26	1	
Agustus	18	6	4	16	24.500.000	28	11	36	1	
September	19	8	5	17	25.950.000	23	7	29	0	
Oktober	20	7	3	19	2.950.000	32	8	40	1	
Nopember	17	7	6	12	6.750.000	15	7	19	0	
Desember	22	3	4	23	16.050.000					
	198	**76**	**41**	**182**	**118.900.000**	**300**	**93**	**341**	**27**	**0**

Sumber: Kepolisian Resort Malang Kota

Tinjauan dari kondisi ketertiban masyarakat, dapat dilihat dari jumlah pelanggaran hukum dan pelanggaran ringan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Jumlah Pelanggaran Ringan di Kota Malang
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Pelanggaran				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pelanggaran Bangunan	433	355	-	-	-
2	Pelanggaran Ijin Gangguan	675	426	182	297	277
3	Pelanggaran Reklame	3.017	50	19	27	15
4	Pelanggaran Pondokan	51	20	-	1	1
5	Pelanggaran Usaha Pariwisata	6	0	-	-	-
6	Anjal	8	0	-	-	-
7	Gepeng	40	0	-	-	-
8	PKL	352	63	-	-	-
9	PSK	30	8	-	-	-
10	Pelanggaran Pertamanan	6	2	-	-	-
11	Pelanggaran Ketertiban	6	0	-	-	60
	J U M L AH	**4.624**	**924**	**201**	**325**	**353**

5. Produk Hukum Daerah

Produk hukum tingkat daerah sangat diperlukan terutama pada era otonomi daerah saat ini. Penerapan aturan-aturan hukum dari tingkat pusat hingga ke daerah memerlukan kejelasan dan penyesuaian berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Dalam rangka menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, maka pelayanan terhadap produk hukum yang jelas dan tegas akan menjadi indikator utama agar dapat melaksanakan suatu aturan yang sudah titetapkan di tingkat pusat. Pelayanan pemerintahan di bidang

hukum dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang diselesaikan dan jumlah perwal yang diselesaikan. Dari tabel berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah perda dan perwal selama tahun 2007-2013.

Tabel 2.32
Jumlah Perda dan Peraturan Walikota yang diselesaikan
Tahun 2007 – 2013

No.	URAIAN	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Perda	17	20	11	16	11	9	11
2	Jumlah Perwal	53	97	58	50	54	90	45

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Malang

C. Seni Budaya dan Olahraga

Kota Malang merupakan kota yang cukup mempunyai andil dalam pengembangan seni budaya dan olahraga di tingkat nasional. Dengan keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kota Malang baik berupa grup musik, tari-tarian, lagu dan kesenian khas daerah lainnya, maka hal ini menunjukkan tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kota Malang juga cukup tinggi.

Adapun dalam bidang olahraga, masyarakat Kota Malang menaruh apresiasi yang tinggi pada beberapa cabang olahraga. Bahkan terdapat satu cabang olahraga yang sangat besar gaungnya di kalangan masyarakat dari lapisan masyarakat bawah hingga masyarakat kelas atas. Hal ini kemungkinan mengikuti trend atau pola umum yang terjadi pada bagian wilayah yang lain, yaitu masyarakat Kota Malang menaruh

dukungan dan harapan yang sangat besar pada cabang Sepak Bola dengan tim kesayangan mereka yaitu AREMA.

Akan tetapi, perhatian dan pembinaan pemerintah Kota Malang terhadap bidang budaya dan olahraga ini memang masih perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak terhenti atau bahkan mengalami kemunduran. Melalui dinas teknis yang membidangi, bimbingan dan perhatian tersebut dapat ditingkatkan porsinya agar dapat mendukung perkembangan masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat disekitarnya.

Kebutuhan terhadap fasilitas dan *event* seni budaya dan olahraga ini pada ujungnya akan menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Adanya berbagai pertunjukan yang digelar dalam rangka peringatan budaya, festival maupun kegiatan pertandingan olahraga dipastikan akan menarik minat masyarakat secara umum untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Perhatian pemerintah dalam hal seni budaya dan olahraga ini pada masa mendatang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, maupun meningkatkan kedamaian hati sehingga akan menciptakan kesejahteraan hidup.

Tabel 2.33
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Malang
Tahun 2009 s.d 2013

No	Capaian Pembangunan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	35	37	39	42	45
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	1	1	1	2	2
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	138	140	141	142	145
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.34
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Malang per Kecamatan
Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk		Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	
	Klub		Gedung Olahraga	
	Jumlah	Per 10000 penduduk	Jumlah	Per 10000 Penduduk
Blimbing	32	0,390128291		0
Klojen	36	0,438894328	2	0,024383018
Lowokwaru	30	0,365745273		0
Sukun	36	0,438894328		0
Kedungkandang	11	0,1341066	1	0,012191509
Total	145	1,76776882	4	0,048766036

II.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pembangunan Kota Malang yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum khususnya urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan dengan lebih sederhana dan cepat sehingga dihasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada masyarakat umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam arti luas. Fungsi pelayanan umum pada hakekatnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Peningkatan fungsi pelayanan umum perlu ditunjang dengan kemampuan profesionalisme aparat, pemanfaatan teknologi infomasi serta pentingnya kesadaran semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Kelengkapan pranata hukum (Peraturan Daerah-Peraturan Daerah) termasuk produk-produk perencanaan pembangunan (RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, dan lain-lain), yang secara substantif mampu memberikan arah pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan, sangat diperlukan.

Pemerintah Kota Malang berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Perkembangan pembangunan yang telah dicapai saat ini telah mengindikasikan adanya peningkatan pelayanan umum terutama dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana dasar bidang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Jenis pelayanan umum yang sudah dicapai selama ini akan diuraikan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

A. Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar yang dapat disediakan bagi masyarakat antara lain meliputi:

1. Pelayanan Bidang Pendidikan

Salah satu ikon Kota Malang adalah kota pendidikan.Hal ini tentu bukan hanya karena Kota Malang mempunyai sejumlah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang cukup banyak, namun juga karena berkembangnya *learning society.* Ditambah dengan adanya berbagai lembaga kursus, menjadi daya tarik bagi bagi calon mahasiswa dari luar kota maupun dari luar propinsi bahkan luar negeri untuk menempuh studi di Kota Malang.

Selain adanya perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkembang di Kota Malang, ketersediaan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah atas merupakan potensi yang menjadi daya tarik bagi warga di luar Kota Malang untuk menempuh pendidikan di Kota Malang.

Dari segi kualitas penduduk, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar masih didominasi oleh pendidikan dasar yaitu sejak SD hingga SMP. Penduduk yang sudah menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi sudah cukup tinggi pada tahun 2008 namun cenderung turun jumlahnya sampai pada tahun 2010, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2011. Secara lebih rinci, dapat dibaca pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Persentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2012 –2016

TINGKAT PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
Tidak/Belum Tamat SD/MI	9,94	13,19	12,22	7,05	6,97
SD/MI	17,02	19,24	14,84	18,87	28,48
SMP/MTs/SMPK	17,47	20,25	18,26	20,11	12,30
SMU/MA	29,93	21,44	24,59	27,64	26,22
SMK	8,24	11,31	12,48	8,95	10,03
Perguruan Tinggi	17,39	14,57	17,61	17,38	16,00
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2012-2016.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan. APK untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perjenjang Pendidikan
Tahun 2012 - 2016

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah APK				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD	95	107,88	81,38	95,99	95,86
2	SMP	106	77	89,41	76,83	85,13
3	SLTA	131	136	83,54	117,39	84,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Adapun angka partisipasi murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan

jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2013-2018).

Tabel 2.37
Data Angka Partisipasi Murni (APM) Perjenjang Pendidikan
Tahun 2012 - 2016

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah APM				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD	95	94,73	82,56	85,87	82,79
2	SMP	106	57,22	68,90	58,52	62,99
4	SLTA	131	99,16	69,99	90,89	58,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Secara umum dalam lima tahun terakhir 2012-2016, terjadi peningkatan maupun penurunan APM di Kota Malang untuk jenjang pendidikan SLTA. Pada jenjang pendidikan SD dan SLTP, angka APM berfluktuasi naik turun pada tahun 2012 hingga 2016, Sementara APM SLTA Kota Malang juga berfluktuasi naik turun mulai tahun 2012-2016.

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Malang
Tahun 2009 s.d 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	82.111	98.913	87.100	87.577	86.654
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	72.186	72.186	75.122	80.520	80.520
1.3.	APS SD/MI	581,38	690,07	629,51	590,51	582,05
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	44.143	48.053	42.442	42.028	45.538
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40.794	40.794	38.245	39.802	39.802
2.3.	APS SMP/MTs	569,59	609,70	654,92	616,27	662,80

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Blimbing	17,688	18,073	97.87	8,858	8,702	101.79
2	Kedungkandang	17,963	19,994	89.84	6,723	9,634	69.78
3	Klojen	16,582	8,823	187.94	13,259	4,638	285.88
4	Lowokwaru	16,475	14,894	110.62	10,222	7,535	135.66
5	Sukun	17,946	18,736	95.78	6,476	9,293	69.69
	Jumlah	86,654	80,520	582	45,538	39,802	663

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kota Malang
Tahun 2009 s.d 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	312	325	316	320	319
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	72.186	72.186	75.122	80.520	80.520
1.3.	Rasio	1 : 231	1 : 206	1 : 238	1 : 237	1 : 252
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	103	115	115	118	121
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40.794	40.794	38.245	39.802	39.802

2.3.	Rasio	1 : 396	1 : 397	1 : 333	1 : 327	1 : 329

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar Kota Malang
Tahun 2013

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Blimbing	62	18,073	97.87	22	8,702	101.79
2	Kedungkandang	77	19,994	89.84	26	9,634	69.78
3	Klojen	48	8,823	187.94	30	4,638	285.88
4	Lowokwaru	62	14,894	110.62	25	7,535	135.66
5	Sukun	70	18,736	95.78	18	9,293	69.69
	Jumlah	319	80,520	582	121	39,802	663

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.42
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Malang
Tahun 2009 s.d 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	4,556	4,613	4,688	4,661	4,598
1.2.	Jumlah Murid	86,450	78,423	87,389	87,065	87,130
1.3.	Rasio	1 : 19	1 : 17	1 : 19	1 : 19	1 : 19
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2,903	2,932	3,030	3,316	2,963
2.2.	Jumlah Murid	39,240	39,223	39,580	44,287	41,674
2.3.	Rasio	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.43
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Malang
Tahun 2013

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Blimbing	954	18,040	1 : 19	475	7,252	1 : 15
2	Kedungkandang	970	18,756	1 : 19	596	6,886	1 : 12
3	Klojen	799	15,023	1 : 19	846	13,058	1 : 15
4	Lowokwaru	918	16,526	1 : 18	622	8,421	1 : 14
5	Sukun	957	18,785	1 : 20	424	6,057	1 : 14
	Jumlah	4,598	87,130	1 : 19	2963	41674	1 : 14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.44
Data Perguruan Tinggi dan Lembaga Kursus setingkat D-1 Tahun 2009 – 2013

No	JENIS PENDIDIKAN	2009		2010		2011		2012		2013	
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	NEGERI	SWASTA
1	Universitas	3	12	3	3	12	3	12	3	12	3
2	Politeknik/Akademi Negeri/D-3	3	8	3	3	8	3	8	3	8	3
3	Sekolah Tinggi Swasta	-	20	-	-	20	-	20	-	20	-
4	Institut	-	4	-	-	4	-	4	-	4	-
5	Lembaga Kursus setingkat D-1	-	155	-	-	155	-	155	-	155	-
JUMLAH		199	6	199	6	6	199	6	199	6	199

Sumber : Kota Malang Dalam Angka Tahun 2009-2013

Tabel 2.45
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Perjenjang Pendidikan Tahun 2009– 2013

No	Tk. Pendidikan	2009			2010			2011			2012			2013		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	TK	295	19.515	1.320	299	19.101	1.443	311	19.579	1.427	320	19.422	1.480	329	20.030	1.508
2	SD	265	74.589	3.816	265	75.964	3.934	267	76.832	4.086	267	77.373	4.338	271	76.857	4.311
3	MI	48	10.009	572	47	10.223	609	48	9.965	598	49	11.673	605	49	10.208	669
4	SMP	90	34.737	2.450	89	35.080	2.398	89	35.124	2.500	89	34.684	2.499	92	35.087	2.487
5	MTs	24	4.245	462	24	4.160	505	26	4.099	497	26	4.173	504	26	4.511	530
6	SMU	50	16.493	1.685	46	15.347	1.543	43	16.150	1.555	42	16.712	1.525	44	17.202	1.562
7	MA	13	2.369	316	13	2.365	353	13	2.485	314	14	2.699	362	15	2.691	360
8	SMK	16	24.771	1.691	46	28.072	1.875	45	29.099	1.993	46	29.735	2.125	49	30.648	2.260

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel 2.46
Jumlah Guru, Murid dan Rasio Kota Malang 2009-2013

No	Tk. Pendidikan	2009			2010			2011			2012			2013		
		Guru	Murid	Rasio	Guru	Murid	Rasio	Guru	Murid	Rasio	Guru	Murid	Rasio	Guru	Murid	Rasio
1	PAUD	1.320	19.515	15	1.443	19.101	13	1.427	19.579	14	1.480	19.422	13	1.508	20.030	13
2	SD/MI	4.388	84.598	19	4.543	86.187	19	4.684	86.797	19	4.943	89.046	18	4.980	87.065	17
3	SMP/MTs	2.912	38.982	13	2.903	39.240	14	2.997	39.223	13	3.003	38.857	13	3.017	39.598	13
4	SMA/SMK/MA	3.692	43.633	12	3.771	45.784	12	3.862	47.734	12	4.012	49.146	12	4.182	50.541	12
JUMLAH		12.312	186.728		12.660	190.312		12.970	193.333		13.438	196.471		13.687	197.234	

Berdasarkan tabel diatas, bahwa terdapat kesenjangan pemerataan guru sekolah, dimana jumlah guru SD per kelas masih tersedia 1 guru per kelas, sedangkan jumlah guru SMP per kelas masih tersedia 2 guru per kelas, jumlah guru SMA per kelas masih tersedia 2 orang guru per kelas.

Sedangkan rasio guru per 100 murid, pada tiap-tiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. SD :

   Tersedia 5 guru SD tiap 100 murid SD dengan jumlah seluruh guru SD sebanyak 4.903 guru dan jumlah seluruh murid SD sebanyak 86.864 murid.

b. SMP :

   Tersedia 7 guru SMP tiap 100 murid SMP dengan jumlah seluruh guru SMP sebanyak 3.054 guru dan jumlah seluruh murid SMP sebanyak 41.674 murid.

c. SMA :

   Tersedia 9 guru SMA tiap 100 murid SMA dengan jumlah seluruh guru SMA sebanyak 1.916 guru dan jumlah seluruh murid SMA sebanyak 20.040 murid.

d. SMK :

   Tersedia 7 guru SMK tiap 100 murid SMK dengan jumlah seluruh guru SMK sebanyak 2.301 guru dan jumlah seluruh murid SMK sebanyak 31.523

murid.

2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata, tercapai :

   a. rata-rata guru SD per kelas :

      rata-rata jumlah guru SD per kelas adalah 1,7 guru SD dengan jumlah seluruh guru SD adalah 4.903 guru dan jumlah kelas SD adalah 2.826 kelas.

   b. rata-rata guru SMP per kelas :

      rata-rata jumlah guru SMP per kelas adalah 2,5 guru SMP dengan jumlah seluruh guru SMP adalah 3.054 guru dan jumlah kelas SMP adalah 1.224 kelas.

   c. rata-rata guru SMA per kelas :

      rata-rata jumlah guru SMA per kelas adalah 2,7 guru SMA dengan jumlah seluruh guru SMA adalah 1.916 guru dan jumlah kelas SMA adalah 712 kelas.

   d. rata-rata guru SMK per kelas :

      rata-rata jumlah guru SMK per kelas adalah 3,5 guru SMK dengan jumlah seluruh guru SMK adalah 2.301 guru dan jumlah kelas SMK adalah 653 kelas.

2. Pelayanan Bidang Kesehatan

Untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk dengan tujuan agar mengelola jumlah Sumber Daya Manusia dengan lebih baik adalah dengan melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Jumlah peserta KB aktif per kecamatan tersaji pada berikut.

Tabel 2.47
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Penduduk Tahun 2012 – 2015

NO	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	128,335	128.338	129.546	128.477
2	Peserta KB Aktif	97,508	94.250	100.218	99.021
3	Peserta KB Baru	18,609	10.619		
	Akseptor KB	**108.310**	**109.310**		

Sumber : BKBPM Kota Malang

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) di atas 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap program KB cukup tinggi.

Untuk menunjang kesehatan masyarakat secara umum, diperlukan juga kesehatan sanitasi masyarakat yang baik. Perkembangan prasarana dan sarana kesehatan selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada uraian statistik berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Sarana Kesehatan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rumah Sakit Umum	9	9	10	10	9	9
2	Rumah Sakit Khusus Bedah	1	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Anak dan Bersalin	2	2	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Bersalin	4	4	6	2	2	2
5	Rumah Bersalin	10	10	6	1	1	1
6	Puskesmas	15	15	15	15	15	15
7	Puskesmas Pembantu	33	33	33	33	34	34
8	Puskesmas Keliling	15	15	15	15	15	15
9	BP di luar Rumah Sakit (Klinik)	62	62	69	71	50	50
10	BP Gigi di Luar Rumah Sakit (Klinik Gigi)	20	20	20	1	1	1
11	Klinik KB	49	49	49	-	-	-
12	Apotik	145	152	152	161	168	206
13	Rumah Obat (Toko Obat)	10	10	10	4	4	4
14	Laboratorium Medis	21	22	22	26	14	15

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2008-2013.

Tabel 2.49.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan
Tahun 2013

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kedungkandang	**31**	**317**	**39**	**387**
Puskesmas Kedungkandang	2	14	10	26
Puskesmas Gribig	3	11	6	20
Puskesmas Arjowinangun	4	7	6	17
RS. Panti Nirmala	22	285	17	324

Sukun	**60**	**370**	**80**	**510**
Puskesmas Janti	4	10	5	19
Puskesmas Ciptomulyo	3	7	6	16
Puskesmas Mulyorejo	4	8	7	19
RST Dr Soepraoen	49	345	62	456
Klojen	**573**	**1678**	**188**	**2439**
Puskesmas Arjuno	4	7	6	17
Puskesmas Bareng	4	8	6	18
Puskesmas Rampal Celaket	3	7	5	15
RS Lavalet	96	164	12	272
RS Panti Waluyo	94	252	10	356
RS Dr Syaiful Anwar	299	1080	140	1519
RS Aisyiyah	73	160	9	242
Blimbing	**11**	**26**	**20**	**57**
Puskesmas Kendalkerep	4	14	8	26
Puskesmas Cisadea	4	4	5	13
PuskesmasPandanwangi	3	8	7	18
Lowokwaru	**12**	**32**	**26**	**70**
Puskesmas Dinoyo	4	13	10	27
Puskesmas Kendalsari	5	12	9	26
Puskesmas Mojolangu	3	7	7	17
RS Lain	473	648	351	1472
Institusi Diknakes/Diklat*	0	0	0	0
Sarana Kesehatan Lain**	5	16	8	29
Jumlah/*Total*	1165	3087	712	4964

Tabel 2.50.
Jumlah Tenaga Kesehatan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dokter	626	425	457	413	413	350
2	Perawat	1.509	3.752	1721	1915	1915	1935
3	Bidan	207	575	342	435	435	487

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Malang

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan tahun 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
1	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	0
2	Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS	13%
3	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	0,28
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	1,09
5	Persentase rumah sakit yang telah terakreditasi	42%
		10 RS dari 24 RS
6	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0.09
		1 dokter untuk 900 penduduk (74 dokter)
7	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,39
8	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	46,83
9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6,03
10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,07

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
11	Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk (bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitasi, teknis medis, keterampilan psikiater)	30,03
12	Persentase persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%
13	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100%
14	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik	60%
15	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%
16	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	100%
17	Persentase balita gizi buruk	0,45%
18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100%
20	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	98,83%
21	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	3,90%
22	Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif	15,72%
23	Penderita DBD yang ditangani	100%
24	Penemuan Penderita Diare	6,51
25	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam	100%
26	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	98.25% (56 kelurahan dari 57)
27	Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	0
28	Jumlah rujukan penderita HIV AIDS di Puskesmas	0
29	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan	0
30	Jumlah masyarakat yang terlayani oleh bakti sosial perguruan tinggi	0

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
31	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%
32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55,88%
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	55,88%
34	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%
35	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	73.25%
		(94.250/129.038)
36	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2
37	Persentase akseptor KB	81%
38	Cakupan peserta KB Aktif	73,25%
39	Persentase peserta KB Aktif	81%
40	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Kel. Sejahtera I	55454
41	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun 3,5 % pada 2014	1,02%
42	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif 65 % pada 2014	75,74%
43	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada 2014	13,24%
44	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 % pada 2014	70,00%
45	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% pada 2014	81,93%
46	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	1:02
47	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBL) 1 Petugas di setiap Kelurahan	1:01

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
48	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%
49	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100%
50	Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja	0
51	Jumlah sosialisasi KIE	33180 kali
		(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)
52	Persentase Ketersediaan alat kontrasepsi	100%
		(16.169/16.169)
53	Jumlah dan jenis layanan KB	6
54	Jumlah pria ikut KB	288
55	Jumlah Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)	57
56	Adanya Pengkatagorian Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)	Ada
57	Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB	1106
58	Rasio posyandu per satuan balita (1 : 80 balita)	1 : 103
59	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%
60	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70%
61	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%
62	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	89%
63	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	54,89%
64	Cakupan kunjungan bayi.	68,29
65	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immuniza-tion (UCI).	47,37%
66	Cakupan pelayanan anak balita.	54,03%
67	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%
68	Jumlah kader posyandu	5904
69	Persentase kader posyandu aktif	100%
		(5904/5904)
71	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	81,75%

B. Pelayanan Penunjang

Jenis-jenis pelayanan penunjang yang dapat disediakan bagi masyarakat antara lain meliputi:

1. Pelayanan Infrastruktur Komunikasi

   Infrastruktur komunikasi yang ada di Kota Malang dapat diketahui dari tampilan data-data berikut yaitu :

Tabel 2.52
Perkembangan Pengiriman Berita Melalui Kantor Pos Kota Malang

Bulan	Tahun 2008						Tahun 2009					
	Surat Biasa		Kilat Khusus		Paket Pos		Surat Biasa		Kilat Khusus		Paket Pos	
	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima
Jan	112.299	93.821	71.310	81.089	7.688	2.195	33.693	56.566	79.184	94.821	3.312	1.948
Feb	51.569	54.355	65.719	86.798	7.453	2.512	49.422	47.332	97.842	104.769	2.764	1.924
Mar	39.383	57.808	67.740	53.780	4.536	1.994	40.867	44.819	86.092	99.553	2.908	1.816
Apr	48.144	57.962	75.898	65.378	4.169	2.015	33.004	43.721	76.427	94.189	2.783	1.771
Mei	41.016	49.671	73.903	88.113	4.084	2.247	29.041	44.527	67.563	99.762	3.864	1.873
Jun	49.972	49.119	75.668	83.894	4.423	2.736	26.229	45.964	91.010	102.733	6.094	1.926
Jul	51.493	87.004	81.425	58.236	4.886	2.706	25.754	44.114	94.348	102.133	2.803	2.386
Ags	64.583	79.975	75.897	56.410	17.156	2.493	29.433	45.294	81.751	102.146	3.231	2.203
Sep	75.854	105.157	71.851	53.416	5.412	3.986	51.363	42.532	88.178	95.319	2.816	1.801
Okt	38.223	75.424	71.366	49.743	3.748	2.086	27.528	47.940	86.657	111.315	3.147	1.704
Nop	62.131	86.669	74.080	59.220	4.417	2.607	28.314	42.630	81.858	99.132	2.690	1.681
Des	65.208	87.045	72.587	50.695	3.723	2.359	58.034	49.206	92.012	104.671	3.114	1.692
JML	**699.875**	**884.010**	**877.444**	**786.772**	**71.695**	**29.936**	**432.682**	**554.645**	**1.022.922**	**1.210.543**	**39.526**	**22.725**

Lanjutan ....

Bulan	Tahun 2010						Tahun 2011					
	Surat Biasa		Kilat Khusus		Paket Pos		Surat Biasa		Kilat Khusus		Paket Pos	
	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima
Jan	40.696	90.766	33.738	83.700	3.283	2.787	40.790	93.146	0	0	3.283	2.787
Feb	45.937	97.091	31.375	85.104	3.039	3.028	46.207	93.676	0	0	3.039	3.028
Mar	55.398	89.544	53.438	85.992	4.119	3.072	45.371	96.998	0	0	4.119	3.072
Apr	54.955	88.656	44.890	83.186	3.572	2.857	40.016	286.533	0	0	3.572	2.857
Mei	40.932	80.590	39.789	78.193	3.944	3.162	32.166	345.971	0	0	3.944	3.162
Jun	44.656	69.674	43.640	79.801	5.218	3.759	35.273	88.201	0	0	5.218	3.759
Jul	49.858	67.617	40.474	79.756	5.383	4.094	41.669	28.258	0	0	5.383	4.094
Ags	60.990	65.348	33.708	81.601	6.046	5.377	56.791	40.242	0	0	6.046	5.377
Sep	54.998	63.126	39.017	81.213	4.891	4.100	17.290	49.500	0	0	4.891	4.100
Okt	38.832	61.859	44.431	90.359	5.208	3.544	21.039	3.036	0	0	5.208	3.644
Nop	38.504	60.170	39.673	83.698	5.207	3.946	19.044	36.829	0	0	5.207	3.946
Des	52.138	58.848	40.282	92.740	5.324	4.184	31.259	45.264	0	0	5.324	4.184
JML	**577.894**	**893.289**	**484.455**	**1.005.343**	**55.234**	**43.910**	**426.915**	**1.207.654**	**0**	**0**	**55.234**	**44.010**

2. Pelayanan Infrastruktur Energi

Ketersediaan Infrastruktur Energi yang ada di Kota Malang dapat diketahui dari perkembangan pelanggan listrik selama tahun 2008-2013 sebagaimana uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kategori
Kota Malang

NO	URAIAN		TAHUN					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sosial	Pasca Bayar	*)	*)	17,057	17,008	16,926	16,781
		Pra Bayar	-	-	107	107	2,033	3,500
2	Rumah Tangga	Pasca Bayar	655.101	669.463	693,557	695,086	685,824	672,529
		Pra Bayar	-	-	6,699	42,801	100,926	175,767
3	Publik	Pasca Bayar	18.336	18.867	2,649	3,669	3,969	4,304
		Pra Bayar	-	-	3	49	108	174
4	Bisnis	Pasca Bayar	26.421	27.313	28,366	27,654	27,061	25,955
		Pra Bayar	-	-	399	1,795	3,969	7,163
5	Industri	Pasca Bayar	1.314	1.323	1,346	1,358	1,396	1,398
		Pra Bayar	-	-	-	3	24	55

Sumber Data : PLN APJ Malang

Tabel 2.54
Jumlah Listrik Terjual Menurut Kategori (KwH)
Kota Malang

NO	URAIAN		TAHUN					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sosial	Pasca Bayar	*)	*)	41,111,110	41,111,110	49,831,050	54,050,300
		Pra Bayar	-	-	102,100	864,550	2,076,100	3,569,150
2	Rumah Tangga	Pasca Bayar	494.882.450	513.872.350	541,145,600	541,145,600	545,575,850	538,188,000
		Pra Bayar	-	-	6,280,550	39,943,600	90,432,000	155,340,200
3	Publik	Pasca Bayar	60.467.490	62.907.850	28,422,060	28,422,060	44,180,560	49,204,460
		Pra Bayar	-	-	4,800	86,400	228,150	353,800
4	Bisnis	Pasca Bayar	113.696.800	128.779.250	142,103,950	142,103,950	153,498,100	160,616,400
		Pra Bayar	-	-	662,450	3,305,050	9,137,350	21,063,750

NO	URAIAN		TAHUN					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	Industri	Pasca Bayar	130.645.350	141.252.550	153,973,550	153,973,550	184,439,450	195,978,700
		Pra Bayar	-	-	-	6,600	160,800	426,450

Sumber Data : PLN APJ Malang

Adapun perkembangan prasarana dan sarana air bersih selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada uraian statistik berikut ini.

Tabel 2.55
Produksi dan Konsumsi serta Jumlah Pelanggan PDAM

NO	URAIAN	TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi (m3/detik)	42.074.109	37.821.026	39.618.144	39.939.532	39.387.525	40.402.172
2	Konsumsi (m3/detik)	23.367.064	23.145.343	23.052.028	22.058.268	22.852.234	25.083.504
3	Pelanggan	86.840	90,918	92.970	99.307	106.578	116.184

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2008-2013

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan sebagai berikut :

1. Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan, tercapai 98,56%, yang diukur dari realisasi 83,78% atau 184.676 Jumlah bangunan ber-IMB per 220.431 jumlah bangunan
2. Rata-rata Lama proses perijinan, diukur dari realisasi Rata-rata lama proses perijinan 4 hari untuk bangunan lantai 2 ke bawah, 7 hari untuk bangunan lantai 2 ke atas dibanding target 4 hari untuk bangunan lantai 2 ke bawah, 7 hari untuk bangunan lantai 2 ke atas.
3. Persentase Rumah yang memiliki IMB, yang diukur dari realisasi 69,78% atau 153.815 Jumlah rumah ber-IMB per 220.431 jumlah rumah seluruhnya

4. Persentase Kepemilikan KTP, tercapai 94% yang diukur dari realisasi 518.182 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP per 565.604 penduduk wajib KTP.
5. Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, diukur dari realisasi adanya KTP Nasional berbasis NIK.
6. Jumlah uji kir angkutan umum, diukur dari realisasi Jumlah uji kir angkutan umum sebanyak 1 fasilitas.
7. Jumlah terminal bis, diukur dari realisasi jumlah terminal bis sebanyak 3 terminal
8. Jumlah angkutan darat (bermotor), diukur dari realisasi jumlah angkutan darat sebanyak 516.712 angkutan.

II.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Tingkat pencapaian pembangunan yang diraih oleh Kota Malang memang sudah cukup bagus. Namun secara relatif, tingkat pencapaian ini tidak dapat diukur hanya dengan pengertian bagus dan tidak saja, melainkan harus dinyatakan dalam ukuran kuantitatif sehingga dapat dilihat secara nyata tingkat pencapaian pembangunannya untuk selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur daya saing daerah secara relatif terhadap daerah yang lain baik secara dalam lingkup kawasan Malang Raya,tingkat regional Jawa Timur, maupun tingkat nasional.

Untuk lebih memahami tingkat daya saing daerah, maka berikut ini akan ditampilkan tinjauan mengenai kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kota Malang.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Gambaran mengenai tingkat kemampuan ekonomi daerah untuk Kota Malang dapat diketahui dari tingkat pendapatan asli daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.56.
Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2009 – 2013

NO	Uraian	Tahun Anggaran					Pertum-buhan Rata-Rata (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**798,840,456,272.21**	**988,288,099,524.78**	**1,102,655,771,801.76**	**1,356,369,664,977.83**	**1.524.846.569.429,26**	**16.71**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**92,476,383,151.21**	**113,490,265,808.78**	**185,818,563,982.76**	**230,295,806,325.83**	**317.772.985.191.26**	**34.46**
1.1.1	PAJAK DAERAH	49,467,066,282.96	60,151,082,871.20	125,332,979,877.83	159,124,119,792.89	238.499.748.161,57	**46.76**
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	23,533,733,096.00	27,342,779,004.00	31,217,425,090.00	35,596,756,524.00	38.460.785.953,00	**13.04**
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11,623,194,754.85	13,255,093,254.18	13,313,185,918.32	14,350,056,538.28	16.571.050.907,26	**17.64**
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	7,852,389,017.40	12,741,310,679.40	15,954,973,096.61	21,224,873,470.66	24.241.400.169,43	**36.72**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**599,009,597,671.00**	**626,023,144,999.00**	**646,871,523,364.00**	**817,671,023,179.00**	**863.736.860.965,00**	**9.89**
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	106,673,389,671.00	123,635,357,999.00	97,800,736,364.00	46,100,612,909.00	86.734.213.965,00	**6.08**
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	471,739,208,000.00	494,910,987,000.00	533,491,887,000.00	665,927,808,000.00	746.686.937.000,00	**12.41**
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	20,597,000,000.00	7,476,800,000.00	15,578,900,000.00	21,897,310,000.00	30.315.710.000,00	**30.92**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**107,354,475,450.00**	**248,774,688,717.00**	**269,965,684,455.00**	**308,402,835,473.00**	**343.259.284.780,00**	**39.38**
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	-	-	11,000,000,000.00	-	17.756.000.000,00	
1.3.2	DANA DARURAT	-	-	-	-	0,00	
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	66,177,847,450.00	89,300,667,042.00	105,083,231,095.00	101,923,440,473.00	109.145.826.273,00	**12.72**
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	9,501,750,000.00	124,407,431,675.00	148,927,460,600.00	154,326,955,000.00	191.569.752.000,00	**309.93**
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	31,674,878,000.00	35,066,590,000.00	4,954,992,760.00	52,152,440,000.00	24.865.145.000,00	**206.24**

Tabel 2.57.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2009 – 2013

NO	URAIAN		2009	2010	2011	2012	2013
1	2		3	4	5	6	7
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**ANGGARAN**	**448,511,642,802.69**	**614,252,789,297.37**	**636,546,820,751.64**	**633,678,957,742.37**	**752,340,467,210.28**
		REALISASI	**437,716,514,512.03**	**593,996,588,240.46**	**678,823,982,158.50**	**648,419,281,076.37**	
		%	**97.59**	**96.70**	**106.64**	**102.33**	**-**
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	377,417,702,518.28	500,730,670,121.23	557,065,649,744.33	612,383,839,454.35	686,948,580,883.53
		REALISASI	368,239,197,506.00	490,523,672,242.00	606,120,627,899.81	629,284,953,483.64	
		%	97.57	97.96	108.81	102.76	-
2.1.2	BELANJA BUNGA	ANGGARAN	2,146,989,033.57	2,196,448,962.78	682,272,974.81	682,272,974.81	36,157,840.95
		REALISASI	1,772,673,056.03	2,196,448,962.78	682,272,974.81	180,003,164.73	
		%	82.57	100.00	100.00	26.38	-
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	ANGGARAN	-	-	-	-	0.00
		REALISASI					
		%	-	-	-	-	-
2.1.4	BELANJA HIBAH	ANGGARAN	58,246,430,500.00	82,742,250,000.00	61,401,396,419.00	17,926,364,000.00	62,439,314,100.00
		REALISASI	58,245,490,500.00	82,510,449,000.00	60,846,467,169.00	17,631,219,000.00	
		%	100.00	99.72	99.10	98.35	-
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	ANGGARAN	9,875,500,000.00	17,892,780,000.00	13,837,280,000.00	875,500,000.00	500,000,000.00
		REALISASI	9,346,535,000.00	8,475,793,500.00	8,637,026,000.00	676,728,700.00	
		%	94.64	47.37	62.42	77.30	-

1	2		3	4	5	6	7
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGARAN	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
		REALISASI	63,254,600.00	64,402,800.00	63,549,200.00		
		%	63.25	64.40	63.55	-	-
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA	ANGGARAN	-	-	-	-	663,728,700.00
		REALISASI	-	-	-	42,014,400.00	-
		%	-	-	-	-	-
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	ANGGARAN	725,020,750.84	10,590,640,213.36	3,460,221,613.50	1,710,981,313.21	1,652,685,685.80
		REALISASI	49,363,850.00	10,225,821,735.68	2,474,038,914.88	604,362,328.00	
		%	6.81	96.56	71.50	35.32	-
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**ANGGARAN**	**391,623,307,546.15**	**404,737,887,493.00**	**482,106,109,164.04**	**728,000,023,357.23**	**874,988,688,930.07**
		REALISASI	**371,411,671,684.88**	**373,971,057,079.13**	**369,407,140,670.52**	**603,893,364,536.40**	
		%	**94.84**	**92.40**	**76.62**	**82.95**	**-**
	JUMLAH BELANJA	**ANGGARAN**	**840,134,950,348.84**	**1,018,990,676,790.37**	**1,118,652,929,915.68**	**1,361,678,981,099.60**	**1,627,329,156,140.35**
		REALISASI	**809,128,186,196.91**	**967,967,645,319.59**	**1,048,231,122,829.02**	**1,252,312,645,612.77**	**-**
		%	**96.31**	**94.99**	**93.70**	**91.97**	**-**

Sumber : BPKAD Kota Malang.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk memahami daya saing daerah Kota Malang, berdasarkan fasilitas wilayah/infrastrukturnya, maka berikut ini ditampilkan data-data mengenai fasilitas wilayah/Infrastruktur di Kota Malang.

1. Jalan dan Jembatan

   Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang/massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

   Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana Pendidikan maupun Kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Tabel 2.58.
Panjang Jalan Menurut Status Jalan (Km)

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jalan Negara	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	12,64
2	Jalan Propinsi	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	10,94
3	Jalan Kota	140,79	140,79	140,79	140,78	140,78	1027,11
JUMLAH		191,19	191,19	191,19	191,18	191,18	1050,69

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2011-2016.

Tabel 2.59.
Panjang Jalan Berdasarkan Status, Jenis, Kondisi dan Kelas
Tahun 2008 – 2011

No	Jenis/ Kondisi/ Kelas	Tahun 2008						Tahun 2009					
		Status Jalan (Km)						Status Jalan (Km)					
		Negara		Provinsi		Kota		Negara		Provinsi		Kota	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2008 *)	2009	2008 *)	2009	2008 *)	2009
I	**Jenis Permukaan**												
	Aspal	7.08	7.08	48.95	48.95	140.78	140.78	1.45	1.45	48.95	48.95	140.78	140.78
	Kerikil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tidak Dirinci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**7.08**	**7.08**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**	**140.78**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**
II	**Kondisi Jalan**												
	Baik	7.08	7.08	44.95	46.95	113.30	1,197	1.45	1.45	46.95	47.95	119.70	131.70
	Sedang	0.00	0.00	4.00	2.00	9.72	7.58	0.00	0.00	2.00	1.00	7.58	5.43
	Rusak	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.15
	Rusak Berat	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	1.50
Jumlah		**7.08**	**7.08**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**	**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**

III	**Kelas Jalan**												
	Kelas I	7.08	7.08	48.95	48.95	29.77	29.77	1.45	1.45	48.95	48.95	29.77	29.77
	Kelas II	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	29.53
	Kelas III	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	29.68
	Kelas IIIA	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16
	Kelas IIIB	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10
	Kelas IIIC	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55
	Tidak Dirinci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**7.08**	**7.08**	**48.95**	**48.95**	**140.79**	**140.79**	**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.79**	**140.79**

Lanjutan .....

No	Districs	Tahun 2010						Tahun 2011					
		Status Jalan (Km)						Status Jalan (Km)					
		Negara		Provinsi		Kota		Negara		Provinsi		Kota	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I	**Jenis Permukaan**												
	Aspal	1.45	1.45	48.95	48.95	140.78	140.78	1.45	1.45	48.95	48.95	140.78	140.78
	Kerikil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tidak Dirinci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**	**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**
II	**Kondisi Jalan**												
	Baik	1.45	1.45	47.95	47.95	131.70	131.70	1.45	1.45	47.95	47.95	131.70	131.70
	Sedang	0.00	0.00	1.00	1.00	5.43	7.50	0.00	0.00	1.00	1.00	5.43	7.50
	Rusak	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	1.58
	Rusak Berat	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
Jumlah		**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**	**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.78**	**140.78**

No	Districts	Tahun 2010						Tahun 2011					
		Status Jalan (Km)						Status Jalan (Km)					
		Negara		Provinsi		Kota		Negara		Provinsi		Kota	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2011	2010	2011	2010	2011
III	Kelas Jalan												
	Kelas I	1.45	1.45	48.95	48.95	29.77	29.77	1.45	1.45	48.95	48.95	29.77	29.77
	Kelas II	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	29.53
	Kelas III	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	29.68
	Kelas IIIA	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16
	Kelas IIIB	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10
	Kelas IIIC	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55
	Tidak Dirinci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.79**	**140.79**	**1.45**	**1.45**	**48.95**	**48.95**	**140.79**	**140.79**

Tabel 2.60.
Jumlah dan Kondisi Jembatan per Kecamatan Tahun 2013

NO.	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	P (m')	KONDISI SAAT INI	JENIS JEMBATAN
1	2	3	4	6	7
KECAMATAN KLOJEN					
1	Jmbt.Surabaya	Klojen	12	BAIK	Konstruksi beton
2	Jmbt.Bondowoso	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
3	Jmbt.Rajekwesi	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
4	Jmbt.wills	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
5	Jmbt.Pahlawan	Klojen	24	BAIK	Konstruksi beton
6	Jmbt.Mojopahit	Klojen	38	BAIK	Konstruksi beton
7	Jmbt.Semeru	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
8	Jmbt.Kahuripan	Klojen	38	BAIK	Konstruksi beton
9	Jmbt.Kawi	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
10	Jmbt.Bromo	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
11	Jmbt.Kauman	Klojen	8	RUSAK	Konstruksi beton
12	Jmbt.Dr.Cipto	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
13	Jmbt.Pattimura	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
14	Jmbt.A.R. Hakim	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
15	Jmbt.Buring	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
16	Jmbt.Yulius Usman	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
17	Jmbt.Brawijaya	Klojen	24	BAIK	Konstruksi beton
18	Jmbt.Brigjen.Slamet Riadi Gg.13	Klojen	8	RUSAK	Kerangka Besi
19	Jmbt.Brigjen.Slamet Riadi Gg.11	Klojen	25	RUSAK	Kerangka Besi
20	Jmbt.Brigjen.Slamet Riadi Gg. 8	Klojen	25	RUSAK	Gantung
21	Jmbt. Tapak Siring	Klojen	25	RUSAK	Gantung
20	Jmbt.Kintamani	Klojen	20	BAIK	Gantung
21	Jmbt.Corjesu	Klojen	22	BAIK	Kerangka Besi
22	Jmbt.Brawijaya	Klojen	16	BAIK	Kerangka Besi
23	Jmbt.karimun Jawa	Klojen	10	RUSAK	Kerangka Besi
24	Jmbt.Peler	Klojen	60	RUSAK	Gantung
25	Jmbt.Kelud	Klojen	8	BAIK	Kerangka Besi
26	Jmbt.Panjura	Klojen	6	BAIK	Kerangka Besi
27	Jmbt.Buwek	Klojen	12	BAIK	Kerangka Besi
28	Jmbt.Amandit	Klojen	8	RUSAK	Kerangka Besi
29	Jmbt.Celaket	Klojen	22	BAIK	Komposit
30	Jmbt.Magetan	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
31	Jmbt.Guntur	Klojen	15	RUSAK	Konstruksi beton
32	Jmbt.Kadal Pang	Klojen	15	BAIK	Komposit
33	Jmbt.Panggung	Klojen	12	BAIK	Konstruksi beton
34	Jmbt.Juanda	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton
35	Jmbt.Pulosari	Klojen	12	BAIK	Konstruksi beton
36	jmbt. Terusan Dieng	Klojen	6	BAIK	Konstruksi beton
37	Jmbt. Sumbersari	Klojen	11	BAIK	Konstruksi beton
38	Jmbt. Ngaglik	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
39	Jmbt. Talun I	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
40	Jmbt. Talun II	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
41	Jmbt. Narotama	Klojen	6	RUSAK	Konstruksi beton
42	Jmbt. Jupri	Klojen	20	RUSAK	Konstruksi beton
43	Jmbt. Bandulan Gg. 1	Klojen	5	RUSAK	Konstruksi beton
44	Jmbt. Gendekan	Klojen	10	BAIK	Konstruksi beton

45	Jmbt. Galunggung	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
46	Jmbt. Keben	Klojen	7	RUSAK	Konstruksi beton
47	Jmbt. Oro-oro Dowo Gg 2	Klojen	25	RUSAK	Gantung
48	Jmbt. Oro-oro Dowo Gg 8	Klojen	25	RUSAK	Gantung
49	Jmbt. Oro-oro Dowo Gg 13	Klojen	25	RUSAK	Gantung
50	Jmbt. Kasin Gg 9	Klojen	8	BAIK	Gantung
51	Jmbt. Katamso 1	Klojen	22	BAIK	Konstruksi beton
52	Jmbt. Katamso 2	Klojen	8	BAIK	Gantung
53	Jmbt. Katamso 3	Klojen	8	BAIK	Konstruksi beton
54	Jmbt. Letjen S. Parman Gg 5	Klojen	8	BAIK	Kerangka Besi
KECAMATAN BLIMBING					
55	Jmbt.Ahmad Yani I	Blimbing	14	BAIK	Konstruksi beton
56	Jmbt.Ahmad Yani II	Blimbing	14	BAIK	Konstruksi beton
57	Jmbt.Ahmad yani III	Blimbing	14	BAIK	Konstruksi beton
58	Jmbt.kalimewek	Blimbing	16	BAIK	Konstruksi beton
59	Jmbt.Purwodadi I	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
60	Jmbt.Purwodadi II	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
61	Jmbt.Letjen S. Parman	Blimbing	16	RUSAK	Konstruksi beton
62	Jmbt.Bantaran	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
63	Jmbt.Boldi	Blimbing	12	BAIK	Konstruksi beton
64	Jmbt.Polehan 2	Blimbing	28	RUSAK	Gantung
65	Jmbt.Polehan 1	Blimbing	44	RUSAK	Gantung
66	Jmbt.Bunul Rejo	Blimbing	18	BAIK	Konstruksi beton
67	Jmbt. Amprong	Blimbing	16	BAIK	Komposit
68	Jmbt.Kalisari	Blimbing	20	RUSAK	Konstruksi beton
69	Jmbt.L.A. Sucipto Gg. Taruna I	Blimbing	10	RUSAK	Konstruksi beton
70	Jmbt.L.A. Sucipto Gg. Taruna II	Blimbing	10	RUSAK	Konstruksi beton
71	Jmbt.L.A. Sucipto Gg. Taruna III	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
72	Jmbt.Hamid Rusdi Timur	Blimbing	12	BAIK	Konstruksi beton
73	Jmbt.Grindulu	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
74	Jmbt.Karya Timur I	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
75	Jmbt.Karya Timur II	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
76	Jmbt.Karya Timur III	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
77	Jmbt.Sulfat	Blimbing	20	BAIK	Konstruksi beton
78	Jmbt.Simp.Sulfat Utara	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
79	Jmbt.Kesatriyan	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
80	Jmbt.Plaosan Barat	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
81	Jmbt.Plaosan Barat Gg. 1	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
82	Jmbt.Plaosan Timur	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
83	Jmbt.Simp.Teluk Bayur	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
84	Jmbt. Teluk Bayur	Blimbing	12	BAIK	Konstruksi beton
85	Jmbt.Teluk Grajagan	Blimbing	10	RUSAK	Konstruksi beton
86	Jmbt.Simp.LA.Sucipto Gang Lori	Blimbing	11	BAIK	Konstruksi beton
87	Jmbt.Simp.LA.Sucipto	Blimbing	12	BAIK	Konstruksi beton
88	Jmbt.Industri Timur	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
89	Jmbt.Batanghari	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
90	Jmbt.Binor	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
91	Jmbt.Bunul RT 8 RW 12	Blimbing	8	RUSAK	Konstruksi beton
92	Jmbt.Memberamo	Blimbing	10	RUSAK	Konstruksi beton
93	Jmbt.Batu Amaril	Blimbing	15	RUSAK	Konstruksi beton
94	Jmbt.Hamid Rusdi Gg.2	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
95	Jmbt.Pahlawan	Blimbing	15	BAIK	Konstruksi beton

96	Jmbt.Pelabuhan Ratu 1	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
97	Jmbt.Pelabuhan Ratu 2	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
98	Jmbt.LA.Sucipto Gg. 7	Blimbing	5	BAIK	Konstruksi beton
99	Jmbt.LA.Sucipto (Wakof 1)	Blimbing	4	BAIK	Konstruksi beton
100	Jmbt.LA.Sucipto (Wakof 2)	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
101	Jmbt.Tumenggung Suryo	Blimbing	15	BAIK	Konstruksi beton
102	Jmbt.Sanan	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
103	Jmbt.Ciwulan	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
104	Jmbt.Sebuku	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
105	Jmbt. Selorejo	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
106	Jmbt. Kedawung 1	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
107	Jmbt. Kedawung 2	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
108	Jmbt. Kedawung 3	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
109	Jmbt. Satsuitubun 1	Blimbing	11	BAIK	Konstruksi beton
110	Jmbt. Satsuitubun 2	Blimbing	11	RUSAK	Konstruksi beton
111	Jmbt. Bengawan Solo	Blimbing	14	BAIK	Konstruksi beton
112	Jmbt. Juanda	Blimbing	30	BAIK	Konstruksi beton
113	Jmbt. Tuntang	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
114	Jmbt. Mahakam	Blimbing	10	BAIK	Konstruksi beton
115	Jmbt. plaosan Barat 2	Blimbing	9	BAIK	Konstruksi beton
116	Jmbt. Panji Suroso	Blimbing	9	BAIK	Konstruksi beton
117	Jmbt. Simpang Panji Suroso	Blimbing		BAIK	Konstruksi beton
118	Jmbt. Batu Bara 1	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
119	Jmbt. Batu Bara 2	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
120	Jmbt. Batu Bara 3	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
121	Jmbt. Candi Waringin Lawang	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
122	Jmbt. Mesuji	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
123	Jmbt. Candi Mendut Selatan	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
124	Jmbt. Candi Sari	Blimbing	8	BAIK	Konstruksi beton
125	Jmbt. Candi Borobudur Barat	Blimbing	7	BAIK	Konstruksi beton
126	Jmbt. Sudimoro 1	Blimbing	6	RUSAK	Konstruksi beton
127	Jmbt. Sudimoro 2	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
128	Jmbt. Satria Barat	Blimbing	6	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
KECAMATAN KEDUNGKANDANG					
129	Jmbt.Muharto I	Kedungkandang	20	BAIK	Konstruksi beton
130	Jmbt.Muharto II	Kedungkandang	30	BAIK	Konstruksi beton
131	Jmbt.Muharto Gg. 5	Kedungkandang	28	RUSAK	Gantung
132	Jembatan Sido Sadar	Kedungkandang	28	RUSAK	Gantung
133	Jmbt.Mayjen Sungkono I	Kedungkandang	17	BAIK	Konstruksi beton
134	Jmbt.Mayjen Sungkono II	Kedungkandang	11	BAIK	Konstruksi beton
135	Jmbt.Mayjen Sungkono III	Kedungkandang	11	BAIK	Konstruksi beton
136	Jmbt.Mayjen Sungkono Gg. 3	Kedungkandang	9	BAIK	Konstruksi beton
137	Jmbt.Mayjen Sungkono Gg. 6	Kedungkandang	12	BAIK	Konstruksi beton
138	Jmbt.Mayjen Sungkono Gg. 7	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
139	Jmbt.Bumiayu	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
140	Jmbt.Kebonsari	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
141	Jmbt.Kedungkandang	Kedungkandang	8	BAIK	Konstruksi beton
142	Jmbt.Lesanpuro	Kedungkandang	24	BAIK	Konstruksi beton
143	Jmbt.Gadang Gg. I	Kedungkandang	50	BAIK	Kerangka Besi
144	Jmbt.Lesanpuro Gg.12	Kedungkandang	15	BAIK	Konstruksi beton
145	Jmbt. Lesanpuor - Baran	Kedungkandang	18	BAIK	Konstruksi beton
146	Jmbt.Muharto Gg.3b	Kedungkandang	25	RUSAK	Gantung
147	Jmbt.Wonokoyo I	Kedungkandang	12	BAIK	Kerangka Besi

148	Jmbt.Gadang - Bumiayu	Kedungkandang	121	BAIK	Konstruksi beton
149	Jmbt.Wonokoyo II	Kedungkandang	9	BAIK	Komposit
150	Jmbt.Monumen Polri	Kedungkandang	8	BAIK	Konstruksi beton
151	Jmbt.Santoso	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
152	Jmbt.Tlogowaru	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
153	Jmbt.Ki Ageng Gribig 1	Kedungkandang	12	BAIK	Konstruksi beton
154	Jmbt.Ki Ageng Gribig 2	Kedungkandang	12	BAIK	Konstruksi beton
155	Jmbt.Cemoro Kandang	Kedungkandang	15	BAIK	Konstruksi beton
156	Jmbt. Lowok Doro	Kedungkandang	120	RUSAK	Kerangka Besi
157	Jmbt.Parseh Jaya	Kedungkandang	5	BAIK	Konstruksi beton
158	Jmbt.KH.Malik I	Kedungkandang	8	BAIK	Konstruksi beton
159	Jmbt.KH.Malik II	Kedungkandang	8	BAIK	Konstruksi beton
160	Jmbt.Buring Gg.6(Gedangan)	Kedungkandang	8	BAIK	Konstruksi beton
161	Jmbt.Bumi Perkemahan I	Kedungkandang	8	RUSAK	Konstruksi beton
162	Jmbt.Bumi Perkemahan II	Kedungkandang	8	RUSAK	Komposit
163	Jmbt.Mergosono Gg.1	Kedungkandang	30	RUSAK	Gantung
164	Jmbt.Mergosono Gg.5	Kedungkandang	30	BAIK	Gantung
165	Jmbt.Madyopuro Gg.1	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
166	Jmbt. Sawojajar Gg. 7	Kedungkandang	10	RUSAK	Konstruksi beton
167	Jmbt.Glendang Pakem Madyopuro	Kedungkandang	15	BAIK	Konstruksi beton
168	Jmbt.Madyopuro II	Kedungkandang	10	BAIK	Konstruksi beton
169	Jmbt.Slamet	Kedungkandang	8	RUSAK	Konstruksi beton
170	Jmbt. Kalianyar	Kedungkandang	20	BAIK	Konstruksi beton
171	Jmbt. Coban	Kedungkandang	15	RUSAK	Konstruksi beton
172	Jmbt. Kwangsan	Kedungkandang	30	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
173	Jmbt. Wareng 1	Kedungkandang	12	BAIK	Konstruksi beton
174	Jmbt. Wareng 2	Kedungkandang	8	RUSAK	Konstruksi beton
KECAMATAN SUKUN					
175	Jmbt. Raya Janti	Sukun	12	RUSAK	Konstruksi beton
176	Jmbt. Janti Gg. 8	Sukun	12	BAIK	Konstruksi beton
177	Jmbt.Janti Selatan/Jalan Makam	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
178	Jmbt.Gempol	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
179	Jmbt.Kol. Sugiono	Sukun	26	BAIK	Konstruksi beton
180	Jmbt.Sumbersareh	Sukun	24	BAIK	Gantung
181	Jmbt.Kemantren	Sukun	8	BAIK	Gantung
182	Jmbt. Bareng RW 3	Sukun	11	BAIK	Konstruksi beton
183	Jmbt. Kepuh Gg. 4	Sukun	23	RUSAK	Gantung
184	Jmbt. Tebo Selatan	Sukun	8	RUSAK	Konstruksi beton
185	Jmbt.Klayatan Gg. 3	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
186	Jmbt.Klayatan Gg. 2	Sukun	15	RUSAK	Konstruksi beton
187	Jmbt.Klayatan Gg.1	Sukun	15	RUSAK	Konstruksi beton
188	Jmbt.Satsuitubun I	Sukun	11	BAIK	Komposit
189	Jmbt.Satsuitubun 2	Sukun	10	RUSAK	Konstruksi beton
190	Jmbt. Candi 2	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
191	Jmbt. Candi 3	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
192	Jmbt. Candi 3/Jalan Makam	Sukun	5	BAIK	Konstruksi beton
193	Jmbt. Candi 5 - 6	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
194	Jmbt.tidar	Sukun	20	RUSAK	Konstruksi beton
195	Jmbt.Pelabuhan Ketapang(Klabang)	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
196	Jmbt.Mulyorejo	Sukun	5	RUSAK	Konstruksi beton
197	Jmbt.Bakalan	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
198	Jmbt.Karang Suko	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton

199	Jmbt.Jupri	Sukun	15	RUSAK	Konstruksi beton
200	Jmbt.Mergan Lori	Sukun	8	BAIK	Konstruksi beton
201	Jmbt.Abdul Jalil	Sukun	8	BAIK	Konstruksi beton
202	Jmbt.Dieng	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
203	Jmbt.Gasek	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
204	Jmbt.Jurang Akhir	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
205	Jmbt.Budi Utomo/Sedudut	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
206	Jmbt.S.Supriyadi	Sukun	20	BAIK	Konstruksi beton
207	Jmbt.Tirtasari	Sukun	20	BAIK	Konstruksi beton
208	Jmbt.Pelabuhan Tanjung Emas	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
209	Jmbt.Pelabuhan Tanjung Perak	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
210	Jmbt.Bandulan I	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
211	Jmbt.Bandulan 5	Sukun	6	BAIK	Konstruksi beton
212	Jmbt.Bandulan - Tebo	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
213	Jmbt.Juwet	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
214	Jmbt.Kelapa Sawit	Sukun	10	BAIK	Gantung
215	Jmbt.RayaCandi(Badut)	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
216	Jmbt.Candi(Gasek)	Sukun	15	BAIK	Konstruksi beton
217	Jmbt.IR.Rais	Sukun	20	RUSAK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
218	Jmbt.IR.Rais Gg. 9	Sukun	8	BAIK	Konstruksi beton
219	Jmbt.IR.Rais Gg 5	Sukun	12	BAIK	Konstruksi beton
220	Jmbt.IR.Rais 14	Sukun	6	RUSAK	Konstruksi beton
221	Jmbt.Galunggung	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
222	Jmbt.Kasin Gg.8	Sukun	8	BAIK	Konstruksi beton
223	Jmbt. Janti Gg 8	Sukun	18	BAIK	Konstruksi beton
224	Jmbt. Tanjung Perak	Sukun	32	BAIK	Konstruksi beton
225	Jmbt. Klabang	Sukun	32	RUSAK	Konstruksi beton
226	Jmbt. Sukun Permai	Sukun	10	BAIK	Konstruksi beton
227	Jmbt. Raja Wali	Sukun	6	BAIK	Konstruksi beton
228	Jmbt. Pisang Agung	Sukun	18	BAIK	Gantung
229	Jmbt. Candi Mendut	Sukun	8	BAIK	Konstruksi beton
230	Jmbt. Raya Candi	Sukun	18	BAIK	Konstruksi beton
231	Jmbt.Kasin Kuburan	Sukun	8	BAIK	Komposit
KECAMATAN LOWOKWARU					
232	Jmbt.Menjing	Lowokwaru	20	BAIK	Kerangka Besi
233	Jmbt.Penanggungan	Lowokwaru	20	BAIK	Kerangka Besi
234	Jmbt.Juwet II	Lowokwaru	18	BAIK	Kerangka Besi
235	Jmbt.Dinoyo Gg. 1	Lowokwaru	34	BAIK	Kerangka Besi
236	Jmbt.Tasikmadu	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
237	Jmbt.Tunggul Wulung	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
238	Jmbt.Dinoyo-Bioro	Lowokwaru	34	BAIK	Gantung
239	Jmbt.Akordion I	Lowokwaru	15	BAIK	Konstruksi beton
240	Jmbt.Akordion II	Lowokwaru	4	BAIK	Konstruksi beton
241	Jmbt. Jl. Atletik Kali Turi	Lowokwaru	6	RUSAK	Konstruksi beton
242	Jmbt. Jl. Atletik Kali Kajar	Lowokwaru	12	BAIK	Konstruksi beton
243	Jmbt.Lowokwaru Gg.3	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
244	Jmbt.Lowokwaru Gg.4	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
245	Jmbt.Lowokwaru Gg.5	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
246	Jmbt.Solerejo	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
247	Jmbt.Joyosari	Lowokwaru	15	BAIK	Konstruksi beton
248	Jmbt.kedawung	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
249	Jmbt.Letjend.Sutoyo	Lowokwaru	12	BAIK	Konstruksi beton
250	Jmbt.letjend.S.Parman	Lowokwaru	12	BAIK	Konstruksi beton

251	Jmbt.Sigura-gura	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
252	Jmbt.Kanjuruhan	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
253	Jmbt.Tlogosari RW 3	Lowokwaru	12	RUSAK	Kerangka Kayu
254	Jmbt.Tlogosari Barat	Lowokwaru	18	RUSAK	Konstruksi beton
255	Jmbt.UGM Merjosari	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
256	Jmbt.Tlogo Warna	Lowokwaru	8	BAIK	Konstruksi beton
257	Jmbt.Tlogomas	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
258	Jmbt.Tlogomas Gg.8	Lowokwaru	8	BAIK	Gantung
259	Jmbt. Kendalsari 1	Lowokwaru	5	BAIK	Konstruksi beton
260	Jmbt. Kendalsari 2	Lowokwaru	5	BAIK	Konstruksi beton
261	Jmbt.Sumbersari	Lowokwaru	11	BAIK	Konstruksi beton
262	Jmbt. Jl. Melati	Lowokwaru	7	BAIK	Konstruksi beton
1	2	3	4	6	7
263	Jmbt. Cenggerayam 1	Lowokwaru	6	BAIK	Konstruksi beton
264	Jmbt. Cenggerayam 2	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
265	Jmbt. Cenggerayam 3	Lowokwaru	10	BAIK	Konstruksi beton
266	Jmbt. Terusan Cengger Ayam	Lowokwaru	7	BAIK	Konstruksi beton
267	Jmbt. Jl. Ikan Nus	Lowokwaru	7	BAIK	Konstruksi beton
268	Jmbt. Mayjen Panjaitan Gg. 18	Lowokwaru	42	BAIK	Gantung
269	Jmbt. Mayjen Panjaitan Gg. 5	Lowokwaru	42	BAIK	Gantung

Sumber : Dinas PU PPB

Tabel 2.61.
Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2013

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. A. Rahman Hakim	3102	1396	0,45	C
Jl. Ade Irma Suryani	4465,188	1450	0,32	B
Jl. Andalas Selatan	4221,4836	1164	0,55	C
Jl. Aries Munandar	2539,9176	1270	0,50	C
Jl. Bandung	5211,36	1798	0,69	C
Jl. Bend. Sigura-gura	4537,1544	1175	0,52	C
Jl. Bendungan Sutami	4462,368	1361	0,61	D
Jl. Besar Ijen	5725,728	2004	0,70	C
Jl. Borobudur	3787,824	1326	0,70	C
Jl. Brigjend Katamso	4514,256	910	0,40	B

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. Budiutomo	2961,5264	763	0,52	B
Jl. Bukir Sari	2900,464	832	0,57	B
Jl. Bungur	2711,148	691	0,51	B
Jl. Cakalang	2900,464	532	0,37	B
Jl. Candi Mendut	2808,8704	612	0,44	B
Jl. Candi Panggung	2900,464	534	0,37	C
Jl. Candi Tegowangi	2808,8704	583	0,42	B
Jl. Cengger Ayam	5179,4	1132	0,44	B
Jl. Cengkeh	5718,0576	998	0,35	B
Jl. Coklat	5531,5992	1021	0,37	B
Jl. Cokroaminoto	5842,3632	1213	0,42	B
Jl. Danau Kerinci	5422,296	1084	0,40	B
Jl. Danau Toba	4458,6456	689	0,31	C
Jl. Dr. Cipto	4458,6456	785	0,35	B
Jl. Flamboyan	1598,1504	423	0,53	B
Jl. Gajah Mada	3462,5652	634	0,37	B
Jl. Gajayana	5345,1408	1211	0,45	D
Jl. Galunggung	5718,0576	929	0,33	B
Jl. H. Agus Salim	4680,2976	1404	0,30	B
Jl. Halmahera	5179,4	1643	0,32	B
Jl. Hamid Rusdi	5124,88	1124	0,44	B

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. Ijen	5301,6	1378	0,52	B
Jl. Ikwan Ridwan Rais	4978,428	1494	0,60	B
Jl. Indrapasta	4221,4836	654	0,31	B
Jl. Jakarta	5407,8388	984	0,36	B
Jl. Joyo sari	4363,7808	1214	0,56	B
Jl. Joyo Utama	4221,4836	982	0,47	B
Jl. Juanda	4464,0976	1432	0,32	B
Jl. Jupri	5718,0576	1124	0,39	B
Jl. K.H. Ahmad Dahlan	4413,864	1874	0,42	B
Jl. K.H. Hasyim Asyari	4618,032	1632	0,35	B
Jl. Kahuripan	5718,0576	823	0,29	B
Jl. Kali Urang	4363,7808	923	0,42	D
Jl. Kalimosodo	4363,7808	981	0,45	C
JL. Kalpataru	3253,3776	740	0,45	C
Jl. Kapten Tendean	2482,8408	723	0,58	B
Jl. Kauman	2445,6168	1443	0,59	C
Jl. Kawi	4929,36	976	0,40	C
Jl. Kebalen	2717,2768	462	0,34	C
Jl. Kedawung	2808,8704	435	0,31	C
Jl. Kertanegara	4537,1544	794	0,35	B
Jl. KH. Yusuf	2808,8704	449	0,32	B

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. Klayatan	2717,2768	654	0,48	B
jl. Kopral usman	4166,6064	1684	0,40	B
Jl. Kyai Ageng Gribig	5342,96	1121	0,42	B
Jl. Kyai Parseh Jaya	5188,8	983	0,38	B
Jl. Kyai Tamin	4298,3568	826	0,19	C
Jl. Laksda Adi Sucipto	5588,3	1983	0,71	C
Jl. Langsep	5422,296	1201	0,44	B
Jl. Madyopuro	4743,24	978	0,41	B
Jl. Mayjend M. Wiyono	5132,4	956	0,37	B
Jl. Mayjend Sungkono	5342,96	775	0,29	B
Jl. Merdeka Barat	5251,0656	768	0,15	A
Jl. Merdeka Selatan	5079,8352	972	0,19	A
Jl. Merdeka Timur	5079,8352	897	0,18	A
Jl. Merdeka Utara	5079,8352	768	0,15	A
Jl. Mertojoyo	4363,7808	987	0,23	B
Jl. MGR. Sugito	2682,6096	984	0,37	B
Jl. Mojopahit	4363,7808	980	0,45	B
Jl. Muharto	4054,596	912	0,45	B
Jl. Pahlawan	4721,808	984	0,42	B
Jl. Parangtritis	2961,5264	984	0,66	C
Jl. Pasar Besar	2060,6586	897	0,44	D

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. Peltu Sudiono	4506,078	984	0,44	B
Jl. Puntodewo	2869,9328	743	0,52	B
Jl. Ranu Grati	4824,456	1230	0,51	D
Jl. Raya Dieng	5365,2192	1663	0,62	B
Jl. Raya Tidar	3889,4568	613	0,32	B
Jl. Raya Tlogowaru	4506,078	1424	0,63	C
Jl. Semeru	4721,808	1358	0,58	B
Jl. Sersan Harun	4166,6064	1479	0,36	D
Jl. Simp. Laksda Adi Sucipto	2961,5264	526	0,36	B
Jl. Simp. Sulfat	2717,2768	721	0,53	B
Jl. Soekarno Hatta	5718,0576	1342	0,47	B
Jl. Sulfat	5342,96	788	0,30	B
Jl. Sultan Syahrir	4680,2976	1432	0,31	B
Jl. Sumber sari	4972,224	1164	0,47	C
Jl. Sunan Kalijogo	5015,84	1754	0,70	B
Jl. Surabaya	5235,048	777	0,30	B
Jl. Tanimbar	4506,078	811	0,36	B
Jl. Tawangmangu	5288,44	806	0,31	B
Jl. Terusan Dieng	3747,1596	980	0,52	C
Jl. Terusan membero	2808,8704	732	0,52	C
Jl. Trunojoyo	6259,4412	1653	0,53	B

NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	LOS
Jl. Tugu	3787,824	977	0,26	B
Jl. Urip Sumoharjo	6215,28	856	0,28	B
Jl. Veteran	4891,2336	1229	0,50	B
Jl. W.R. Supratman	4363,7808	1108	0,51	B
Jl. Wilis	6090,9744	917	0,30	B
Jl. Yulius Usman	4872,9976	892	0,37	B
Jl. Zainul Zacse	4721,808	818	0,35	B
Jl.Akordion Timur	2808,8704	783	0,56	B
Jl.Joyo Agung	4363,7808	1212	0,56	B
Jl.KH Malik	5342,96	982	0,37	B
Jl.Mulyorejo	2869,9328	832	0,58	B
Jl.Pattimura	4721,808	789	0,33	B
Jl.Perdana Kusuma	5132,4	876	0,34	B
Jl.Prof Muh Yamin	4470,64	872	0,39	B
Jl.Puncak Borobudur	2905,728	734	0,51	B
Jl.Puncak Mandala	4221,4836	894	0,42	B
Jl.Tebo Utara	2869,9328	723	0,50	B

Sumber : Dinas PU PPB

2. Transportasi dan Lalu Lintas

Penyediaan perlengkapan jalan, khususnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Malang sampai saat ini berjumlah 692 unit, dengan klasifikasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.62
Jumlah Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Jenis
Tahun 2013

No	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1.	Rambu Larangan	218	31,5
2.	Rambu Perintah	189	27,3
3.	Rambu Peringatan	185	26,7
4.	Rambu Petunjuk	100	14,5
	Jumlah	692	100

Sumber : Dinas Perhubungan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikasi aksesibilitas daerah yang dilihat untuk melihat ketersediaan prasarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dalam kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Dengan demikian kebutuhan transportasi harus

disertai dengan pengembangan sarana/ prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan prasarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Malang pada Tahun 2012 mencapai 1 : 73,62 , yang berarti bahwa setiap panjang 1 km dapat diakses kendaraan roda empat sebanyak 73 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2011 dengan perbandingan 1 : 66. Dengan kata lain bahwa jumlah kendaraan di Kota Malang meningkat sebesar lebih kurang 11 %.

Tabel 2.63.
Jumlah Penumpang Tahun 2009 - 2013

Tahun	Jumlah Penumpang Naik (PP per-Tahun)	Jumlah penumpang Naik (PP Per-Hari)	Jumlah Penumpang Turun (PP Per-Tahun)	Jumlah Penumpang Turun (PP Per-Hari)
2009	269284	740	134642	370
2010	285818	785	142909	393
2011	303367	833	151684	417
2012	321994	885	160997	442
2013	341764	939	170882	469

Sumber : Dinas Perhubungan

3. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup pada suatu wilayah.

Baik atau buruknya pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah/ kota, salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan sampahnya.

Tabel 2.64
Banyaknya Tempat Penampungan Sampah Sementara
Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kedungkandang	12
2	S u k u n	16
3	Klojen	8
4	Blimbing	16
5	Lowokwaru	16
Jumlah / Total		68

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 2.65
Volume dan Pengelolaan Sampah di Kota Malang 2009 – 2011

No	Tahun	Volume Sampah			Prosentase Penanganan Sampah (%)
		Di Angkut Ke TPA (Ton/Hr)	Di Olah (Ton/Hr)	Tidak Diangkut (Ton/Hr)	
1	2009	477,20	93,23	39,66	93,50
2	2010	469,56	105,45	38,99	93,65
3	2011	460,94	118,68	38,31	93,80
4	2012	420,17	170,65	31,10	95,00
5	2013	439,40	162,47	21,83	96,50

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kota Malang sudah cukup baik, dengan prosentase penanganan sampah mencapai 96,50 %.

Tabel 2.66
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL.

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Jumlah Kegiatan Yang DiPantau	2 Titik Pantau	3 Titik Pantau	5 Titik Pantau	5 Titik Pantau	5 Titik Pantau
Frekuensi	1 (satu) kali dalam satu tahun	1 (satu) kali dalam satu tahun	1 (satu) kali dalam satu tahun	1 (satu) kali dalam satu tahun	1 (satu) kali dalam satu tahun

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

Keterangan : Kegiatan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun. Jenis kegiatan dan/atau usaha yang diawasi adalah:

1. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2
2. Apartemen Menara Soekarno Hatta Jl. Soekarno Hatta
3. MOG Jl. Kawi
4. Matos Jl. Veteran
5. Hotel OJ Jl. Dr. Cipto

C. Perdagangan Daerah

Secara umum kondisi pendukung perdagangan daerah di Kota Malang dapat dilihat sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 2.67
PASAR TRADISIONAL
KOTA MALANG

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Kondisi Pasar	Luas Lahan (m2)	Jumlah Pedagang
1	Besar	Jl. Kyai Tamin No. 1 A Malang	1989	Baik	21,820	1,204
2	Baru Barat	Jl. Prof. M Yamin No. 3 Malang	1977 dan 2002	Sedang	3,777	520
3	Blimbing	Jl. Borobudur Malang	1978	Sedang	11,320	1,918
4	Tawangmangu	Jl. Tawangmangu No. 1 Malang	1979 dan 1993	Sedang	16,965	348
5	Dinoyo (Merjosari)	Jl. MT. Haryono 175 Malang	1976	Sedang	5,000	797
6	Klojen	Jl. Cokroaminoto Malang	1976	Baik	1,860	195
7	Induk Gadang	Jl. Kol. Sugiono Malang	1989	Sedang	15,590	1,566

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Kondisi Pasar	Luas Lahan (m2)	Jumlah Pedagang
8	Oro-oro Dowo	Jl. Guntur Malang	1976	Baik	3,407	174
9	Bunul	Jl. Hamid Rusdi Malang	1982	Sedang	4,904	209
10	Kasin	Jl. Ir. Rais Malang	1976	Sedang	2,616	147
11	Sukun	Jl. S. Supriadi Malang	1987	Sedang	3,170	199
12	Buku Wilis	Jl. Simp. Wilis Indah Malang	2002	Sedang	800	60
13	Madyopuro	Jl. Simp. Danau Jonge Malang	1974 dan 1995	Sedang	1,624	601
14	Mergan	Jl. Raya Langsep Malang	1979	Sedang	1,800	250
15	Gadang Lama	Jl. Raya Gadang Lama Malang	1974	Sedang	1,962	167
16	Bunga	Jl. Brawijaya Malang	1976	Sedang	2,900	67

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Kondisi Pasar	Luas Lahan (m2)	Jumlah Pedagang
17	Burung	Jl. Brawijaya Malang	1973	Sedang	655	126
18	Sawojajar	Jl. Danau Bratan Malang		Sedang	2,496	161
19	Kebalen	Jl. Zaenal Zakse Malang	1979	Sedang	1,313	156
20	Baru Timur	Jl. Prof. M Yamin Malang	1977	Sedang	4,842	178
21	Embong Brantas	Jl. Embong Brantas Malang	1978	Sedang	1,800	96
22	Kotalama	Jl. Kol. Sugiono Malang	1976	Sedang	1,250	92
23	Lesanpuro	Jl. Selat Bengkalis 9D Malang	2002	Sedang	505	89
24	Kedungkandang	Jl. Muharto Malang	1994	Sedang	7,444	325
25	Bareng	Jl. Ters. Ijen Malang	1976	Sedang	1,407	141

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Kondisi Pasar	Luas Lahan (m2)	Jumlah Pedagang
26	Nusakambangan	Jl. Nusakambangan Malang	1939	Sedang	800	41
27	Talun	Jl. Basuki Rahmat Gg. 4 Malang	1976	Sedang	1,916	42
28	Hewan Sukun	Jl. S. Supriadi Malang		Sedang		

Sumber : Dinas Pasar

Adapun kondisi pasar tradisional dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2.68
Kondisi Pasar Tradisional

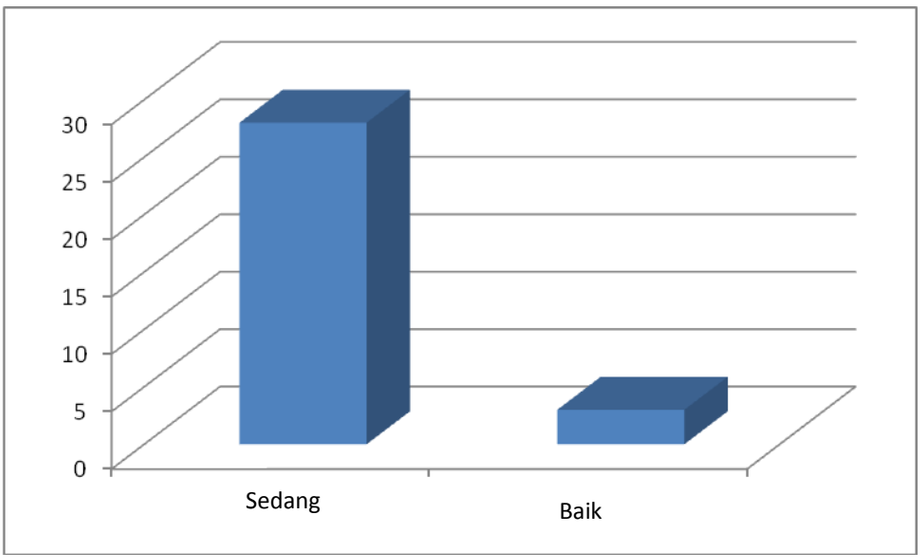

Tabel 2.69
Jumlah Pasar Tradisional, Pasar Modern, Hipermart Dan Minimarket

NO	JENIS PASAR	JUMLAH
1	Pasar Tradisional	28
2	Pasar Modern (Plaza/Mall)	13
3	Hypermart	9
4	Minimarket	112
	Jumlah	162

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.70
Jumlah Perkembangan Rumah Toko (Ruko)
Tahun 2011 - 2013

NO.	KECAMATAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Blimbing	29	114	90
2	Klojen	83	185	86
3	Kedungkandang	48	134	174
4	Sukun	78	106	56
5	Lowokwaru	89	126	200
	JUMLAH	327	665	606

SUMBER : BP2T

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat yang sangat penting. Data di atas menunjukkan bahwa kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Malang saat ini cukup baik. Lonjakan Ruko yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2011 ke 2012, dan tidak banyak peningkatan pada tahun 2012 ke 2013. Kendati demikian, program revitalisasi pasar tradisional masih perlu ditingkatkan guna menjamin keselamatan ekonomi utamanya bagi pelaku ekonomi kecil dan mikro.

D. Iklim Berinvestasi

Dilihat dari perkembangan PDRB Kota Malang, jenis kegiatan yang sangat besar pengaruhnya terhadap PDRB adalah perhotelan, rumah makan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Dengan karakteristik yang demikian, tentu Kota Malang cocok sebagai tempat menginvestasikan dana bagi para investor dan pemain modal.

Dengan karakteristik kota yang demikian, maka Pemerintah Kota Malang perlu mendorong dan membina dengan memberikan layanan umum dan layanan infrastruktur yang

sebaik-baiknya agar dapat para investor, baik investor lokal maupun investor dari luar negeri, tertarik untuk menginvestasikan modal mereka di Kota Malang. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat umum dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi/usaha sangat perlu untuk dikembangkan.

E. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan umum meliputi penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban masyarakat, hukum dan politik.

1. Pegawai Negeri Sipil

Salah satu komponen yang mendukung pelayanan di bidang pemerintahan adalah SDM aparatur birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS Kota Malang dirinci menurut kepangkatan, jenis kelamin dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan data Pegawai, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2013, Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III merupakan kelompok Golongan PNS yang terbanyak dengan persentase 35,9% dimana bila dibandingkan dengan jumlah PNS golongan III pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,33% dari 36,23% menjadi 35,9%, kemudian diikuti Golongan IV pada tahun 2013 dengan persentase 31,3% dimana bila dibandingkan dengan PNS Golongan IV pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,53% dari 30,77% menjadi 31,3%, PNS

Golongan II pada tahun 2013 dengan persentase 22,2%, dimana bila dibandingkan dengan PNS Golongan II pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,4% dari 22,6% menjadi 22,2%, serta PNS Golongan I dengan persentase 10,6%, dimana bila dibandingkan dengan PNS Golongan I pada tahun 2012, mengalami peningkatan sebesar 0,2% dari 10,4% menjadi 10,6%. Adapun dari keseluruhan PNS pada tahun 2013 berjumlah 9.536 orang, dan bila dibandingkan dengan PNS pada tahun 2012 sejumlah 9.891 orang mengalami penurunan sebesar 3,722%.

Tabel 2.71
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Kepangkatan
Tahun 2011 – 2013

GOLONGAN RUANG	JUMLAH			%		
	Tahun 2011	**Tahun 2012**	**Tahun 2013**	**Tahun 2011**	**Tahun 2012**	**Tahun 2013**
GOLONGAN I						
I a	326	150	52	3,20%	1,52%	0,55%
I b	208	382	482	2,04%	3,86%	5,05%
I c	368	222	70	3,61%	2,24%	0,73%
I d	186	275	411	1,83%	2,78%	4,31%
Jumlah	**1.088**	**1.029**	**1.015**	**10,69%**	**10,4%**	**10,6%**
GOLONGAN II						
II a	777	538	388	7,63%	5,44%	4,07%
II b	825	975	961	8,10%	9,86%	10,1%
II c	530	528	565	5,21%	5,34%	5,92%
II d	248	194	204	2,44%	1,96%	2,14%
Jumlah	**2.380**	**2.235**	**2.118**	**23,38%**	**22,6%**	**22,2%**

GOLONGAN RUANG	JUMLAH			%		
	Tahun 2011	**Tahun 2012**	**Tahun 2013**	**Tahun 2011**	**Tahun 2012**	**Tahun 2013**
GOLONGAN III						
III a	1.051	980	884	10,32%	9,91%	9,27%
III b	995	953	862	9,77%	9,64%	9,04%
III c	656	738	852	6,44%	7,46%	8,93%
III d	1.060	913	824	10,41%	9,23%	8,64%
Jumlah	**3.762**	**3.584**	**3.422**	**36,95%**	**36,23%**	**35,9%**
GOLONGAN IV						
IV a	2.742	2.727	2.563	26,93%	27,57%	26,9%
IV b	177	288	391	1,74%	2,91%	4,1%
IV c	30	26	25	0,29%	0,26%	0,26%
IV d	2	2	1	0,02%	0,02%	0,01%
Jumlah	**2.951**	**3.043**	**2.980**	**28,99%**	**30,77%**	**31,3%**
Jumlah PNS	**10.181**	**9.891**	**9.536**	**100%**	**100%**	**100%**
Jumlah PTT	**274**	**253**	**193**	**2,69%**	**2,56%**	**2,02%**

Sumber : BKD (diolah 31 Desember 2013)

Tabel 2.72

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013

NO	PENDIDIKAN	2009			2010			2011			2012			2013		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	SD	743	27	770	333	13	346	650	22	672	743	27	770	555	31	586
2	SMP	752	61	813	269	25	294	603	51	654	752	61	813	667	60	727
3	SMA	1.372	954	2.326	1.101	1.319	2.420	1.287	992	2.279	1.372	954	2.326	1468	1177	2645
4	D3	227	454	681	236	425	661	222	399	621	227	454	681	207	460	667
5	S-1	1.722	2.664	4.386	1.690	2.543	4.233	1.725	2.563	4.288	1.722	2.664	4.386	1702	2768	4470
6	S-2	190	125	315	164	105	269	183	114	297	190	125	315	232	205	437
7	S-3	2	1	3	1	1	2	2	1	3	2	1	3	3	1	4
	JUMLAH	**5.008**	**4.286**	**9.294**	**3.794**	**4.431**	**8.225**	**4.672**	**4.142**	**8.814**	**5.008**	**4.286**	**9.294**	**4.834**	**4.702**	**9.536**

Sumber : BKD Kota Malang

Berdasarkan kondisi dan potensi daerah, menjadi modal dasar yang kuat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dan berkualitas. Namun dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terdapat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan isu aktual, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengendalian penataan bangunan, arus lalulintas, pengelolaan investasi daerah, yang menimbulkan isu aktual Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju "kota metropolis";
2. Kota Malang merupakan daerah pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, sehingga mengundang penduduk yang berasal dari luar daerah untuk menjalani pendidikan atau bekerja di Kota Malang, yang menimbulkan isu aktual Tingginya arus urbanisasi ke Kota Malang.
3. Merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial, Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, yang menimbulkan isu aktual Masih tingginya angka kemiskinan.
4. Kualitas SDM pencari kerja belum bisa sepenuhnya memenuhi standar lowongan yang ada dan terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja, yang menimbulkan isu aktual Masih tingginya angka pengangguran
5. Masih kurangnya peran SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi dan informatika, masih banyaknya pelanggaran

ketentraman dan ketertiban, belum optimalnya penegakan peraturan daerah, dan belum optimalnya pelayanan perijinan, yang menimbulkan isu strategis Pelaksanaan *Good Governance* yang belum optimal.

6. Minimnya jumlah ruang terbuka hijau, Kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang menimbulkan isu strategis Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun
7. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di Kota Malang dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang menimbulkan isu strategis Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat dalam membangun kelurahan masih belum optimal dan Penyebaran tenaga kependidikan secara kualitas dan kuantitas belum merata, yang menimbulkan isu strategis Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal
9. Kurangnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, yang menimbulkan isu strategis Peran perempuan dan pemuda yang belum optimal dalam pembangunan;
10. Permasalahan Kesehatan Ibu, Kesehatan Bayi, Kesehatan Anak Balita dan Permasalahan Gizi Buruk, yang menimbulkan isu strategis Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal

11. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya Malang, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan asli Malang dan belum optimalnya pengembangan manajemen kepariwisataan, yang menimbulkan isu strategis Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;
12. Kurangnya permodalan yang disebabkan oleh sulitnya UMKM untuk memenuhi aturan-aturan yang harus dilengkapi sebagai salah satu persyaratan permodalan dari sumber pembiayaan baik dari Perbankan maupun BUMN dan Kurangnya jaringan usaha, sehingga belum mampu menciptakan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan pengusaha besar, yang menimbulkan isu strategis Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal
13. Industri yang dikembangkan di Kota Malang kurang berpihak pada industri kecil dan menengah dan Pergeseran paradigma ekonomi industri ke Ekonomi Kreatif menuntut upaya pembangunan berkelanjutan dan kurangnya promosi investasi, yang menimbulkan isu strategis Pelaku ekonomi sektor formal (skala besar) belum diberdayakan sebagai mitra pembangunan kota
14. Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penataan dan pengaturan transportasi di Kota Malang, yang menimbulkan isu strategis Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai

15. Masih banyak jalan Kota Malang yang berkondisi rusak, yang menimbulkan isu strategis Prasarana, Sarana dan Utilitas belum memadai untuk kebutuhan masyarakat.

Adapun kondisi capaian kinerja pada tahun 2013 pada tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2013

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
SOSIAL	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahtera-an Sosial (PMKS) terklasifikasi:	37363
	a) ODHA	350
	b) Korban NAPZA	51
	c) Pengemis	184
	d) Gelandangan	56
	e) Tunasusila	35
	f) Anak Jalanan	227
	g) Lanjut Usia Terlantar	174
	h) Fakir Miskin	36286
	2. Jumlah relawan sosial terlatih pendamping PMKS	8
	3. Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdaya-an sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,11%
	4. Persenta-se (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	61,12%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	5. persentase (%) panti sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtera-an sosial	50,00%
	6. persenta-se (%) wahana kesejahtera-an sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtera-an sosial	100%
	7. persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	11%
	8. persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
	9. persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan mengguna-kan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%
	10. Prosenta-se ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehab cacat, dll)	50%
	11. Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahtera-an sosial	240
	12. Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	5,20%
	13. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	1,09%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0,54%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	2. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	34,99%
SOSIAL	1. Ratio Tempat ibadah per satuan penduduk	3 : 1.000
	2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	20/1.786
	3. Cakupan modin penerima tunjangan	980/980
	4. Cakupan pendidik keagamaan penerima tunjangan	6400/6252
	5. Cakupan peningkatan kapasitas bagi pendidik keagamaan	0/6252
	6. Jumlah kegiatan dialog dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lintas agama dan keyakinan	5 (mengacu IKD)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	26,67%
	2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	65%
	3. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	65%
	4. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	62%
	5. Persentase penanganan konflik/ kekerasan berbasis SARA	100%
	6. Rasio Pos kamling per jumlah 100 KK	1 : 100
	7. Prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling	50%
	8. Rasio Petugas Linmas (1 RT 1 Linmas pada 2014)	0,63

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	9. Rasio Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	1,644
	10. Persentase konflik yang termediasi (konflik/per-kelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung)	100%
	11. Persentase organisasi antisipasi/ siaga bencana yang memiliki SDM terlatih dan perlengkapan standar penanganan bencana	100%
	12. Prosentase keaktifan koordinasi Muspika (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan)	100%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Jumlah organisasi perempuan	29
	2. Persentase kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi	100%
	3. Persentase organisasi/ kelompok yang mengembangkan pembinaan keluarga	100% (29 organisasi)
	4. Persentase kegiatan pembinaan dan pengembang-an fungsi keluarga yang difasilitasi	100%
	5. Jumlah lembaga perlindungan anak	1
	6. Persentase terselenggaranya kegiatan/ forum anak yang difasilitasi	10%
	7. Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	100%
	8. Persentase penanganan kasus tindakan asusila	100%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%
	10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	0%
	11. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%
	12. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%
	13. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	0%
	14. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0%
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah	25
	2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali/tahun	12
	3. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online) setiap hari	365

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	4. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 kali/tahun	12
	5. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya 12 kali/tahun setiap kecamatan	12
	6. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho 12 kali/tahun	12 kali 4.000 lbr
	7. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat kecamatan	180%% (10 KIM 5 Kec.)
	8. Cakupan pengguna informasi publik yang terlayani	100%
	9.Persentase informasi publik yang bisa diakses publik melalui website pemerintah daerah	100%
KEARSIPAN	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	Belum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG-KAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	1. Adanya SOP pelayanan informasi publik	Ada

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	3. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	ada
	5. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	100%
	5. Prosentase meningkat-nya jumlah Izin Terbit IMB	11,9%
	6. Lamanya proses penerbitan izin IMB, IG,Trayek dan IUJK	
	IMB yang dapat diproses langsung di BP2T	4 Hari
	IMB yang membutuhkan rekomendasi dari DPU PPB	8 Hari
	IG	9 Hari
	Trayek	4 Hari
	IUJK (baru;her registrasi;perpanjangan; rusak/hilang)	8 Hari; 2 Hari; 8 Hari; 4 Hari
	7. Prosentase kasus tumpang tindih fungsi dan tugas yang terselesaikan	100%
	8. Prosentase SOP penyelengga-raan pemerintah-an yang diterapkan	2% (2 SOP)
	9. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%
	10. Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	11. Prosentase pengaduan yang terselesaikan	100%
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1. Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	90,89%
	2. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	82%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	91,70%
	4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	10%
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG-KAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	1. Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah	Ada
	2. Adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah	Ada
	3. Prosentase peningkatan pajak daerah	49,9%
	4. Hasil audit LKD oleh BPK	WTP
	5. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%
	Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	Ada dalam bentuk SAKIP
	1. Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel	Ada
	Persentase jumlah aparatur yang naik pangkat	100%
	Jumlah aparatur pensiun dan MPP	361
	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	120 org
	2. Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur	0,70%
	3. Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar	0,3%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT	0
	5. Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV	47,5%
	6. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/dik-latpim tingkat III	82%
	7. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II	67%
	8. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I	0%
	9. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II	0%
	10. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III	0%
	11. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan	0%
	12. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset	79%
	13. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah	40 % (80/202 * 100)
	16. Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	6,3%
	2. Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN (SKP)	84%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	1. Persentase perda yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%
	2. Jumlah Perda Inisiatif masyarakat	10 Perda
	3. Cakupan anggota DPRD yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM	100% (45 org dari 45 org anggota 45 org anggota DPRD)
	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan dan evaluasi perda	100%
	Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	80%
	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1,2
STATISTIK	1. Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangun-an ekonomi	3 penelitian
	2. Jumlah hasil penelitian perencanaan pengembang-an kota	4 penelitian
	3. Jumlah penelitian perencanaan sosial budaya	10 penelitian
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4. Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	57
	5. Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	5
	6. Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100% (150 orang)
	7. Jumlah Musrenbang-cam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	5
	8. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	57

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	9.Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang kota	30% (50 orang)
	10. Jumlah Musrenbang-cam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	5
	11. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	57
LINGKUNGAN HIDUP	1. Jumlah Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	5
	2. Adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0
	3. Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1
	4. Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasik-an status mutu airnya	0%
	5. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti	100%
	6. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	25%
	7. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	6%
	8. Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan di infor-masikan status ke-	0%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	rusakannya	
	9. Persentase pemantauan terhadap penanganan air limbah	75%
	10. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	50%
	11. Persentase Industri yang memiliki AMDAL/izin lingkungan	0%
	12. Persentase perumahan yang memiliki izin lingkungan	0%
	13. Persentase kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/-izin lingkungan	0%
	14. Jumlah monitoring pelaksanaan AMDAL setiap tahun	5
	15. Persentase Peningkatan kualitas air, udara, tanah (%)	50%
	16. Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	3
	17. Persentase luasan ruang terbuka hijau	15,92%
	18. Jumlah ruas jalan terhijaukan	59
	19. Persentase kawasan terhijaukan	15,92%
	20. Persentase sampah terolah	30,18%
	21. Rasio pasukan kuning per 100 KK	0,32
	22. Rasio gerobak pengangkut sampah per 100 KK	0,74
	23. Rasio kontainer di setiap TPS per 1000 KK	0,32
	24. Rasio tempat pembuangan sampah sementara per 1000 KK	0,26

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	25. Luasan TPA terbangun	30,5 Ha
	26. Persentase volume sampah yang tertangani	95,42%
	27. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah	509
	28. Persentase taman kota terpelihara	100%
	29. Persentase tersedianya penerangan jalan umum pada jalan kota	63,66%
	30. Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan taman kota	1
	31. Persentase Penerangan Jalan Umum kota terpelihara	100%
PENATAAN RUANG	1. Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	20%
	2. Persentase Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang	90%
PERTANAHAN	3. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah	Ada
	4. Persentase lahan aset yang sudah bersertipikat	38%
	5. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah	100%
	6. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang pendapatan asli daerah	51,13%
	7. Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	Rp 3.265.000.000,00
PENDIDIKAN	Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah
	Prosentase kehadiran pengawas ke satuan pendidikan Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan	75% (320/((36x(425/36))x x 100% pengawas TK/SD : skn:3 blim:3 low:3 ked:2 klo:4 pengawas SMP/SMA : 15 pengawas SMK : 6)
	Persentase Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka:	100% (318 sekolah seluruh-nya melaksa-nanakan 18 jam per minggu)
	a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;	100% (318 sekolah seluruh-nya melaksa-nanakan 18 jam per minggu)
	b) Kelas III : 24 jam per minggu;	100% (318 sekolah seluruh-nya melaksa-nakan 18 jam per minggu)
	c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau	100% (318 sekolah seluruh-nya melaksa-nakan 18 jam per minggu)
	d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	100% (318 sekolah seluruh-nya melaksa-nakan 18 jam per minggu)
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku	100% 318 sekolah seluruh-nya melaksa-nakan 18 jam per minggu

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100% 551 kepala sekolah seluruh-nya melaksa-nakan supervisi
	Persentase Kepala sekolah atau madrasah yang me-nyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampai-kan reka-pitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester	100% 551 kepala sekolah seluruh-nya yang menyam-paikan laporan
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruh-nya menerap-kan prinsip-prinsip manaje-men berbasis sekolah (MBS)
	Angka Kelulusan	
	- AL SD/MI	99,21%
	- AL SMP/MTs	99,63%
	- AL SMA/SMK/-MA	99,08%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	105,50%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/-MA	141,81%
	Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata	
	- SD/MI	11
	- SMP/MTS	6
	- SMA/MA/-SMK	8
	Jumlah pameran karya siswa	2

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional	2
	Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif	2
	Jumlah siswa yang diberi *reward* atas karya inovatif mereka	2
	Angka partisipasi murni	
	- APM SD/MI/-Paket A	102,44
	- APM SMP/MTS-/Paket B	75,38
	- APM SMA/MA/SMK/Paket C	81,88
	Persentase SD/MI per jumlah total SD/MI	
	- Klojen	10,08
	- Kedungkan-dang	26,61
	- Blimbing	19,75
	- Lowokwaru	20,56
	- Sukun	21,77
	Persentase SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs	
	- Klojen	24,39
	- Kedungkan-dang	21,95
	- Blimbing	18,69
	- Lowokwaru	20,32
	- Sukun	14,63
	Persentase SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/-SMK	
	- Klojen	30
	- Kedungkan-dang	16,36

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	- Blimbing	13,64
	- Lowokwaru	24,55
	- Sukun	15,45
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	- APK SD/MI	114,78
	- APK SMP/MTS	104,19
	- APK SMA/MA-/SMK	112,32
	Angka melek huruf masyarakat	98,50%
	Angka Putus Sekolah (APS)	
	- APS SD/MI	0,05
	- APS SMP/MTS	0,19
	- APS SMA/SMK/-MA	0,72
	Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)
	Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (123 Kasek SMP berkualifikasi S1)
	Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (36 orang pengawas memiliki S1
	Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100% (‘11.625 guru menyam-paikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencana-kan pembelajaran, melaksana-kan pem-belajaran, menilai hasil pem-belajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksana-kan tugas tambahan	100% (7856 guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu
	Persentase guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100% ('11.625 guru yang mampu menerap-kan rencana pelaksanaan pembela-jaran (RPP)
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan	100% (319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)
	Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru atau sejenisnya	5409
	Rasio guru / murid per kelas	
	- SD/MI	1,63
	- SMP/MTS	2,20
	- SMA/MA	2,69
	- SMK	2,35
	Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI	81,88
	Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI	70,31

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI	70,31
	Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs	91,53
	Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs	27,97
	Rasio guru / murid	
	- SD/MI	18,33
	- SMP/MTS	13,23
	- SMA/MA	9,37
	- SMK	7,22
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	
	- SD/MI	1:237
	- SMP/MTS	1:314
	- SMA/MA/-SMK	1:417

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	48,75
	Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik	56,88
	Persentase SMP/MTs dengan kondisi baik	69,11
	Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik	55,56
	Persentase Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs	74,80
	Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab Bahasa yang dilengkapi peralatan multimedia	50.84 (30 SMA memiliki lab bahasa /59 jumlah SMA)
	Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lap IPA	40.67 (24 sekolah memiliki ruang lab/59 SMA)
	Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan	95,92
	Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SD/MI	100% dari 318 sekolah
	Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SMP/MTS	81.3% (100 guru yang telah dilengkapi neja kursi dibandinng 123 guru

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs	95,93
	Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbanding-an satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI	71.39 ('62.156 buku teks/87.065 peserta didik)
	Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakan-nya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbanding-an satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs	59.36 (23507 buku teks /39598 peserta didik)
	Persentase Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI	36.25 (116 sat peraga IPA/320 SD)
	Persentase sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan	87.54 (464 sekolah dengan kamar mandi/-530 seluruh sekolah
	Persentase sekolah yang memiliki fasiltas olah raga yang layak	58.11 ('308 sekolah yg memiliki saraba olahraga/530 sekolah)
	Persentase Ketersediaan sarana IT dalam penyelengga-raan pendidikan	81.13 (430 sekolah yang memiliki sarana IT/530 sekolah)

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100% (530 sekolah seluruh-nya memiliki jarak yang terjang-kau
	Jumlah pengunjung perpustaka-an keliling pertahun	8.160 0rang
	Cakupan perpustaka-an kelurahan	57 kel.102 perpustakaan
	Jumlah pengunjung perpustaka-an kota	240.045 orang
	Jumlah judul buku di perpustaka-an kota	141.794 eksemplar
	Adanya Fasilitas virtual library di perpustaka-an kota	1 paket
	Jumlah sarana kendaraan perpustaka-an keliling	7 unit
	Jumlah Taman Baca Masyarakat (TBM)	102
	Jumlah lembaga PAUD setiap RW	2 (2 lembaga PAUD setiap RW)
	Jumlah peserta PAUD	19.132
	Persentase peserta PAUD/ anak usia PAUD	37,89%
	Jumlah lembaga bimbingan belajar	202
	Persentase LSM yang bergerak di bidang pendidikan non-formal	2
	Jumlah lomba minat-bakat tingkat kota	1 kali

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali
	Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat nasional	1 kali
	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali
	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Nasional	1 kali
	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat internasional	1 kali
	Jumlah bantuan yang diberikan pada Anak Berkebutuh-an Khusus (ABK)	31
	Rasio SLB/ jumlah ABK	1:53 (1 SLB terdapat 53 siswa ABK)
	Rasio guru/jumlah ABK	1:20 (1 guru mengajar 20 siswa ABK)
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin	1 kerjasama
	Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta	100% (7000 siswa)
	Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin	2 kendara-an (untuk SMK 13)
	Persentase sekolah yang melakukan audit independen oleh KAP	0%
	Persentase sekolah yang mempublika-sikan laporan keuangan secara terbuka	100% (530 sekolah)

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Adanya kebijakan sebagai pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan	0
	Persentase penanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyalahgu-naan biaya penyelengga-raan pendidikan	100% (seluruh penaduan tertangani)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pelatihan pemberdaya-an pemuda	3
	Jumlah Industri Olahraga	51
	Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga	0
	Jumlah kegiatan kepemudaan	8
	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	240
	Prosentase keaktifan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif	22%
	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga	1
	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur	25
	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional	1
	Jumlah even olahraga tingkat kota	4
	Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur	4
	Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat nasional	4
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur	20
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional	45
	Jumlah organisasi olah raga prestasi yang dibina	37

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olah raga prestasi	42
	Jumlah fasilitasi pembinaan olahraga	0
	Jumlah lapangan olahraga	20
	Jumlah pembangun-an lapangan olahraga	0
	Persentase pemeliharaan lapangan olahraga	70%
	Jumlah kegiatan pembinaan atlit	0
	Jumlah club olahraga	145
	Jumlah cabang olahraga	42
KESEHATAN	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	0
	Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS	13%
	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	0,28
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	1,09
	Persentase rumah sakit yang telah terakreditasi	42% 10 RS dari 24 RS
	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0.09 1 dokter untuk 900 penduduk (74 dokter)
	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,39
	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	46,83
	Rasio dokter spesialis per	6,03

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	100.000 penduduk	
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,07
	Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk (bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitasi, teknis medis, keterampilan psikiater)	30,03
	Persentase persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%
	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100%
	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik	60%
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan	100%
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rasio posyandu per satuan balita (1 : 80 balita)	1 : 103
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%
	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%
	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	89%
	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	54,89%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Cakupan kunjungan bayi.	68,29
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immuniza-tion (UCI).	47,37%
	Cakupan pelayanan anak balita.	54,03%
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%
	Jumlah kader posyandu	5904
	Persentase kader posyandu aktif	100% (5904/5904)
	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	81,75%
KESEHATAN	Persentase balita gizi buruk	0,45%
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100%
	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	98,83%
	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	3,90%
	Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif	15,72%
	Penderita DBD yang ditangani	100%
	Penemuan Penderita Diare	6,51
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam	100%
	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	98.25% (56 kelurahan dari 57)
	Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	0

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah rujukan penderita HIV AIDS di Puskesmas	0
	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan	0
	Jumlah masyarakat yang terlayani oleh bakti sosial perguruan tinggi	0
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55,88%
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	55,88%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	73.25% (94.250/129.038)
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2
	Persentase akseptor KB	81%
	Cakupan peserta KB Aktif	73,25%
	Persentase peserta KB Aktif	81%
	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Kel. Sejahtera I	55454
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun 3,5 % pada 2014	1,02%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif 65 % pada 2014	75,74%
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada 2014	13,24%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 % pada 2014	70,00%
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% pada 2014	81,93%
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	1:02
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBL) 1 Petugas di setiap Kelurahan	1:01
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100%
	Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja	
	Jumlah sosialisasi KIE	33180 kali (5 layanan x 553 RW x 12 bulan)
	Persentase Ketersediaan alat kontrasepsi	100% (16.169/16.169)
	Jumlah dan jenis layanan KB	6
	Jumlah pria ikut KB	288
	Jumlah Petugas Penyuluh KB	

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Lapangan (PPKBL)	
	Adanya Pengkatagorian Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)	Ada
	Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB	1106
KEBUDAYAAN	Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang	30%
	Jumlah kelompok kebudayaan yang masih aktif	12
	Jumlah pembinaan terhadap kelompok-kelompok kebudayaan	224
	Jumlah penghargaan yang diterima oleh budayawan-/seniman, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional	4
PARIWISATA	Jumlah event pariwisata/-budaya yang diadakan oleh budayawan dan masyarakat	1
	Jumlah media promosi wisata budaya Kota Malang	5 Koran Lokal 10 TV Lokal
	Jumlah keikutserta-an budaya-wan dalam event-event wisata	3
	Jumlah event promosi wisata budaya	6
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan pariwisata kebudayaan kota Malang	3
	Jumlah penggunaan Gedung Kesenian untuk kegiatan seni budaya	20
	Cakupan kajian seni 50% pada 2014	50%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Cakupan fasilitasi seni	143
	Cakupan gelar seni	133
	Cakupan misi kesenian	100
	Cakupan SDM kesenian	250
	Cakupan tempat kesenian	100
	Cakupan organisasi kesenian	196
	Rata-rata persentase tingkat okupansi hotel	49%
	Jumlah restoran/ rumah makan	191
	Jumlah Objek cagar budaya	212
	Persentase objek Cagar Budaya yang terawat	40%
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Konservasi Cagar Budaya	100%
	Jumlah obyek wisata aset daerah yang direvitalisasi	1
	Jumlah penyedia jasa transportasi wisata	113
	Adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA)	1
	Jumlah pusat informasi wisata	4
	Jumlah media promosi wisata	8
	Adanya kalender wisata kreatif berbasis kegiatan masyarakat	10
	Persentase Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat	11
	Rasio lokasi rekreasi murah per 100.000 penduduk	0,3 uraian

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk merevitalisasi taman dan hutan kota menjadi lokasi rekreasi murah	1
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan lokasi wisata murah masyarakat	0
	Jumlah kegiatan masyarakat yang menunjang pariwisata	10
	Jumlah kelompok/ komunitas sadar wisata	0
KOPERASI DAN UKM	Jumlah kebijakan daerah yang melindungi perkembang-an UKM	0
	Jumlah UKM	10.611
	Jumlah asosiasi pengusaha UKM	1
	Persentase wirausaha baru yang aktif	210
	Adanya database dan profil UKM di Kota Malang	1
	Jumlah perizinan usaha UKM	548
		0
	Persentase penyerapan produk unggulan UKM di pasar modern (minimarket dan supermarket)	0
	Jumlah tenaga kerja UKM	43.234
	Jumlah promosi pameran daerah yang diikuti UKM per tahun	6
	jumlah pusat konsultasi bisnis	1
	Terselengga-ranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UKM tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi	0
	Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	1,09%
	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0,54%
	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	34,99%
	Jumlah perputaran modal UKM	30 milyar
	Jumlah Nilai transaksi dalam tiap promosi UKM	15 jt
	Jumlah pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UKM	5
	Cakupan pelaku UKM yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan	1%
	Jumlah Besaran kredit yang disalurkan pada sektor UKM	316 milyar
	Persentase Tingkat pengembalian kredit UKM	80%
	Jumlah kelompok pelaku ekonomi produktif	149
	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan kepada pelaku ekonomi produktif	1
	Jumlah pelaku ekonomi produktif penerima akses permodalan	75
PERDAGANGAN	Adanya hasil pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum dilakukan penertiban	0
	Jumlah PKL yang mendapat-kan KUR	0
	Jumlah Besar kredit yang dikucurkan oleh kalangan perbankan kepada PKL	0

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Persentase Tingkat pengembali-an kredit PKL	0
	Jumlah kawasan khusus PKL	1
	Adanya kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional	1
	Cakupan pedagang tradisional yang menerima manfaat dari program pem-berdayaan	6000
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pemberdaya-an pedagang pasar tradisional	3
	Jumlah infrastruktur pasar tradisional yang direhabilitasi melalui kerjasama dengan pihak lain	3
	Jumlah pasar tradisional	28
	Jumlah paguyuban pedagang pasar tradisional	28
	Persentase infrastruktur bangunan pasar tradisional yang direhabilitasi	32%
KOPERASI DAN UKM	Persentase KSP / USP sehat	16%
	Persentase koperasi berkategori sehat / baik / yang sudah menerapkan sistem pencatatan sesuai Standart Akuntansi Indonesia	14%
	Jumlah koperasi berprestasi	2
	Persentase permasalah-an perkoperasi-an yang tertangani	60%
PERTANIAN	Jumlah Nilai produksi hasil pertanian (ton)	16.243
	Jumlah Nilai produksi hasil perkebunan (ton)	113.449
	Jumlah Nilai produksi hasil peternakan (ton)	759.952

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Jumlah nilai produksi hasil perikanan (ton)	40.519
KELAUTAN DAN PERIKANAN		
KETAHANAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% pada 2015	57,44%
	Penguatan Cadangan Pangan 60% pada 2015	50%
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	60%
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	60%
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60%
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	50%
PENANAMAN MODAL	1. Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada
	2. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0
	3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bi-dang usaha unggulan	Ada
	4. Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	6 MOU
	5. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	9 kegitan
	6. Terselenggaranya bimbingan pelaksana-an kegiatan penanaman modal kepada	0

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	masyarakat dunia usaha	
	7. Jumlah investor baru skala nasional	9
PERDAGANGAN		
KETENAGA-KERJAAN	1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %
	2. Persentase tenaga kerja yang mendapat-kan pelatihan berbasis masyarakat	71%
	3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0% (pelatihan kewirausahaan akan dilaksanakan tahun 2014)
	4. Jumlah Pelayanan Penempat-an Tenaga Kerja	341 orang
KETRANS MIGRASIAN	5. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempat-kan	28%
	6. Jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	1.035 perusahaan
	7. Angka partisipasi angkatan kerja	62,95 %
	8. Jumlah pengangguran terbuka	7.145
	9. Rasio daya serap tenaga kerja	64,81
	10. Jumlah Pelayanan Kepeserta-an BPJS Ketenaga-kerjaan	48.385 orang
	11. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga-kerjaan	48.385 orang
	12. Upah Minimum Kota (UMK)	18%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	13. Jumlah perusahaan yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	707
KETENAGA-KERJAAN	14. Persentase Penyelesai-an Perselisih-an Hubungan Industrial	77%
	15. Persentase kasus yang diselesai-kan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65 %
	16. Jumlah kasus Perselisih-an buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	35 kasus
	17. Persentase Pemeriksa-an Perusahaan	68 %
	18. Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	38 %
INDUSTRI	1. Jumlah kerjasama alih TTG dengan perguruan tinggi	40 kerja sama
	2. Jumlah IKM penerima alih TTG	120
	3. Cakupan IKM penerima hibah sarana produksi	10%
	5. Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	60%
	6. Persentase IKM yang mengembangkan kerjasama produksi	100%
PERHUBUNGAN	1. Jumlah titik rawan macet	33
	2. Persentase titik rawan macet yang berhasil diurai	15,15%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	3. Persentase ketersediaan SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Evaluasi Andal Lalin, Pengelolaan Parkir	100%
	4. Persentase ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%
	5. Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor	Ada
	6. Cakupan kendaraan wajib uji KIR yang terlayani	73,79%
	7. Persentase tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor per 4.000 kendaraan wajib uji	100%
	8. Rasio infrastruktur perlengkapan jalan	0,49
	9. Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	49,28%
	10. Jumlah titik parkir di tepi jalan umum	412
	11. Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum	412
	12. Persentase halte dalam kondisi baik	100%
	13. Persentase ketersediaan halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	86,11%
	14. Persentase ketersediaan terminal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%
	15. Jumlah penertiban terminal bayangan	11
	16. Persentase Terpenuhi-nya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	94,96%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	17. Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek	48
	18. Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 75% untuk 2014	62,36%
	19. Jumlah izin trayek angkutan	1808 izin 3616 izin
	20. Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat	2
	21. Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas	6 Rekom
PEKERJAAN UMUM	1. Jumlah peralatan perawatan jalan yang cukup	1
	2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,27
	3. Persentase kondisi jalan yang baik	90,59%
	4. Persentase jembatan standar (lebar minimal 6 meter) yang dilalui kendaraan Roda 4	48%
	5. Jumlah pembangun-an jalan dan jembatan baru	
	- jalan	0
	- jembatan	1
	6. Jumlah pembangun-an pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki dan penyandang cacat	9
PERUMAHAN	1. Adanya peta wilayah kawasan kumuh	0 PLPBK
	2. Persentase penurunan kawasan kumuh	15%
	3. Persentase wilayah kawasan kumuh yang tidak terjangkau sarana air bersih	16%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	4. Jumlah wilayah kawasan kumuh yang tidak bersanitasi	16 %
	5. Rata-rata prosentase rumah tinggal bersanitasi di wilayah kumuh	84%
	6. Prosentase rumah layak huni di wilayah kumuh	84%
	7. Persentase Rumah Tangga (RT) yang mengguna-kan air bersih di wilayah kumuh	84%
	8. Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	200
	9. Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	116.857
	10. Jumlah Rumah tangga pengguna listrik	278.471
	11. Jumlah Rumah tangga ber-Sanitasi sehat	85%
	12. Prosentase rumah layak huni	84%
	13. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	200 Unit
	14. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	96%
	15. Cakupan gedung daerah/Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial yang memenuhi standar	60%
	16. Prosentase rumah tinggal (RT) layak huni yang mengguna-kan air bersih	16%
	17. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota 25% pada 2015	80%
	18. Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	75%
	19. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000	85%

BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR
	Liter Pada WMK	
	20. Luasan PSU yang dibangun pihak ke-tiga	10%
	21. Rasio Luasan PSU yang diserahkan ke pemkot dibanding luasan PSU yang ada	10%
	22. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	90%
PEKERJAAN UMUM	23. Panjang drainase baru yang dibangun	19.9 km
	24. Persentase pemeliharaan drainase	2,51%
	25. Jumlah ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3 Jaringan
PERUMAHAN	26. Jumlah Tempat Pemakaman Umum	9 TPU
	27. Luas lahan Tempat Pemakaman Umum	447,396 m^2
	28. Rasio luas lahan Tempat Pemakaman Umum / 1.000 orang	529,04 m^2/1.000 orang

F. Capaian Berdasarkan MDG's

Berdasarkan pencapaian pembangunan milenium indonesia, ada beberapa prioritas penting yang juga menjadi acuan bagi pembangunan daerah di Kota Malang.

Pertama adalah dalam tujuan **Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan**. Di Kota Malang Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 4,10%, sedangkan pada tahun

2015 sebesar 4,2%. Dalam hal Peningkatan status gizi balita, di Kota Malang persentase balita gizi buruk pada tahun 2013 sebesar 0,11%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 0,14%(sumber:Lakip 2013).

Kedua adalah dalam tujuan **Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua**. Mengacu pada angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2016, APM Sekolah dasar terealisasi 82,79 %. Dan untuk angka melek huruf, dikota malang tercatat pada tahun 2016 sebesar 99,91%(sumber:Lakip 2016).

Ketiga adalah dalam tujuan **Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**. Hal ini terbukti dengan proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD Kota Malang periode 2009-2014 sebesar 20%(sumber : Kota Malang Dalam Angka 2013). Sedangkan untuk IPG dan IDG di Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 57,83 dan 41,48.

Keempat, dalam **Upaya Meningkatkan Kesehatan Ibu,** proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 92,24%. Sedangkan cakupan pelayanan *Antenatal Care* (ANC) bagi ibu hamil pada tahun 2016 sebesar 95,11%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 92,24%. Dan pada Desember 2016, untuk angka *Unmeet Need* (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) sebesar 22,79% (sumber : Kota Malang Dalam Angka 2016).

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab II telah diuraiakan kondisi riil daerah yang ada di Kota Malang serta tantangan-tantangan riil yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan tersebut, dibutuhkan program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan Pemerintahan Daerah tersebut, maka diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa aturan Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, (baik APBD, Perubahan APBD, maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan APBD Tahun 2009 – 2013 perlu diketahui komposisi dan proporsi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan Neraca Daerah Tahun 2009 – 2013.

1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

(1) Hasil Pajak Daerah;

(2) Hasil Retribusi Daerah;

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari :

(1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

(2) Dana Alokasi Umum, dan

(3) Dana Alokasi Khusus.

Sumber dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

(1) Pendapatan Hibah;

(2) Dana Darurat;

(3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;

(4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

(5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat "*given*" dan merupakan dana transfer sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Sedangkan sumber pendapatan yang dapat ditentukan target perolehannya oleh Pemerintah Daerah adalah sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Secara rinci Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2009 – 2013

NO	Uraian	Tahun Anggaran					Pertum buhan Rata-rata (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan daerah	798,840,456,272.2	988,288,099,524.7	1,102,655,771,801.7	1,356,369,664,977.8	1.524.846.569.429,26	16.71
1.1	Pendapatan asli daerah	92,476,383,151.21	113,490,265,808.7	185,818,563,982.76	230,295,806,325.83	317.772.985.191.26	34.46
1.1.1	Pajak daerah	49,467,066,282.96	60,151,082,871.20	125,332,979,877.83	159,124,119,792.89	238.499.748.161,57	46.76
1.1.2	Retribusi daerah	23,533,733,096.00	27,342,779,004.00	31,217,425,090.00	35,596,756,524.00	38.460.785.953,00	13.04
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11,623,194,754.85	13,255,093,254.18	13,313,185,918.32	14,350,056,538.28	16.571.050.907,26	17.64
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7,852,389,017.40	12,741,310,679.40	15,954,973,096.61	21,224,873,470.66	28.210.928.956,97	36.72
1.2	Dana perimbangan	599,009,597,671.0	626,023,144,999.0	646,871,523,364.00	817,671,023,179.00	863.736.860.965,00	9.89
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	106,673,389,671.0	123,635,357,999.0	97,800,736,364.00	46,100,612,909.00	86.734.213.965,00	6.08
1.2.2	Dana alokasi umum	471,739,208,000.0	494,910,987,000.0	533,491,887,000.00	665,927,808,000.00	746.686.937.000,00	12.41
1.2.3	Dana alokasi khusus	20,597,000,000.00	7,476,800,000.00	15,578,900,000.00	21,897,310,000.00	30.315.710.000,00	30.92

1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107,354,475,450.0	248,774,688,717.0	269,965,684,455.00	308,402,835,473.00	343.336.723.273,00	39.38
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	11,000,000,000.00	-	17.756.000.000,00	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	0,00	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	66,177,847,450.00	89,300,667,042.00	105,083,231,095.00	101,923,440,473.00	109.145.826.273,00	12.72
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	9,501,750,000.00	124,407,431,675.0	148,927,460,600.00	154,326,955,000.00	191.569.752.000,00	309.93
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	31,674,878,000.00	35,066,590,000.00	4,954,992,760.00	52,152,440,000.00	24.865.145.000,00	206.24

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Daerah adalah sebesar 16,71 %. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan dengan proporsi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dimana pada Tahun 2013 mencapai Rp. 746,686,937,000.00 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,89 %. Diikuti oleh Pajak Daerah, dimana pada Tahun 2013 telah mencapai Rp. 238.499.748.161,57 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 46,76 %.

Adapun Pertumbuhan rata-rata tertinggi dari Tahun 2009 – 2013 adalah pada Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, dengan prosentase sebesar 309.93 % dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan prosentase sebesar 206.24 %.

Angka tersebut dapat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan secara nasional dan di derah lain, khususnya provinsi Jawa Timur. Secara nasional, setiap tahun sejak 2009 hingga 2012 seluruh daerah di Indonesia menganggarkan kenaikan Pendapatan Daerah yang secara rata-rata peningkatannya mencapai 14,7% per tahun. Peningkatan pendapatan tertinggi adalah pada tahun 2012 sebesar 19,9%, di mana Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 459,9 triliun meningkat menjadi sebesar Rp. 551,6 triliun pada tahun 2012. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009 secara nasional Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di kisaran Rp. 19,5 triliun, kemudian mengalami rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 47,2%, sehingga di tahun 2012

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp. 58,0 triliun.

Persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar 89,7% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya dan di tahun 2012 dianggarkan meningkat 38,3%. Berdasarkan data trend 2009 hingga 2012 maka kita juga bisa melihat gambaran tingkat pertumbuhan total Pendapatan Daerah beserta komponen utamanya yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Secara agregat pendapatan seluruh daerah per provinsi dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendapatan daerah yang tertinggi adalah di Provinsi Banten (19,6%), lalu diikuti oleh Provinsi Bali (19,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (19,4%). Sedangkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang terendah adalah di Provinsi Sulawesi Utara (9,9%), Provinsi Maluku Utara (10,0%), dan Povinsi Kalimantan Timur (10,0%).

Bila dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhan PAD per tahunnya yang tertinggi adalah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 35,2%, lalu diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 31,6%, dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 31,5%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD yang terendah yaitu di bawah 10% terdapat di Provinsi Aceh yaitu di kisaran 5,0%, Provinsi Bengkulu. sebesar 5,8%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,0% dan Provinsi Riau sebesar 8,7%.

Karena untuk menjadi kota Mandiri kemampuan keuangan Daerahnya untuk mencukupi pengeluarannya harus bisa mencapai lebih besar dari 75% sedangkan Kota Malang rata-rata kemampuan untuk mencukupi keuangannya sendiri baru sekitar 16.71%. Hal ini

berarti Kota Malang jika dilihat dari kemampuan keuangannya belum dapat dikatakan mandiri karena sumber keuangannya sebagian besar masih ditopang dari pendanaan Pemerintah Pusat.

Kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah sebenarnya disebabkan oleh kecilnya nilai faktor penentu besaran Pendapatan Asli Daerah yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah,. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Disatu sisi pendapatan dari pajak yang nilainya cukup besar seperti misalnya pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak kendaraan bermotor masuk pada pendapatan pajak Daerah Propinsi.

Melihat kenyataan tersebut betapa besar pajak kendaraan bermotor yang masuk sebagai pendapatan daerah, tetapi tidaklah masuk pada daerah kota/kabupaten melainkan masuk pada daerah Propinsi, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota/ Kabupaten dari tahun ketahun nilainya relatif tetap rendah. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran terkait dengan peranan PAD terhadap belanja langsung daerah serta masih kecilnya tingkat kemandirian keuangan Kota Malang.

Saran serta langkah-langkah yang bisa ditempuh pemerintah Kota Malang adalah dengan meningkatkan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menumbuh

kembangkan iklim investasi di kota Malang agar lebih mempunyai daya tarik bagi calon investor. Karena dengan meningkatnya investasi di kota Malang akan dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah maupun retribusi daerah mengingat kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD sangat besar.

Pengelolaam kekayaan daerah terpisahkan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintahan Kota Malang, karena melalui pengelolaan kekayaan daerah terpisahkan Pendapatan Asli Daerah kota Malang akan dapat meningkat, mengingat pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah terpisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen sumber pendapatan yang pencapaian targetnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah. Pencapaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2013

Thn	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas	Ket.
	PAD (rp)	Pertum-buhan	PAD (rp)	Pertum buhan		
2009	92,772,122,460.02		92,476,383,151.21		99.68	
2010	104,802,485,741.16	12.97	113,490,265,808.78	22.72	108.29	
2011	162,332,588,459.55	54.89	185,818,563,982.76	63.73	114.47	
2012	200,671,267,208.87	23.62	230,295,806,325.83	23.94	114.76	
2013	298.417.399.028,87	48.71	317.850.423.684,26	38,02	106,51	
Rata-rata Per Tahun		35.05		37.10	108,74	

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan sebesar 35,05%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan sebesar 37,10 %

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 target PAD meningkat sebesar Rp.12.030.363.281,14 atau sebesar 12,97 % jika dibandingkan dengan target tahun 2009. Tahun 2011 target PAD meningkat sebesar Rp. 57.530.102.718,39 atau sebesar 54,89 % jika dibandingkan dengan target tahun 2010. Tahun 2012 target PAD meningkat sebesar Rp.38.338.678.749,32 atau sebesar 23,62 % jika dibandingkan dengan target tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 target PAD meningkat sebesar Rp. 97.746.131.820,00 atau sebesar 48,71% jika dibandingkan dengan target tahun 2012.

Secara rinci target Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 - 2013

	URAIAN	TARGET (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hasil Pajak Daerah	49.144.638.669,9	56.142.003.282,9	104.644.701.180,71	125.828.676.756,77	210.287.899.778,18
2	Hasil Retribusi Daerah	22.880.899.999	26.019.619.499	29.130.485.000	33.999.701.999	38.366.632.198,90
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.628.777.255,85	11.706.439.124,26	13.258.455.293,82	20.624.513.916,82	21.551.938.094,82
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.117.806.535,27	10.934.423.835	15.298.946.985,02	20.218.374.536,28	28.210.928.956,97
JUMLAH		92.772.122.460,02	104.802.485.741,16	162.332.588.459,55	200.671.267.208,87	298.417.399.028,87

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 realisasi PAD meningkat sebesar Rp.21.013.882.657,57 atau sebesar 22,72 % jika dibandingkan dengan target tahun 2009. Tahun 2011 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 72.328.298.173,98 atau sebesar 63,73 % jika dibandingkan dengan target tahun 2010. Tahun 2012 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 44.477.242.343,07 atau sebesar 23,94 % jika dibandingkan dengan target tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 realisasi PAD tahun 2013 mencapai Rp.87.554.617.358,43 atau 38,02% dari target anggaran.

Secara rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 - 2013

	URAIAN	REALISASI (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hasil Pajak Daerah	49.467.066.282,96	60.151.082.871,20	125.332.979.877,83	159.124.119.792,89	238.499.748.161,57
2	Hasil Retribusi Daerah	23.533.733.096,00	27.342.779.004,00	31.217.425.090,00	35.596.756.524,00	38.460.785.953,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.623.194.754,85	13.255.093.254,18	13.313.185.918,32	14.350.056.538,28	16.571.050.907,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.852.389.017,40	12.741.310.679,40	15.954.973.096,61	21.224.873.470,66	24.241.400.169,43
JUMLAH		92.476.383.151,21	113.490.265.808,78	185.818.563.982,76	230.295.806.325,83	317.772.985.191,26

Permasalahan dan Solusi

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap Pendapatan Daerah.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaataan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.

c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi / sistem Informasi manajemen pajak daerah
f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
g. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan.
h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah

2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat dari proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kota Malang Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp.)

NO	URAIAN		2009	2010	2011	2012	2013
1	2		3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANG-SUNG	ANGGARAN	448,511,642,802.69	614,252,789,297.37	636,546,820,751.64	633,678,957,742.37	752.329.517.210,27
		REALISASI	437,716,514,512.03	593,996,588,240.46	678,823,982,158.50	648,419,281,076.37	752.757.621.404,05
		%	97.59	96.70	106.64	102.33	100,06
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	377,417,702,518.28	500,730,670,121.23	557,065,649,744.33	612,383,839,454.35	686.948.580.883,52
		REALISASI	368,239,197,506.00	490,523,672,242.00	606,120,627,899.81	629,284,953,483.64	767.293.384.806,10
		%	97.57	97.96	108.81	102.76	111,70
2.1.2	BELANJA BUNGA	ANGGARAN	2,146,989,033.57	2,196,448,962.78	682,272,974.81	682,272,974.81	36.157.840,95
		REALISASI	1,772,673,056.03	2,196,448,962.78	682,272,974.81	180,003,164.73	36.157.840,95
		%	82.57	100.00	100.00	26.38	100,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	ANGGARAN	-	-	-	-	0.00
		REALISASI					0.00
		%	-	-	-	-	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	ANGGARAN	58,246,430,500.00	82,742,250,000.00	61,401,396,419.00	17,926,364,000.00	62.344.799.800,00
		REALISASI	58,245,490,500.00	82,510,449,000.00	60,846,467,169.00	17,631,219,000.00	83.046.361.500,00
		%	100.00	99.72	99.10	98.35	133,20
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	ANGGARAN	9,875,500,000.00	17,892,780,000.00	13,837,280,000.00	875,500,000.00	238.500.000,00
		REALISASI	9,346,535,000.00	8,475,793,500.00	8,637,026,000.00	676,728,700.00	129.250.000,00
		%	94.64	47.37	62.42	77.30	54,19

2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGARAN	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
		REALISASI	63,254,600.00	64,402,800.00	63,549,200.00		73.314.450,00
		%	63.25	64.40	63.55	-	73,31
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	ANGGARAN	-	-	-	-	663.728.700,00
		REALISASI	-	-	-	-	663.728.700,00
		%	-	-	-	-	100,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	ANGGARAN	725,020,750.84	10,590,640,213.36	3,460,221,613.50	1,710,981,313.21	1.997.749.985,80
		REALISASI	49,363,850.00	10,225,821,735.68	2,474,038,914.88	604,362,328.00	17.022.672,00
		%	6.81	96.56	71.50	35.32	0,85
2.2	BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN	391,623,307,546.15	404,737,887,493.00	482,106,109,164.04	728,000,023,357.23	877.264.638.930,07
		REALISASI	371,411,671,684.88	373,971,057,079.13	369,407,140,670.52	603,893,364,536.40	737.221.252.303,40
		%	94.84	92.40	76.62	82.95	84,04
	JUMLAH BELANJA DAERAH	ANGGARAN	840,134,950,348.84	1,018,990,676,790.37	1,118,652,929,915.68	1,361,678,981,099.60	1.629.594.156.140,34
		REALISASI	809,128,186,196.91	967,967,645,319.59	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1.486.364.066.886,45
		%	96.31	94.99	93.70	91.97	91,21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2012 adalah sebesar 102,33% atau Rp. 648,419,281,076.37 dari anggaran awal sebesar Rp. 633,678,957,742.37. Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 752.757.621.404,05 atau 100,06% dari anggaran awal sebesar Rp. 752.329.517.210,27.

Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 berkisar antara 76,62 sampai dengan 94,84.

Pada Tahun 2011, Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 369,407,140,670.52 atau 76,62% dari anggaran awal sebesar Rp. 482,106,109,164.04. Dan untuk tahun anggaran 2012 Realisasi Belanja Langsung sebesar 82,95% dari target anggaran sebesar Rp. 728,000,023,357.23 dan terealisasi sebesar Rp.603,893,364,536.40. Sedangkan tahun anggaran 2013 Realisasi Belanja Langsung sebesar 84,04% dari target anggaran sebesar Rp. 877.264.638.930,07 dan terealisasi sebesar Rp.737.221.252.303,40.

Secara akumulatif, Jumlah Belanja Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan, namun secara realisasi cenderung menurun. Pada Tahun 2009 Realisasi Jumlah Belanja adalah sebesar Rp. 809,128,186,196.91 atau 96.31% dari Rp. 840,134,950,348.84. sedangkan pada Tahun 2013 Realisasi Jumlah Belanja adalah sebesar Rp. 1.486.364.066.886,45 atau 91.21% dari

Rp.1.629.594.156.140,34.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.6.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang

No	Uraian	(n-3) (Rp) 2011	(n-2) (Rp) 2012	(n-1) (Rp) 2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	552.443.762.271,62	630.183.699.748,37	690.314.058.432,05	**11,81**
1	Belanja Pegawai	551.034.211.396,81	629.284.953.483,64	689.540.857.441,10	11,89
2	Belanja Bunga	682.272.974,81	180.003.164,73	36.157.840,95	(76,76)
3	Belanja bagi hasil	63.549.200,00	42.014.400,00	73.314.450,00	20,31
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	676.728.700,00	663.728.700,00	0,02
B	Belanja Langsung	55.086.416.503,00	85.967.092.577,50	77.757.227.365,00	**23,25**
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai).	55.086.416.503,00	85.967.092.577,50	77.757.227.365,00	23,25
C	Pembiayaan Pengeluaran	27.696.928.387,14	36.754.146.414,64	17.171.900.460,32	**(10,29)**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2.	Penyertaan Modal (investasi)	15.900.008.913,06	35.550.000.000,00	16.100.000.000,00	34,44
2	Pembayaran pokok utang	11.796.919.474,08	1.204.146.414,64	1.071.900.460,32	(50,39)
	TOTAL (A+B+C)	635.227.107.161,76	752.904.938.740,51	785.243.186.257,37	**11,41**

Keterangan : menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.7.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp) (2013)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp) (2014)	Tahun n+2 (Rp) (2015)	Tahun n+3 (Rp) (2016)	Tahun n+4 (Rp) (2017)	Tahun n+5 (Rp) (2018)
A	Belanja Tidak Langsung	690.314.058.432,05	11,81	776.486.203.302,82	868.740.370.054,39	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346,22	1.216.539.236.230,70
1	Belanja Pegawai	689.540.857.441,10	11,89	775.722.474.602,82	867.940.370.054,39	971.121.129.829,14	1.086.568.019.346,22	1.215.739.236.230,70
2	Belanja Bunga	36.157.840,95	(76,76)	-	-	-	-	-
3	Belanja bagi hasil	73.314.450,00	20,31	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	0,02	663.728.700,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
				-				
B	Belanja Langsung	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai).	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
				-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	17.171.900.460,32	(10,29)	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana	-		-				

	Cadangan							
2.	Penyertaan Modal (investasi)	16.100.000.000,00	34,44	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2	Pembayaran pokok utang	1.071.900.460,32	(50,39)	-				
				-				
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	785.243.186.257,37	11,41	890.457.625.252,82	958.740.370.054,39	1.061.921.129.829,14	1.177.368.019.346,22	1.301.539.236.230,70

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009-2013 masih dijumpai permasalahan seperti kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang;

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:

1. pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut

sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur di bidang pendapatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
4. Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
5. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

f. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman

kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;

c. Pembayaran pokok utang;

d. Pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	RENCANA / REALISASI	TAHUN ANGGARAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	RENCANA	84,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,571,686,021.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		REALISASI	84,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,413,371,689.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		%	100.00	100.00	99.77	100.00	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	RENCANA	59,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,571,686,021.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		REALISASI	59,420,938,781.04	69,429,062,441.70	67,413,371,689.77	94,141,092,275.37	161.443.965.225,79
		%	100.00	100.00	99.77	100.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	
		%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Dipisahkan	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	RENCANA	25,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	25,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%	100.00				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.7	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.1.8	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain Yang Sah	RENCANA	0	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	RENCANA	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,801,182,796.15	51,754,147,668.64	17.171.901.087,32

		REALISASI	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17.171.900.460,32
		%	100.00	100.00	99.63	71.02	99.99
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	RENCANA	0.00	0.00	0.00	15,000,000,000.00	0
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	-	
		%					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	RENCANA	3,500,000,000.00	6,500,000,000.00	15,900,008,913.06	35,550,000,000.00	16.100.000.000,00
		REALISASI	3,500,000,000.00	6,500,000,000.00	15,900,008,913.06	35,550,000,000.00	16.100.000.000,00
		%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	RENCANA	1,204,146,414.64	15,677,830,625.12	11,901,173,883.09	1,204,147,668.64	1.071.901.087,32
		REALISASI	1,204,146,414.64	15,677,830,625.12	11,796,919,474.08	1,204,146,414.64	1.071.900.460,32
		%	100.00	100.00	99.12	100.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	RENCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		%					
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan	RENCANA	0		0.00	0.00	0,00
		REALISASI	0		0.00	0.00	0,00
		%					

	Pembiayaan Netto	RENCANA	79,716,792,366.40	47,251,231,816.58	39,770,503,225.62	42,386,944,606.73	144.272.064.138,47
		REALISASI	79,716,792,366.40	47,251,231,816.58	39,716,443,302.63	57,386,945,860.73	182.749.867.308,28
		%	100.00	100.00	99.86	135.39	126.67

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 selalu memenuhi Rencana Target Penerimaan Pembiayaan Daerah (100%), kecuali pada Tahun 2011 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya mencapai 99,77%.

Sedangkan pada Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun 2009 dan 2010 realisasi mencapai 100% dari Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah, namun pada Tahun 2011 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah hanya mencapai 99,63% dan pada Tahun 2012 hanya mencapai 71,02% dan pada Tahun 2013 mencapai 99,99%.

Adapun untuk Pembiayaan Netto, pada tahun 2009 dan 2010, realisasi pembiayaan sesuai dengan rencana pembiayaan (100%). Pada tahun 2011 realisasi pembiayaan hanya mencapai 99,86% dan pada tahun 2012 realisasi pembiayaan melebihi rencana pembiayaan hingga mencapai 135,39% dan pada tahun 2013 realisasinya mencapai 126,67%.

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Pertumbuhan aset lancar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pertumbuhan Aset Lancar Tahun 2009 – 2013

NO.	URAIAN	Pertumbuhan rata-rata %
A	**ASET LANCAR**	**30.28**
1	**Kas**	**30.98**
	Kas di Kas Daerah	31.24
	Kas di Bendahara Penerimaan	-44.93
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5715.70
2	**Investasi Jangka Pendek**	**-**
3	**Piutang**	**43.26**
	Piutang Pajak	50.35
	Piutang Retribusi	16.23
	Piutang Dana Bagi Hasil	20.84
	Piutang Dana Alokasi Umum	-
	Piutang Dana Alokasi Khusus	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-50.60
	Piutang Lain-lain	182.22
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-
4	**Persediaan**	**31.44**

Pertumbuhan Rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kota Malang memiliki kenaikan yang cukup besar yaitu 30,28%. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Piutang, dengan pertumbuhan sebesar 43, 26%, diikuti komponen Kas dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 30,98%, dan komponen Persediaan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,44%.

Tabel 3.10.
Pertumbuhan Aset Tetap dan Dana Cadangan
Tahun 2008 - 2012

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN RATA-RATA
		%
B	**ASET TETAP**	**6.60**
	Tanah	2.97
	Peralatan dan Mesin	16.39
	Gedung dan Bangunan	13.38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.60
	Aset Tetap Lainnya	0.96
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	225.94
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-
C	**DANA CADANGAN**	**-**
	Dana Cadangan	**-**

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, memberikan sumbangan terbesar dalam Neraca Aset Daerah, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 126,13% pada komponen Investasi Permanen, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.11.
Pertumbuhan Aset Lainnya
Tahun 2008 - 2012

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN RATA-RATA
		%
D	**ASET LAINNYA**	**53.24**
	BOT	49.79
	Tagihan Penjualan Angsuran	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-58.15
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
	Aset Tak Berwujud	47.98
	Aset Lainnya	25.54

Pertumbuhan Aset Lainnya pada kurun waktu Tahun 2008 – 2012 memiliki pertumbuhan rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 53,24%. Komponen yang memiliki pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah *Build Operate Transfer* (BOT) yaitu sebesar 49,79%, diikuti oleh komponen Aset Tak Berwujud dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 47,98% dan komponen Aset Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,54%. Sedangkan komponen Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 58,15%.

Tabel 3.12
Analisis Rasio Keuangan Kota Malang

NO	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)	21,65	104,33	73,11
2.	Rasio quick (quick ratio)	20,04	97,37	69,79
3.	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0013	0,00037	0,00062
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,0013	0,00037	0,00062
5.	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6.	Rata-rata umur persediaan	-	-	-

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja di berbagai sektor yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Adapun proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2013	Tingkat pertum buhan	Proyeksi				
				Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4	Tahun n+5
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(%)	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	690,314,058,432.05	11,81	776.486.203.302,82	868.740.370.054,39	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346,22	1.216.539.236.230,70
1	Belanja Pegawai	689.540.857.441,10	11,89	775.722.474.602,82	867.940.370.054,39	971.121.129.829,14	1.086.568.019.346,22	1.215.739.236.230,70
2	Belanja Bunga	36.157.840,95	-76,76	-	-	-	-	-
3	Belanja bagi hasil	73.314.450,00	20,31	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Belanja Bantuan Partai Politik	663.728.700,00	0,02	663.728.700,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
				-				
B	Belanja Langsung	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1	Belanja honorarium PNS (Belanja Pegawai)	77.757.227.365,00	23,25	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA	768,071,285,797.05		858.357.625.252,82	938.740.370.054,39	1.041.921.129.829,14	1.157.368.019.346,22	1.276.539.236.230,70

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Malang

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2011	607.530.178.774,62	1.075.928.051.216,16	56,47
2	Tahun 2012	716.150.792.325,87	1.289.066.792.027,41	55,73
3	Tahun 2013	768.071.285.797,05	1.507.150.774.167,77	50,96

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang telah efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi atas pengeluaran daerah sehingga dapat memaksimalkan hasil PAD yang diperoleh pemerintah daerah.

Rasio efesiensi sudah tepat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah Kota Malang dalam menggunakan PAD untuk melakukan pengeluaran daerah yang digunakan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai alat pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana yang dibayarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Malang sebagaian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja aparatur menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan belanja modal, kendati masih dalam kisaran 50,6%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagaian besar dana yang dimiliki tidak diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang belum optimal dalam mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat. Rasio keserasian juga melihat kinerja pemerintah dalam mengalokasikan PAD untuk belanja. Adanya peningkatan belanja operasional dikarenakan adanya peningkatan atas belanja pegawai/ personalia seperti dokter, guru dan lain-lain, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Belanja operasi tersebut

digunakan sebagai bentuk peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Analisis trend pada rasio efektifitas Kota Malang untuk tahun 2013 sebesar 114,32% dan tahun 2012 sebesar 114,52% menunjukkan Kota Malang menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan PAD yang kecil yang dapat disebabkan kurangnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah. Pada rasio efisensi untuk tahun 2013 Kota Malang untuk tahun 2013 sebesar 93,273% dan untuk tahun 2012 92,32% yang berarti Kota Malang menunjukkan peningkatan dalam melakukan alokasi belanja terhadap PAD yang diterima sebagai tanggung jawab kepada masyarakat.

Analisis trend pada rasio keserasian belanja operasi Kota Malang tahun 2013 sebesar 79,694 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 78,52%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2013 menunjukkan presentase sebesar 26,613% dan tahun 2012 sebesar 21,23% dan analisis trend belanja modal untuk Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 23,292%, untuk tahun 2012 sebesar 21,23% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang untuk tahun 2013 terdapat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana prasarana ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang

diimbangi dengan meningkatnya belanja operasi pada tahun 2013.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diharapkan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah Daerah Kota Malang juga harus melakukan efisiensi atas belanja daerah yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan rasio pertumbuhan diharapkan pemerintah daerah Kota Malang harus menetapkan target atau anggaran kerja yang benar-benar didukung oleh kondisi potensi wilayah serta pemanfaatan aparatur pemerintahan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah daerah secara maksimal. Serta, selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja seluruh elemen yang dimiliki oleh instansi untuk bekerja secara maksimal dalam usaha untuk pencapaian atas anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Defisit Riil/ Surplus Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Realisasi Pendapatan Daerah	798,840,456,272.21	988,288,099,524.78	1,102,655,771,801.76	1,356,369,664,977.83	1.524.846.569.429,26
2	Dikurangi Realisasi : Belanja Daerah	809,128,186,196.91	967,967,645,319.59	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1.486.364.066.886,46
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,704,146,414.64	22,177,830,625.12	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17.171.900.460,00
	Defisit Riil/Surplus	(14,991,876,339.34)	(1,857,376,419.93)	26,727,720,585.60	67,302,872,950.42	38.482.502.542,81

Berdasarkan tabel Defisit Riil Anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 defisit riil anggaran mencapai Rp. 14,991,876,339.34 dan pada tahun 2010 defisit riil mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp. 1,857,376,419.93, dan pada tahun – tahun berikutnya Anggaran Pemerintah Kota Malang memperoleh surplus anggaran, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 26,727,720,585.60 dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 67,302,872,950.42. dan pada tahun 2013 mencapai surplus sebesar Rp. 21.305.902.082,49.

Tabel 3.16.
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang

No.	Uraian	Tahun Anggaran		
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,102,655,771,801.76	1,356,369,664,977.83	1,485,322,092,001.87
	Dikurangi realisasi :			
2.	Belanja Daerah	1,048,231,122,829.02	1,252,312,645,612.77	1,489,978,873,707.45
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27,696,928,387.14	36,754,146,414.64	17,171,900,460.32
A.	Defisit Riil	26,727,720,585.60	67,302,872,950.42	(21,828,682,165.90)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran	94,195,152,198.36	161,443,965,225.79	182,749,867,308.28

	sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	94,195,152,198.36	161,443,965,225.79	182,749,867,308.28
(A-B)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	67,467,431,612.76	94,141,092,275.37	204,578,549,474.18

Tabel 3.17.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00	100,00	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.18.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2009 – 2013
(dalam Rp.)

NO	URAIAN	2011		2012		2013		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	
	Jumlah SILPa	94,195,152,198.36	100	161,443,965,225.79	100	182,749,867,308.28	100	
1	Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	23,485,975,523.21		29,139,022,987.96		19.433.024.655,39.		
2	Pelampauan Dana Perimbangan	5,677,294,743.49		39,209,974,409.00		26.835.452.772		
3	Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	(5,389,925,155.00)		(31,271,368,912.00)		(6.744.000.000,00)		

4	Penghematan Belanja	70,421,807,086.66		109,366,335,486.83		143.225.389.253,89		
5	Penghematan pengeluaran pembiayaan			15,000,001,254.00		627		
	Defisit Riil/Surplus	94,299,406,607.37		161,443,965,225.79		182.749.867.308,28		

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu 2009 – 2013 memiliki kecenderungan meningkat, dari Rp.69,429,062,441.70 pada tahun 2009, hingga mencapai Rp. 182.749.867.308,28. Komponen SiLPA yang terbesar berasal dari Penghematan Belanja, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 31,006,764,151.93 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 143.225.389.253,89.

Tabel 3.19.
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Malang

No.	Uraian	(2011) (Rp)	(2012) (Rp)	(2013) (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	96.269.159.779,86	161.484.283.852,20	182.776.837.119,65
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.815.363.352,88	1.783.651.905,00	3.255.611.049,50
3.	Kegiatan lanjutan	0,00	68.163.500.000,00	56.400.211.000,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	90.453.796.426,98	91.537.131.947,20	123.121.015.070,15

Tabel 3.20.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kota Malang 2014 - 2018

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	182.776.837.119,65	40,46	210.193.362.687,60	231.212.698.956,36	247.397.587.883,30	262.241.443.156,30	275.353.515.314,12
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.255.611.049,50	6,60	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
2.	Kegiatan lanjutan	56.400.211.000,00		-	-	20.000.000.000,00	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	123.121.015.070,15	17,85	208.193.362.687,60	229.712.698.956,36	246.397.587.883,30	261.241.443.156,30	274.853.515.314,12

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas maka akan dapat dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan

Semua aspek tersebut aka di bahas lebih lanjut pada bagian pembahasan berikutnya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip pengelolaan ini harus tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.3.1 **Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Kota Malang

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Total penerimaan	1.755.862.893.484	1.956.999.793.773,7	2.175.358.105.938,3	2.416.790.857.481,8	2.685.155.856.787,6
1.	Pendapatan	1.547.669.530.797	1.727.287.094.817	1.928.960.518.054,1	2.155.549.414.325,5	2.410.302.341.473,5
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	208.193.362.687,60	229.712.698.956,36	246.397.587.883,30	261.241.443.156,30	274.853.515.314,12
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	890.457.625.252,82	958.740.370.054,39	1.061.921.129.829,1	1.177.368.019.346,2	1.301.539.236.230,7
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	865.405.268.231,87	998.259.423.719,32	1.113.436.976.109	1.239.422.838.135	1.383.616.620.556

Tabel 3.22.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Malang

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	865.405.268.231,87	998.259.423.719,3	1.113.436.976.109,1	1.239.422.838.135	1.383.616.620.556
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	857.741.673.340,00	943.515.840.674	1.037.867.424.741,4	1.141.654.167.215	1.255.819.583.937
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	81.871.421.950,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	32.100.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	807.970.251.390,00	893.515.840.674	987.867.424.741,4	1.091.654.167.215	1.220.819.583.937
	Sisa kapasitas riil	57.435.016.841,87	104.743.583.045,32	125.569.551.367,75	147.768.670.920,02	162.797.036.619,88

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	825.928.369.502,82	908.521.206.453,1	999.373.327.098,42	1.099.310.659.808	1.209.241.725.789
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	776.486.203.302,82	868.740.370.054,3	971.921.129.829,14	1.087.368.019.346	1.216.539.236.230
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	49.442.166.200,00	39.780.836.398,71	27.452.197.269,27	11.942.640.462,04	(7.297.510.441,62)
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	7.992.850.641,87	64.962.746.646,61	98.117.354.098,48	135.826.030.457,98	170.094.547.061,49

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

	Jenis Dana	Alokasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Prioritas I	684,316,459,348.06	758,248,105,282.87	834,072,915,811.15	917,480,207,392.27	1,009,228,228,131.50
	%	*40.60 %*	*40,51 %*	*40.53 %*	*40.56 %*	*40.46 %*
2.	Prioritas II	852,812,960,690.00	938,094,256,759.00	1,031,903,682,434.90	1,135,094,050,678.39	1,248,603,455,746.23
	%	*50.58 %*	*50.11 %*	*50.15 %*	*50.18 %*	*50.06 %*
3.	Prioritas III	148,770,461,571.00	175,559,781,579.46	191,740,759,737.41	209,539,835,711.15	236,368,819,282.26
	%	*8.82 %*	*9.38 %*	*9.32 %*	*9.26 %*	*9.48 %*
	Total	**1,685,899,881,609.06**	**1,871,902,143,621.33**	**2,057,717,357,983.46**	**2,262,114,093,781.81**	**2,494,200,503,159.99**

Berdasarkan tabel 3.23 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program

prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing SKPD.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan terkait kondisi riil serta tantangan yang ada di Kota Malang selama ini berikut aspek pembiayaan atas kebijakan daerah yang akan diambil guna menjawab tantangan tersebut. Sebelum kebijakan riil yang perlu untuk diambil guna mencapai tujuan pembangunan daerah di Kota Malang lima tahun ke depan perlu dilakukan terlebih dahulu analisis atas isu strategis berdasarkan kondisi riil yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari dokumen RPJMD ini.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu-isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan adanya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya dilakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Sumber

lain bagi informasi atau isu strategis berasal dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada data kondisi riil sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dokumen RPJMD ini. Hal tersebut kemudian dianalisis yang

merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun salah satu indentifikasi permasalahan pembangunan adalah ketimpangan antar wilayah dalam berbagai sektor, diantaranya adalah :

A. PENDIDIKAN

Tabel 4.1.

Rasio Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	58	316	3730	64	12
2	Sukun	68	273	4375	64	16
3	Klojen	71	301	4293	60	14
4	Blimbing	64	283	4108	64	15
5	Lowokwaru	68	293	3524	52	12
	Kota Malang	329	1466	20030	61	14

Rata rata rasio sekolah/murid TK di Kota malang adalah 1 : 61, dengan demikian ketersediaan Sekolah TK di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti. Namun demikian capaian rasio guru/murid di Kecamatan Sukun dan Blimbing masih berada di bawah rata-rata Kota Malang.

Tabel 4.2.

Rasio Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	54	755	15111	280	20
2	Sukun	55	800	16260	296	20
3	Klojen	42	687	12417	296	18
4	Blimbing	53	896	17038	321	19
5	Lowokwaru	58	888	15910	274	18
	Kota Malang	262	4026	76736	293	19

Rata rata rasio sekolah/murid SD di Kota malang adalah 1 : 293, dengan demikian ketersediaan Sekolah SD di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti. Capaian rasio guru/murid di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti.

Tabel 4.3.

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	15	374	5265	351	14
2	Sukun	15	355	5336	356	15
3	Klojen	24	735	11138	464	15
4	Blimbing	19	437	6600	347	15
5	Lowokwaru	17	470	6706	394	14
	Kota Malang	90	2371	35045	389	15

Tidak terdapat ketimpangan yang berarti dalam ketersediaan sekolah dan guru jenjang SLTP di seluruh Kecamatan.

Tabel 4.4.

Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	5	168	1778	356	11
2	Sukun	6	97	438	73	5
3	Klojen	18	756	9684	538	13
4	Blimbing	5	83	374	75	5
5	Lowokwaru	9	342	4919	547	14
	Kota Malang	43	1446	17193	400	12

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta Di Bawah Kementerian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	21	238	3449	164	14
2	Sukun	12	149	2432	203	16
3	Klojen	6	135	2589	432	19
4	Blimbing	5	49	1057	211	22
5	Lowokwaru	5	49	681	136	14
	Kota Malang	49	620	10208	208	16

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta Di Bawah Kementerian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	12	188	1316	110	7
2	Sukun	2	45	575	288	13
3	Klojen	5	132	1403	281	11
4	Blimbing	2	30	315	158	11
5	Lowokwaru	5	86	902	180	10
	Kota Malang	26	481	4511	174	9

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Di Bawah Kementrian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kedungkandang	5	85	345	69	4
2	Sukun	1	20	323	323	16
3	Klojen	4	118	912	228	8
4	Blimbing	1	13	24	24	2
5	Lowokwaru	4	110	1178	295	11
	Kota Malang	15	346	2782	185	8

a. Tingginya minat masyarakat di dalam dan luar kota Malang terhadap sekolah.

b. Kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran yang mendekati sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

c. Penyebaran tenaga kependidikan secara kualitas dan kuantitas belum merata.

d. Perhitungan data di Biro Pusat Statistik, masih menggunakan sistem proyeksi, sehingga data penduduk usia sekolah belum valid.

e. Masih rendahnya tingkat pelayanan sekolah di tingkat SMA/MA karena rendahnya jumlah sekolah di tingkat SMA/MA.

f. Rata-rata input pada sekolah swasta dibawah rata-rata input sekolah negeri, dan rendahnya motivasi yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan.

g. Beban kurikulum terlalu padat, kegiatan ekstra kurikuler kurang maksimal.

h. Belum dijalankannya fungsi dan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan secara maksimal.

B. KESEHATAN

Tabel 4.5.

Jumlah dan Rasio Dokter per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kedungkandang	31	6.514
2	Sukun	57	3.567
3	Klojen	194	617
4	Blimbing	17	11.685
5	Lowokwaru	97	1.760
	Kota Malang	396	2.258

Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang tergolong kekurangan tenaga dokter karena rasio dua kecamatan ini masing-masing 1 : 11.685 dan 1 : 6514.

Tabel 4.6.

Jumlah dan Rasio Perawat per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Perawat	Rasio
1	Kedungkandang	300	673
2	Sukun	223	912
3	Klojen	962	124
4	Blimbing	30	6.622
5	Lowokwaru	417	410
	Kota Malang	1.932	463

Kecamatan Blimbing tergolong kekurangan tenaga perawat karena rasio Kecamatan ini adalah 1 : 6.622.

Tabel 4.7.

Jumlah dan Rasio Bidan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Bidan	Rasio
1	Kedungkandang	38	5.314
2	Sukun	39	5.213
3	Klojen	63	1.899
4	Blimbing	20	9.932
5	Lowokwaru	263	649
	Kota Malang	423	2.114

Beberapa Kecamatan yang tergolong kekurangan tenaga bidan adalah Kedungkandang dengan rasio 1 : 5.314, Sukun dengan rasio 1 : 5.213, Klojen dengan rasio 1 : 1.899, dan Blimbing 1 : 9.932

Permasalahan kesehatan yang ada di Kota Malang tidak terlepas dari masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.

1. Permasalahan Kesehatan Ibu

Kasus kematian ibu masih terjadi di Kota Malang dan mengalami peningkatan pada tahun 2012. Dampaknya adalah angka kematian ibu meningkat walaupun masih dibawah angka

propinsi. Adapun angka kematian ibu (AKI) dilaporkan pada tahun 2012 mencapai 164,64 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 164 – 165 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,4 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini perkembangan kasus kematian ibu dalam 5 tahun.

Grafik 4.8.
Kasus Kematian Ibu Kota Malang 2008 – 2012

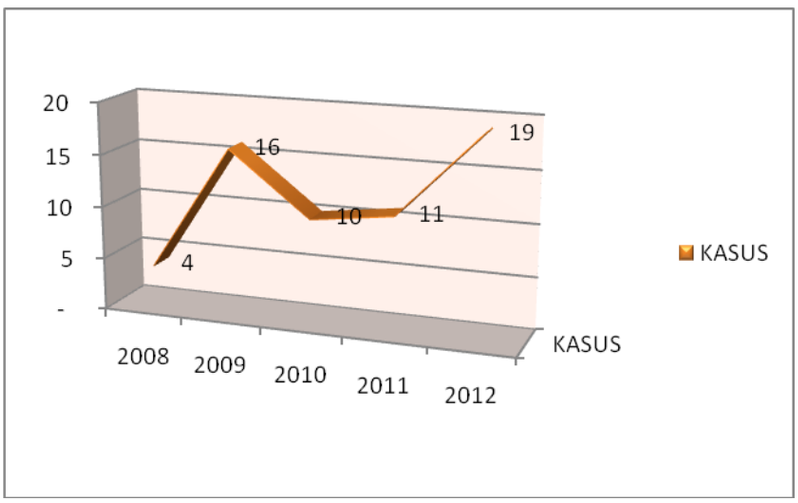

2. Permasalahan Kesehatan Bayi

Kasus kematian bayi di Kota Malang masih tergolong tinggi walau terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun. Berikut ini trend kasus kematian bayi di Kota Malang selama 5 tahun.

Grafik 4.9.

Kasus Kematian Bayi Kota Malang 2008 – 2012

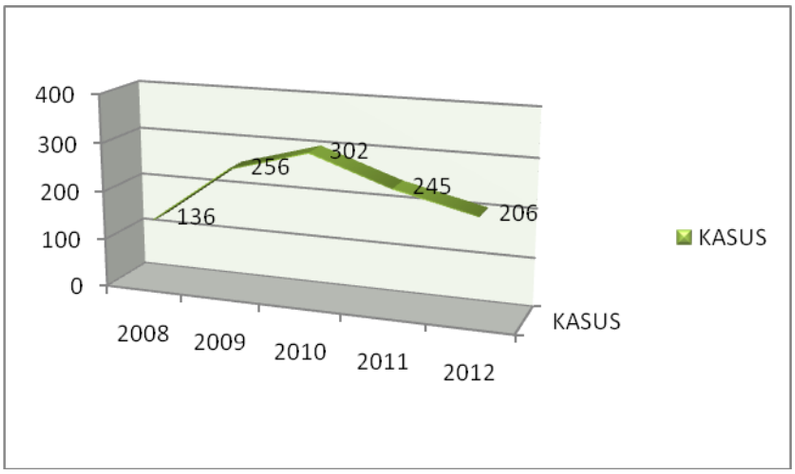

Selama tahun 2012 telah terjadi 206 kasus kematian bayi. Kasus ini menurun jika dibandingkan dengan kasus tahun 2011 yang mencapai 245 kasus. Angka kematian bayi (AKB) Kota Malang mencapai 17,85 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 17 hingga 18 bayi. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2011 yang mencapai 20,1 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Permasalahan Kesehatan Anak Balita

Kasus kematian anak balita di Kota Malang pada tahun 2012 menurun sangat tajam. Berikut adalah perkembangan kasus kematian anak balita selama 5 tahun.

Grafik 4.10.

Kasus Kematian Balita Kota Malang 2008 – 2012

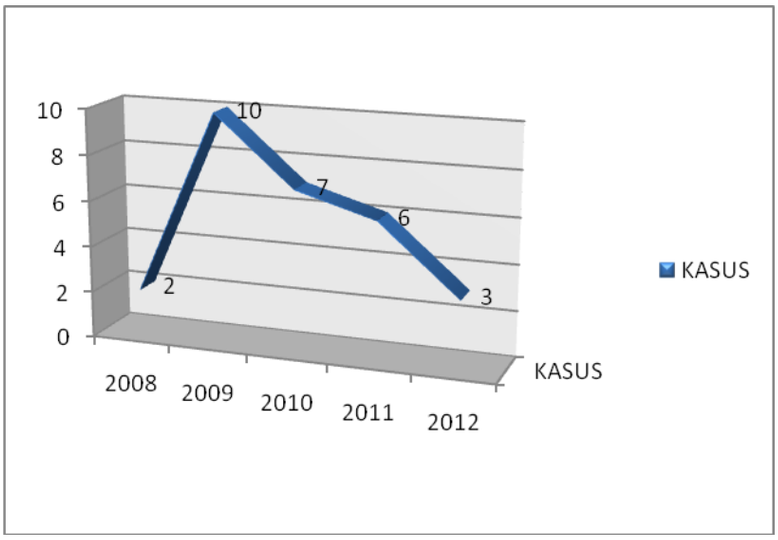

Angka kematian anak balita (AKABA) di Kota Malang pada tahun 2012 mencapai 0,26 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam 1.000 kelahiran hidup yang dilaporkan terjadi kematian 0 hingga 1 anak balita. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 0,5 per 1.000 kelahiran hidup.

4. Permasalahan Gizi Buruk

Permasalahan gizi buruk senantiasa ada, selama masalah kemiskinan di suatu daerah ada maka masalah gizi buruk akan senantiasa ada pula. Berikut ini distribusi kasus gizi buruk di Kota Malang berdasarkan puskesmas selama tahun 2012 yang berjumlah 136 kasus.

Grafik 4.11.

Kasus Gizi Buruk Kota Malang 2012

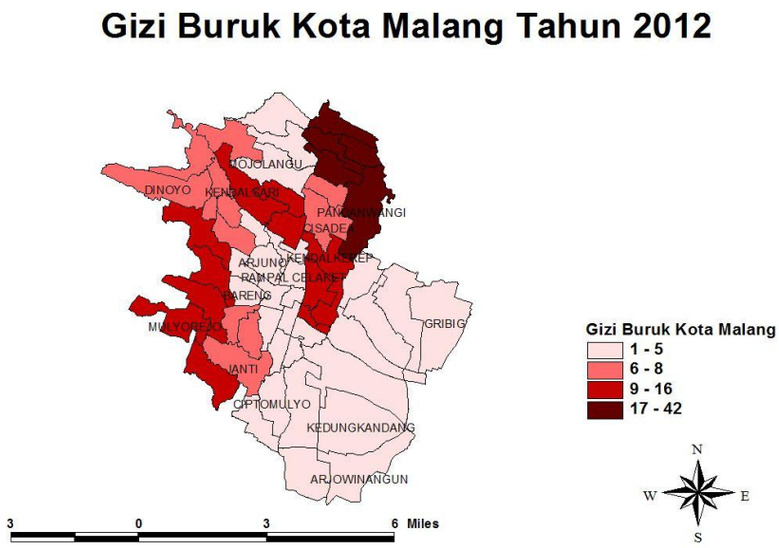

5. PERAN SERTA MASYARAKAT

Selama tahun 2012, Kota Malang memiliki 57 kelurahan siaga, dan 56 kelurahan dalam keadaan aktif, atau mencapai 98,25%. Selain kelurahan siaga juga ada poskeskel. Seluruh kelurahan di Kota Malang pada tahun 2012 yang berjumlah 57 kelurahan telah memiliki poskeskel.

Sedangkan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat secara langsung juga diadakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diantara Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tersebut adalah posyandu (pos pelayanan terpadu), polindes (pondok bersalin kelurahan), toga (tanaman obat keluarga), POD (pos obat kelurahan), dan sebagainya.

Presentase posyandu menurut strata di Kota Malang pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 4.12.

Prosentase Posyandu Menurut Strata Kota Malang 2012

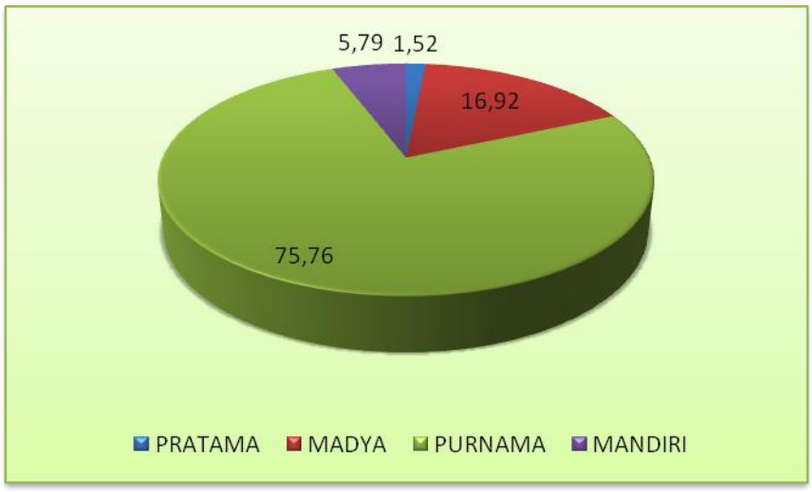

Dari 656 posyandu yang ada di Kota Malang pada tahun 2012, 75,76% atau 497 adalah posyandu purnama, 16,92% adalah posyandu madya atau 111 posyandu, 5,79% adalah posyandu mandiri atau 38 posyandu, dan demikian juga dengan posyandu pratama yang mencapai 1,52% atau 10 posyandu. Selain posyandu untuk balita, juga terdapat 319 posyandu untuk lansia di Kota Malang.

6. KONDISI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

Kota Malang adalah lahan subur untuk segala macam jenis industri. Industri pangan, jamu, obat-obatan, dan lain-lain. Peredaran makanan dan minuman di satu sisi mendatangkan banyak keuntungan dan di sisi lain akan mendatangkan masalah jika makanan yang beredar adalah makanan yang tidak aman. Hal ini akan dapat menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat Kota Malang dan sekitarnya.

Hingga tahun 2012, kondisi farmasi dan pangan di Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13.
Kondisi Farmasi dan Pangan Kota Malang 2012

Situasi	**2012**
Pangan	
1. Industri Rumah Tangga Makanan	208
2. Jumlah Pasar	10
3. Jumlah Distributor Pangan / Toko Pangan	52
Farmasi	
1. Apotek	206
2. Toko Obat	4
3. PBF	27
4. Industri Kecil Obat Tradisional	8
Kosmetik	
1. Industri Kosmetik	4
2. Salon / Toko Kosmetik	72
Sarana Obat Puskesmas	
1. Puskesmas	15
2. Rumah Bersalin Pemkot	1
3. Puskesmas Pembantu	33

Situasi diatas menunjukkan bahwa Kota Malang menjadi salah satu rujukan utama industri pangan dan farmasi. Peredaran makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak aman akan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.

Dari jumlah diatas, hanya 18% PIRT yang berada dalam kondisi baik dan 80% dalam kategori cukup selama tahun 2007. Pada tahun yang sama, 97,3% apotek telah melakukan pengelolaan apotek dengan baik dan terjadi 4 kali pelanggaran.

Selama tahun 2012, telah dilakukan pengujian terhadap bahan makanan berbahaya. Dari 50 yang diperiksa, 52% mengandung bahan berbahaya dan yang memenuhi syarat 48%. Demikian juga, dalam tahun yang sama terjadi pencampuran bahan kimia obat dengan jamu sebanyak 2%.

C. LINGKUNGAN HIDUP;

Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan Kualitas Air Sungai dan Udara terhadap Baku Mutu. Pengujian kualitas air sungai melalui pengukuran Kualitas BOD atau kebutuhan oksigen biologis serta melalui pengukuran COD, dimana COD menunjukan jumlah bahan kimia secara total yang masuk ke badan air selama kurun waktu lima tahun. Uji ABA yang dilakukan di 15 titik pantau didapatkan hasil semua titik tersebut Uji parameter BOD (Biological Oxigen Demand) melebihi standart baku muku sedangkan untuk COD(Chemical Oxsigen Demand) ada 8 titik yang melebihi Standart Baku Mutu.

Dari aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Dari Uji Kwalitas Udara yang dilakukan pada 13 titik dengan hasil sesuai Standat Baku Mutu yang disyaratkan, terbukti Kota Malang pada tahun 2013 mendapatkan Penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan lingkungan hidup antara lain adalah :

a. Belum optimalnya regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang;
b. Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik maupun limbah rumah tangga;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
d. Minimnya jumlah ruang terbuka hijau;
e. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan lingkungan hidup, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor lingkungan hidup yaitu : "**belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang"**.

D. PEKERJAAN UMUM;

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum sangat mempengaruhi ketersedian infrastruktur di Kota Malang. Peningkatan kapasitas serta kualitas jalan dan jembatan serta sarana pengairan juga pembangunan gedung-gedung pemerintahan maupun pembangunan gedung untuk masyarakat diupayakan dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian daerah.

Beberapa permasalahan mendasar dalam bidang pekerjaan umum antara lain :

a. Masih banyak jalan Kota Malang yang berkondisi rusak, sehingga diperlukan peningkatan dan perbaikan jalan.
b. Data untuk Panjang Jalan Kota Malang adalah 191,19 Km yang meliputi Jalan Negara, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Sampai dengan saat ini (2013) belum ada penambahan ruas jalan baru sebagai penambahan infrastruktur transportasi;
c. Terjadinya penurunan/longsor pada beberapa ruas jalan yang lokasinya rawan longsor sehingga perlu dilakukan pembangunan tembok penahan tanah dan turap di sepanjang Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Kalimewek;
d. Dalam hal penanganan drainase dan jaringan irigasi perlu adanya studi kelayakan terlebih dahulu, penyusunan master plan drainase perkotaan di tiap wilayah kecamatandi Kota Malang, pembangunan reservoir, pembangunan pompa pengendali banjir, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase, pembangunan turap/tanggul/bronjong, pembangunan bendung dan pintu air, serta pembangunan embung;

e. Perlunya pembangunan sumur-sumur imbuh, baik oleh Pemerintah Kota Malang, pihak swasta maupun masyarakat;
f. Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan umum masih kurang.

Berdasarkan beberapa mendasar dalam urusan pekerjaan umum, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan sektor pekerjaan umum yaitu : **belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Malang, sehingga tingkat kerusakan jalan, jembatan, drainase masih cukup tinggi**.

E. PENATAAN RUANG;

Sebagaimana visi penataan ruang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diarahkan untuk mewujudkan misi penataan ruang, yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan penataan ruang antara lain adalah :

a. Belum meratanya pembangunan antara pusat kota dengan sub pusat kota;
b. Rencana detail tata ruang masih dalam proses persetujuan substansi;
c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di Kota Malang;
d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
e. Alih fungsi lahan pertanian, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Malang, tidak dapat dihindarkan alih fungsi

Lahan Peruntukkan Pertanian menjadi Perumahan, namun Kota Malang tetap akan berupaya mempertahankan lahan pertanian.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan penataan ruang, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor penataan ruang yaitu : **Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Malang**.

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

Perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal, dimana pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Kota Malang dimulai dari pelaksanaan musrenbang (kelurahan, kecamatan, kota). Hasil musrenbang tersebut akan dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Malang. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan antara lain :

a. Penyusunan perencanaan pembangunan belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena keterbatasan anggaran;
b. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota;
c. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasikan prioritas pembangunan;
d. Masih kurangnya peran SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat;

e. Kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi penganggarannya;
f. Pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perencanaan pembangunan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perencanaan pembangunan yaitu : **belum optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, karena masih rendahnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanan pembangunan dan kurang tajamnya SKPD dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan daerah**.

G. PERUMAHAN;

Perumahan dan pemukiman akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Penataan perumahan dan pemukiman meliputi air bersih, drainase, jalan lingkungan, pemakaman, sanitasi serta persampahan. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan perumahan antara lain :

a. Rencana tata bangunan dan lingkungan belum tercipta (belum ada Peraturan Daerah tentang Tata Bangunan dan Lingkungan);
b. Masih banyak rumah/masyarakat yang belum mempunyai MCK, dimana dibeberapa lokasi masih menggunakan sungai;
c. Masih ada pemukiman kumuh dibeberapa wilayah, khususnya di sekitar sempadan sungai dan sempadan rel kereta api;
d. Akses air bersih untuk masyarakat masih kurang;
e. Pentingnya Penataan drainase pemukiman;

f. Fasilitas umum dan fasilitas sosial masih banyak yang belum diserahkan pada Pemerintah Kota Malang (jumlah pengembang, jumlah perumahan, jumlah fasos/fasum yang sudah serah terima);
g. Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kota Malang;
h. Masih banyak rumah tinggal yang belum memiliki IMB;
i. Masih kurangnya sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU);
j. Terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;
k. Terbatasnya sarana TPA yang terencana dengan baik dan disetujui oleh warga sekitarnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perumahan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perumahan yaitu : **belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan serta masih tingginya persentase rumah tinggal yang belum layak huni, serta belum optimalnya pengelolaan persampahan**.

H. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA;

Permasalahan utama dalam pembangunan olahraga di Kota Malang adalah masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh urusan kepemudaan dan olahraga antara lain adalah :

a. Kurangnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;

b. Kurangnya pembinaan dalam peningkatan prestasi olahraga di tingkat Kota;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mewadahi generasi muda dalam berkreativitas;
d. Permasalahan kepemudaan masih cukup tinggi, yaitu dalam hal penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pemuda dan olah raga, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pemuda dan olahraga yaitu: **belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan serta masih munculnya permasalahan sosial di kalangan pemuda**.

I. PENANAMAN MODAL;

Peningkatan penanaman modal/investasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Malang. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam meningkatkan laju investasi di Kota Malang antara lain adalah :

a. Kurangnya promosi investasi.
b. Terbatasnya lahan bagi industri skala menengah dan kecil.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan penanaman modal, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan penanaman modal yaitu: **belum optimalnya promosi investasi di Kota Malang**.

J. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi dan UKM, karena pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan koperasi dan UKM antara lain adalah :

a. Kurangnnya permodalan yang disebabkan oleh sulitnya UMKM untuk memenuhi aturan-aturan yang harus dilengkapi sebagai salah satu persyaratan permodalan dari sumber pembiayaan baik dari Perbankan maupun BUMN, dimana harus melampirkan agunan dengan suku bunga yang terlalu tinggi.
b. Kualitas SDM koperasi dan pengelola UMKM yang masih terbatas, tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga kurang memiliki kreativitas serta belum menggunakan hasil penelitian dan inovasi teknologi yang tepat dalam mengembangkan bisnis mereka;
c. Kurangnya sarana dan prasarana, kerjasama dan gerakan koperasi;
d. Kurangnya jaringan usaha, sehingga belum mampu menciptakan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan pengusaha besar sehingga diharapkan dapat mengembangkan akses pasar lokal dan pelaku usaha belum mampu mencari peluang pasar. Kurangnya kemandirian UMKM dalam meningkatkan daya saing untuk berkarya dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas;

e. Kebijakan pemerintah daerah masih belum menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan UMKM. Padahal, kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan, antara lain untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan dan aspek pembiayaan usaha;
f. Masih rendahnya pola kemitraan antara pelaku usaha kecil, sehingga hasil produk UMKM belum mampu memenuhi permintaan pasar.
g. Sulitnya UMKM menembus pasar, karena UMKM belum bisa memenuhi aturan spesifikasi dari pengusaha besar;
h. Masih terbatasnya produktivitas unggulan dari pelaku usaha kecil, dimana UMKM belum memiliki spesifikasi/ciri khas produk dari suatu daerah.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan koperasi dan UKM, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan urusan koperasi dan UKM yaitu **belum optimalnya pengelolaan koperasi dan UKM di Kota Malang serta kurangnya kualitas pengelola koperasi dan UKM**.

K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang lebih dipengaruhi oleh arus migrasi dari pada tingkat kelahiran dan kematian. Dengan demikian, pengendalian administrasi kependudukan harus lebih diperhatikan, karena pertumbuhan penduduk yang dialami akan mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam

urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain adalah :

a. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat migrasi di Kota Malang antara lain adalah :
   - Kota Malang merupakan daerah pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, sehingga mengundang penduduk yang berasal dari luar daerah untuk menjalani pendidikan atau bekerja di Kota Malang. Hal ini menyebabkan tingkat mobilitas penduduk menjadi tinggi;
   - Pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena migrasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk alami;
   - Selain Kota Malang sebagai daerah kawasan pendidikan, Kota Malang juga menjadi kawasan pemukiman. Banyak kawasan pemukiman baru yang dikembangkan di Kota Malang;
b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
c. Belum optimalnya validasi kependudukan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
   - Sumber daya manusia terutama di tingkat kelurahan dan RT/RW sebagai ujung tombak kegiatan pendataan penduduk masih rendah, sehingga data penduduk yang dilaporkan tidak lengkap dan masih banyak yang tidak sesuai dengan kondisi penduduk yang ada;
   - Pola pikir dan kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan status kependudukannya kepada petugas RT/RW

setempat dimana mereka tinggal/berdomisili masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam *database* kependudukan Kota Malang, dan enggan melaporkan keberadaan mereka karena data kependudukan dianggap kurang penting.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu: **belum optimalnya pengelolaan administrasi dan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Malang**.

L. KETENAGAKERJAAN;

Urusan ketenagakerjaan terkait dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan ketenagakerjaan antara lain adalah :

a. Kualitas SDM pencari kerja belum bisa sepenuhnya memenuhi standar lowongan yang ada;
b. Terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja;
c. Belum memadainya sistem informasi ketenagakerjaan, karena masih terhambatnya sistem bursa kerja online yang selama ini dijadikan penghubung informasi antara pekerja dengan pengusaha;
d. Masih adanya hubungan yang kurang harmonis antara pekerja dengan pengusaha;

e. Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, sehingga kualitas SDM pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan ketenagakerjaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan ketenagakerjaan yaitu: **kurangnya kualitas SDM pencari kerja yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan ketenagakerjaan di Kota Malang**.

M. KETAHANAN PANGAN;

Permasalahan ketahanan pangan mencakup tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan dan konsumsi pangan yang bermutu. Berdasarkan permasalahan mendasar dalam urusan ketahanan pangan, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan ketahanan pangan yaitu: **belum optimalnya pengelolaan ketahanan pangan masyarakat Kota Malang terkait dengan konsumsi pangan yang bermutu**.

N. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

Pemberdayaan perempuan di Kota Malang masih sangat terbatas, terutama yang terkait dengan fasilitasi kesempatan melakukan usaha ekonomi produktif bagi perempuan. Persoalan lain, ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah :

a. Masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
b. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

c. Kurangnya perlindungan terhadap anak jalanan;
d. Pelaksanaan program perlindungan anak dan perempuan belum optimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: **kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta belum optimalnya penguatan lembaga perlindungan anak dan perempuan sehingga masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak**.

O. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;

Keberhasilan program keluarga berencana memperoleh perhatian yang serius, karena program yang dilaksanakan harus selaras dengan program yang dicanangkan oleh BKKBN. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pembangunan keluarga kecil yang berkualitas. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain adalah :

a. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
b. Belum optimalnya pengembangan BKB, BKL, BKR dan PKLK.
c. Tingkat partisipasi KB masih rendah;
d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka dirumuskan isu strategis pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu: **belum optimalnya implementasi pemberdayaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Malang**.

P. PERHUBUNGAN;

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sarana transportasi yang memadai. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor pehubungan antara lain :

a. Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penataan dan pengaturan transportasi di Kota Malang. Tingginya jumlah kendaraan dan minimnya pertumbuhan jalan di Kota Malang membuat Pemerintah Daerah dan POLRI harus melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi mobilitas kendaraan di sekitar kawasan pusat kota dan pusat pendidikan terutama pada hari dan jam kerja;
b. Belum adanya transportasi massal, mengingat mobilitas orang dan barang di dalam dan antar daerah, terutama pergerakan komuter dari dan kekawasan industri. Pemerintah Kota Malang perlu memikirkan alternatif transportasi massal yang ramah lingkungan yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas di Kota Malang dan di luar Kota Malang;

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perhubungan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perhubungan yaitu: **belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Malang**.

Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

Penggunaan Teknologi Informatika akan sangat menunjang kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Namun, penerapan Teknologi Informatika di Pemerintah Kota Malang masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah :

a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi dan informatika. Sarana yang telah dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, sampai saat ini pemanfaatan layanan tersebut belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak Tim Lelang SKPD dan pengguna barang dan jasa (pihak ketiga) yang belum memiliki kompetensi dalam melaksanakan lelang secara elektronik.
b. Kurangnya kualitas SDM jaringan komunikasi dan informatika. Jumlah SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisa beban kerja masih jauh dari mencukupi. Khususnya, setelah dibentuknya UPTD LPSE, dimana banyak SDM Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipindah tugaskan ke UPTD tersebut.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika,maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan komunikasi dan informatika yaitu **belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika**.

R. PERTANAHAN;

Kebijakan pemanfaatan tanah di Kota Malang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui proses perijinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan urusan administrasinya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional. Beberapa permasalahan penting yang dihadapi dalam bidang pertanahan antara lain adalah :

a. Belum optimalnya sistem informasi pertanahan;
b. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Malang belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pertanahan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor pertanahan yaitu: **belum optimalnya pengelolaan pertanahan khususnya dalam urusan sertifikasi di Kota Malang**.

S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;

Untuk melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan suasana yang aman dan kondusif. Sedangkan, guna menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Malang, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain :

a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, karena masih kurangnya personil anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP). Di internal pemerintah daerah, kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah tentang disiplin pegawai adalah kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

b. Kurangnya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban bagi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di kedua bidang tersebut. Perlengkapan yang dimiliki saat ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan guna mengantisipasi perkembangan masyarakat.

c. Masih banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Bisa jadi, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

d. Masih terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

e. Belum tersedianya sarana operasional pendukung kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terutama dalam mendukung program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu : **belum optimalnya penegakan peraturan daerah yang berimbas pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan serta belum optimalnya pengelolaan LSM dan FKUB**.

T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN;

Poin penting yang terkandung dalam otonomi daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan otonomi daerah antara lain adalah :

a. Belum optimalnya pelayanan perijinan, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
   - Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) belum mengakomodir semua kebutuhan pemohon karena Sistem Pelayanan Informasi Perijinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum sepenuhnya melayani semua jenis perijinan yang ada.
   - Persyaratan perijinan yang cukup banyak dapat pula menjadi kendala karena BPPT memberlakukan persyaratan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya. Sehingga, sebagai solusinya, diperlukan peraturan-peraturan lain untuk menyederhanakan persyaratan perijinan agar pelayanan perijinan menjadi optimal;
   - Banyaknya keterkaitan koordinasi dengan SKPD lain dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan perijinan (Rekomendasi dari SKPD lain) mengakibatkan jangka waktu yang dibutuhkan

dalam pengurusan ijin menjadi lebih lama dan birokrasi yang ditempuh menjadi lebih panjang.

b. Potensi pendapatan daerah belum tergali secara optimal.
c. Perlunya dilakukan reformasi pelayanan publik yang berkualitas, dengan dukungan implementasi standar pelayanan publik yang cepat, tepat dan benar dan monitoring pelayanan dan pengukuran IKM secara periodik;
d. Perlunya dilakukan penataan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
e. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, berdasarkan data yang diperoleh aset daerah yang baru disertifikasi sekitar 40%;
f. Kompetensi pegawai belum mampu memenuhi kebutuhan teknis.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan tersebut adalah **belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh potensi keuangan daerah yang belum tergali secara optimal dan adanya beberapa SKPD yang belum memiliki SPM.**

U. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN;

Dalam perkembangan kedepan, kelurahan berada didepan sebagai ujung tombak pembangunan atau pelaku utama pembangunan. Pemerintah Kota Malang memandang bahwa para pemangku kepentingan secara bersama-sama sesuai posisi dan kewenangannya masing-masing memberikan kontribusi positif untuk

memberdayakan masyarakat kelurahan guna menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, antara lain :

a. Pemerintah Kelurahan belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga belum mampu mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, serta belum menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, sehingga upaya peningkatan kapasitas SDM perlu lebih ditingkatkan secara intensif dan berkelanjutan.
b. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat dalam membangun kelurahan masih belum optimal. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan anggota kemasyarakatan antara lain dipengaruhi oleh belum terintegrasinya perencanaan program pembangunan serta partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, diperlukan penguatan dalam bentuk dukungan keuangan dan pembinaan intensif dan berkelanjutan kepada lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat.
c. Penciptaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih sangat minim, karena sarana dan prasarana sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan kelurahan yaitu : **belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, karena faktor-faktor pendukungnya yang terdiri dari pemerintahan kelurahan, keuangan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan anggota masyarakat dapat dikatakan masih belum memadai**.

V. SOSIAL;

Tabel 4.14.

Jumlah Dan Prosentase Keluarga Miskin Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga	Persentase keluarga miskin
1	Kedungkandang	1827	58167	3,1%
2	S u k u n	1704	34922	4,9%
3	Klojen	609	57501	1,1%
4	Blimbing	1034	58172	1,8%
5	Lowokwaru	916	50592	1,8%
	Kota Malang	**6090**	**259354**	**2,3%**

Jumlah keluarga miskin di Sukun adalah yang terbanyak yaitu 1.704 atau 4,9% diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang sebanyak 1.827 atau 3,1%. Permasalahan dalam bidang sosial dipengaruhi oleh kecenderungan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalankan kehidupan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan sosial antara lain adalah :

a. Merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia;
b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
c. Belum optimalnya peran lembaga sosial;
d. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayan sosial;
e. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam bidang sosial, maka dirumuskan isus trategis pembangunan urusan sosial yaitu: **belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penanganan masalah pengangguran/kemiskinan**.

W. KEBUDAYAAN;

Pembangunan kebudayaan di Kota Malang cenderung diarahkan pada penguatan kebudayaan asli Kota Malang, karena kebudayaan asli Malang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral dalam pembangunan Kota Malang. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan di Kota Malang antara lain adalah :

a. Belum optimalnya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesenian;
b. Kurangnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas masuknya kebudayaan asing;
c. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya Malang;
d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan asli Malang.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kebudayaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kebudayaan yaitu : **belum optimalnya pengelolaan nilai-nilai kebudayaan dan penyediaan sarana dan prasarana kesenian di Kota Malang**.

X. STATISTIK;

Statistik sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data statistik daerah. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan statistik antara lain adalah :

a. Kurangnya SDM yang bergerak dalam pengolahan data statistik, khususnya tenaga ahli statistik;
b. Sarana dan prasarana pendukung data statistik belum memadai, antara lain belum tersedianya petunjuk teknis penyeragaman data bagi SKPD, belum tersedianya ruang arsip data di masing-masing SKPD.

Berdasarkan dua permasalahan penting dalam bidang statistik, maka dirumuskan isu strategis dalam bidang statistik adalah **belum optimalnya pengelolaan statistik daerah**.

Y. KEARSIPAN;

Pelaksanaan urusan kearsipan terkait dengan pengelolaan arsip aktif maupun arsip statis. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan kearsipan adalah belum optimalnya manajemen arsip daerah karena kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, dimana sarana yang ada pada saat ini masih bersifat

manual, serta kurangnya tenaga arsiparis dalam mengelola arsip daerah (arsiparis).

Berdasarkan permasalahan mendasar dalam urusan kearsipan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kearsipan adalah **belum optimalnya pengelolaan arsip daerah**.

Z. PERPUSTAKAAN.

Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pemasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan perpustakaan adalah semakin tingginya tingkat membaca buku bagi masyarakat yang perlu dukungan sarana dan prasarana perpustakaan seperti kurangnya mobil perpustakaan keliling yang harus melayani perpustakaan di tingkat kelurahan serta kurangnya tenaga pustakawan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan perpustakaan yaitu **masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan**.

AA. PERTANIAN;

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai kontribusi di Kota Malang, karena sebagian masyarakat Kota Malang bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian antara lain adalah :

a. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian;

b. Harga hasil produksi pertanian di tingkat petani dan di tingkat pasar lebih rendah.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan pertanian, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pertanian yaitu **belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian dan masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian**.

BB. PARIWISATA;

Pariwisata merupakan potensi yang akan diunggulkan sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi alam, pendidikan maupun potensi industri dan perdagangan di Kota Malang, objek tujuan wisata diarahkan pada pengembangan potensi wisata dimaksud antara lain meliputi :

1. Potensi wisata religi:
   Pengembangan sisi sejarah makan Ki Ageng Gribig
2. Potensi wisata kuliner
   - Pengembangan wisata belanja TUGU yang menyediakan aneka ragam kuliner di lokasi Stadion dan Velodrome
   - Pengembangan wisata kuliner aneka makanan tempe di lokasi kampung sanan dengan berbagai varian berbahan baku tempe
3. Potensi wisata minat khusus:
   - wisata budaya dan kesenian dalam bentuk gebyar antara lain Festival Kendedes, Gebyar Jaran Kepang, Gebyar tarian daerah nusantara;
   - Pengembangan situs Karang Besuki ;
   - Pengembangan wisata sejarah Tirtan Beji Sari di Kel. Mojolangu;

- Pengembangan wisata sejarah Cungkup Dakon di Kel. Sukun ;
- Pengembangan wisata sejarah Situs Kendedes di Kel. Polowijen;
- Pengembangan Wisata Museum ;
- Wisata Rakyat Taman Rekreasi Kota Malang (Tareko) dan Pengembangan wisata Eco Green ;
- Pengembangan Wisata Trans Studio di Buring ;
- Pengembangan Wisata Air Sungai ROLAK di Kedung kandang

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah :

a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung periwisata;
b. Kurangnya infrastruktur pendukung menuju obyek wisata;
c. Belum optimalnya pengembangan manajemen kepariwisataan;
d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pariwisata, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pariwisata yaitu : **belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek pariwisata di Kota Malang**.

CC. INDUSTRI;

Sebagai daerah penyangga ibukota provinsi, Kota Malang sangat potensial perkembangannya dalam sektor perindustrian. Industri yang dikembangkan di Kota Malang terdiri dari industri kecil, sedang dan industri besar. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor perindustrian antara lain adalah :

a. Industri yang dikembangkan di Kota Malang merupakan industri lebih banyak industri kecil dan menengah, belum terdapat industri skala besar, kecuali industri rokok;
b. Sumber daya manusia (SDM) lokal yang tersedia belum memenuhi kriteria industrialisasi;
c. Industri kecil belum bisa masuk menjadi subkon (vendor) industri besar.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perindustrian, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan perindustrian yaitu :

1. **Industri yang dikembangkan di Kota Malang kurang berpihak pada industri kecil dan menengah;**
2. **Pergeseran paradigma ekonomi industri ke Ekonomi Kreatif menuntut upaya pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas untuk mendorong perekonomian yang berdaya saing dan menggali cadangan sumber daya yang terbarukan. Pengembangan industri harus diarahkan pada industri berbasis lapangan usaha kreatif dan budaya, lapangan usaha kreatif, dan hak kekayaan intelektual;**
3. **Perkembangan IPTEK dapat mendorong adanya efisiensi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga bersaing. Industrialisasi menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Pada tahapan ini pengembangan sektor industri harus diupayakan pada upaya peningkatan produktivitas dan**

kapasitas industri, efisiensi rantai nilai produksi, serta penguatan struktur industri dari hulu ke hilir;

4. **Semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Malang dan menurunnya produksi bahan baku alam dari daerah lain, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan industri yang berbasis pada sumber-sumber daya alam seperti industri mebel dan rotan. Kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan baru, antara lain dengan pengembangan *Green Industry* serta mendorong industri dengan sumber-sumber yang terbarukan. Selain itu, berkurangnya produk pertanian juga berdampak pada penyediaan bahan kebutuhan pokok sehingga pemerintah masih harus mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan jaringan dan sistem distribusi komoditas bahan pokok.**

DD. PERDAGANGAN;

Kemajuan perdagangan Kota Malang sangat dipengaruhi oleh produk unggulan antara lain, tempe, keripik tempe, keripik buah selain produk-produk industri yang melayani kebutuhan regional maupun nasional dan internasional. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan antara lain adalah :

a. Belum optimalnya distribusi dan pemasaran produk lokal;
b. Masih adanya barang dan jasa yang beredar tetapi tidak memenuhi standar;
c. Kurangnya promosi terhadap produk unggulan daerah;

d. Kurangnya pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang kecil (lokal);

e. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perdagangan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan perdagangan yaitu:

1. **Kurangnya kualitas mutu produk masih menjadi masalah utama, hal ini antara lain disebabkan pelaku usaha tidak mempunyai standar baku yang terukur dari produk yang dihasilkan. Kualitas pruduk yang baik diharapkan mampu menguatkan ekonomi lokal dalam menghadapi perdagangan bebas pasca berlakunya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean – China Free Trade Area* (AFCTA), dan sebagainya.**

2. **Diversifikasi produk perlu ditingkatkan untuk strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Diversifikasi produk merupakan langkah dan alternatif yang dapat dilakukan untuk bisa *sustainable* dipasar. Dengan demikian produk lokal akan mampu bersaing ditengah serangan produk-produk yang akan masuk dalam era globalisasi.**

3. **Pola kemitraan belum dioptimalkan untuk menjawab tuntutan pasar atas dasar tanggung jawab bersama demi tumbuhnya usaha menengah dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.**

4. **Kurangnya kemampuan pelaku ekspor dalam menyerap kesempatan yang ada dan juga tidak adanya informasi pasar luar negeri yang mudah diakses.**
5. **Belum optimalnya promosi dan distribusi produk unggulan daerah;**
6. **Kurangnya pembinaan bagi pengusaha lokal;**
7. **Minimnya sarana dan prasarana pasar tradisional.**

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya sangat luas dalam jangka waktu yang panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara bertahap. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan di daerah cenderung muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Perumusan permasalahan ini penting untuk merumuskan visi dan misi Kota Malang untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis setiap urusan pemerintahan seperti tersebut pada poin A, maka dirumuskan isu

strategis pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju "kota metropolis";

   Kota Malang sebagai kota besar yang menuju kota metropolis, saat ini sudah dirasakan problematika perkotaan yang berkaitan dengan sarana transportasi, persampahan, kependudukan, dan drainase perkotaan. Dalam rangka mengatasi problematika tersebut perlu sinergitas dengan wilayah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu, melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, tata laksana, peningkatan sistem informasi, penegakan hukum dan kerjasama regional.

2. Pengelolaan Kependudukan Yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi;

   Kota Malang sebagai kota besar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi termasuk didalamnya warga yang bukan sebagai penduduk Kota Malang. Penduduk merupakan subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan, sangat diperlukan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menata tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan tata laksana yang didukung sistem informasi administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan.

Kota Malang sebagai bagian wilayah regional di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak tingginya arus urbanisasi. Agar urbanisasi bisa dikelola sebagai sebuah potensi yang positif perlu langkah-langkah kebijakan yang bersifat kerjasama antar daerah di Malang Raya.

3. Masih tingginya angka kemiskinan;

   Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 5,2 %. Kota Malang berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sebagai wujud kebijakan *Peduli Wong Cilik* sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui keterlibatan lembaga keuangan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

4. Masih tingginya angka pengangguran;

   Kota Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Agar pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

   Kebijakan yang diambil yaitu dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;

   Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun;

   Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.

   Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

   Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan

Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal;

   Globalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari yang saat ini sudah mulai kita rasakan. Untuk menghadapi tantangan dimaksud perlu peningkatan kualitas SDM di kelurahan sebagai ujung tombak layanan terdepan, serta meningkatkan daya saing SDM yang ada di kelurahan untuk memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, termasuk tenaga pendidik untuk menyiapkan masyarakat didik yang handal dan punya daya saing secara global. Selain itu diperlukan penguasaan teknologi informasi yang handal oleh SDM serta dukungan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan;

   Pembangunan Kota Malang yang berjalan pesat memerlukan peran perempuan dalam partisipasi untuk lebih mengoptimalkan proses pembangunan. Kebijakan yang akan diambil antara lain melalui perluasan kesempatan berusaha serta memprioritaskan

pembinaan dan pemberdayaan perempuan, khususnya untuk mendapatkan hak yang sama (kesetaraan gender).

10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;

    Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Malang.

    Kebijakan yang diambil antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Malang termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;

    Pembangunan pariwisata di Kota Malang sangat potensial, sesuai dengan data BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi yang dimiliki baik dari pendidikan, industri dan perdagangan sangat mendukung untuk pengembangan potensi wisata.

    Kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan didukung oleh potensi wisata religi, wisata kuliner, dan wisata minat khusus.

12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal;

    Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi, UKM, dan sektor informal. Pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, dan sektor informal memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

    Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain melalui kemudahan permodalan, kerjasama perbankan, penyediaan zona perdagangan.

13. Pemberdayaan ekonomi sektor formal dan perbaikan iklim investasi;

    Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Malang dan memerlukan jaminan keamanan dan kepastian hukum serta penyediaan sarana prasarana pendukung investasi.

    Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung serta penyediaan kawasan industri.

14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai;

    Sebagai salah satu kota besar yang mengarah pada kota metropolitan perlu pengembangan sistem transportasi terpadu

untuk memperlancar sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas bagi barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal serta manajemen transportasi untuk rekayasa lalu lintas, diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kota Malang. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di Kota Malang harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah kabupaten/ kota yang juga semakin meningkat.

15. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota;

    Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.

    Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu diupayakan pembangunan rumah secara vertikal, baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan pada kawasan kumuh perlu ditingkatkan kualitas hunian, prasarana sarana lingkungan, serta, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta

penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat.

Kebijakan yang diambil adalah sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

16. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

    Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Malang.

    Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyiapan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Upaya lain dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program pendidikan gratis tingkat SD dan SMP, serta pendidikan gratis tingkat SMA dan SMK bagi siswa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

17. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;

    Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan iklim yang kondusif, tentram dan tertib, dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

    Kebijakan yang diambil melalui penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Kota Malang yang aman, tentram, tertib dan teratur, serta diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana.

18. Penguatan Ketahanan Pangan;

    Permasalahan ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem yaitu : ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang bermutu. Tantangan ketahanan pangan di Kota Malang adalah menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang diakibatkan perkembangan kota.

    Kebijakan yang diambil antara lain melakukan diversifikasi bahan pangan dan olahan pangan pengganti bahan pokok.

19. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

    Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

20. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

Sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerjasama pihak pemerintah daerah dengan stakeholder terkait baik swasta maupun masyarakat.

Instrumen pembiayaan non-konvensional ini salah satunya adalah memfasilitasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) / Corporate Social Responsibilities (CSR) Badan Usaha yang disinergikan dengan program daerah.

Kebijakan pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema Public Private Partnership (PPP), maupun Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lainnya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. RUMUSAN VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Adapun Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

"TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya *Peduli Wong Cilik* sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap *wong cilik* menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan

program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi *wong cilik*. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh *wong cilik* di Kota Malang.

Adapun visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BER**sih, **M**akmur, **A**dil, **R**eligius-toleran, **T**erkemuka, **A**man, **B**erbudaya, **A**sri, dan **T**erdidik.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bersih : Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur : Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal

penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.

Adil : Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran : Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai

faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka : Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman : Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi

masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya : Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri : Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan

aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik : Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

5.2. RUMUSAN MISI

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka

misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan**

   Pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang sangat fundamental yang menjadi hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintahan daerah.

   Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

   Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Pewujudan Misi ini diantaranya melalui upaya mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk pendidikan formal dan non-formal, serta penyediaan jaminan kesehatan bagi semua penduduk Kota Malang, terutama bagi wong cilik, dengan prosedur yang cepat dan mudah.

2. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah**

   Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah di berbagai sektor sehingga Kota Malang dapat menjadi kota yang produktif dan berdaya saing.

3. **Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial**

   Pelaksanaan pembangunan yang pesat terkadang menimbulkan ekses negatif berupa potensi timbulnya permasalahan ekonomi maupun sosial pada sebagian komunitas masyarakat.

   Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan (baik rentan ekonomi maupun rentan sosial), pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial, sebagai wujud kehadiran dan peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi ekses negatif atas akselerasi pelaksanaan pembangunan.

4. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan**

   Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka

mengimbangi pesatnya pertumbuhan Kota Malang sehingga kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas menjadi semakin baik.

Pembangunan dimaksud tidak boleh lepas dari upaya tertib penataan ruang daerah sesuai peruntukannya, serta harus berwawasan lingkungan.

Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan, sebagai wujud upaya pemerintah Kota Malang memacu pembangunan kota tanpa mengesampingkan aspek tertib tata ruang dan aspek lingkungan.

5. **Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**

   Birokrasi merupakan motor penggerak pemerintahan sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensinya selaku pelayan masyarakat.

   Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam memperbaiki kualitas penyelenggara

pemerintahan yang memiliki relevansi logis terhadap peningkatan kinerja Daerah dan kepuasan masyarakat.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan Pemerintah Kota Malang 2013-2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

   Dengan Sasaran :

   a) Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM;
   b) Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

2. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

   Dengan Sasaran :

   a) Meningkatnya kesempatan kerja
   b) Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah

3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availibility*).

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

   Dengan Sasaran :

   a) Menurunnya persentase penduduk miskin;
   b) Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial;
   c) Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana

2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender.

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.

   Dengan Sasaran :

   a) Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;

b) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

2. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan :

1. Terwujudnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah

   Dengan Sasaran :

Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntable dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

   Dengan Sasaran :

   Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Pada tabel berikut ini, akan disajikan secara sistematis rangkaian antara pernyataan Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kota Malang 2013-2018.

Tabel 5.1
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
										2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Melek Huruf (%)	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%
			2. % Angka kelulusan		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%			88,92%	88.92 %	88,95	88,97	88,99	89,03	89,03
			- SD/MI		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%			92,71%	93,01%	93,71%	94,01%	94,71%	95,01%	95,01%
			- SMP / MTs.		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%			67,07%	68.01 %	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
					5. Angka Melek Huruf	%			99,71 %	99,88 %	99,9 %	99,92 %	99,94 %	99,95 %	99,95 %
					6. Angka kelulusan										
					- SD/MI	%			99.21 %	99.21 %	99.22 %	99.23 %	99.24 %	99.25 %	99.25 %
					- SMP / MTs.	%			99.63 %	99.63 %	99.64 %	99.66 %	99.67 %	99.68 %	99.68 %
					7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Rasio	Kesehatan	Dinas Kesehatan	15,65	17	16,5	16	15,5	15	15
					2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Rasio			149,75	135	130	128	125	120	120
					3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Rasio			0,49	1,08	1,08	1,1	1,1	1,12	1,12
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB							
					4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1:103	1:103	1:103	1:102	1:102	1:101	1:101
					5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	%			62,28%	74%	75%	76%	77%	78%	78%
					6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata			70,82	70,92	70,95	70,98	71	71,1	71,1
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB							
							Kesehatan	Dinas Kesehatan							

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
												2014	2015	2016	2017	2018	
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	1.	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1.	Persentase koperasi aktif	%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi & UM	68,72%	71,71%	74,39%	76,24%	79,01%	80,95%	80,95%
			2.	Persentase Koperasi Aktif		2.	Kontribusi sektor UKM terhadap Total PDRB	%			54,39%	54,41%	54,51%	54,67%	54,73%	54,87%	54,87%
									Perdagangan	Dinas Perdagangan	39,86%	39,90%	39,92%	39,95%	39,99%	40,04%	40,04%
					Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1.	Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap Total PDRB	%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
									Pariwisata								
									Kebudayaan								
						2.	Persentase sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	%	Perindustrian	Dinas Perindustrian	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%
		Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Meningkatnya kesempatan kerja	1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	7,69%	7,22%	7,28%	7,18%	7,08%	7,00%	7,00%
			2.	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah		2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%			12,79%	75,00%	78,00%	80,00%	83,00%	85,00%	85,00%
									Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora							
					Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	1.	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	Penanaman Modal	DPM & PTSP	247,59	5%	5%	5%	5%	5%	5%
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Pengembangan Perekonomian							
									Perencanaan	Barenlitbang							
									Penanaman Modal	DPM & PTSP							
		Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	1.	Ketersediaan pangan (food availibility)	Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availibility*)	1.	Ketersediaan pangan (*food availibility)*	Jumlah	Pangan	Dinas Pertanian & KP	6.651,40 306,91 4.510,32 16.268,26	7.390,44 341,01 5.011,47 18.075,85	8.211,60 378,90 5.568,30 20.084,27	9.124,00 421,00 6.187,00 22.315,86	10.036,40 463,10 6.805,70 24.547,45	11.040,04 509,41 7.486,27 27.002,19	11.040,04 509,41 7.486,27 27.002,19
									Pertanian		1.500,41 156,11 50,81	1.667,13 173,46 56,46	1.852,36 192,73 62,73	2.058,18 214,15 69,70	2.264,00 235,56 76,67	2.490,40 259,12 84,34	2.490,40 259,12 84,34
									Kelautan dan Perikanan		154,78	171,98	191,09	212,32	233,55	256,91	256,91

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
												2014	2015	2016	2017	2018	
3	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial	Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	1.	Menurunnya persentase penduduk miskin	Menurunnya persentase penduduk miskin	1.	Angka kemiskinan	%	Sosial	Dinas Sosial	4,87%	4,80%	4,60%	4,50%	4,40%	4,30%	4,30%
									Perencanaan	Barenlitbang							
					Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	1.	Persentaase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	%	Sosial	Dinas Sosial	10,44%	13,00%	15%	17,00%	19,00%	21,00%	21,00%
					Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	1.	Persentase korban bencana yang tertangani	%	Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaa n gender	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB	72,99	73,49	74,09	74,79	75,59	76,49	76,49
						2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		75,41	75,91	76,51	77,21	78,01	78,91	78,91
									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	1.	Angka kriminalitas	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1.	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	%	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Kesra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						2.	Persentase penurunan kerusuhan bermotif	%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
									Sosial	Dinas Sosial							
					Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1.	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
						2.	Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	%	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	1.	Predikat Adipura	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1.	Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP	608,60	608,6	551,60	499,60	444,60	389,60	389,60
			2.	Predikat Wahana Tata Nugraha					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR							
									Perencanaan	Barenlitbang							
						2.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	%	Perhubungan	Dinas Perhubungan	90,59%	92%	95%	96%	97%	98%	
						3.	Persentase layanan air bersih	%			84%	85%	85,5%	87%	90%	95%	95%

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
												2014	2015	2016	2017	2018	
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR							
									Pemerintahan Administrasi Kelurahan/Kecamatan	Kec/ kel							
									Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP							
									Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora							
						4.	Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	%	Lingkungan Hidup	DLH	30%	45%	60%	70%	80%	90%	90%
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR							
									Lingkungan Hidup	DLH							
		Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1.	Persentase luasan RTH	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1.	Persentase luasan RTH	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR	15,92%	15,93%	15,94%	15,95%	15,96%	15,97%	15,97%
						2.	Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	%			90,48%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
						3.	% luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukkannya	%			50%	52%	54%	56%	58%	60%	60%
									Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP							
									Pertanahan								
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR							
5	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Terwujudnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah	1.	Opini BPK	Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah	1.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah	Pengawasan	Inspektorat	0	0	3	4	5	6	6
						2.	Nilai SAKIP Kota Malang	Jumlah			63,64	65	65	66	67	68	68
						3.	Opini BPK	Kriteria			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Organisasi							
									Keuangan	BPKAD							
										BPPD							
									Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD							

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
												2014	2015	2016	2017	2018	
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Keuangan & Perlengkapan							
									Penunjang	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)							
									Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKD							
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntable dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	1.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	1.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah	Penanaman Modal	DPM & PTSP	75,34	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	78,66
									Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD							
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Humas							
										Bagian Hukum							
									Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP							
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur							
										Bagian Pemerintahan							
										Bagian layanan pengadaan barang/jasa							
									Perencanaan	Barenlitbang							
									Penanaman Modal	DPM & PTSP							
									Penunjang	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)							
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Keuangan & perlengkapan							

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN INDIKATOR	URUSAN	OPD	DATA AWAL	Target Tahun					KONDISI AKHIR RPJMD
												2014	2015	2016	2017	2018	
									Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora							
									Komunikasi dan Informatika	Diskominfo							
									Statistik								
									Persandian								
									Pemerintahan Administrasi	Kec/Kel							
									Pemerintahan Administrasi Kelurahan	Kel							
									Penelitian dan Pengembangan	Barenlitbang							
									Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil							
									Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora							
									Perpustakaan	Dinperpus Dan Arsip Daerah							
									Kearsipan								

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Malang tahun 2013-2018. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara Pemerintah Kota Malang untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Penyusunan strategi dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018 ini didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan-kekuatan (*strengths*), kelemahan-kelemahan (*weaknesses*),

peluang-peluang (*opportunities*), dan tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman (*threats*) secara bersama-sama.

SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kota Malang. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola di Kota Malang, yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman.

Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi

berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik di dalam perumusan strategi pembangunan daerah Kota Malang 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018).

Bagan 6.1 Model Analisa SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal		**Kekuatan**					**Kelemahan**				
		1	2	3	4	Dst	1	2	3	4	Dst
Peluang	1 2 3 4 Dst	**S - O**					**W – O**				
Tantangan	1 2 3 4 Dst	**S – T**					**W – T**				

KETERANGAN:

S-O : Menggunakan kekuatan (S = *strength*) untuk meraih peluang (O = *opportunity*)
W-O : Menekan kelemahan (W = *weakness*) untuk meraih peluang
S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T = *threat*)
W-T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

6.1. ISU STRATEGIS

Isu strategis Kota Malang dalam 5 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahun mendatang.

Sebagaimana telah dirumuskan pada pembahasan di bab sebelumnya, berikut ini adalah isu-isu strategis Kota Malang selama 5 tahun mendatang, yakni:

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju "kota metropolis";
2. Pengelolaan Kependudukan Yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi;
3. Masih tingginya angka kemiskinan;
4. Masih tingginya angka pengangguran;
5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;
6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun;
7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal;
9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan;
10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;
12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal;
13. Pemberdayaan ekonomi sektro formal dan perbaikan iklim investasi;
14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai;
15. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota;
16. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
17. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;
18. Penguatan Ketahanan Pangan;
19. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

20. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

A. Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki seperti posisi geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana. Selanjutnya, dilakukan juga identifikasi terhadap berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

1. *Pertama* : Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*) Daerah

a. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya.

Malang Raya adalah salah satu kawasan yang terdiri dari tiga daerah pemerintahan (Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang) yang saling bertautan dimana antara daerah satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan baik dalam hal kegiatan lalu lintas ekonomi (industri pariwisata, hasil produksi pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya), sosial, budaya maupun politik.

Posisi Kota Malang yang berada di tengah-tengah kawasan Malang Raya memungkinkan akses yang luas dan cepat bagi Kota Malang untuk menjangkau berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

b. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas.

Dilihat dari aspek SDM tingkat pendidikan rata-rata angkatan kerja usia produktif, 35,07 % berpendidikan SMU dan 16,06 % berpendidikan sarjana.

c. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan dengan banyak tenaga ahli dan akademisi, yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Kota Malang.

d. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.

e. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.

f. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.

g. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta. Beragamnya media

massa ini menjadikan informasi berkembang dengan baik dan cepat.

h. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 7,9%.

i. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. Sebagian besar dari UMKM ini mengolah produk-produk lokal dan khas Malang.

j. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, *money changer*, situs-situs bernilai sejarah/*heritage*.

k. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.

l. Tersedianya tokoh-tokoh potensial(agama, seni, budaya, sosial politik).

   Kota Malang memiliki banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pengaruh mereka bahkan tidak hanya untuk komunitas mereka sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah untuk dilakukan.

m. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan. Di Kota Malang, relatif tidak pernah terjadi konflik horisontal yang mengganggu ketertiban sosial. Meskipun, potensi tersebut cukup banyak mengingat beragamnya latar belakang masyarakat Kota Malang.

2. *Kedua* : Faktor-Faktor Kelemahan (*weakness*) Daerah

a. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah. Keberadaan pelaku usaha informal kalah bersaing dengan pelaku usaha skala besar. Bahkan, keberadaan pelaku usaha informal (PKL) sering dianggap merusak keindahan kota.

b. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial.

Angka kemiskinan di Kota Malang memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tetapi, jumlah penduduk yang terkategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 16.990 Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin. Selain itu, tingkat pengangguran di Kota Malang tergolong tinggi. Pada 2011, penduduk yang terkategori menganggur mencapai 22.185 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,19%.

Jika dikaitkan dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi, maka bisa dipastikan terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat besar di kalangan masyarakat.

c. Kemacetan lalu lintas

Di Kota Malang, tampak bahwa infrastruktur transportasi kota sudah tidak mampu menunjang mobilitas masyarakat. Kemacetan sudah menjadi pemandangan yang jamak di Kota Malang, terutama di jam-jam sibuk. Bahkan, jalan-jalan alternatif pun tidak mampu menampung luberan masyarakat pengguna jalan. Dampak lanjutannya, kondisi jalan-jalan di Kota Malang banyak yang rusak, dan tidak bisa secara cepat tertangani. Sebab, penanganan kerusakan jalan bisa jadi malah akan menimbulkan kemacetan baru.

d. Banjir di Kota Malang

Sebagai daerah yang terletak di dataran tinggi, sangat mengherankan jika Kota Malang mengalami banjir. Namun, faktanya, hampir setiap musim penghujan, terjadi banjir di Kota Malang. Berkurangnya daerah resapan air karena menjadi bangunan; penyempitan daerah sungai dan saluran air untuk keperluan rumah tangga; volume sampah yang menghambat selokan dan saluran pembuangan air; dan lain-lain adalah hal-hal yang bisa menjelaskan mengapa banjir bisa terjadi di Kota Malang.

e. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk.

Di bidang sarana pemukiman kota, dapat dilihat berkembangnya kawasan-kawasan hunian tanpa perencanaan, termasuk daerah-daerah kumuh di beberapa

tempat, serta adanya bangunan-bangunan ruko di seantero kota.

f. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui.

   Perkembangan Kota Malang yang pesat ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai guna menjamin kenyamanan aktivitas masyarakat. Banyak infrastruktur yang sudah rusak, yang belum dilakukan perbaikan. Sedangkan, pengembangan infrastruktur-infrastruktur baru belum tersedia.

g. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota.

   Konsistensi dan ketaatan terhadap Tata Ruang Kota adalah menjadi salah satu bagian penting dalam pengaturan pemanfaatan ruang Kota Malang. Namun, di Kota Malang, dapat dilihat banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan tata ruang kota.

h. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.

   Dalam hal pelayanan publik masih banyak dijumpai ketidakpuasan masyarakat penerima layanan. Umumnya, keluhan masyarakat bersumber pada mekanisme layanan yang cenderung berbelit-belit, serta lamanya waktu pelayanan.

B. Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui dan mengelompokkan peluang-peluang (*opportunities*) yang tersedia dan ancaman-ancaman (*threats*) yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Malang dalam 5 tahun mendatang (2013-2018).

Faktor-faktor eksternal yang jika dikelola dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat yang besar dimasa yang akan datang dikategorikan sebagai *opportunity* (peluang). Sebaliknya jika faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, menjadi penghalang atau menghambat dalam pencapaian visi dan misi, dikategorikan sebagai *threats* (ancaman). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

1. Pertama : Faktor Peluang (opportunities) Daerah

a. Akses menuju ke Kota Malang yang semakin mudah. Sejalan dengan perkembangan kawasan Malang Raya, Kota Malang kian mudah untuk dijangkau. Selain melalui sarana transportasi darat, sarana transportasi udara juga sudah tersedia.

b. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan.

c. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan. Misalnya, keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program yang lain.

d. Adanya *good political will* dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018. Sejak dilantik menjadi walikota dan wakil walikota, Abah Anton dan Sutiaji telah berkomitmen kuat untuk memimpin pembangunan Kota Malang dengan pembenahan dan pembaharuan di segala sektor, menuju tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan.

e. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang menjadi tujuan investasi. Ketertarikan investor untuk menanamkan investasi ini merupakan peluang bagi pemerintah Kota Malang untuk lebih memajukan pembangunan di Kota Malang.

f. Dukungan luas dari kalangan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018. Dukungan ini muncul dari kesepahaman kalangan pengusaha terhadap visi dan misi kepemimpinan baru di Kota Malang ini.

2. Pertama : Faktor Tantangan (threat) Daerah

a. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin tinggi.

Besarnya arus urbanisasi dari daerah lain ke Kota Malang seiring dengan laju dan perkembangan daerah, menjadi

tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang. Jika arus urbanisasi ini tidak diantisipasi secara baik, berbagai masalah akan muncul dan menghambat perkembangan kota.

b. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.

   Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pengusaha besar semakin menguat dan menjadi bagian dari nadi perekonomian masyarakat Kota Malang. Hal ini, misalnya, terlihat dari masuknya bisnis ritel dan pasar modern sampai ke berbagai pelosok kota. Kekuatan besar ini telah nyata berdampak pada terpinggirkannya bisnis ritel tradisional dan pertumbuhan UMKM. Manakala kekuatan ekonomi besar itu tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan ekonomi besar itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kota Malang.

c. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

d. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam pemanfaatan tata ruang kota. Berkembangnya kawasan perumahan dan rumah-toko (ruko) adalah ancaman serius bagi daya dukung kawasan untuk kenyamanan kehidupan masyarakat Kota Malang.

e. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.

   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota diwajibkan

untuk memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20%. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau pada setiap wilayah ini merupakan perwujudan dan penguatan dari tujuan Penataan Ruang, yaitu "mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan".

Namun, dapat dilihat secara kasat mata bahwa RTH di Kota Malang banyak berkurang dan beralih fungsi menjadi pemukiman dan pertokoan/kawasan perdagangan.

f. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.

g. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat diketahui bahwa Kota Malang memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kota juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan. Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kota Malang berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama.

Pertama adalah strategi S - O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W - O, yaitu

strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S - T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap hal itu terlihat di dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Strategi Pembangunan Daerah Berdasar Analisis SWOT

Internal	**KEKUATAN (*Strenghts*)**	**KELEMAHAN (*Weakneses*)**
	1. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya. 2. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas. 3. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan. 4. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti. 5. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.	1. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah 2. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah. 3. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial. 4. Kemacetan lalu lintas Kota Malang 5. Banjir di Kota Malang 6. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk. 7. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui. 8. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota. 9. Pelayanan publik belum optimal

	6. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai. 7. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta. 8. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat. 9. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. 10. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage. 11. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat. 12. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik). 13. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan.	

Eksternal		
PELUANG (*Opportunities*)	**STRATEGI (SO)**	**STRATEGI (WO)**
1. Akses menuju ke Kota Malang yang semakin mudah. 2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan. 3. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan.	1. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai. 2. Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan. 3. Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial 5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan 6. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. 7. Transparansi pengelolaan dana pendidikan 8. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi 9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 10. Peningkatan kesehatan sosial masyarakat 11. Fasilitasi investasi pengembangan	1. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Pemberdayaan masyarakat miskin 3. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, Swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan. 4. Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan 5. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff. 6. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal. 7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik 8. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi 9. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan

4. Adanya *good political will* dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018. 5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang menjadi tujuan investasi. 6. Dukungan luas dari kalangan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018.	destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru 12. Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan 13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian. 14. Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah 15. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal	penduduk 10. Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko yang akan ditimbulkan

ANCAMAN (*Threats*)	**STRATEGI (ST)**	**STRATEGI (WT)**
1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin tinggi. 2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas. 3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 2. Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya 3. Perluasan lapangan kerja 4. Penggunaan alokasi dana untuk pogram/kegiatan sesuai kebutuhan	1. Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu 2. Optimalisasi peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM 3. Pengembangan sistem transportasi terpadu 4. Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas ekonomi industri 5. Meningkatkan pengendalian terhadap

Malang. 4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam tata ruang kota. 5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau. 6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara. 7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial	pembangunan 5. Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku pembangunan di Kota Malang 6. Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah	pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 6. Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase 7. Optimalisasi dan penyempurnaan penataan ruang 8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang 9. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan 10. Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar 11. Optimalisasi kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata 12. Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah 13. Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro 14. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri 15. Revitalisasi pasar tradisional

Hasil analisis SWOT di atas, dapat dikembangkan secara kuantitatif untuk mengetahui posisi Kota Malang dalam Diagram Matriks SWOT.

Dalam Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS –*Internal Strategic Factors Analysis Summary*), didapatkan tabel berikut :

Tabel 6.2

Analisis Faktor Strategis Internal

KEKUATAN	**SKOR**	**BOBOT**	**TOTAL**
1. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya.	0,02	3	0,06
2. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas.	0,1	4	0,4
3. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan.	0,08	4	0,32
4. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.	0,02	2	0,04
5. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.	0,08	3	0,24
6. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.	0,06	3	0,18

7. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta.	0,04	3	0,12
8. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat.	0,1	4	0,4
9. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam.	0,1	4	0,4
10. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/ rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage.	0,04	3	0,12
11. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.	0,04	3	0,12
12. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik).	0,02	3	0,06
13. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan.	0,02	4	0,08
KELEMAHAN			
1. Produktivitas dan daya saing sektor informal masih lemah	0,02	3	0,06
2. Tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin dan disparitas ekonomi-sosial.	0,08	4	0,32
3. Kemacetan lalu lintas Kota Malang	0,04	3	0,12
4. Banjir di Kota Malang	0,04	3	0,12
5. Bertambahnya kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk.	0,04	3	0,12
6. Banyak infrastruktur kota sudah tidak layak dan perlu diperbarui.	0,02	3	0,06
7. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang kota.	0,02	2	0,04
8. Pelayanan publik belum optimal	0,02	4	0,08
TOTAL	**1**		**3,46**

Sedangkan dalam Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS–*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*), didapatkan tabel berikut :

Tabel 6.3

Analisis Faktor Strategis Eksternal

PELUANG	SKOR	BOBOT	TOTAL
1. Akses menuju ke Kota Malang yang semakin mudah.	0,08	3	0,24
2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Malang untuk melaksanakan pembangunan.	0,08	3	0,24
3. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Malang adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan.	0,1	4	0,4
4. Adanya *good political will* dari Walikota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2013-2018.	0,14	4	0,56
5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Malang menjadi tujuan investasi.	0,08	3	0,24
6. Dukungan pengusaha terhadap kepemimpinan Walikota - Wakil Walikota Malang 2013 -2018.	0,06	3	0,18
ANCAMAN			
1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Malang semakin tinggi.	0,1	4	0,4
2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.	0,04	2	0,08
3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Malang.	0,04	2	0,08
4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam tata ruang kota.	0,08	4	0,32
5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.	0,08	4	0,32
6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.	0,06	3	0,18

7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial	0,06	3	0,18
TOTAL	**1**		**3,42**

Dari kedua tabel IFAS dan EFAS di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6.4

Hasil Analisis Faktor Strategis Internal Dan Eksternal

IFAS	**NILAI**
Sub Total Analisis Kekuatan (a)	2,54
Sub Total Analisis Kelemahan (b)	0,92
Nilai (a) dikurangi (b)	**1,62**
EFAS	
Sub Total Analisis Peluang (c)	1,86
Sub Total Analisis Ancaman (d)	1,56
Nilai (c) dikurangi (d)	**0,3**
Koordinat Posisi dalam Diagram Matriks SWOT	(1,62 ; 0,3)

Dari Tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kota Malang berada pada KUADRAN I, mengingat nilai koordinat IFAS dan EFAS sama-sama memiliki nilai positif.

Dari hasil ini, ditarik kesimpulan bahwa Kota Malang merupakan kota yang kuat dan memiliki banyak peluang yang harus dioptimalkan. Strategi pembangunan yang perlu dikembangkan, menurut Teori Matriks SWOT, adalah Strategi PROGRESIF, yakni meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dengan kebijakan dan program yang lebih kreatif guna meraih kemajuan pembangunan secara maksimal.

6.2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2013-2018, digunakan tiga strategi pokok yaitu strategi *pro growth, pro job, pro poor, dan pro gender*. *Pro growth* berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Pro job* berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. *Pro poor* berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada Wong Cilik, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. *Pro gender* berarti pembangunan di Kota Malang dilakukan dengan prinsip kesetaraan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan. Keempat strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan.

Melalui keempat strategi itu, diharapkan bisa tercipta adanya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang relatif tinggi secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diusahakan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau sektor, melainkan oleh banyak orang. Karena itu, selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga mendukung adanya alokasi dan distribusi sumber-sumber ke berbagai sektor dan wilayah.

Sebagaimana terlihat di dalam bagan 6.2, terdapat empat kelompok strategi pembangunan daerah Kota Malang berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup:

1. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai;

2. Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan;
3. Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat;
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial;
5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan;
6. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;
7. Transparansi pengelolaan dana pendidikan;
8. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi;
9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
10. Peningkatan kesehatan sosial masyarakat;
11. Fasilitasi investasi pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru;
12. Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan;
13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian;
14. Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah;
15. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal.

Kedua adalah strategi W - O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup:

1. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
3. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, Swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan;

4. Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan;
5. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff;
6. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal;
7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik;
8. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
10. Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko yang akan ditimbulkan.

Ketiga adalah strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
2. Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya;
3. Perluasan lapangan kerja;
4. Penggunaan alokasi dana untuk pogram/kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan;
5. Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku pembangunan di Kota Malang;
6. Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah.

Keempat, strategi W - T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu;

2. Optimalisasi peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM;
3. Pengembangan sistem transportasi terpadu;
4. Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas ekonomi industri;
5. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase;
7. Optimalisasi dan penyempurnaan penataan ruang;
8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang;
9. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan;
10. Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar;
11. Optimalisasi kebudayaan tradisional Malang sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata;
12. Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah;
13. Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro;
14. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri;
15. Revitalisasi pasar tradisional.

Semua strategi dari empat kelompok tersebut merupakan alternatif strategi yang dihasilkan dari proses analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kota Malang. Pada tahap berikutnya, semua alternatif strategi tersebut akan dipilih dan dipilah berdasarkan kaitan dan relevansinya dengan Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kota Malang 2013-2018.

Selain analisi SWOT, pemetaan potensi wilayah juga dapat dilakukan dengan analisis LQ dan Shift share sebagai berikut:

PDRB Kota Malang dan Jawa Timur 2009-2013

(Atas Dasar Harga Konstan 2000, dalam jutaan rupiah/ 000.000)

LAPANGAN USAHA	KOTA MALANG					JAWA TIMUR			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012
1. PERTANIAN	*56.158,91*	*55.625,28*	*52.982,13*	*52.161,16*	*51.717,79*	50.208.896,71	51.329.548,83	52.628.433,15	54.463.942,77
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	*6.380,72*	*6.171,43*	*6.041,83*	*5.896,22*	*5.684,55*	7.104.816,81	7.757.319,82	8.228.632,48	8.401.262,86
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	*4.083.960,28*	*4.254.693,26*	*4.521.178,77*	*4.809.913,23*	*5.057.287,07*	83.299.893,42	86.900.779,13	92.171.191,46	98.017.056,47
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	*226.610,82*	*238.622,25*	*253.344,93*	*273.698,30*	*295.361,52*	4.361.515,81	4.642.081,81	4.932.084,36	5.238.431,69
5. BANGUNAN	*332.272,21*	*374.935,96*	*406.693,04*	*443.498,76*	*484.070,03*	10.307.883,76	10.992.599,76	11.994.825,72	12.840.565,41
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	*5.310.305,69*	*5.721.906,62*	*6.191.342,82*	*6.764.892,36*	*7.315.892,84*	95.983.867,09	106.229.112,97	116.645.214,35	128.375.498,60
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	*430.545,59*	*460.113,26*	*492.812,03*	*531.807,80*	*575.756,40*	22.781.527,67	25.076.424,92	27.945.256,13	30.640.913,33
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	*1.014.463,01*	*1.076.000,18*	*1.147.143,50*	*1.227.667,56*	1.311.652,32	17.395.393,53	18.659.490,17	20.186.109,19	21.802.468,45
9. JASA-JASA	*1.758.219,63*	*1.856.556,91*	*1.966.921,35*	*2.067.445,18*	*2.195.916,22*	29.417.374,11	30.693.407,48	32.251.530,62	33.886.297,81
PDRB Tanpa MIGAS	13.218.916,86	14.044.625,15	15.038.460,40	16.176.980,57	17.293.338,74	320.861.168,91	342.280.764,89	366.983.277,46	393.666.437,39

HASIL LOCATION QUOTIENT (LQ)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012
1. pertanian	0,03	0,03	0,02	0,02
2. pertambangan & penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02
3. industri pengolahan	1,19	1,19	1,20	1,19
4. listrik, gas & air bersih	1,26	1,25	1,25	1,27
5. bangunan	0,78	0,83	0,83	0,84
6. perdagangan, hotel & restoran	1,34	1,31	1,30	1,28
7. pengangkutan & komunikasi	0,46	0,45	0,43	0,42
8. keuangan, persewaan, & js. prsh.	1,42	1,41	1,39	1,37
9. jasa-jasa	1,45	1,47	1,49	1,48

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis di Kota Malang yang merupakan sektor unggulan daerah dan empat sektor lainnya menjadi sektor non basis sebagai sektor penunjang dari keberadaan sektor basis. Sektor unggulan tersebut secara berurutan adalah : 1) Jasa-jasa, 2) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3) Perdagangan, hotel dan restoran, 4) Listrik gas dan air bersih, 5) Industri pengolahan. Pada kurun waktu 2009-2012 kelima sektor tersebut memiliki nilai LQ > 1, artinya kelimaa sektor tersebut merupakan sektor basis yang cenderung dapat mengekspor ke daerah lain. Sektor yang memiliki nilai LQ paling besar terdapat pada sektor jasa-jasa, dengan kisaran nilai LQ secara berturut-turut adalah 1,45; 1,47; 1,49; 1,48. Hal ini disebabkan karena produksi sektor jasa-jasa di Kota Malang telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Peringkat sektor unggulan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan potensi daerah di sektor-sektor yang memang sedang surplus dan berkembang.

HASIL SHIFT SHARE ANALYIS

SEKTOR	Nij		Mij		Cij		Pergeseran Struktur Ekonomi	
	nilai	(%)	nilai	(%)	nilai	(%)	nilai	(%)
1. Pertanian	12.742,78	0,42	-7.983,49	-2,50	-8.757,04	-2,42%	-3.997,75	-0,14
2. Pertambangan & penggalian	1.447,82	0,05	-283,51	-0,09	-1.648,82	-0,46%	-484,5	-0,02
3. Industri pengolahan	926.674,38	30,89	-205.133,13	-64,12	4.411,70	1,22%	725.952,95	24,54
4. Listrik, gas & air bersih	51.419,32	1,71	-5.857,49	-1,83	1.525,65	0,42%	47.087,48	1,59
5. Bangunan	75.394,50	2,51	6.245,90	1,95	29.586,15	8,19%	111.226,55	3,76
6. Perdagangan, hotel & restoran	1.204.939,30	40,17	587.127,12	183,52	-337.479,75	-93,40%	1.454.586,67	49,17
7. Pengangkutan & komunikasi	97.693,30	3,26	50.840,36	15,89	-47.271,46	-13,08%	101.262,21	3,42
8. Keuangan, persewaan, & js. prsh.	230.187,57	7,67	26.823,84	8,38	-43.806,85	-12,12%	213.204,55	7,21
9. Jasa-jasa	398.950,28	13,30	-131.851,34	-41,21	42.126,61	11,66%	309.225,55	10,45
Total	2.999.449,25		319.928,27		-361.313,80		2.958.063,71	

Industrial Mix (Mij)

Industrial Mix menunjukkan cepat lambatnya pertumbuhan sebuah sektor di Kota Malang dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai Mij > 0 (+) menunjukkan sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibanding sektor yang sama di Jawa Timur. Nilai Mij < 0 (-) menunjukkan sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibanding sektor yang sama di Jawa Timur.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara berurutan sektor yang tumbuh paling cepat adalah : 1) Perdagangan, hotel & restoran; 2) Pengangkutan & komunikasi; 3) Keuangan, persewaan, & js. Prsh; dan 4) Bangunan. Adapun lima sektor lainnya tumbuh lebih lambat dibandingkan lima sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Competitive Advantages (Cij)

Competitive advantages menunjukkan tingkat kompetisi sebuah sektor di Kota Malang dengan pertumbuhan total sektor yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai Cij > 0 (+) menunjukkan sektor tersebut lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di Jawa Timur. Nilai Mij < 0 (-) menunjukkan sektor tersebut tidak kompetitif dibanding sektor yang sama di Jawa Timur.

Peringkat sektor yang paling kompetitif secara berurutan adalah : 1) Jasa-jasa; 2) Bangunan; 3) Industri pengolahan; 4) Listrik, gas & air bersih. Adapun lima sektor lainnya berdasarkan analisa ini dianggap kurang kompetitif.

Berdasarkan tabel tersebut antara Cij dan Mij dapat dielaborasi untuk menentukan pemeringkatan sebagaimana penjelasan dan matrik berikut :

Tingkat Mij dan Cij > 0, adalah unggul
Tingkat Cij > 0 tetapi tingkat Mij < 0, adalah agak unggul
Tingkat Mij > 0 tetapi tingakat Cij < 0, adalah kurang unggul
Tingkat Cij dan Mij < 0, adalah tidak unggul

6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

Berdasarkan kondisi riil, analisis SWOT dan analisis LQ/Shift share maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Malang. Adapun arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2013-2018, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih.

Tabel 6.5

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 1: Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan sarana	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan	Peningkatan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
		prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin

Tabel 6.6

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi
	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	Meningkatkan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Meningkatkan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata
		Meningkatkan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri	Peningkatan pengembangan sektor industri
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.	Meningkatnya kesempatan kerja	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif
Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availibility*)	Mengembangkan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan katahanan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan	Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan katahanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
		pangan daerah	katahanan pangan daerah	katahanan pangan daerah	katahanan pangan daerah	katahanan pangan daerah	katahanan pangan daerah	pangan daerah
		Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian	Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian

Tabel 6.7

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	Menurunnya persentase penduduk miskin	Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Meningkatkan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Peningkatan penyelenggara an kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial
	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Membangun sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	Meningkatkan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan	Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam pembinaan	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam	Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
	antar umat beragama	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 6.8

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan
		Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota

Tabel 6.9

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang 2013-2018

Dalam Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntable dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Dari lima tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa terdapat 20 Strategi Pembangunan Kota Malang 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global.
2. Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin, dengan arah kebijakan berupa:
   a. pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin.
3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi.
4. Meningkatkan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal, dengan arah kebijakan berupa:

a. Peningkatan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal;

5. Meningkatkan performa dan daya saing sektor pariwisata, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Peningkatan performa dan daya saing sektor pariwisata;
6. Meningkatkan pengembangan sektor industri, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Peningkatan pengembangan sektor industri;
7. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
8. Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif;
9. Mengembangkan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan katahanan pangan daerah, dengan arah kebijakan berupa:
   a. Pengembangan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan katahanan pangan daerah;
10. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan kualitas intensifikasi pertanian;
11. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan berupa:

a. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin;

12. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial;
13. Membangun sistem penanganan bencana yang responsif dan handal, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Pembangunan sistem penanganan bencana yang responsif dan handal.
14. Meningkatkan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
15. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat;
16. Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum;

17. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan
18. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota;
19. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap
20. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan berupa:
    a. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam sub-bab bagian ini, akan diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Malang 2013 – 2018 berdasarkan rumusan dari masing-masing strategi yang dipilih untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Dari perspektif

Perencanaan Stratejik, perumusan program pembangunan daerah ini merupakan penjabaran dari Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 -2018.

Perumusan program pembangunan Kota Malang 2013 – 2018 ini berupa Program Prioritas, yakni program-program yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Malang 2013- 2018. Program prioritas secara spesifik akan didetailkan dalam RPJMD ini, beserta dengan indikator-indikator capaiannya. Target-target dari indikator program prioritas kemudian akan dijabarkan kedalam capaian kinerja tahunan beserta pagu indikatifnya. Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Kota Malang 2013- 2018 dijabarkan dalam tabel 6.10 berikut :

Tabel 6. 10
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Malang

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan														
	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan		**Angka Melek Huruf**	**99,71 %**	**99,88 %**		**99,9 %**		**99,92 %**		**99,94 %**		**99,95 %**		
			Angka kelulusan SD/MI	**99.21 %**	**99.21 %**		**99.22 %**		**99.23 %**		**99.24 %**		**99.25 %**		
			Angka kelulusan SMP/MTs	**99.63 %**	**99.63 %**		**99.64 %**		**99.66 %**		**99.67 %**		**99.68 %**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan		**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**99,63%**	**99,63%**		**99,63%**		**99,63%**		**99,63%**		**99,63%**		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	**88,92%**	**88.92 %**		**88,95%**		**88,97%**		**88,99%**		**89,03%**		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	**92,71%**	**93,01%**		**93,71%**		**94,01%**		**94,71%**		**95,01%**		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	**67,07%**	**68.01 %**		**69,00%**		**70,00%**		**71,00%**		**72,00%**		
			Angka Melek Huruf	**99,71 %**	**99,88 %**		**99,9 %**		**99,92 %**		**99,94 %**		**99,95 %**		
			Angka kelulusan SD/MI	**99.21 %**	**99.21 %**		**99.22 %**		**99.23 %**		**99.24 %**		**99.25 %**		
			Angka kelulusan SMP/MTs	**99.63 %**	**99.63 %**		**99.64 %**		**99.66 %**		**99.67 %**		**99.68 %**		
			Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
-	Peningkatan kapasitas serta profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik - Nilai UKG - Persentase Satuan pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM	- 70,31% - 66,4 - 60%	- 70,31% - - 62,10%	17.061.527.000,00	- 71,56% - - 63,2%	12.928.520.000,00	- 72,81% - 66,4 - 64,3%	30.020.920.000,00	- 74,06% - 67,5 - 65%	23.625.660.000,00	- 75,31% - 70 - 70%	27.769.850.000,00	Dinas Pendidikan
-	Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan dasar	Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Lulusan	100%	100%		100%		100%		100%	135.401.306.341,00	100%	171.948.875.150,00	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Lulusan	99,63%	100%		100%		100%		100%	90.779.980.000,00	100%	95.930.049.500,00	Dinas Pendidikan
-	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini	Pendidikan Anak Usia Dini	- Angka Partisipasi Kasar PAUD - Prosentasi Lembaga PAUD terakriditasi	- 62,01% - 8,5%	- 64,01% - 8,7%	871.943.000,00	- 75% - 8,8%	2.136.600.000,00	- 80% - 15%	3.711.600.000,00	- 85% - 25%	5.447.760.000,00	- 90% - 50%	4.066.673.000,00	Dinas Pendidikan
-	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal	Pendidikan Non formal	- Prosentase Program Kesetaraan Teragreditasi - Angka Melek Huruf - Prosentase Program Kursus Teragreditasi	- 9,09% - 99,71% - 17,05%	- 15% - 99,88% - 18%	5.944.555.000,00	- 20% - 99,9% - 19%	3.532.500.000,00	- 23% - 99,92% - 20%	4.700.000.000,00	- 25% - 99,94% - 23%	6.635.000.000,00	- 50% - 99,95% - 25%	2.521.946.000,00	Dinas Pendidikan

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan		**Angka Usia Harapan Hidup (AHH)**	**70,82**	**70,92**		**70,95**		**70,98**		**71**		**71,1**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan		**Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)**	**15,65**	**17**		**16,5**		**16**		**15,5**		**15**		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	**149,75**	**135**		**130**		**128**		**125**		**120**		
			Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	**0,49**	**1,08**		**1,08**		**1,1**		**1,1**		**1,12**		
			Rasio Posyandu per Satuan Balita	**1:103**	**1:103**		**1:103**		**1:102**		**1:102**		**1:101**		
			Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	**62,28%**	**74%**		**75%**		**76%**		**77%**		**78%**		
			Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	**70,82**	**70,92**		**70,95**		**70,98**		**71**		**71,1**		
-	Peningkatan kualitas pelayanan obat dan perbekalan kesehatan serta alat kesehatan	Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan	- Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan - Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	- 100% - 90%							- 100% - 90%	12.088.730.000,00	- 100% - 90%	11.078.669.650,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Pengawasan obat dan makanan	Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar	40%	40%	378.316.400,00	40%	350.000.000,00	40%	404.000.000,00	40%	546.000.000,00	40%	524.700.000,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga	- Persentase kompliksi kebidanan yang ditangani - Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangtani	- 94% - 97% - 80%							- 94% - 97% - 80%	395.000.000,00	- 94% - 97% - 80%	7.780.590.000,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera anggota UPPKS	1300							1300	3.955.000.000,00	1300	2.918.775.000,00	DP3AP2KB
-	Peningkatan kualitas layanan gizi masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	<0,45	<0,45	5.400.000.000,00	<0,45	13.642.000.000,00	<0,45	10.139.000.000,00	<0,45	17.545.000.000,00	<0,45	16.279.040.000,00	Dinas Kesehatan
-	Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	Pencegahan dan pengendalian penyakit	% Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100%							100%	2.287.209.000,00	100%	2.296.160.000,00	Dinas Kesehatan

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	1.285.000.000,00	100%	795.000.000,00	100%	933.000.000,00	100%	18.858.000.000,00	100%	20.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat	92%							92%	1.423.647.100,00	92%	1.416.556.600,00	Dinas Kesehatan
		Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Persentase pekerja formal dan non formal yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar	70%							70%	584.365.500,00	70%	1.279.365.500,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan, termasuk bagi masyarakat miskin	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu	50%							50%	53.850.635.240,00	50%	507.111.800,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Net Death rate (NDR)	2%					2%	10.016.592.426,00	2%	21.080.351.000,00	2%	56.980.540.200,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	40%							40%	165.000.000,00	40%	134.046.000,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan kesehatan dasar	Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah puskesmas yng berstandar ISO 9001:2008 atau terakreditasi	11							11	27.386.675.450,00	11	28.871.694.150,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Net Death rate (NDR)	2%							2%	9.400.230.240,00	2%	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
-	Peningkatan Program Keluarga Berencana	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Prosentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,70%							0,70%	375.000.000,00	0,70%	887.991.000,00	DP3AP2KB
		Keluarga Berencana	TFR	1,72	1,72	2.200.000.000,00	1,72	995.000.000,00	1,72	1.335.000.000,00	1,72	3.207.500.000,00	1,72	2.825.000.000,00	DP3AP2KB
-	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek	83%							83%	437.500.000,00	83%	589.500.000,00	Dinas Kesehatan

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah.														
	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.		**Pertumbuhan PDRB**	**12,52%**									**12,76%**		
			Persentase koperasi aktif	**68,72%**	**71,71%**		**74,39%**		**76,24%**		**79,01%**		**80,95%**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM		**Persentase koperasi aktif**	**68,72%**	**71,71%**		**74,39%**		**76,24%**		**79,01%**		**80,95%**		
			Kontribusi sektor UKM terhadap Total PDRB	**54,39%**	**54,41%**		**54,51%**		**54,67%**		**54,73%**		**54,87%**		
-	Peningkatan kapasitas koperasi	Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	80			80	475.000.000,00	100	600.000.000,00	600	1.240.000.000,00	600	2.163.328.700,00	Dinas Koperasi & UM
		Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	60	60	100.000.000,00					372	1.425.000.000,00	372	698.000.000,00	Dinas Koperasi & UM
-	Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah wirausaha mikro yang berkembang - Jumlah wirausaha mikro baru	- 36 - 400					- 36 - 400	2.253.000.000,00	250 400	5.990.000.000,00	250 400	5.686.475.200,00	Dinas Koperasi & UM
		Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Prosentase PKL yang dibina	1,54%							1,54%	450.000.000,00	1,54%	225.000.000,00	Dinas Perdagangan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata		**Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap Total PDRB**	**39,86%**	**39,90%**		**39,92%**		**39,95%**		**39,99%**		**40,04%**		
-	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan	Pengembangan Usaha Perdagangan	Prosentase pedagang yang dibina	40% pedagang binaan							40% pedagang binaan	6.991.665.000,00	40% pedagang binaan	3.246.000.000,00	Dinas Perdagangan
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase barang pangan yang layak konsumsi	40%	40%	545.000.000,00	40%	535.000.000,00	40%	835.000.000,00	40%	1.200.000.000,00	40%	722.500.000,00	Dinas Perdagangan
		Peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian	Nilai SKM pelayanan kemetrologian	80									80	610.000.000,00	Dinas Perdagangan
		Peningkatan kualitas pelayanan pasar	Nilai SKM pelayanan pasar	80									80	1.000.000.000,00	Dinas Perdagangan
-	Penguatan Daya Saing Produk Lokal	Pembinaan dan Pengembangan Produk Lokal													Dinas Perdagangan
		Peningkatan Promosi Dagang													Dinas Perdagangan
-	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat	Prosentase pemeliharaan pasar tradisional	92,86%	92,86%	80.000.000,00	92,86%	250.000.000,00	92,86%	550.000.000,00	92,86%	12.337.785.000,00	92,86%	31.615.515.000,00	Dinas Perdagangan
-	Pengembangan budaya tradisional Kota Malang sebagai potensi wisata	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Budaya Tradisional	40%	40%	1.353.675.600,00	39,92%	925.000.000,00	40%	720.000.000,00	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/seniman dan masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Kebudayaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-	Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya	Promosi Wisata berbasi Seni Budaya	Persentase Promosi Wisata berbasis seni budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Persentase peningkatan kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap total PDRB	104%	104%	1.067.574.400,00	105%	1.607.074.400,00	106%	668.000.000,00	108%	3.775.000.000,00	109%	5.125.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kontribusi subsektor ekonomi kreatif dibidang seni dan budaya terhadap total PDRB	13%	-	-	-	-	-	-	13%	2.825.000.000,00	14%	54.385.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	- Persentase seni budaya tradisional yang ditetapkan sebagai obyek pariwisata - Persentase Cagar Budaya yang terpelihara	9%	9%	365.000.000,00	25%	1.230.000.000,00	38%	4.540.000.000,00	40%	5.092.460.700,00	43%	8.150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-	Pembinaan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	11%	-	-	11%	1.586.925.600,00	12%	1.700.000.000,00	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-	Peningkatan fasilitasi pengembangan sektor industri	Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan industri ILMETA & IATT	1,94	-	-	-	-	-	-	1,94	5.525.000.000,00	2	4.825.000.000,00	Dinas Perindustrian
		Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	2,24	-	-	-	-	-	-	2,24	4.400.000.000,00	2,3	6.970.000.000,00	Dinas Perindustrian
	Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja		**Tingkat pengangguran terbuka (TPT)**	**7,69%**	**7,22%**		**7,28%**		**7,18%**		**7,08%**		**7,00%**		
			Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	**247,59**	**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kesempatan kerja		**Tingkat pengangguran terbuka (TPT)**	**7,69%**	**7,22%**		**7,28%**		**7,18%**		**7,08%**		**7,00%**		
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	**12,79%**	**75,00%**		**78,00%**		**80,00%**		**83,00%**		**85,00%**		
-	Perlindungan lembaga ketenagakerjaan	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial yang harmonis	500 orang	500 orang	1.140.000.000,00	500 orang	1.315.000.000,00	500 orang	1.496.347.000,00	500 orang	922.220.000,00	500 orang	722.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja
-	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi/ ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja yang dilatih/dibina	667 orang	667 orang	360.000.000,00	667 orang	42.367.000.000,00	667 orang	165.000.000,00	667 orang	2.200.000.000,00	667 orang	2.310.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
-	Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya fasilitasi penempatan tenaga kerja	1.825 orang	1.825 orang	595.406.700,00	1.825 orang	910.000.000,00	1.825 orang	2.812.500.000,00	1.825 orang	1.295.000.000,00	1.825 orang	5.417.150.000,00	Dinas Tenaga Kerja

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terlaksananya kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda	2	2	800.000.000,00	2	243.750.000,00	2	1.060.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	640.040.000,00	Dispora
	Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah		**Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah**	**247,59**	**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		
-	Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Penanaman Modal	3%	-	-	-	-	-	-	3%	750.000.000,00	2.227.890.000	4.170.000.000,00	DPM & PTSP
		Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Laporan perkembangan kegiatan Penanaman dan Promosi	3%	-	-	-	-	-	-	3%	1.725.000.000,00	3 laporan	2.403.000.000,00	DPM & PTSP
		Pengembangan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 dokumen							8 dokumen	1.056.750.000,00	8 dokumen	1.217.042.000,00	Bagian Pengembangan Perekonomian
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi	80%							80%	2.965.000.000,00	80%	2.737.750.000,00	Barenlitbang
		Pengolahan Data dan Informasi	Nilai SKM layanan informasi	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	1.900.150.000,00	84	2.050.000.000,00	DPM & PTSP
	Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.		**Ketersediaan pangan (food availibility)**	**6.651,40 306,91 4.510,32 16.268,26 1.500,41 156,11 50,81 154,78**	**7.390,44 341,01 5.011,47 18.075,8 5 1.667,13 173,46 56,46 171,98**		**8.211,60 378,90 5.568,30 20.084,27 1.852,36 192,73 62,73 191,09**		**9.124,00 421,00 6.187,00 22.315,86 2.058,18 214,15 69,70 212,32**		**10.036,40 463,10 6.805,70 24.547,45 2.264,00 235,56 76,67 233,55**		**11.040,04 509,41 7.486,27 27.002,19 2.490,40 259,12 84,34 256,91**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan (food availibility)		**Ketersediaan pangan (food availibility)**	**6.651,40 306,91 4.510,32 16.268,26 1.500,41 156,11 50,81 154,78**	**7.390,44 341,01 5.011,47 18.075,8 5 1.667,13 173,46 56,46 171,98**		**8.211,60 378,90 5.568,30 20.084,27 1.852,36 192,73 62,73 191,09**		**9.124,00 421,00 6.187,00 22.315,86 2.058,18 214,15 69,70 212,32**		**10.036,40 463,10 6.805,70 24.547,45 2.264,00 235,56 76,67 233,55**		**11.040,04 509,41 7.486,27 27.002,19 2.490,40 259,12 84,34 256,91**		
-	Pengembangan Penganekaragaman, konsumsi pangan dan keamanan pangan	Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (food availability)	- 6.651 - 307 - 4.510 - 16.268 - 1.500 - 156 - 51 - 155			- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	590.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	670.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.336.000.000,00	- 11.040,04 - 509 - 7.486,27 - 27.002,20 - 2.490,40 - 259,12 - 84,34 - 256,91	691.000.000,00	Dinas Pertanian & KP

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (food availability)	- 6.651 - 307 - 4.510 - 16.268 - 1.500 - 156 - 51 - 155	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	190.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	335.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.153.520.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.394.900.000,00	- 11.040,04 - 509 - 7.486,27 - 27.002,20 - 2.490,40 - 259,12 - 84,34 - 256,91	837.500.000,00	Dinas Pertanian & KP
-	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Peningkatan penyuluhan usaha pertanian	Prosentase peningkatan produksi hasil pertanian	5%							5%	252.500.000,00	5%	354.150.000,00	Dinas Pertanian & KP
		Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	9%							9%	4.175.100.000,00	9%	480.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
		Peningkatan produksi tanaman	Prosentase peningkatan rata-rata peningkatan produktivitas hasil pertanian (%)	5%							5%	3.442.500.000,00	5%	1.075.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
		Peningkatan produksi peternakan	- Prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	9%							9%	304.100.000,00	9%	396.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
		Peningkatan produksi Perikanan	Prosentase peningkatan produksi hasil perikanan	14%							14%	1.384.525.000,00	14%	1.126.350.000,00	Dinas Pertanian & KP
		Pengembangan pembenihan ikan	Prosentase peningkatan produksi hasil perikanan	14%							14%	800.000.000,00	14%	487.590.000,00	Dinas Pertanian & KP
	Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial														
	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan		**Menurunnya persentase penduduk miskin**	**4,87%**	**4,80%**		**4,60%**		**4,50%**		**4,40%**		**4,30%**		
	Sasaran 1 : Menurunnya persentase penduduk miskin		**Angka kemiskinan**	**4,87%**	**4,80%**		**4,60%**		**4,50%**		**4,40%**		**4,30%**		
-	Perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan	Penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial	- Jumlah PMKS fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan - Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar - Jumlah PSKS yang dibina	- 200 org - 450 org - 229 org							- 500 org - 17.440 org - 229 org	4.841.975.000,00	- 500 org - 17.440 org - 229 org	4.616.462.750,00	Dinas Sosial
		Perencanaan Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi	80%							80%	1.835.000.000,00	80%	1.575.000.000,00	Barenlitbang

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial		**Persentaase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan**	**10,44%**	**13%**		**15%**		**17%**		**19%**		**21%**		
-	Perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	- Jumlah gelandangan psikotik dan tuna wisma yang ditangani di TWK Sukun dan Liponsos - Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan - Jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial	- 240 org - 800 org - 25 org	- 240 org - 800 org - 25 org	3.406.353.500,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.536.578.300,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.385.046.500,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.494.230.000,00	- 240 org - 800 org - 25 org	2.663.677.500,00	Dinas Sosial
		Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	- Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial - Jumlah anggota Tagana yang mengikuti pelatihan penang-gulangan bencana - Jumlah korban bencana yang diberi bantuan	- 100 org - 90 org - 0	- 100 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0	1.320.000.000,00	- 31679 org - 90 org - 0	1.239.548.750,00	Dinas Sosial
	Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana		**Persentase korban bencana yang tertangani**	**0**	**0**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
-	Peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	-				5%	605.000.000,00	5%	1.050.000.000,00	5%	1.113.620.000,00	BPBD
-	pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana	Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	-				100%	850.000.000,00	100%	1.650.000.000,00	100%	2.827.500.000,00	BPBD
-	Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%	-				100%	610.000.000,00	100%	925.000.000,00	100%	2.702.500.000,00	BPBD
	Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**72,99**	**73,49**		**74,09**		**74,79**		**75,59**		**76,49**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**72,99**	**73,49**		**74,09**		**74,79**		**75,59**		**76,49**		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**75,41**	**75,91**		**76,51**		**77,21**		**78,01**		**78,91**		

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%							100%	1.135.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	DP3AP2KB
		Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Prosentase PUS anggota BKB , BKR, BKL , UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesertaan ber KB	78,27%							78,27%	850.000.000,00	78,27%	1.678.000.000,00	DP3AP2KB
		Pemberdayaan perempuan	IDG	75,03							75,03	1.850.000.000,00	75,03	2.200.000.000,00	DP3AP2KB
	Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat		**Angka kriminalitas**	**14%**									**18%**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama		**Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
			Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	**15%**	**15%**		**15%**		**15%**		**15%**		**15%**		
-	Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan	Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	16 Fasilitasi							16 Fasilitasi	17.748.745.000,00	16 Fasilitasi	16.679.880.000,00	Bagian Kesra
-	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan berdemokrasi	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan	12 kali	12 kali	730.000.000,00	12 kali	1.207.500.000,00	12 kali	901.000.000,00	12 kali	2.950.000.000,00	12 kali	699.000.000,00	Bakesbangpol
		Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pendidikan politik	12 kali	12 kali	235.000.000,00	12 kali	275.000.000,00	12 kali	629.000.000,00	12 kali	1.800.000.000,00	12 kali	457.920.000,00	Bakesbangpol
		Pemberdayaan Ormas dan LSM	Prosentase jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan	90 %							90 %	200.000.000,00	90 %	25.000.000,00	Bakesbangpol
-	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan berdemokrasi	Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	- Persentase (%)jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik - Jumlah anggota veteran yang menerima bingkisan/tali asih	- 100% - 300 org							- 100% - 300 org	340.000.000,00	- 100% - 300 org	391.000.000,00	Dinas Sosial
	Sasaran 2 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib		**Persentase penurunan angka kriminalitas**	**14%**	**10%**		**10%**		**10%**		**10%**		**10%**		
			Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	**90%**	**90%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
-	Peningkatan kewaspadaan daerah	Kewaspadaan Daerah	Jumlah operasi selama 1 tahun	12 bulan							12 bulan	5.950.000.000,00	12 bulan	5.925.000.000,00	Bakesbangpol
-	Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	100%							100%	9.872.399.000,00	100%	6.309.000.000,00	Satpol PP

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Penegakan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	100%							100%	2.650.500.000,00	100%	1.757.000.000,00	Satpol PP
		Peningkatan kapasitas satuan Linmas	Persentase Pos Kamling yang digunakan	96%			96%	1.439.200.000,00	96%	1.437.750.000,00	96%	6.485.000.000,00	96%	4.390.000.000,00	Satpol PP
		Pembinaan Polisi Pamong Praja	Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	90%							90%	2.057.974.000,00	90%	1.066.000.000,00	Satpol PP
	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan														
	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota		**Predikat Adipura**	**Piala Adipura**	**Piala Adipura**		**Piala Adipura**		**Piala Adipura**		**Piala Adipura**		**Piala Adipura**		
			Predikat Wahana Tata Nugraha	**Piala WTN**	**Piala WTN**		**Piala WTN**		**Piala WTN**		**Piala WTN**		**Piala WTN**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan		**Luasan Kawasan Kumuh**	**608,60**	**608,60**		**551,6**		**499,6**		**444,6**		**389,6**		
			Persentase jalan kota dalam kondisi baik	**90,59%**	**92%**		**95%**		**96%**		**97%**		**98%**		
			Persentase layanan air bersih	**84%**	**85%**		**85,5%**		**87%**		**90%**		**95%**		
			Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	**30%**	**45%**		**60%**		**70%**		**80%**		**90%**		
-	Pembangunan sarana prasarana pemukiman, air bersih dan sanitasi	Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh	80.00 Ha							80.00 Ha	14.190.440.000,00	80.00 Ha	18.395.000.000,00	DPKP
		Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Tingkat hunian rumah susun sederhana sewa	100%					100%	4.150.000.000,00	100%	6.836.797.505,00	100%	3.020.000.000,00	DPKP
-	Pembangunan sarana prasarana pemukiman, air bersih dan sanitasi	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak - Prosentase Rumah Tangga yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	- 100% - 80%							- 100% - 80%	29.641.088.000,00	- 100% - 80%	22.136.979.500,00	DPUPR
		Pembangunan Sumber Daya Air	Prosentase rehabilitasi/pemeliharaan sumber daya air	79,7%							79,7%	10.000.000.000,00	79,7%	571.500.000,00	DPUPR
		Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor	Prosentase Gedung Milik Daerah dalam kondisi baik	20%							20%	43.036.000.000,00	20%	66.254.115.000,00	DPUPR
		Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik	79,7%							79,7%	54.000.000.000,00	79,7%	35.687.800.000,00	DPUPR
		Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase	Prosentase sumber daya air dan drainase yang terdata dalam sistem	79,7%							79,7%	5.600.000.000,00	79,7%	1.056.000.000,00	DPUPR

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah	Prosentase rumah tangga yang terdata dalam sistem informasi air minum dan air limbah	80%							80%	3.400.000.000,00	80%	1.424.140.000,00	DPUPR
-	Pembangunan sarana prasarana pemukiman, air bersih dan sanitasi	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi	80%							80%	5.300.000.000,00	80%	7.650.000.000,00	Barenlitbang
-	Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	50%	55%	1.224.734.000,00	60%	570.000.000,00	65%	417.070.000,00	68%	9.040.000.000,00	71%	14.170.340.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	25%	33%	-	41%	-	49%	-	57%	2.857.820.800,00	60%	1.575.023.000,00	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan	88,96%	90%	19.675.831.320,00	90%	600.000.000,00	92%	1.095.000.000,00	93%	3.525.000.000,00	95%	2.514.281.200,00	Dinas Perhubungan
-	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait	Peningkatan dan pengamanan lalulintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	50%	55%	-	60%	1.070.000.000,00	65%	656.750.000,00	68%	1.270.000.000,00	71%	3.132.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja Pelayanan Angkutan	60%	60%	1.434.500.000,00	70%	2.388.188.395,00	70%	1.062.277.000,00	71%	1.326.500.000,00	74%	1.876.767.000,00	Dinas Perhubungan
-	Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	9%	8%	-	7%	-	6%	-	5%	2.609.938.350,00	4%	1.456.925.900,00	Dinas Perhubungan
-	Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik	99,1%							99,1%	54.260.700.000,00	99,1%	26.291.090.000,00	DPUPR
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik	79,70%	79,70%	56.340.657.920,00	79,70%	12.470.000.000,00	79,70%	42.904.790.000,00	79,70%	25.000.000.000,00	79,70%	7.500.000.000,00	DPUPR
		Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong	Prosentase turap/talud/brojong dalam kondisi baik	79,70%							79,70%	50.000.000.000,00	79,70%	7.000.000.000,00	DPUPR
		rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Prosentase jalan dalam kondisi baik - Prosentase jembatan dalam kondisi baik	99,1% 91%	99,1% 91%	83.528.239.600,00	99,1% 91%	57.067.298.500,00	99,1% 91%	67.803.855.800,00	99,1% 91%	235.000.000.000,00	99,1% 91%	246.632.926.620,00	DPUPR
		Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	- Ketersediaan sistem informasi/database jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik - Prosentase data jalan dan jembatan yang terintegrasi dalam sistem informasi jalan dan jembatan	- 5 Kecamatan - 100%							- 5 Kecamatan - 100%	5.600.000.000,00	- 5 Kecamatan - 100%	1.230.090.000,00	DPUPR

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan/perumahan di wilayah kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik									31.454.377.350,00		23.486.283.000,00	Kec/ kel
-	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Prosentase fasilitas penerangan jalan	86.73%							86.73%	2.300.000.000,00	86.73%	24.116.640.000,00	DPKP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Prosentase fasilitas penerangan jalan	86.73%							86.73%	1.600.000.000,00	86.73%	3.423.430.000,00	DPKP
-	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	4 kegiatan	4 kegiatan	12.685.000.000,00	4 kegiatan	1.905.491.300,00	4 kegiatan	4.475.000.000,00	4 kegiatan	17.300.000.000,00	4 kegiatan	27.006.079.000,00	Dispora
-	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	- Prosentase peraturan daerah di bidang lingkungan hidup yang diberlakukan secara efektif - Prosentase dokumen lingkungan hidup yang disetujui	100% 100%							100% 100%	4.575.000.000,00	100% 100%	1.741.000.000,00	DLH
		Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	persentase lembaga LH yang menjalin kerjasama/kemitraan dengan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan LH	100%							100%	1.420.000.000,00	100%	958.000.000,00	DLH
		Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase sekolah di Kota Malang yang peduli dan berbudaya lingkungan (sekolah adiwiyata)	50%							50%	3.695.000.000,00	50%	1.433.950.000,00	DLH
-	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya di Kota Malang dalam kondisi baik	50%							50%	20.000.000.000,00	50%	4.943.390.000,00	DPUPR
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	77,51%	77,51%	48.620.000.000,00	77,51%	233.000.000,00	77,51%	19.876.000.000,00	77,51%	71.011.806.700,00	77,51%	28.506.090.000,00	DLH
		Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Prosentase pengoperasian TPA	77,5%									77,5%	30.051.107.500,00	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,8									79,8	1.050.000.000,00	DLH
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan	persentase kendaraan operasional persampahan yang layak jalan	90%									90%	2.150.000.000,00	DLH
		Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Prosentase pengurangan sampah melalui 3R	11,5%									11,5%	4.479.250.000,00	DLH

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	persentase menurunnya pelanggaran dibidang lingkungan hidup	10%							10%	1.625.000.000,00	10%	1.250.000.000,00	DLH
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan udara emisi dari sumber tidak bergerak	- 50%	- 50%	850.000.000,00	- 50%	2.195.000.000,00	- 50%	1.260.028.000,00	- 50%	950.000.000,00	- 50%	755.367.000,00	DLH
			-Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah (B3)	- 50%	- 50%		- 50%		- 50%		- 50%		- 50%		
			-Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC)	- 5,66%	- 5,66%		- 5,66%		- 5,66%		- 5,66%		- 5,66%		
			-Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah cair	-	-		-		-		-		-		
	Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya		**Persentase luasan RTH**	**15,92%**	**15,93%**		**15,94%**		**15,95%**		**15,96%**		**15,97%**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya		**Persentase luasan RTH**	**15,92%**	**15,93%**		**15,94%**		**15,95%**		**15,96%**		**15,97%**		
			Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	**90,48%**	**95%**		**95%**		**95%**		**95%**		**95%**		
			% luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukkannya	**50%**	**52%**		**54%**		**56%**		**58%**		**60%**		
-	Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	98%							98%	1.070.000.000,00	98%	225.900.000,00	DPUPR
		Perencanaan Ruang	Prosentase kesesuaian dan kesahihan dokumen tata ruang yang tersedia dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan penataan ruang yang berlaku	100%							100%	1.960.000.000,00	100%	394.215.000,00	DPUPR
		Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan	Prosentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20%							20%	1.200.000.000,00	20%	520.000.000,00	DPUPR
		Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang	Prosentase Jumlah Keterangan Rencana Kota yang telah diinput kedalam database sistem	100%							100%	373.600.000,00	100%	422.480.000,00	DPUPR

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Bina Jasa Konstruksi	Prosentase pelaku usaha jasa konsruksi yang dibina	50%							50%	900.000.000,00	50%	500.000.000,00	DPUPR
		Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Prosentase Jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	100%							100%	5.870.000.000,00	100%	3.104.500.000,00	DPUPR
-	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) melalui Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan	8.30%	8.30%	7.585.000.000,00	8.30%	12.032.144.400,00	8.30%	6.963.145.500,00	8.30%	81.124.056.000,00	8.30%	22,549,600,800.00	DPKP
		Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman	75%	75%	1.000.000.000,00	75%	1.185.000.000,00	75%	485.000.000,00	75%	4.150.000.000,00	75%	922.472.200,00	DPKP
-	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Ijin Lokasi yang diproses sesuai dengan SOP	80.00 Ha							80.00 Ha	200.000.000,00	80.00 Ha	200.000.000,00	DPKP
-	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Jumlah Keterangan Rencana Kota Yang diterbitkan kurang dari 18 hari kerja setelah persyaratan administrasi lengkap	100%	100%	390.000.000,00	100%	665.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	2.640.000.000,00	100%	191.625.000,00	DPUPR
		Penataan bangunan dan lingkungan	Prosentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang	50 %									50 %	2.900.000.000,00	DPUPR
	Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat														
	Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah		**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah		**Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK**	**0**	**0**		**3**		**4**		**5**		**6**		
			Nilai SAKIP Kota Malang	**63,64**	**65**		**65**		**66**		**67**		**68**		
			Opini BPK	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
-	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah 1	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	33%	278.768.800,00	56%	299.572.130,00	78%	328.962.000,00	100%	353.200.000,00	100%	314.265.900,00	Inspektorat
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	30%	278.768.800,00	50%	299.572.130,00	70%	328.962.000,00	100%	321.656.800,00	100%	405.594.400,00	Inspektorat
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	33%	278.768.800,00	56%	299.572.130,00	78%	328.962.000,00	100%	419.425.300,00	100%	318.756.400,00	Inspektorat

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	38%	278.768.800,00	63%	299.572.130,00	88%	328.962.000,00	100%	400.356.000,00	100%	1.293.809.400,00	Inspektorat
-	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%							100%	2.313.110.000,00	100%	940.000.000,00	Bagian Organisasi
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%							100%	2.320.400.000,00	100%	1.808.979.000,00	Bagian Organisasi
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Anggaran Daerah	Prosentase BTL dalam APBD ≤ 50%	47%							47%	1.833.200.000,00	47%	1.936.738.000,00	BPKAD
		Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D kurang dari 2 (dua) hari	100%							100%	1.719.038.700,00	100%	2.268.614.400,00	BPKAD
		Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung Opini BPK RI - Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	- 100% - 0							- 100% - 0	1.551.800.000,00	- 100% - 0	1.330.072.800,00	BPKAD
		Penatausahaan Aset Daerah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	13,57%							13,57%	3.434.730.000,00	13,57%	2.224.119.100,00	BPKAD
		Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase data aset daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%							100%	2.025.203.000,00	100%	3.367.663.000,00	BPKAD
		Peningkatan pelayanan UPT	Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah	14,75%									14,75%	166.160.000,00	BPKAD
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	- Presentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah - Prosentase peningkatan wajib pajak daerah	5%	-		-		-		5%	2.350.000.000,00	5%	2.382.640.020,00	BPPD
		Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Prosentase penurunan tunggakan pajak daerah	5%	-		-		-		5%	925.000.000,00	5%	2.393.000.000,00	BPPD
		Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Prosentase peningkatan pajak daerah	10%	-		-		-		10%	2.845.000.000,00	10%	2.206.112.000,00	BPPD
		Optimalisasi pelayanan UPT	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83	-		-		-		83		83	1.249.860.000,00	BPPD
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran bagi pimpinan/anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penggangaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	15.185.517.800,00	100%	10.126.630.000,00	Sekretariat DPRD

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Keuangan & Perlengkapan
-	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	- Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal - Hasil evaluasi SAKIP SKPD - Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti			3.004.275.200,00		8.451.618.912,00		7.333.174.972,00		17.012.901.570,00		13.160.897.700,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
-	Peningkatan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	- Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kebutuhan - Persentase penempatan ASN sesuai kebutuhan	- 79% - 63%	- 79% - 63,4%		- 80,3% - 65,5%		- 83,2% - 85,3%		- 85,5% - 88,4%	3.296.000.000,00	- 87,8% - 91,6%	1.810.780.000,00	BKD
		Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Persentase PNS yg menerima SK pensiun tepat waktu	0%	0%		0%		100%		100%	174.300.000,00	100%	259.000.000,00	BKD
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yg mengikuti diklat PIM	52,90%	55,8%		64,80%		66%		67%	5.332.023.000,00	98%	6.377.984.000,00	BKD
		Pembinaan Kepegawaian	Persentase pegawai yg dikenakan sanksi disiplin	0,16%	0,15%		0,14%		0,13%		0,12%	760.000.000,00	0,11%	911.478.000,00	BKD
		Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data yg akurat	70%	75%		75%		80%		83%	440.000.000,00	90%	750.750.000,00	BKD
	Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntable dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.		**Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**75,34**	**76,66**		**77,16**		**77,66**		**78,16**		**78,66**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat		**Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**75,34**	**76,66**		**77,16**		**77,66**		**78,16**		**78,66**		
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai SKM Perizinan	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	2.368.240.000,00	84	1.805.962.500,00	DPM & PTSP
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Fasilitasi penyelenggaraan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitas Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	27.943.351.550,00	100%	19.762.246.800,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan fungsi kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	2.717.498.150,00	100%	23.961.090.000,00	Sekretariat DPRD
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokoleran dan hubungan antar lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%							100%	16.216.000.000,00	100%	10.716.000.000,00	Bagian Humas

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penataan dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	100%	2.673.906.000,00	100%	2.302.040.000,00	100%	1.920.890.000,00	100%	5.700.000.000,00	100%	1.687.390.000,00	Bagian Hukum
		Penerapan dan penegakan hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	100%	770.280.000,00	100%	1.117.000.000,00	100%	1.658.000.000,00	100%	2.370.000.000,00	100%	3.894.180.000,00	Bagian Hukum
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100%	100%	1.018.456.646,00			100%	2.859.214.400,00	100%	32.782.702.300,00	100%	28.020.000.000,00	Satpol PP
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan kebijakan bidang sumber daya alam dan infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan infrasturktur yang difasilitasi	75%							75%	875.000.000,00	85%	850.000.000,00	Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313							3,1313	6.390.000.000,00	3,1313	2.965.000.000,00	Bagian Pemerintahan
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%							100%	3.015.000.000,00	100%	1.944.000.000,00	Bagian layanan pengadaan barang/jasa
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	25%	25%	650.000.000,00	25%	2.152.488.100,00	25%	2.380.000.000,00	25%	5.295.000.000,00	25%	5.129.247.000,00	Barenlitbang
		Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan	Nilai SKM Non Perizinan	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	300.970.000,00	84	510.650.000,00	DPM & PTSP
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP - Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi - Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik - Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran - Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi - Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			73.451.514.182,00		105.086.412.300,00		73.371.173.991,00		134.633.510.702,00		109.927.993.420,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase kendaraan dinas yang layak pakai - Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur - Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik - Persentase kendaraan dinas yang laik jalan - Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			35.408.252.495,55		51.628.300.989,03		42.866.600.490,03		191.832.207.483,00		152.577.797.500,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik - Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan - Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi - Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			5.174.493.300,00		9.009.978.000,00		8.945.553.200,00		18.452.209.250,00		12.226.698.200,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	90%	-	-	-	-	-	-	90%	2.510.000.000,00	90%	3.290.000.000,00	Bagian Keuangan & perlengkapan
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan prestasi olahraga	Terlaksanannya kegiatan pembinaan olahraga prestasi	7 Kegiatan							7 Kegiatan	2.500.000.000,00	7 Kegiatan	2.858.000.000,00	Dispora
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	7,18%	30,24%		32,26%		34,27%		36,29%	4.690.000.000,00	38,31%	3.012.275.000,00	Diskominfo
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase Aplikasi Informasi data yang diimplentasikan	30 simda	32 simda		34 simda		36 simda		38 simda	8.585.000.000,00	40 simda	7.845.000.000,00	Diskominfo
		Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Prosentase luas area blank spoot	7%	7%		6,9%		6,7%		6,5%	771.250.000,00	6,2%	1.187.894.000,00	Diskominfo
		Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Prosentase pengelolaan data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	75%	78%		80%		85%		90%	795.000.000,00	100%	975.000.000,00	Diskominfo
		Pengelolaan Persandian	Prosentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	80%	80%		76%		72%		69%	270.000.000,00	67%	360.000.000,00	Diskominfo

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui siskampling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan - Prosentase kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik - Prosentase ketersediaan data monografi di itngkat kecamatan dan kelurahan									11.967.182.468,00		30.259.720.200,00	Kec/ Kel
		Pemberdayaan Masyarakat	- Terlaksananya Musrenbang Kecamatan sesuai dengan ketentuan - Terlaksananya Musrenbang Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan - Tersedianya data profil Kecamatan dan Kelurahan									15.117.817.000,00		18.824.201.000,00	Kec/ Kel
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui siskampling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan - Prosentase kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik - Prosentase ketersediaan data monografi di itngkat kecamatan dan kelurahan									20.258.177.309,00			Kel
		Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	- Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan - Prosentase peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK	25% 80%							25% 80%	5.440.000.000,00	25% 80%	2.350.000.000,00	Barenlitbang
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang memliki dokumen kependudukan	1 Tahun							1 Tahun	1.510.600.000,00	1 Tahun	2.020.000.000,00	Dispendukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang memliki dokumen pencatatan sipil	100 %							100 %	1.744.200.000,00	100 %	1.489.950.000,00	Dispendukcapil

	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	100%							100%	892.700.000,00	100%	811.000.000,00	Dispendukcapil
		Peningkatan Peran serta kepemudaan	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepemudaan	7 kegiatan	7 kegiatan	619.645.000,00	7 kegiatan	592.869.000,00	7 kegiatan	556.000.000,00	7 kegiatan	780.000.000,00	7 kegiatan	2.205.092.000,00	Dispora
		Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.790.000.000,00	6 Kegiatan	1.583.257.000,00	6 Kegiatan	2.108.100.000,00	6 Kegiatan	1.355.000.000,00	6 Kegiatan	1.238.414.500,00	Dispora
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Prosentase koleksi perpustakaan yang terkelola dengan baik	82%	-	-	-	-	-	-	82%	671.380.320,00	82%	1.236.701.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan binaan yang memenuhi standart perpustakaan	95%	98%	1.425.659.800,00	100%	2.018.582.800,00	100%	1.799.891.800,00	100%	3.875.562.600,00	100%	1.634.591.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Prosentase arsip yang terkelola	60%	-	-	-	-	-	-	60%	1.606.293.000,00	75%	1.395.200.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan UPT													

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Prinsip pengelolaan ini harus tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Selanjutnya, kerangka pendanaan pembangunan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2013 – 2018
Kota Malang

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	865.405.268.231,87	998.259.423.719,3	1.113.436.976.109,1	1.239.422.838.135	1.383.616.620.556
	BELANJA					
II.a	Belanja Langsung	857.741.673.340,00	943.515.840.674	1.037.867.424.741,4	1.141.654.167.215	1.255.819.583.937
III.a	Belanja Tidak Langsung	825.928.369.502,82	908.521.206.453,1	999.373.327.098,42	1.099.310.659.808	1.209.241.725.789

7. 2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam sub-bab bagian ini, akan diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Malang 2013 – 2018. Penyusunan program pembangunan daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan dari perspektif Perencanaan Stratejik, perumusan program pembangunan daerah ini merupakan penjabaran dari Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum Pembangunan Kota Malang 2013 -2018.

Secara umum, terdapat dua kelompok besar dari perumusan program pembangunan Kota Malang 2013 – 2018. Yang pertama, Program Prioritas, yakni program-program yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Malang 2013- 2018. Program prioritas secara spesifik akan didetailkan dalam RPJMD ini, beserta dengan indikator-indikator capaiannya.

Sedangkan kelompok program yang kedua adalah Program Perangkat Daerah, yakni program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Berikut ini akan diuraikan program-program Perangkat Daerah dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Malang

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Urusan Wajib													
					Pendidikan													
1	1	1	20		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik - Nilai UKG - Persentase Satuan pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM	- 70,31% - 66,4 - 60%	- 70,31% - - 62,10%	17.061.527.000,00	- 71,56% - - 63,2%	12.928.520.000,00	- 72,81% - 66,4 - 64,3%	30.020.920.000,00	- 74,06% - 67,5 - 65%	23.625.660.000,00	- 75,31% - 70 - 70%	27.769.850.000,00	Dinas Pendidikan
2	1	1	23		Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Lulusan	100%	100%		100%		100%		100%	135.401.306.341,00	100%	171.948.875.150,00	Dinas Pendidikan
3	1	1	16		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Lulusan	99,63%	100%		100%		100%		100%	90.779.980.000,00	100%	95.930.049.500,00	Dinas Pendidikan
4	1	1	15		Pendidikan Anak Usia Dini	- Angka Partisipasi Kasar PAUD - Prosentasi Lembaga PAUD terakriditasi	- 62,01% - 8,5%	- 64,01% - 8,7%	871.943.000,00	- 75% - 8,8%	2.136.600.000,00	- 80% - 15%	3.711.600.000,00	- 85% - 25%	5.447.760.000,00	- 90% - 50%	4.066.673.000,00	Dinas Pendidikan
5	1	1	18		Pendidikan Non formal	- Prosentase Program Kesetaraan Teragreditasi - Angka Melek Huruf - Prosentase Program Kursus Teragreditasi	- 9,09% - 99,71% - 17,05%	- 15% - 99,88% - 18%	5.944.555.000,00	- 20% - 99,9% - 19%	3.532.500.000,00	- 23% - 99,92% - 20%	4.700.000.000,00	- 25% - 99,94% - 23%	6.635.000.000,00	- 50% - 99,95% - 25%	2.521.946.000,00	Dinas Pendidikan
					Kesehatan													
6	1	2	41		Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan	- Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan - Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	- 100% - 90%							- 100% - 90%	12.088.730.000,00	- 100% - 90%	11.078.669.650,00	Dinas Kesehatan
7	1	2	17		Pengawasan obat dan makanan	Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar	40%	40%	378.316.400,00	40%	350.000.000,00	40%	404.000.000,00	40%	546.000.000,00	40%	524.700.000,00	Dinas Kesehatan
8	1	2	39		Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga	- Persentase kompliksi kebidanan yang ditangani - Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangtani	- 94% - 97% - 80%							- 94% - 97% - 80%	395.000.000,00	- 94% - 97% - 80%	7.780.590.000,00	Dinas Kesehatan
9	1	2	20		Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	<0,45	<0,45	5.400.000.000,00	<0,45	13.642.000.000,00	<0,45	10.139.000.000,00	<0,45	17.545.000.000,00	<0,45	16.279.040.000,00	Dinas Kesehatan
10	1	2	36		Pencegahan dan pengendalian penyakit	% Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100%							100%	2.287.209.000,00	100%	2.296.160.000,00	Dinas Kesehatan
11	1	2	19		Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	1.285.000.000,00	100%	795.000.000,00	100%	933.000.000,00	100%	18.858.000.000,00	100%	20.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
12	1	2	38		Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat	92%							92%	1.423.647.100,00	92%	1.416.556.600,00	Dinas Kesehatan

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
13	1	2	37		Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Persentase pekerja formal dan non formal yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar	70%							70%	584.365.500,00	70%	1.279.365.500,00	Dinas Kesehatan
14	1	2	34		Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu	50%							50%	53.850.635.240,00	50%	507.111.800,00	Dinas Kesehatan
15	1	2	43		Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Net Death rate (NDR)	2%					2%	10.016.592.426,00	2%	21.080.351.000,00	2%	56.980.540.200,00	Dinas Kesehatan
16	1	2	35		Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	40%							40%	165.000.000,00	40%	134.046.000,00	Dinas Kesehatan
17	1	2	33		Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah puskesmas yng berstandar ISO 9001:2008 atau terakreditasi	11							11	27.386.675.450,00	11	28.871.694.150,00	Dinas Kesehatan
18					Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Net Death rate (NDR)	2%							2%	9.400.230.240,00	2%	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
19	1	2	40		Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek	83%							83%	437.500.000,00	83%	589.500.000,00	Dinas Kesehatan
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
20	1	3	27		Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak - Prosentase Rumah Tangga yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	- 100% - 80%							- 100% - 80%	29.641.088.000,00	- 100% - 80%	22.136.979.500,00	DPUPR
21	1	3	28		Pembangunan Sumber Daya Air	Prosentase rehabilitasi/pemeliharaan sumber daya air	79,7%							79,7%	10.000.000.000,00	79,7%	571.500.000,00	DPUPR
22	1	3	31		Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor	Prosentase Gedung Milik Daerah dalam kondisi baik	20%							20%	43.036.000.000,00	20%	66.254.115.000,00	DPUPR
23	1	3	32		Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik	79,7%							79,7%	54.000.000.000,00	79,7%	35.687.800.000,00	DPUPR
24	1	3	35		Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase	Prosentase sumber daya air dan drainase yang terdata dalam sistem	79,7%							79,7%	5.600.000.000,00	79,7%	1.056.000.000,00	DPUPR
25	1	3	36		Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah	Prosentase rumah tangga yang terdata dalam sistem informasi air minum dan air limbah	80%							80%	3.400.000.000,00	80%	1.424.140.000,00	DPUPR
26	1	3	15		Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik	99,1%							99,1%	54.260.700.000,00	99,1%	26.291.090.000,00	DPUPR
27	1	3	16		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik	79,70%	79,70%	56.340.657.920,00	79,70%	12.470.000.000,00	79,70%	42.904.790.000,00	79,70%	25.000.000.000,00	79,70%	7.500.000.000,00	DPUPR

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
28	1	3	17		Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong	Prosentase turap/talud/brojong dalam kondisi baik	79,70%							79,70%	50.000.000.000,00	79,70%	7.000.000.000,00	DPUPR
29	1	3	18		rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Prosentase jalan dalam kondisi baik - Prosentase jembatan dalam kondisi baik	99,1% 91%	99,1% 91%	83.528.239.600,00	99,1% 91%	57.067.298.500,00	99,1% 91%	67.803.855.800,00	99,1% 91%	235.000.000.000,00	99,1% 91%	246.632.926.620,00	DPUPR
30	1	3	22		Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	- Ketersediaan sistem informasi/database jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik - Prosentase data jalan dan jembatan yang terintegrasi dalam sistem informasi jalan dan jembatan	- 5 Kecamatan - 100%							- 5 Kecamatan - 100%	5.600.000.000,00	- 5 Kecamatan - 100%	1.230.090.000,00	DPUPR
31	1	3	24		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya di Kota Malang dalam kondisi baik	50%							50%	20.000.000.000,00	50%	4.943.390.000,00	DPUPR
32	1	3	29		Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	98%							98%	1.070.000.000,00	98%	225.900.000,00	DPUPR
33	1	3	33		Perencanaan Ruang	Prosentase kesesuaian dan kesahihan dokumen tata ruang yang tersedia dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan penataan ruang yang berlaku	100%							100%	1.960.000.000,00	100%	394.215.000,00	DPUPR
34	1	3	37		Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan	Prosentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20%							20%	1.200.000.000,00	20%	520.000.000,00	DPUPR
35	1	3	38		Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang	Prosentase Jumlah Keterangan Rencana Kota yang telah diinput kedalam database sistem	100%							100%	373.600.000,00	100%	422.480.000,00	DPUPR
36	1	3	39		Bina Jasa Konstruksi	Prosentase pelaku usaha jasa konsruksi yang dibina	50%							50%	900.000.000,00	50%	500.000.000,00	DPUPR
37	1	3	40		Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Prosentase Jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	100%							100%	5.870.000.000,00	100%	3.104.500.000,00	DPUPR
38	1	3	34		Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Jumlah Keterangan Rencana Kota Yang diterbitkan kurang dari 18 hari kerja setelah persyaratan administrasi lengkap	100%	100%	390.000.000,00	100%	665.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	2.640.000.000,00	100%	191.625.000,00	DPUPR
39					Penataan bangunan dan lingkungan	Prosentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang	50 %									50 %	2.900.000.000,00	DPUPR
					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
40	1	4	19		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan	8.30%	8.30%	7.585.000.000,00	8.30%	12.032.144.400,00	8.30%	6.963.145.500,00	8.30%	81.124.056.000,00	8.30%	22,549,600,800.00	DPKP

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
41	1	4	15		Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh	80.00 Ha							80.00 Ha	14.190.440.000,00	80.00 Ha	18.395.000.000,00	DPKP
42	1	4	16		Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Tingkat hunian rumah susun sederhana sewa	100%					100%	4.150.000.000,00	100%	6.836.797.505,00	100%	3.020.000.000,00	DPKP
43	1	4	17		Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Prosentase fasilitas penerangan jalan	86.73%							86.73%	2.300.000.000,00	86.73%	24.116.640.000,00	DPKP
44	1	4	18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Prosentase fasilitas penerangan jalan	86.73%							86.73%	1.600.000.000,00	86.73%	3.423.430.000,00	DPKP
45	1	4	20		Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman	75%	75%	1.000.000.000,00	75%	1.185.000.000,00	75%	485.000.000,00	75%	4.150.000.000,00	75%	922.472.200,00	DPKP
					Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
46	1	5	15		Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	100%							100%	9.872.399.000,00	100%	6.309.000.000,00	Satpol PP
47	1	5	16		Penegakan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	100%							100%	2.650.500.000,00	100%	1.757.000.000,00	Satpol PP
48	1	5	18		Peningkatan kapasitas satuan Linmas	Persentase Pos Kamling yang digunakan	96%			96%	1.439.200.000,00	96%	1.437.750.000,00	96%	6.485.000.000,00	96%	4.390.000.000,00	Satpol PP
49	1	5	17		Pembinaan Polisi Pamong Praja	Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	90%							90%	2.057.974.000,00	90%	1.066.000.000,00	Satpol PP
50	1	5	19		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100%	100%	1.018.456.646,00			100%	2.859.214.400,00	100%	32.782.702.300,00	100%	28.020.000.000,00	Satpol PP
					Sosial													
51	1	6	15		Penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial	- Jumlah PMKS fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan - Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar - Jumlah PSKS yang dibina	- 200 org - 450 org - 229 org							- 500 org - 17.440 org - 229 org	4.841.975.000,00	- 500 org - 17.440 org - 229 org	4.616.462.750,00	Dinas Sosial
52	1	6	17		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	- Jumlah gelandangan psikotik dan tuna wisma yang ditangani di TWK Sukun dan Liponsos - Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan - Jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial	- 240 org - 800 org - 25 org	- 240 org - 800 org - 25 org	3.406.353.500,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.536.578.300,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.385.046.500,00	- 240 org - 800 org - 25 org	1.494.230.000,00	- 240 org - 800 org - 25 org	2.663.677.500,00	Dinas Sosial

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
53	1	6	18		Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	- Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial - Jumlah anggota Tagana yang mengikuti pelatihan penang-gulangan bencana - Jumlah korban bencana yang diberi bantuan	- 100 org - 90 org - 0	- 100 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0		- 31679 org - 90 org - 0	1.320.000.000,00	- 31679 org - 90 org - 0	1.239.548.750,00	Dinas Sosial
54	1	6	16		Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	- Persentase (%)jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik - Jumlah anggota veteran yang menerima bingkisan/tali asih	- 100% - 300 org							- 100% - 300 org	340.000.000,00	- 100% - 300 org	391.000.000,00	Dinas Sosial
					Tenaga Kerja													
55	1	7	16		Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial yang harmonis	500 orang	500 orang	1.140.000.000,00	500 orang	1.315.000.000,00	500 orang	1.496.347.000,00	500 orang	922.220.000,00	500 orang	722.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja
56	1	7	15		Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi/ ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja yang dilatih/dibina	667 orang	667 orang	360.000.000,00	667 orang	42.367.000.000,00	667 orang	165.000.000,00	667 orang	2.200.000.000,00	667 orang	2.310.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
57	1	7	17		Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya fasilitasi penempatan tenaga kerja	1.825 orang	1.825 orang	595.406.700,00	1.825 orang	910.000.000,00	1.825 orang	2.812.500.000,00	1.825 orang	1.295.000.000,00	1.825 orang	5.417.150.000,00	Dinas Tenaga Kerja
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
58	1	8	16		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%							100%	1.135.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	DP3AP2KB
59	1	8	15		Pemberdayaan perempuan	IDG	75,03							75,03	1.850.000.000,00	75,03	2.200.000.000,00	DP3AP2KB

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Pangan													
60	1	9	16		Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (food availability)	- 6.651 - 307 - 4.510 - 16.268 - 1.500 - 156 - 51 - 155			- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	590.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	670.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.336.000.000,00	- 11.040,04 - 509 - 7.486,27 - 27.002,20 - 2.490,40 - 259,12 - 84,34 - 256,91	691.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
61	1	9	15		Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (food availability)	- 6.651 - 307 - 4.510 - 16.268 - 1.500 - 156 - 51 - 155	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	190.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	335.000.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.153.520.000,00	- 10.036 - 463 - 6.806 - 24.547 - 2.264 - 236 - 77 - 234	1.394.900.000,00	- 11.040,04 - 509 - 7.486,27 - 27.002,20 - 2.490,40 - 259,12 - 84,34 - 256,91	837.500.000,00	Dinas Pertanian & KP
					Pertanahan													
62	1	4	21		Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Ijin Lokasi yang diproses sesuai dengan SOP	80.00 Ha							80.00 Ha	200.000.000,00	80.00 Ha	200.000.000,00	DPKP
					Lingkungan Hidup													
63	1	11	15		Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	- Prosentase peraturan daerah di bidang lingkungan hidup yang diberlakukan secara efektif - Prosentase dokumen lingkungan hidup yang disetujui	100% 100%							100% 100%	4.575.000.000,00	100% 100%	1.741.000.000,00	DLH
64	1	11	16		Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	persentase lembaga LH yang menjalin kerjasama/kemitraan dengan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan LH	100%							100%	1.420.000.000,00	100%	958.000.000,00	DLH
65	1	11	19		Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase sekolah di Kota Malang yang peduli dan berbudaya lingkungan (sekolah adiwiyata)	50%							50%	3.695.000.000,00	50%	1.433.950.000,00	DLH
66	1	11	17		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	77,51%	77,51%	48.620.000.000,00	77,51%	233.000.000,00	77,51%	19.876.000.000,00	77,51%	71.011.806.700,00	77,51%	28.506.090.000,00	DLH
67					Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Prosentase pengoperasian TPA	77,5%									77,5%	30.051.107.500,00	DLH
68					Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,8									79,8	1.050.000.000,00	DLH
69					Program Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan	persentase kendaraan operasional persampahan yang layak jalan	90%									90%	2.150.000.000,00	DLH
70					Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Prosentase pengurangan sampah melalui 3R	11,5%									11,5%	4.479.250.000,00	DLH
71	1	11	18		Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	persentase menurunnya pelanggaran dibidang lingkungan hidup	10%							10%	1.625.000.000,00	10%	1.250.000.000,00	DLH

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
72	1	11	20		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan udara emisi dari sumber tidak bergerak -Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah (B3) -Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) -Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah cair	- 50% - 50% - 5,66% -	- 50% - 50% - 5,66% -	850.000.000,00	- 50% - 50% - 5,66% -	2.195.000.000,00	- 50% - 50% - 5,66% -	1.260.028.000,00	- 50% - 50% - 5,66% -	950.000.000,00	- 50% - 50% - 5,66% -	755.367.000,00	DLH
					Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
73	1	12	15		Pelayanan Pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang memliki dokumen kependudukan	1 Tahun							1 Tahun	1.510.600.000,00	1 Tahun	2.020.000.000,00	Dispendukcapil
74	1	12	16		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang memliki dokumen pencatatan sipil	100 %							100 %	1.744.200.000,00	100 %	1.489.950.000,00	Dispendukcapil
75	1	12	17		Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	100%							100%	892.700.000,00	100%	811.000.000,00	Dispendukcapil
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
76	1	14	17		Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera anggota UPPKS	1300							1300	3.955.000.000,00	1300	2.918.775.000,00	DP3AP2KB
77	1	14	15		Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Prosentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,70%							0,70%	375.000.000,00	0,70%	887.991.000,00	DP3AP2KB
78	1	14	16		Keluarga Berencana	TFR	1,72	1,72	2.200.000.000,00	1,72	995.000.000,00	1,72	1.335.000.000,00	1,72	3.207.500.000,00	1,72	2.825.000.000,00	DP3AP2KB
79	1	14	18		Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Prosentase PUS anggota BKB , BKR, BKL , UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesertaan ber KB	78,27%							78,27%	850.000.000,00	78,27%	1.678.000.000,00	DP3AP2KB
					Perhubungan													
80	1	15	16		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase persediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	50%	55%	1.224.734.000,00	60%	570.000.000,00	65%	417.070.000,00	68%	9.040.000.000,00	71%	14.170.340.000,00	Dinas Perhubungan
81	1	15	19		Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	25%	33%	-	41%	-	49%	-	57%	2.857.820.800,00	60%	1.575.023.000,00	Dinas Perhubungan
82	1	15	20		Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan	88,96%	90%	19.675.831.320,00	90%	600.000.000,00	92%	1.095.000.000,00	93%	3.525.000.000,00	95%	2.514.281.200,00	Dinas Perhubungan

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
83	1	15	15		Peningkatan dan pengamanan lalulintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	50%	55%	-	60%	1.070.000.000,00	65%	656.750.000,00	68%	1.270.000.000,00	71%	3.132.200.000,00	Dinas Perhubungan
84	1	15	17		Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kinerja Pelayanan Angkutan	60%	60%	1.434.500.000,00	70%	2.388.188.395,00	70%	1.062.277.000,00	71%	1.326.500.000,00	74%	1.876.767.000,00	Dinas Perhubungan
85	1	15	18		Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	9%	8%	-	7%	-	6%	-	5%	2.609.938.350,00	4%	1.456.925.900,00	Dinas Perhubungan
					Komunikasi dan Informatika													
86	1	16	15		Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	7,18%	30,24%		32,26%		34,27%		36,29%	4.690.000.000,00	38,31%	3.012.275.000,00	Diskominfo
87	1	16	16		Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase Aplikasi Informasi data yang diimplentasikan	30 simda	32 simda		34 simda		36 simda		38 simda	8.585.000.000,00	40 simda	7.845.000.000,00	Diskominfo
88	1	16	17		Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Prosentase luas area blank spoot	7%	7%		6,9%		6,7%		6,5%	771.250.000,00	6,2%	1.187.894.000,00	Diskominfo
					Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
89	1	17	15		Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	80			80	475.000.000,00	100	600.000.000,00	600	1.240.000.000,00	600	2.163.328.700,00	Dinas Koperasi & UM
90	1	17	16		Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	60	60	100.000.000,00					372	1.425.000.000,00	372	698.000.000,00	Dinas Koperasi & UM
91	1	17	17		Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah wirausaha mikro yang berkembang - Jumlah wirausaha mikro baru	- 36 - 400					- 36 - 400	2.253.000.000,00	250 400	5.990.000.000,00	250 400	5.686.475.200,00	Dinas Koperasi & UM
					Penanaman Modal													
92					Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Penanaman Modal	3%	-	-	-	-	-	-	3%	750.000.000,00	2.227.890.000	4.170.000.000,00	DPM & PTSP
93	1	18	16		Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Laporan perkembangan kegiatan Penanaman dan Promosi	3%	-	-	-	-	-	-	3%	1.725.000.000,00	3 laporan	2.403.000.000,00	DPM & PTSP
94	1	18	17		Pengolahan Data dan Informasi	Nilai SKM layanan informasi	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	1.900.150.000,00	84	2.050.000.000,00	DPM & PTSP
95	1	18	19		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai SKM Perizinan	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	2.368.240.000,00	84	1.805.962.500,00	DPM & PTSP
96	1	18	18		Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan	Nilai SKM Non Perizinan	83,5	-	-	-	-	-	-	83,5	300.970.000,00	84	510.650.000,00	DPM & PTSP
					Kepemudaan dan Olah Raga													
97	1	19	16		Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda	2	2	800.000.000,00	2	243.750.000,00	2	1.060.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	640.040.000,00	Dispora
98	1	19	19		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	4 kegiatan	4 kegiatan	12.685.000.000,00	4 kegiatan	1.905.491.300,00	4 kegiatan	4.475.000.000,00	4 kegiatan	17.300.000.000,00	4 kegiatan	27.006.079.000,00	Dispora
99	1	19	18		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	7 Kegiatan							7 Kegiatan	2.500.000.000,00	7 Kegiatan	2.858.000.000,00	Dispora
100					Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan	7 kegiatan	7 kegiatan	619.645.000,00	7 kegiatan	592.869.000,00	7 kegiatan	556.000.000,00	7 kegiatan	780.000.000,00	7 kegiatan	2.205.092.000,00	Dispora
101	1	19	17		Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.790.000.000,00	6 Kegiatan	1.583.257.000,00	6 Kegiatan	2.108.100.000,00	6 Kegiatan	1.355.000.000,00	6 Kegiatan	1.238.414.500,00	Dispora

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Statistik													
102	1	20	15		Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Prosentase pengelolaan data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	75%	78%		80%		85%		90%	795.000.000,00	100%	975.000.000,00	Diskominfo
					Persandian													
103	1	21	15		Pengelolaan Persandian	Prosentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	80%	80%		76%		72%		69%	270.000.000,00	67%	360.000.000,00	Diskominfo
					Kebudayaan													
104					Pembinaan dan Pengembangan Budaya Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Budaya Tradisional	40%	40%	1.353.675.600,00	39,92%	925.000.000,00	40%	720.000.000,00	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
105					Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Kebudayaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
106					Promosi Wisata berbasi Seni Budaya	Persentase Promosi Wisata berbasis seni budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
107	1	22	15		Pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	- Persentase seni budaya tradisional yang ditetapkan sebagai obyek pariwisata - Persentase Cagar Budaya yang terpelihara	9%	9%	365.000.000,00	25%	1.230.000.000,00	38%	4.540.000.000,00	40%	5.092.460.700,00	43%	8.150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	11%	-	-	11%	1.586.925.600,00	12%	1.700.000.000,00	-	-	-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Perpustakaan													
109	1	23	15		Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Prosentase koleksi perpustakaan yang terkelola dengan baik	82%	-	-	-	-	-	-	82%	671.380.320,00	82%	1.236.701.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
110	1	23	16		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan binaan yang memenuhi standart perpustakaan	95%	98%	1.425.659.800,00	100%	2.018.582.800,00	100%	1.799.891.800,00	100%	3.875.562.600,00	100%	1.634.591.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
					Kearsipan													
111	1	24	15		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Prosentase arsip yang terkelola	60%	-	-	-	-	-	-	60%	1.606.293.000,00	75%	1.395.200.000,00	Dinperpus Dan Arsip Daerah
					Urusan Pilihan													
					Kelautan dan Perikanan													
112	2	1	15		Peningkatan produksi Perikanan	Prosentase peningkatan produksi hasil perikanan	14%							14%	1.384.525.000,00	14%	1.126.350.000,00	Dinas Pertanian & KP
113	2	1	16		Pengembangan pembenihan ikan	Prosentase peningkatan produksi hasil perikanan	14%							14%	800.000.000,00	14%	487.590.000,00	Dinas Pertanian & KP
					Pariwisata													
114	2	2	16		Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Persentase peningkatan kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap total PDRB	104%	104%	1.067.574.400,00	105%	1.607.074.400,00	106%	668.000.000,00	108%	3.775.000.000,00	109%	5.125.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
115	2	2	15		Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kontribusi subsektor ekonomi kreatif dibidang seni dan budaya terhadap total PDRB	13%	-	-	-	-	-	-	13%	2.825.000.000,00	14%	54.385.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pertanian													
116	2	3	19		Peningkatan penyuluhan usaha pertanian	Prosentase peningkatan produksi hasil pertanian	5%							5%	252.500.000,00	5%	354.150.000,00	Dinas Pertanian & KP
117	2	3	18		Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	9%							9%	4.175.100.000,00	9%	480.000.000,00	Dinas Pertanian & KP

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
118	2	3	15		Peningkatan produksi tanaman	Prosentase peningkatan rata-rata peningkatan produktivitas hasil pertanian (%)	5%							5%	3.442.500.000,00	5%	1.075.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
119	2	3	17		Peningkatan produksi peternakan	- Prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	9%							9%	304.100.000,00	9%	396.000.000,00	Dinas Pertanian & KP
					Perdagangan													
120	2	6	19		Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Prosentase PKL yang dibina	1,54%							1,54%	450.000.000,00	1,54%	225.000.000,00	Dinas Perdagangan
121	2	6	21		Pengembangan Usaha Perdagangan	Prosentase pedagang yang dibina	40% pedagang binaan							40% pedagang binaan	6.991.665.000,00	40% pedagang binaan	3.246.000.000,00	Dinas Perdagangan
122	2	6	15		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase barang pangan yang layak konsumsi	40%	40%	545.000.000,00	40%	535.000.000,00	40%	835.000.000,00	40%	1.200.000.000,00	40%	722.500.000,00	Dinas Perdagangan
123					Peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian	Nilai SKM pelayanan kemetrologian	80									80	610.000.000,00	Dinas Perdagangan
124					Peningkatan kualitas pelayanan pasar	Nilai SKM pelayanan pasar	80									80	1.000.000.000,00	Dinas Perdagangan
125					Pembinaan dan Pengembangan Produk Lokal													Dinas Perdagangan
126					Peningkatan Promosi Dagang													Dinas Perdagangan
127	2	6	20		Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat	Prosentase pemeliharaan pasar tradisional	92,86%	92,86%	80.000.000,00	92,86%	250.000.000,00	92,86%	550.000.000,00	92,86%	12.337.785.000,00	92,86%	31.615.515.000,00	Dinas Perdagangan
					Perindustrian													
128	2	7	20		Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan industri ILMETA & IATT	1,94	-	-	-	-	-	-	1,94	5.525.000.000,00	2	4.825.000.000,00	Dinas Perindustrian
129	2	7	21		Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	2,24	-	-	-	-	-	-	2,24	4.400.000.000,00	2,3	6.970.000.000,00	Dinas Perindustrian
					Perencanaan													
130	3	1	16		Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi	80%							80%	2.965.000.000,00	80%	2.737.750.000,00	Barenlitbang
131	3	1	17		Perencanaan Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi	80%							80%	1.835.000.000,00	80%	1.575.000.000,00	Barenlitbang
132	3	1	18		Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi	80%							80%	5.300.000.000,00	80%	7.650.000.000,00	Barenlitbang

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
133	3	1	15		Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP	25%	25%	650.000.000,00	25%	2.152.488.100,00	25%	2.380.000.000,00	25%	5.295.000.000,00	25%	5.129.247.000,00	Barenlitbang
					Keuangan													
134	3	2	15		Penyusunan Anggaran Daerah	Prosentase BTL dalam APBD ≤ 50%	47%							47%	1.833.200.000,00	47%	1.936.738.000,00	BPKAD
135	3	2	16		Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D kurang dari 2 (dua) hari	100%							100%	1.719.038.700,00	100%	2.268.614.400,00	BPKAD
136	3	2	17		Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung Opini BPK RI - Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	- 100% - 0							- 100% - 0	1.551.800.000,00	- 100% - 0	1.330.072.800,00	BPKAD
137	3	2	18		Penatausahaan Aset Daerah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	13,57%							13,57%	3.434.730.000,00	13,57%	2.224.119.100,00	BPKAD
138	3	2	19		Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase data aset daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%							100%	2.025.203.000,00	100%	3.367.663.000,00	BPKAD
139					Peningkatan pelayanan UPT	Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah	14,75%									14,75%	166.160.000,00	BPKAD
140	3	2	20		Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	- Presentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah - Prosentase peningkatan wajib pajak daerah	5%	-		-		-		5%	2.350.000.000,00	5%	2.382.640.020,00	BPPD
141	3	2	21		Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Prosentase penurunan tunggakan pajak daerah	5%	-		-		-		5%	925.000.000,00	5%	2.393.000.000,00	BPPD
142	3	2	22		Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Prosentase peningkatan pajak daerah	10%	-		-		-		10%	2.845.000.000,00	10%	2.206.112.000,00	BPPD
143					Optimalisasi pelayanan UPT	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83	-		-		-		83		83	1.249.860.000,00	BPPD
					Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan													
144	3	3	15		Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	- Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kebutuhan - Persentase penempatan ASN sesuai kebutuhan	- 79% - 63%	- 79% - 63,4%		- 80,3% - 65,5%		- 83,2% - 85,3%		- 85,5% - 88,4%	3.296.000.000,00	- 87,8% - 91,6%	1.810.780.000,00	BKD
145	3	3	16		Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Persentase PNS yg menerima SK pensiun tepat waktu	0%	0%		0%		100%		100%	174.300.000,00	100%	259.000.000,00	BKD
146	3	3	17		Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yg mengikuti diklat PIM	52,90%	55,8%		64,80%		66%		67%	5.332.023.000,00	98%	6.377.984.000,00	BKD
147	3	3	18		Pembinaan Kepegawaian	Persentase pegawai yg dikenakan sanksi disiplin	0,16%	0,15%		0,14%		0,13%		0,12%	760.000.000,00	0,11%	911.478.000,00	BKD
148	3	3	19		Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data yg akurat	70%	75%		75%		80%		83%	440.000.000,00	90%	750.750.000,00	BKD
					Penelitian dan Pengembangan													

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
149	3	4	19		Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	- Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan - Prosentase peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK	25% 80%							25% 80%	5.440.000.000,00	25% 80%	2.350.000.000,00	Barenlitbang
					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya													
					Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi													
150	4	1	18		Pengembangan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 dokumen							8 dokumen	1.056.750.000,00	8 dokumen	1.217.042.000,00	Bagian Pengembangan Perekonomian
151	4	1	17		Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	16 Fasilitasi							16 Fasilitasi	17.748.745.000,00	16 Fasilitasi	16.679.880.000,00	Bagian Kesra
152	4	1	24		Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%							100%	2.313.110.000,00	100%	940.000.000,00	Bagian Organisasi
153	4	1	23		Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%							100%	2.320.400.000,00	100%	1.808.979.000,00	Bagian Organisasi
154					Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Keuangan & Perlengkapan
155	4	1	16		Penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokoleran dan hubungan antar lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%							100%	16.216.000.000,00	100%	10.716.000.000,00	Bagian Humas
156	4	1	21		Penataan dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	100%	2.673.906.000,00	100%	2.302.040.000,00	100%	1.920.890.000,00	100%	5.700.000.000,00	100%	1.687.390.000,00	Bagian Hukum
157	4	1	22		Penerapan dan penegakan hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	100%	770.280.000,00	100%	1.117.000.000,00	100%	1.658.000.000,00	100%	2.370.000.000,00	100%	3.894.180.000,00	Bagian Hukum

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
158	4	1	19		Pengembangan kebijakan bidang sumber daya alam dan infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan infrasturktur yang difasilitasi	75%							75%	875.000.000,00	85%	850.000.000,00	Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
159	4	1	15		Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,1313							3,1313	6.390.000.000,00	3,1313	2.965.000.000,00	Bagian Pemerintahan
160	4	1	20		Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%							100%	3.015.000.000,00	100%	1.944.000.000,00	Bagian layanan pengadaan barang/jasa
161	4	1	25		Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	90%	-	-	-	-	-	-	90%	2.510.000.000,00	90%	3.290.000.000,00	Bagian Keuangan & perlengkapan
					Pendukung DPRD													
162	4	3	15		Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran bagi pimpinan/anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penggangaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	15.185.517.800,00	100%	10.126.630.000,00	Sekretariat DPRD
163	4	3	16		Fasilitasi penyelenggaraan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitas Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	27.943.351.550,00	100%	19.762.246.800,00	Sekretariat DPRD
164	4	3	17		Penyelenggaraan fungsi kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%							100%	2.717.498.150,00	100%	23.961.090.000,00	Sekretariat DPRD
					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
165	4	4	15		Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan	12 kali	12 kali	730.000.000,00	12 kali	1.207.500.000,00	12 kali	901.000.000,00	12 kali	2.950.000.000,00	12 kali	699.000.000,00	Bakesbangpol
166	4	4	16		Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pendidikan politik	12 kali	12 kali	235.000.000,00	12 kali	275.000.000,00	12 kali	629.000.000,00	12 kali	1.800.000.000,00	12 kali	457.920.000,00	Bakesbangpol
167	4	4	17		Pemberdayaan Ormas dan LSM	Prosentase jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan	90 %							90 %	200.000.000,00	90 %	25.000.000,00	Bakesbangpol
168	4	4	18		Kewaspadaan Daerah	Jumlah operasi selama 1 tahun	12 bulan							12 bulan	5.950.000.000,00	12 bulan	5.925.000.000,00	Bakesbangpol
					Penanggulangan Bencana Daerah													
169	4	5	15		Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	-				5%	605.000.000,00	5%	1.050.000.000,00	5%	1.113.620.000,00	BPBD
170	4	5	16		Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	-				100%	850.000.000,00	100%	1.650.000.000,00	100%	2.827.500.000,00	BPBD

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
171	4	5	17		Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%	-				100%	610.000.000,00	100%	925.000.000,00	100%	2.702.500.000,00	BPBD
					Pemerintahan Administrasi Kecamatan													
172	4	6	17		Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan/perumahan di wilayah kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik									31.454.377.350,00		23.486.283.000,00	Kec/ kel
173	4	6	15		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui siskampling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan - Prosentase kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik - Prosentase ketersediaan data monografi di itngkat kecamatan dan kelurahan									11.967.182.468,00		30.259.720.200,00	Kec/ Kel
174	4	6	16		Pemberdayaan Masyarakat	- Terlaksananya Musrenbang Kecamatan sesuai dengan ketentuan - Terlaksananya Musrenbang Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan - Tersedianya data profil Kecamatan dan Kelurahan									15.117.817.000,00		18.824.201.000,00	Kec/ Kel
175					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui siskampling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan - Prosentase kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik - Prosentase ketersediaan data monografi di itngkat kecamatan dan kelurahan									20.258.177.309,00			Kel
					Pengawasan													

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
176	4	2	15		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah 1	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	33%	278.768.800,00	56%	299.572.130,00	78%	328.962.000,00	100%	353.200.000,00	100%	314.265.900,00	Inspektorat
177	4	2	16		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	30%	278.768.800,00	50%	299.572.130,00	70%	328.962.000,00	100%	321.656.800,00	100%	405.594.400,00	Inspektorat
178	4	2	17		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	33%	278.768.800,00	56%	299.572.130,00	78%	328.962.000,00	100%	419.425.300,00	100%	318.756.400,00	Inspektorat
179	4	2	19		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Persentase PD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	0%	38%	278.768.800,00	63%	299.572.130,00	88%	328.962.000,00	100%	400.356.000,00	100%	1.293.809.400,00	Inspektorat
180	x	x	6		Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	- Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal - Hasil evaluasi SAKIP SKPD - Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti			3.004.275.200,00		8.451.618.912,00		7.333.174.972,00		17.012.901.570,00		13.160.897.700,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
181	x	x	1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP - Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi - Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik - Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran - Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi - Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			73.451.514.182,00		105.086.412.300,00		73.371.173.991,00		134.633.510.702,00		109.927.993.420,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)

No.	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
182	x	x	2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase kendaraan dinas yang layak pakai - Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur - Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik - Persentase kendaraan dinas yang laik jalan - Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			35.408.252.495,55		51.628.300.989,03		42.866.600.490,03		191.832.207.483,00		152.577.797.500,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
183	x	x	5		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik - Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan - Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi - Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			5.174.493.300,00		9.009.978.000,00		8.945.553.200,00		18.452.209.250,00		12.226.698.200,00	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
184					Pelayanan UPT													
						JUMLAH									**2.000.294.867.578,00**		**1.825.242.138.610,00**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Setelah target capaian indikator pembangunan berikut pagu anggaran telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka agar proses pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki dasar hukum yang kuat, perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah ini merupakan bagian integral dari dokumen RPJMD Kota Malang 2013 – 2018. Oleh karenanya kekuatan hukum atas indikator dan capaian target kinerja adalah setara dengan kekuatan hukum dari dokumen RPJMD ini sendiri.

Adapun penetapan indikator kinerja daerah ditujukan guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja dalam aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini akan ditunjukkan dari besarnya akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahunnya, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD akan dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan cara mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes)* atau yang merupakan kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator

kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian pembangunan Kota Malang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan yang telah dicapai. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi mengenai indikator kinerja daerah tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan, menentukan alokasi anggaran prioritas, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan daerah, membuat tindakan-tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan daerah yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Indikator Kinerja daerah akan menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan di dalam masing-masing Misi Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018, termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas.

Dalam tabel 8.1. berikut ini akan disajikan mengenai Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kota Malang 2013 – 2018.

Tabel 8.1.
MATRIK PENYEMPURNAAN RPJMD
TAHUN 2013-2018
KOTA MALANG

"TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"

MISI 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Angka Melek Huruf (%)	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis **dibagi** jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas **dikali** 100%	99,71 %	99,95 %
2.	% Angka kelulusan	Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) **dibagi** jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan **dikali** 100%		
	- SD/MI		99.21 %	99.25 %
	- SMP / MTs.		99.63 %	99.68 %

Sasaran									Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun										
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa Kota Malang pada tingkat pendidikan SD/MI **dibagi** dengan jumlah penduduk Kota Malang berusia 7-12 tahun **dikali** 100%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global	- Peningkatan kapasitas serta profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah penduduk Kota Malang usia antara 7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI **dibagi** jumlah penduduk Kota Malang usia 7-12 tahun	88,92%	88.92 %	88,95	88,97	88,99	89,03	89,03		- Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan dasar	Pendidikan Sekolah Dasar		Dinas Pendidikan
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah siswa Kota Malang pada tingkat pendidikan SMP/MTs **dibagi** dengan jumlah penduduk Kota Malang berusia 13-15 tahun **dikali** 100%	92,71%	93,01%	93,71%	94,01%	94,71%	95,01%	95,01%			Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Dinas Pendidikan
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah penduduk Kota Malang usia antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs **dibagi** jumlah penduduk Kota Malang usia 13-15 tahun	67,07%	68.01 %	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00		- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini	Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan
	5. Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis **dibagi** jumlah penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas **dikali** 100%	99,71 %	99,88 %	99,9 %	99,92 %	99,94 %	99,95 %	99,95 %		- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal	Pendidikan Non formal		Dinas Pendidikan
	6. Angka kelulusan	Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) **dibagi** jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan **dikali** 100%												
	- SD/MI		99.21 %	99.21 %	99.22 %	99.23 %	99.24 %	99.25 %	99.25 %					
	- SMP / MTs.		99.63 %	99.63 %	99.64 %	99.66 %	99.67 %	99.68 %	99.68 %					
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	Jumlah anak usia 7-15 tahun dari keluarga pra sejahtera Kota Malang yang sekolah sampai dengan SMP/MTs **dibagi** jumlah seluruh anak usia 7-15 tahun dari keluarga pra sejahtera Kota Malang **dikali** 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target 2018
1.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,82	71,1

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2014	2015	2016	2017	2018	2018	Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun **dibagi** jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama **dikali** 1.000	15,65	17	16,5	16	15,5	15	15	Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	- Peningkatan kualitas pelayanan obat dan perbekalan kesehatan serta alat kesehatan	Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas **dibagi** jumlah ibu saat hamil, melahirkan dan nifas di**kali** 100.000	149,75	135	130	128	125	120	120		- Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Pengawasan obat dan makanan		Dinas Kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga medis **dibagi** jumlah penduduk **dikali** 1.000	0,49	1,08	1,08	1,1	1,1	1,12	1,12		- Peningkatan kualitas kesehatan keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga		Dinas Kesehatan
												Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Jumlah Posyandu **dibagi** Jumlah Balita **dikali** 1.000	1:103	1:103	1:103	1:102	1:102	1:101	1:101		- Peningkatan kualitas layanan gizi masyarakat	Pebaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis **dibagi** jumlah penduduk yang masuk kategori miskin **dikali** 1.000	62,28%	74%	75%	76%	77%	78%	78%		- Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	Pencegahan dan pengendalian penyakit		Dinas Kesehatan
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,82	70,92	70,95	70,98	71	71,1	71,1		- Peningkatan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		Dinas Kesehatan
											- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Peningkatan Kesehatan Lingkungan		Dinas Kesehatan
												Kesehatan Kerja Dan Olahraga		Dinas Kesehatan
											- Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan, termasuk bagi masyarakat miskin	Pelayanan Kesehatan Rujukan		Dinas Kesehatan
												Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah		Dinas Kesehatan
											- Peningkatan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional	Pelayanan Kesehatan Tradisional		Dinas Kesehatan
											- Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan kesehatan dasar	Pelayanan Kesehatan Dasar		Dinas Kesehatan

											- Peningkatan kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Dinas Kesehatan
											- Peningkatan Program Keluarga Berencana	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
												Keluarga Berencana		DP3AP2KB
											- Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

MISI 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah.

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Pertumbuhan PDRB	(PDRB ADHK tahun n **dikurangi** PDRB ADHK tahun n-1) **dibagi** PDRB ADHK tahun n **dikali** 100%	12,52%	12,76%
2.	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi Aktif **dibagi** Jumlah Koperasi yang ada **dikali** 100%	43,54%	62,34%

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif **dibagi** Jumlah Koperasi yang ada **dikali** 100%	68,72%	71,71%	74,39%	76,24%	79,01%	80,95%	80,95%	Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi	- Peningkatan kapasitas koperasi	Pengembangan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi & UM
	2. Kontribusi sektor UKM terhadap Total PDRB	PDRB sektor UKM ADHK **dibagi** Total PDRB ADHK **dikali** 100%	54,39%	54,41%	54,51%	54,67%	54,73%	54,87%	54,87%			Pengawasan Koperasi		Dinas Koperasi & UM
											- Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	Pengembangan Usaha Mikro		Dinas Koperasi & UM
												Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Perdagangan
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap Total PDRB	PDRB sektor Perdagangan, Akomodasi, dan Makanan ADHK **dibagi** Total PDRB ADHK **dikali** 100%	39,86%	39,90%	39,92%	39,95%	39,99%	40,04%	40,04%	Meningkatkan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal	- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan	Pengembangan Usaha Perdagangan		Dinas Perdagangan
												Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Dinas Perdagangan
												Peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian		Dinas Perdagangan
												Peningkatan kualitas pelayanan pasar		Dinas Perdagangan
											- Penguatan Daya Saing Produk Lokal	Pembinaan dan Pengembangan Produk Lokal		Dinas Perdagangan
												Peningkatan Promosi Dagang		Dinas Perdagangan
											- Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar Rakyat		Dinas Perdagangan

										Meningkatkan performa dan daya saing sektor pariwisata	- Pengembangan budaya tradisional Kota Malang sebagai potensi wisata	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Tradisional	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
											- Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/seniman dan masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
											- Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya	Promosi Wisata berbasi Seni Budaya		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
											'- Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
												Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
												Pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
											- Pembinaan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	PDRB Industri Pengolahan ADHK **dibagi** Total PDRB ADHK **kali** 100%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	Meningkatkan pengembangan sektor industri	- Peningkatan fasilitasi pengembangan sektor industri	Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Perindustrian	Dinas Perindustrian
												Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman		Dinas Perindustrian

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja keseluruhan (usia 15-59 tahun) dikali 100%	7,69%	7,00%
2.	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n* **dikurangi** Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n-1* **dibagi** Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n-1*	247,59	25%

Sasaran									Kondisi Kinerja Pada	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) **dibagi** jumlah angkatan kerja keseluruhan (usia 15-59 tahun) **dikali** 100%	7,69%	7,22%	7,28%	7,18%	7,08%	7,00%	7,00%	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	- Perlindungan lembaga ketenagakerjaan	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja **dibagi** jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas **dikali** 100%	12,79%	75,00%	78,00%	80,00%	83,00%	85,00%	85,00%		- Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja
											- Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja		Dinas Tenaga Kerja
												Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	1. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n* **dikurangi** Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n-1* **dibagi** Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun *n-1*	247,59	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM & PTSP
												Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal		DPM & PTSP
												Pengembangan kebijakan bidang perekonomian	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Pengembangan Perekonomian
												Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perencanaan	Barenlitbang
												Pengolahan Data dan Informasi	Penanaman Modal	DPM & PTSP

Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Ketersediaan pangan (food availibility)	Beras (ton)	6.651,40	11.040,04
		Jagung (ton)	306,91	509,41
		Kedelai (ton)	4.510,32	7.486,27
		Daging (ton)	16.268,26	27.002,19
		Telur (ton)	1.500,41	2.490,40
		Susu (ton)	156,11	259,12
		Ikan (ton)	50,81	84,34
		Gula (ton)	154,78	256,91

Sasaran									Kondisi Kinerja Pada	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availibility*)	Ketersediaan pangan (*food availibility*)	Beras (ton)	6.651,40	7.390,44	8.211,60	9.124,00	10.036,40	11.040,04	11.040,04	Mengembangkan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan katahanan pangan daerah	- Pengembangan Penganekaragaman, konsumsi pangan dan keamanan pangan	Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pangan	Dinas Pertanian & KP
		Jagung (ton)	306,91	341,01	378,90	421,00	463,10	509,41	509,41					
		Kedelai (ton)	4.510,32	5.011,47	5.568,30	6.187,00	6.805,70	7.486,27	7.486,27					
		Daging (ton)	16.268,26	18.075,85	20.084,27	22.315,86	24.547,45	27.002,19	27.002,19					
		Telur (ton)	1.500,41	1.667,13	1.852,36	2.058,18	2.264,00	2.490,40	2.490,40					
		Susu (ton)	156,11	173,46	192,73	214,15	235,56	259,12	259,12					
		Ikan (ton)	50,81	56,46	62,73	69,70	76,67	84,34	84,34					
		Gula (ton)	154,78	171,98	191,09	212,32	233,55	256,91	256,91					
											- Peningkatan ketersediaan, distribusi	Peningkatan ketahanan pangan		Dinas Pertanian & KP
										Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian	- Peningkatan produksi dan produktivitas	Peningkatan penyuluhan usaha pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian & KP
												Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Pertanian & KP
												Peningkatan produksi tanaman		Dinas Pertanian & KP
												Peningkatan produksi peternakan		Dinas Pertanian & KP
												Peningkatan produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian & KP
												Pengembangan pembenihan ikan		Dinas Pertanian & KP

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Menurunnya persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin **dibagi** Jumlah penduduk **dikali** 100%	4,87%	4,30%

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Menurunnya persentase penduduk miskin	1. Angka kemiskinan	Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin **dibagi** Jumlah penduduk **dikali** 100%	4,87%	4,80%	4,60%	4,50%	4,40%	4,30%	4,30%	Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin	- Perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan	Penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial	Sosial	Dinas Sosial
												Perencanaan Pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Perencanaan	Barenlitbang
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	1. Persentaase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan **dibagi** Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial **dikali** 100%	10,44%	13,00%	15%	17,00%	19,00%	21,00%	21,00%	Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	- Perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial
												Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial		Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	1. Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani **dibagi** Jumlah korban bencana **dikali** 100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Membangun sistem penanganan bencana yang responsif dan handal	- Peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
											- pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana	Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana		BPBD
											- Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana		BPBD

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka harapan hidup perempuan ditambah angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan dibagi 3	72,99	76,49

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2014	2015	2016	2017	2018	2018	Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka harapan hidup perempuan **ditambah** angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan **dibagi** 3	72,99	73,49	74,09	74,79	75,59	76,49	76,49	Meningkatkan peran serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks keterwakilan perempuan diparlemen **ditambah** indeks pengambilan keputusan **ditambah** pendapatan perkapita perempuan **dibagi** 3	75,41	75,91	76,51	77,21	78,01	78,91	78,91			Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
												Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Angka kriminalitas	angka kriminalitas dalam tahun berkenaan	14%	18%

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2014	2015	2016	2017	2018	2018	Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan peran lembaga keagamaan/ tokoh agama dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	- Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan	Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Kesra
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikurangi jumlah kerusuhan tahun n dibagi jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikali 100%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		- Peningkatan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan berdemokrasi	Pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
												Pendidikan Politik Masyarakat		Bakesbangpol
												Pemberdayaan Ormas dan LSM		Bakesbangpol
												Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Sosial	Dinas Sosial
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas tahun n-1 dikurangi jumlah kriminalitas tahun n dibagi jumlah kriminalitas tahun n-1 dikali 100%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum	- Peningkatan kewaspadaan daerah	Kewaspadaan Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak **dibagi** jumlah pelanggaran Perda **dikali** 100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		- Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
												Penegakan perundang-undangan daerah		Satpol PP
												Peningkatan kapasitas satuan Linmas		Satpol PP
												Pembinaan Polisi Pamong Praja		Satpol PP

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Predikat Adipura	Plakat/Piala Adipura/Piala Adipura Kencana	Piala Adipura	Piala Adipura
2.	Predikat Wahana Tata Nugraha	Piagam/Piala WTN	Piala WTN	Piala WTN

Sasaran									Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh	608,60	608,6	551,60	499,60	444,60	389,60	389,60	Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	- Pembangunan sarana prasarana pemukiman, air bersih dan sanitasi	Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
												Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		DPKP
												pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
												Pembangunan Sumber Daya Air		DPUPR
												Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor		DPUPR
												Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong		DPUPR
												Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase		DPUPR
												Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah		DPUPR
												Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perencanaan	Barenlitbang
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Jumlah komulatif panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang **dibagi** jumlah komulatif panjang jalan **dikali** 100%	90,59%	92%	95%	96%	97%	98%			- Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan
												Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran		Dinas Perhubungan
												Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan

	3. Persentase layanan air bersih	Jumlah KK yang mendapat pelayanan air berih **dibagi** jumlah seluruh KK **dikali** 100%	84%	85%	85,5%	87%	90%	95%	95%		- Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait	Peningkatan dan pengamanan lalulintas		Dinas Perhubungan
												Peningkatan Pelayanan Angkutan		Dinas Perhubungan
											- Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Dinas Perhubungan
											- Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
												Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		DPUPR
												Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong		DPUPR
												rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		DPUPR
												Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		DPUPR
											- Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Pemerintahan Administrasi Kelurahan/Kecamatan	Kec/ kel
												Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan		DPKP
												Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora

	4.	Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	Jumlah titik pantau peningkatan kualitas air **dibagi** Jumlah Titik Pantau **kali** 100%	30%	45%	60%	70%	80%	90%	90%	Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan	- Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLH
													Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup		DLH
													Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		DLH
													Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
													Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DLH
													Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		DLH
													Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan		DLH
													Program Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan		DLH
													Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah		DLH
												- Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan		DLH
													Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		DLH

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Persentase luasan RTH	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **dibagi** Luasan wilayah **dikali** 100%	15,92%	15,97%

Sasaran										Kondisi Kinerja	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator		Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
					2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1.	Persentase luasan RTH	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **dibagi** Luasan wilayah **dikali** 100%	15,92%	15,93%	15,94%	15,95%	15,96%	15,97%	15,97%	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	- Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	2.	Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani **dibagi** Jumlah seluruh pelanggaran tata ruang **dikali** 100%	90,48%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			Perencanaan Ruang		DPUPR
	3.	% luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukkannya	luas wilayah yang sesuai dengan zona peruntukkannya **dibagi** luas wilayah per zona pada akhir tahun perencanaan **dikali** 100%	50%	52%	54%	56%	58%	60%	60%			Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan		DPUPR
													Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang		DPUPR
													Bina Jasa Konstruksi		DPUPR
													Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat		DPUPR
												- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) melalui Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
													Pengelolaan Areal Pemakaman		DPKP
												- Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	DPKP
													Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
													Penataan bangunan dan lingkungan		DPUPR

MISI 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah.

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	WTP	WTP

Sasaran									Kondisi Kinerja Pada	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
				2014	2015	2016	2017	2018	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	0	0	3	4	5	6	6	Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap	- Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah 1	Pengawasan	Inspektorat
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Malang	63,64	65	65	66	67	68	68			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II		Inspektorat
	3. Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III		Inspektorat
												Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV		Inspektorat
												Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Organisasi
											- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan		Bagian Organisasi

											- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Anggaran Daerah	Keuangan	BPKAD
												Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah		BPKAD
												Pelaporan Keuangan Daerah		BPKAD
												Penatausahaan Aset Daerah		BPKAD
												Pemanfaatan Aset Daerah		BPKAD
												Peningkatan pelayanan UPT		BPKAD
												Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah		BPPD
												Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah		BPPD
												Pengembangan Potensi Pajak Daerah		BPPD
												Optimalisasi pelayanan UPT		BPPD
												Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran bagi pimpinan/anggota DPRD	Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD
												Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Keuangan & Perlengkapan
												Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	Penunjang	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
											- Peningkatan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKD
												Fasilitasi Pemberhentian Pegawai		BKD
												Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara		BKD
												Pembinaan Kepegawaian		BKD
												Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian		BKD

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntable dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2018
1.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM	75,34	78,66

Sasaran									Kondisi Kinerja Pada	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun										
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	75,34	76,66	77,16	77,66	78,16	78,66	78,66	Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Penanaman Modal	DPM & PTSP
												Fasilitasi penyelenggaraan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD
												Penyelenggaraan fungsi kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Sekretariat DPRD
												Penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokoleran dan hubungan antar lembaga	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Humas
												Penataan dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan		Bagian Hukum
												Penerapan dan penegakan hukum		Bagian Hukum
												Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
												Pengembangan kebijakan bidang sumber daya alam dan infrastruktur	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
												Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kecamatan		Bagian Pemerintahan
												Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Bagian layanan pengadaan barang/jasa
												Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Barenlitbang
												Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan	Penanaman Modal	DPM & PTSP
												Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang	Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
												Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)

												Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan)
												Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi	Bagian Keuangan & perlengkapan
												Peningkatan prestasi olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
												Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
												Pengelolaan Aplikasi Informatika		Diskominfo
												Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik		Diskominfo
												Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Statistik	Diskominfo
												Pengelolaan Persandian	Persandian	Diskominfo
												Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Administrasi Kelurahan/Kecamatan	Kec/Kel
												Pemberdayaan Masyarakat		Kec/Kel
												Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Pemerintahan Administrasi Kelurahan	Kel
												Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Barenlitbang
												Pelayanan Pendaftaran penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
												Pelayanan Pencatanan Sipil		Dispendukcapil
												Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data		Dispendukcapil
												Peningkatan Peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
												Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		Dispora
												Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Perpustakaan	Dinperpus Dan Arsip Daerah
												Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Dinperpus Dan Arsip Daerah
												Program Pengelolaan Arsip Daerah	Kearsipan	Dinperpus Dan Arsip Daerah
												Pelayanan UPT		

BAB IX
PENUTUP

Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan daerah pada tahun 2019, mengingat periode RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 berakhir, dan waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2018 untuk menyusun RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 serta RKPD Tahun 2019, maka Walikota Malang yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya (tahun 2018), wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, sebelum RPJMD 2018 – 2023 tersusun. Selanjutnya, RKPD Tahun 2019 (masa transisi) merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Walikota terpilih hasil Pemilukada 2018, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2019.

RKPD Tahun 2019 (masa transisi) memuat rancangan program indikatif tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2013 – 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru serta digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa

akhir jabatan kepala daerah. Program dan kegiatan transisi tersebut mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Malang 2013 – 2018 ini;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan;

6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 sangat bergantung dari peran seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya;
7. Masyarakat Kota Malang perlu diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran masyarakat dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini.

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302 199003 1 019